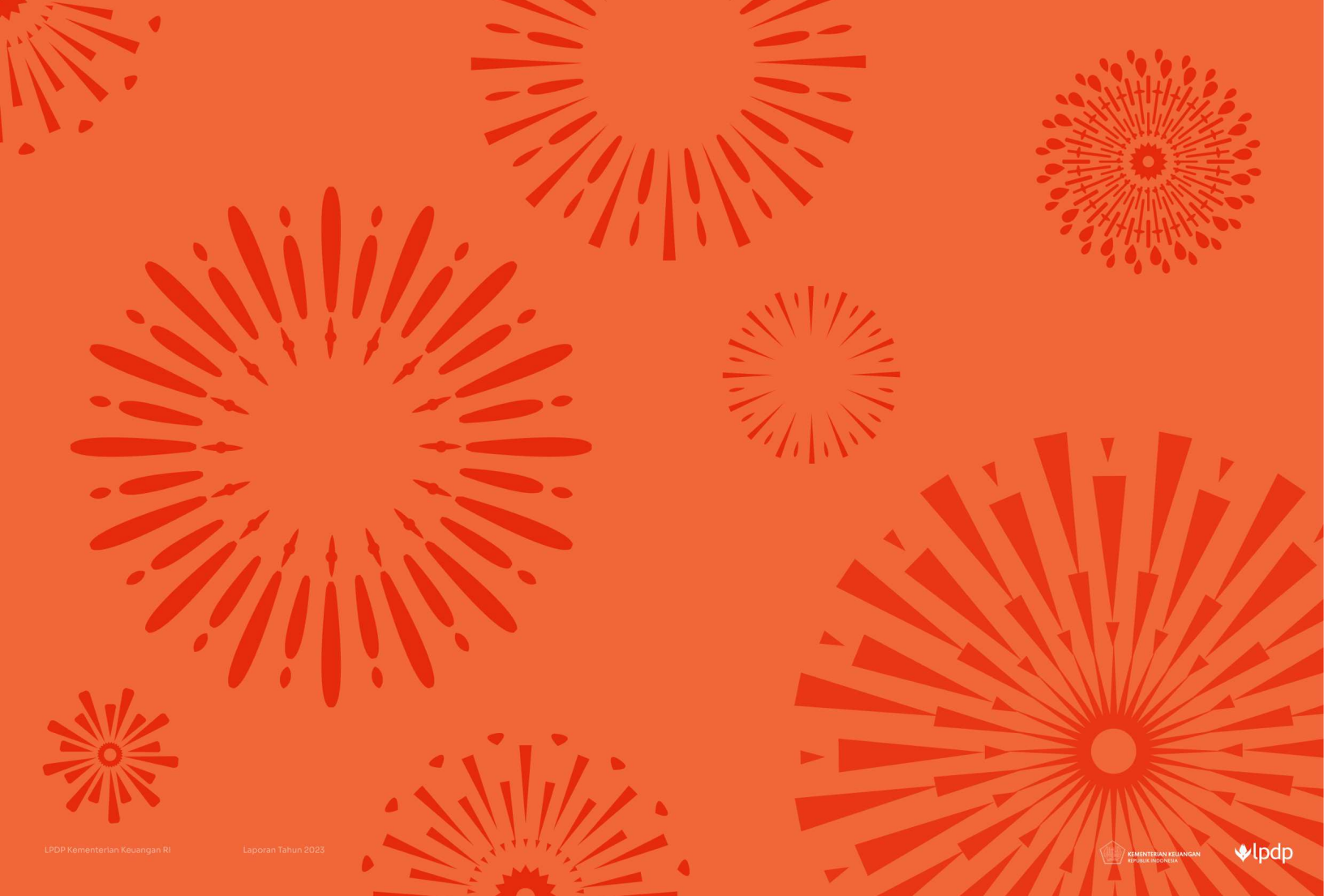


2023

11 Tahun LPDP: Nyala Terang Kemajuan Bangsa Indonesia

Laporan Tahunan
LPDP Kementerian
Keuangan RI





00

Mukadimah

Nyala Terang Indonesia

Seperti ragam warna kembang api yang menerangi langit, anak bangsa di berbagai daerah juga punya potensi berbeda yang siap untuk menyinari masa depan. LPDP layaknya sumbu yang selalu berupaya mengobarkan mimpi Indonesia melalui dukungannya pada pendidikan dan penelitian.





0.1 Makna Visual: Kembang Api

Setiap pijaran kembang api yang melesat ke langit, tersusun percikan-percikan cahaya dengan warna beragam. Membentuk pola indah yang kemudian bisa membawa kebahagiaan bagi siapa pun yang melihatnya. Layaknya menatap masa depan Indonesia yang terang, upaya LPDP dari tahun ke tahun tak pernah putus untuk mewujudkan pendidikan terbaik yang inklusif.

Melalui program dan layanan LPDP, satu demi satu potensi dan keunikan putra putri bangsa dari berbagai daerah berkumpul dan bersinergi. Dimulai dari setitik percikan api, hingga akhirnya tercipta cahaya terang dengan sejuta warna dan harapan yang mampu menerangi Indonesia.

Tahun ini, LPDP serupa sumbu juga pemantik, yang menjadi elemen kunci untuk menyalakan semangat dan mimpi anak bangsa. Lewat layanan beasiswa untuk pendidikan serta penelitian, LPDP senantiasa menerangi gerakan perubahan yang membangun dan berkontribusi untuk menghadirkan nyala terang bangsa.



0.2 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

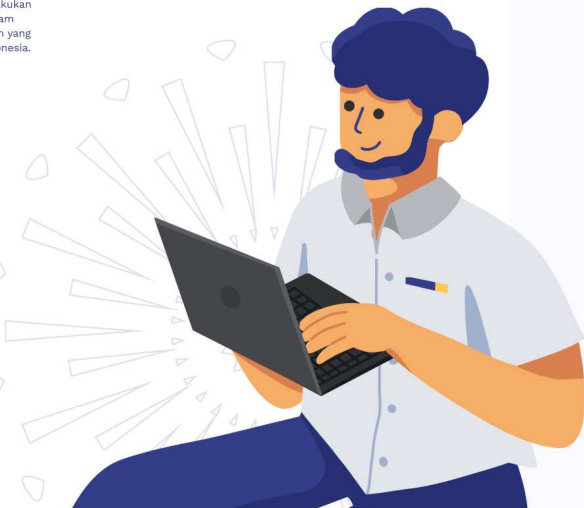
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah satuan kerja noneselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan mengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPDP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020.

Penyusunan Laporan Tahunan 2023 LPDP mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SE/OJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Beberapa penyesuaian juga dilakukan untuk memenuhi kriteria penilaian dalam penghargaan terhadap laporan tahunan yang diselenggarakan berbagai pihak di Indonesia.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" dan "Rp" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dolar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat.

Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Tabel dan grafik pada laporan tahunan ini memaparkan data numerik dengan standar penulisan mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Pemagaran numerik dalam teks menggunakan standar kaidah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai konteks. Sebagian besar bahan Laporan Tahunan ini diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit dan dapat masyarakat akses secara terpisah melalui situs web lpdp.kemenkeu.go.id.



0.3 Penjelasan Tema

2023



Nyala Terang Kemajuan Bangsa Indonesia

Dalam usianya yang telah memasuki sebelas tahun, LPDP menandai awal dekade baru. Pericaraan api semangat yang telah LPDP semai selama sepuluh tahun terakhir memijar di atas jalur yang tepat, dengan layanan yang semakin masif semakin inklusif, kini iktihar LPDP mewarnai pembangunan sumber daya manusia (SDM) bangsa mulai membara dan menunjukkan nyala terangnya.

Penerima manfaat beasiswa LPDP mulai menampilkan diri dalam panggung pembangunan bangsa, memberi dampak nyata pada lingkungan sekitar dengan kiprah dan kariernya masing-masing.

Karya inovatif-produktif juga terus bermunculan seiring dengan dukungan pendanaan riset. Manfaat dukungan pendanaan pada perguruan tinggi juga mulai dirasakan dengan semakin tingginya ranking dan pengakuan perguruan tinggi dalam negeri di kancah internasional. Pengembangan aktivitas kebudayaan melalui dukungan pendanaan juga makin memperkuat karakter dan identitas bangsa. Kita bersiap menyongsong era
Nyala Terang Kemajuan Bangsa Indonesia.



2022

Satu Dekade LPDP: Semakin Masif, Semakin Inklusif

Selama satu dekade, LPDP berkontribusi dalam peningkatan kualitas SDM dan daya saing bangsa. Di 2022, peran LPDP meluas dengan penyaluran dana abadi untuk penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan Indonesia yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemena), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada pendanaan beasiswa dan riset, serta industri strategis nasional agar manfaatnya kian tepat guna.

Kontribusi LPDP untuk pengembangan SDM Indonesia semakin kuat didukung lewat penunjukkan sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.05/2022. Peran ini memberi wewenang lebih besar dalam pengelolaan investasi lewat instrumen jangka pendek dan/atau panjang. Imbal hasil investasi dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang mendukung target komitmen LPDP, salah satunya pemerataan penerima beasiswa.

Transformasi yang disiplin membuat LPDP mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada demi cakupan dan sasaran lebih luas. Peran LPDP yang kian masif diharapkan bisa menghasilkan produk serta layanan prima bagi bangsa.



2021

Resiliensi, Transformasi, Kontribusi Menuju Satu Dekade

Selama sembilan tahun terakhir, LPDP telah menunjukkan resiliensi yang kuat dalam menghadapi tantangan pandemi dan dinamika. LPDP memberikan kontribusi yang signifikan serta pelayanan terbaik dalam mewujudkan visi Indonesia Emas demi meningkatkan daya saing serta transformasi SDM.

Tahun 2021 menjadi momentum penting bagi LPDP dengan penguatan regulasi melalui Perpres Nomor 111 Tahun 2021. Selain mengelola dana abadi untuk pendidikan, LPDP bertanggung jawab atas dana abadi untuk penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan. Perbaikan tata kelola yang berkelanjutan tercermin dalam program Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK).

Selain program beasiswa dan riset, LPDP juga berperan mendukung program Beasiswa Kolaborasi dengan Kemendikbudristek. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberi dukungan pendanaan yang lebih luas dan menyemai semangat belajar untuk terus bertumbuh di kalangan pelajar, pendidik, dan budayawan. LPDP berkomitmen menjadikan dana abadi dapat diakses secara merata, mendukung inovasi kebijakan dan program pendidikan.

2020

Resiliensi Layanan Beasiswa dan Pendanaan Riset di Tengah Pandemi COVID-19

Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan, berbagai aturan pembatasan kegiatan yang terjadi di seluruh dunia memaksa LPDP beradaptasi tanpa menggadaikan mimpi pengembangan SDM dan inovasi anak bangsa dari program layanan.

Resiliensi menjadi kata kunci, layanan beasiswa sebagai salah satu komitmen pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul tetap dilaksanakan secara terbatas sebagai respon dari keadaan pandemi ini, LPDP melakukan penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi seleksi program beasiswa. Di tahun ini pula LPDP mulai turut menyalurkan manfaat Dana Abadi untuk pendanaan Program Merdeka Belajar yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Inovasi penelitian yang juga merupakan karakter kemajuan negara juga tak boleh berhenti hanya karena pandemi. LPDP terus menyalurkan pendanaan riset baik yang bersifat baru (termasuk riset-riset yang berhubungan dengan penanganan COVID-19) maupun melanjutkan pendanaan bagi riset yang telah berjalan.



2019

Kontribusi Kami untuk SDM dan Inovasi

Guna menghadirkan layanan dan kontribusi terbaik pada peningkatan kualitas SDM bangsa melalui beasiswa dan pendanaan riset-riset produktif-inovatif, LPDP terus melakukan perbaikan tata kelola baik dari sisi regulasi maupun teknis operasional.

Di tahun ini, posisi dan legitimasi LPDP sebagai pengelola dana abadi ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan, penguatan regulasi ini kemudian menjadi landasan hukum bagi LPDP untuk menyusun dan menjalankan segala proses bisnis layanan (investasi dana abadi, beasiswa, dan riset) dengan prinsip *good governance*.

Penguatan aspek teknis operasional juga turut dilakukan salah satunya dengan perpindahan kantor LPDP dari Gedung Ali Wardhana ke Gedung Danadyaksa Cikini, gedung baru ini didesain dengan konsep *open office* yang mencerminkan budaya kolaborasi dan sinergitas, serta memberikan kesan positif bahwa organisasi LPDP adalah organisasi yang terbuka, transparan, dan amanah dalam pengelolaan Dana Abadi Pendidikan.

0.4 Tonggak Pencapaian

2010

Dasar gagasan pembentukan LPDP dapat dilacak kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Amandemen ke-4 Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati dua puluh persen pengalokasian sebagian dana APBN untuk fungsi pendidikan dengan menjadikannya sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Dana Rp1 triliun pertama disisihkan untuk dikelola menggunakan instrumen investasi jangka pendek berupa deposito, surat utang negara, dan obligasi korporasi yang kompetitif. Pengelolaan DPPN menggunakan mekanisme Dana Abadi (*Endowment Fund*) oleh sebuah BLU.



2011

Sebagai tindak lanjut pengelolaan dana abadi pendidikan, Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK/01/2011 menetapkan LPDP sebagai BLU yang mengelola dana abadi pendidikan.

LPDP adalah lembaga noneseton yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun. Para Dewan Penyantun terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama.



2012

Pada 30 Januari 2012, LPDP ditetapkan sebagai instansi BLU dengan tiga menteri jajaran di Dewan Penyantun. Untuk itu, LPDP melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik Dana Abadi Pendidikan (*Endowment Fund*) maupun Dana Cadangan Pendidikan. Kantor perdana LPDP berada di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Baru pada pertengahan

2012, LPDP beraktivitas di Gedung A. A. Maramis II (Ali Wardhana) Lantai 2 Kementerian Keuangan.

Program Riset Inovatif Produktif (RISPRO) juga pertama kali dibuka pada November 2012. Fokus pendanaan RISPRO saat itu adalah ketahanan pangan, energi, kesehatan, lingkungan hidup, tata kelola, kebudayaan, dan sosial keagamaan.



2013

Untuk pertama kalinya LPDP menyelenggarakan pelayanan beasiswa pada 11 Maret 2013 dan dibuka sepanjang tahun. Acara Persiapan Keberangkatan (PK) angkatan pertama yang saat itu bernama Program Kepemimpinan dilakukan pada bulan Juni 2013 dan diikuti oleh 70 calon penerima beasiswa atau *owardee*.



2015

Museum Rekor Indonesia (MURI) mengukuhkan LPDP sebagai Pemberi Beasiswa Terbanyak untuk S2 dan S3 Luar Negeri di Indonesia. Ikatan alumni penerima beasiswa LPDP bernama Mata Garuda secara resmi dibentuk.



2016

LPDP mendapat Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi tahun 2016 dari Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada gelaran Festival Antikorupsi 2016.



2019

Setelah hampir sewindu berkantor di Gedung Ali Wardhana, LPDP memindahkan seluruh aktivitasnya ke Gedung Danadyaksa di Cikini, Menteng. Kegiatan pelayanan, kunjungan, dan perkantoran seluruhnya dilakukan di sini.

Kinerja LPDP juga turut dikuatkan melalui Perpres No. 12 tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya.

2020

Pandemi COVID-19 membuat kegiatan pelayanan fisik di kantor LPDP ditutup sejak April 2020. Layanan di tempat atau onsite untuk umum kembali dibuka pada Maret 2022 secara bertahap. Kunjungan dibuka sebanyak dua kali seminggu dan berangsur tiga kali dalam seminggu. Baru pada bulan Agustus 2022, seluruh aktivitas layanan kunjungan ke kantor LPDP dibuka secara penuh.

2021

LPDP mendapat mandat untuk mengelola seluruh dana abadi di bidang pendidikan yang terdiri dari Dana Abadi Pendidikan (DAP), Dana Abadi Penelitian (DAPL), Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT), dan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB). Hal ini berdasar pada Perpres No. 111 tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan.



2022

LPDP ditetapkan sebagai OIP dengan kewenangan investasi yang lebih luas. LPDP kini berwenang untuk berinvestasi pada instrumen investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang berbentuk surat berharga maupun nonsurat berharga di dalam dan luar negeri.

2023

Selabel tahun sejak awal berdiri, LPDP telah mengakselerasi perbaikan kualitas dan daya saing ribuan anak terbaik bangsa melalui program beasiswa dan riset. Setelah sekian lama vakum selama pandemi COVID-19, LPDP menggelar kegiatan luring bertema *Enlivening Indonesia Advancing The Nation*, yang terdiri atas kegiatan seperti EduFair, Research Fair, seminar, Pagelaran Budaya, Bioskop Mini, dan Homecoming Alumni yang menampilkan berbagai pencapaian para penerima manfaat LPDP.

Pada tahun yang sama, LPDP kembali menorehkan pencapaian atas tata kelola yang akuntabel dan pelayanan terbaik dengan penghargaan Zona Integritas - Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM). Keberhasilan ini tak terlepas dari usaha LPDP melakukan perbaikan pada enam area perubahan, yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Leksana, Penataan Manajemen SDM Aparatur, Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Manajemen Risiko, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada tahun ini pula, kanal media sosial Instagram @lpdp_ri memperoleh satu juta pengikut. Pencapaian yang umumnya jarang ditemukan pada akun-akun lembaga pemerintah ini membuktikan apresiasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi LPDP. Hal ini sekaligus mencerminkan keberhasilan citra LPDP sebagai "teman hangat" anak-anak muda Indonesia dengan berbagai terobosan dan kesegaran kontennya.

Daftar Isi

00 Mukadimah

• Penjelasan Makna Visual	04
• Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab	05
• Penjelasan Tema	06
• Tonggak Pencapaian	09
• Daftar Isi	13

02 Laporan Manajemen

Pilar Para
Penggerak

• Laporan Ketua Dewan Pengawas	43
• Laporan Direktur Utama LPDP	55
• Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	68

01

Kilas Kinerja | Kilau Semangat Membangun Negeri

• Sorotan Kinerja LPDP 2023	17
• Ikhtisar Keuangan	30
• Peristiwa Penting	33
• Penghargaan dan Apresiasi	38

03

Profil LPDP | Kilau Asa untuk Bangsa

• Selayang Pandang LPDP	73
• Riwayat Singkat	75
• Visi, Misi, dan Nilai-nilai	77
• Tugas dan Fungsi	82
• Layanan	83
• Struktur Organisasi	85
• Profil Dewan Penyalutun	89
• Profil Dewan Pengawas	93
• Profil Direksi dan Manajemen	97
• Sumber Daya Manusia	101
• Sarana dan Prasarana	103

04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Denyar Karya
yang Benderang

• Tinjauan Umum	107
• Analisis Kinerja Keuangan	122
• Analisis Kinerja Operasional	131
• Proyeksi dan Rencana Strategis	169

06

Kontribusi Penerima Manfaat

Terang untuk
Kesejahteraan

• Pendahuluan	203
• Kontribusi Alumni dan Grantee	204

Profil Talenta Laporan Tahunan 2023 LPDP

Glosarium 283

05

Tata Kelola | Seruni Angan Nyata

• Pedoman dan Kebijakan GRC Terintegrasi	181
• Pembangunan Sistem Penilaian GRC Terintegrasi	183
• Struktur dan Mekanisme Tata Kelola	185
• Audit Internal dan Eksternal	186
• Sistem Pengendalian Internal	187
• Manajemen Risiko	191
• Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM)	193
• Keterbukaan Informasi Publik	197
• Survei Kepuasan Publik	199

07

Laporan Keuangan | Bijak, Transparan, Genggam Masa Depan

• Daftar Lampiran & Surat Pernyataan Anggota Direksi	211
• Lampiran 1: Laporan Realisasi Anggaran LPDP	215
• Lampiran 2: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LPDP	216
• Lampiran 3: Neraca LPDP	217
• Lampiran 4: Laporan Operasional LPDP	219
• Lampiran 5: Laporan Arus Kas LPDP	221
• Lampiran 6: Laporan Perubahan Ekuitas LPDP	223
• Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	224

01 Kilas Kinerja

Gelegar Semangat Membangun Negeri

Dengan semangat memajukan anak bangsa, 2023 telah menjadi tahun yang transformatif dan dipenuhi percikan cerah berbagai kemajuan. Setahun penuh LPDP memperjuangkan layanan terbaiknya mulai dari program beasiswa, pendanaan penelitian, hingga inisiatif investasi demi mencerahkan masa depan bangsa.



1.1 Sorotan Kinerja LPDP 2023

Memasuki usianya yang kesebelas tahun, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terus memainkan peran strategisnya dalam menjaga nyala terang kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kemajuan inovasi bangsa. Semakin bertambahnya jumlah kelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang semakin masif berbanding lurus dengan cakupan penerima manfaat yang semakin masif pula dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah sorotan capaian kinerja LPDP sepanjang tahun 2023.

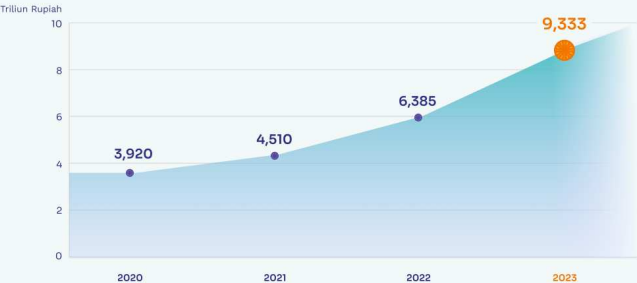
A. Kinerja Investasi Dana Abadi



Akumulasi dana abadi LPDP yang mulanya sebesar Rp1 triliun pada 2010, telah mencapai angka Rp139,11 triliun pada akhir 2023. Dana abadi yang awalnya hanya Dana Abadi Pendidikan (DAP), di tahun 2020 dikembangkan menjadi Dana Abadi Penelitian (DAPL), Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT), dan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB). Penambahan jumlah dan jenis dana abadi ini menunjukkan konsistensi dan perhatian pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Seperti tercermin pada namanya, dana abadi tidak digunakan habis untuk belanja, melainkan hasil investasi yang digunakan sebagai wujud keberpihakan anggaran dalam usaha memajukan kualitas SDM yang berkelanjutan.

Hasil pendapatan pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dari tahun ke tahun



B. Kinerja Layanan Beasiswa

Tiap-tiap Rupiah disalurkan, menjadi bahan bakar dan pijakan anak bangsa menyalakan dan menyakan mimpi-mimpi mereka. Keberpikahan anggaran pada dana abadi yang semakin besar berkorelasi positif dengan jumlah penerima Beasiswa LPDP yang semakin masif. Hingga tahun 2023, LPDP telah mendanai 45.500 penerima beasiswa.

a. Program Beasiswa Native

Program Beasiswa Native adalah program beasiswa yang diselenggarakan langsung oleh LPDP, dibedakan dalam tiga kategori program yang berbeda, yaitu Program Beasiswa Umum, Targeted, dan Afirmasi.

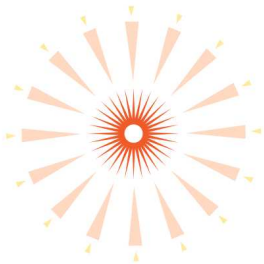
Total penerima Program Beasiswa Native LPDP

dari tahun 2013 hingga 31 Desember 2023

45.500
Orang



Tahun
Seleksi



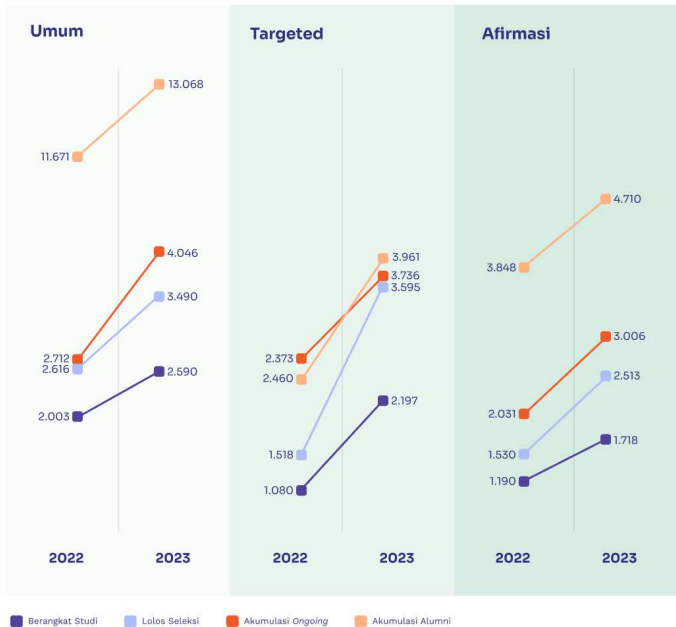
b. Perbandingan Penerima Program Beasiswa 2022-2023

Akses Beasiswa LPDP yang terbuka untuk umum/ seluruh potensi anak bangsa ditentukan dengan seleksi berbasis merit system. Meski demikian, LPDP sangat memahami bahwa masih terdapat banyak kelompok underprivileged sehingga perlu aksi-aksi afirmatif yang diwujudkan dalam program afirmasi sebagai wujud keberpikahan no one left behind.

Melalui Program Beasiswa Targeted, LPDP juga menyiapkan program khusus bagi profesi-profesi strategis untuk menunjang perbaikan pada sektor pelayanan publik.

Jumlah penerima Program Beasiswa Umum, Targeted, dan Afirmasi

2022-2023

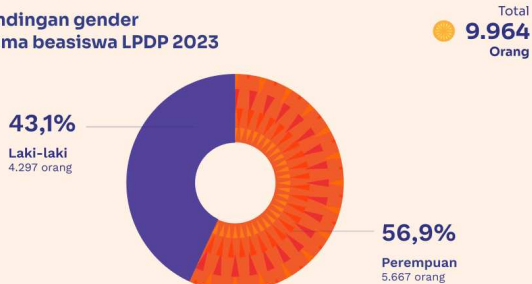


■ Berangkat Studi ■ Lolos Seleksi ■ Akumulasi Ongoing ■ Akumulasi Alumni

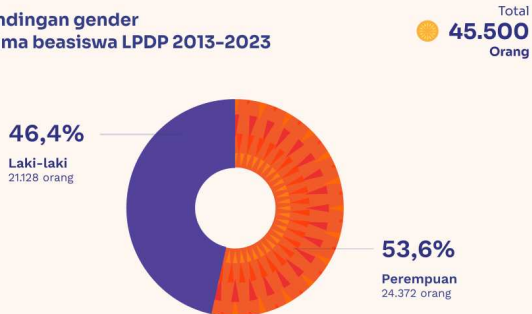
c. **Perbandingan Gender Penerima Program Beasiswa**

Pembangunan bangsa adalah tanggung jawab seluruh anak bangsa, baik laki-laki maupun perempuan. Merayakan para Kartini Indonesia pembawa peradaban, lebih dari 53,6% penerima beasiswa LPDP adalah perempuan. Akses yang telah terbuka lebar menuntun kita menuju era kesetaraan gender yang kian nyata.

Perbandingan gender penerima beasiswa LPDP 2023



Perbandingan gender penerima beasiswa LPDP 2013-2023



d. **Perbandingan Tujuan Studi**

Dalam rangka menjaga dan terus meningkatkan kualitas anak bangsa, LPDP mengupayakan akses studi ke jajaran perguruan tinggi terbaik dunia. Keberpihakan anggaran yang bertemu dengan kemauan dan kemampuan generasi muda membuat studi lanjut di dalam maupun luar negeri bukan lagi hal yang mustahil.

Seiring dengan perbaikan kualitas deretan kampus tanah air yang makin mendunia, makin banyak pula anak bangsa yang memilih kampus dalam negeri sebagai tujuan studi lanjut mereka.

Perbandingan jumlah penerima beasiswa LPDP di dalam dan luar negeri 2013-2023

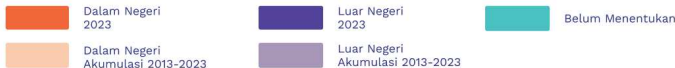
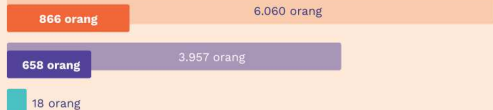
Magister



Spesialis



Doktor



e. Program Beasiswa Kolaborasi

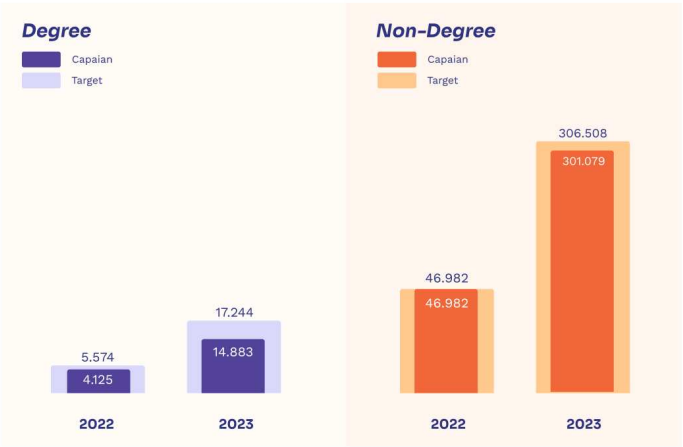
I. Kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Gegap gempita nyala kembang api makin terang dalam ledakan harmoni. Sadar tak bisa menyala sendiri, LPDP memperluas dampak dengan bersinergi bersama Kemendikbudristek dalam layanan beasiswa.

Dalam kolaborasi bersama Kemendikbudristek, pada tahun 2023 LPDP mampu menjangkit 315.962 orang penerima manfaat, melonjak sangat tajam dibanding tahun 2022 yang sejumlah 51.107 orang. Hal ini tentu didukung dari semakin banyaknya cakupan pendanaan dan pilihan program yang ditawarkan.

Perbandingan target dan capaian penerima Beasiswa Kolaborasi dengan Kemendikbudristek 2022-2023

(Capaian dan target dinyatakan dalam satuan "orang", kecuali dinyatakan lain)



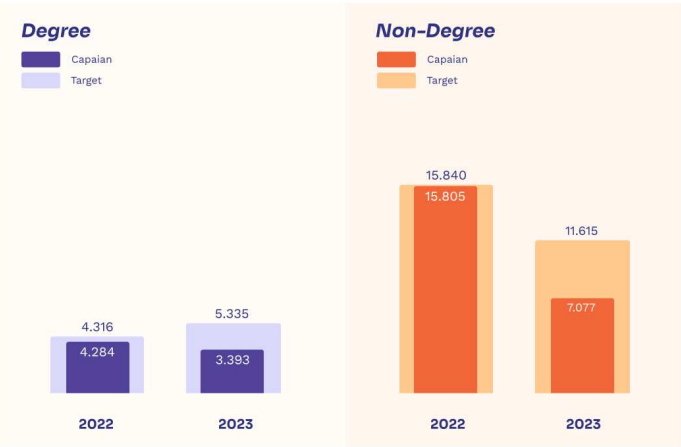
Tahun	Total Target	Total Capaian	Persentase Capaian
2022	52.556	51.107	97,24%
2023	323.752	315.962	97,59%

II. Kolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag)

Dalam kolaborasinya bersama Kemenag, pada tahun 2023 LPDP terus menyalurkan manfaat dengan menjangkit 10.470 orang penerima beasiswa. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya, dikarenakan program beasiswa kolaborasi bersama Kemenag kali ini hanya dibuka untuk satu gelombang.

Perbandingan target dan capaian penerima Beasiswa Kolaborasi dengan Kemenag 2022-2023

(Capaian dan target dinyatakan dalam satuan "orang", kecuali dinyatakan lain)



Tahun	Total Target	Total Capaian	Persentase Capaian
2022	20.156	20.089	99,67%
2023	16.950	10.470	61,77%

C. Kinerja Layanan Pendanaan Riset

Nyala terang kemajuan bangsa juga ditopang dari ekosistem inovasi. Keberpihakan anggaran kepada ikim penelitian ditunjukkan dari semakin masifnya dukungan penyaluran dana kepada para peneliti terbaik bangsa. Penurunan jumlah dana yang disalurkan pada Program Riset Native LPDP terjadi seiring dengan berakhirnya masa pendanaan pada beberapa proyek, sedangkan pada program riset yang dikelola oleh Kemdikbudristek dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus melonjak tinggi.

Riset yang dikelola oleh LPDP dan Kemdikbudristek didanai dari hasil pengelolaan dana abadi di bidang pendidikan sedangkan yang dikelola BRIN didanai dari hasil pengelolaan dana abadi di bidang penelitian. Diversifikasi ini dilakukan agar lebih banyak proyek riset menerima manfaat dari berbagai skema kerja sama.



Jumlah pendanaan Program Riset Native maupun Kolaborasi LPDP 2022-2023

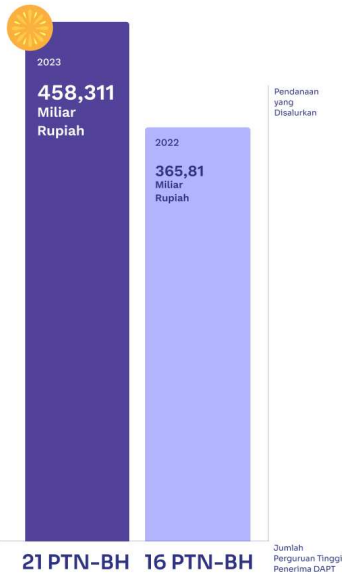


D. Kinerja Layanan Pengelolaan Dana Abadi

a. Program Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT)

Dari sekitar 4.000 perguruan tinggi di Indonesia, belum ada satu pun yang mampu bertengger di peringkat Top 100 dunia. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat peran strategis yang dimainkan perguruan tinggi sebagai kawah candradimuka utama yang menentukan kualitas SDM bangsa.

Keberpihakan anggaran diperlukan. Tiap rupiah DAPT disalurkan untuk mendongkrak berbagai program *World Class University*. Pada tahun 2023, penerima manfaat DAPT meningkat hingga sejumlah 21 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dari yang sebelumnya hanya 16 PTN-BH di tahun 2022.



Total realisasi penyaluran DAPT

2023	2022
 481,4 Miliar Rupiah	 292,6 Miliar Rupiah

Daftar universitas penerima DAPT 2022-2023

No.	PTN-BH	Nilai Dana Kontrak (Miliar Rupiah)	
		2023	2022
1.	 Universitas Airlangga	82,7	35,4
2.	 Institut Teknologi Bandung	50,2	24,2
3.	 Universitas Gadjah Mada	49,7	48,4
4.	 Institut Pertanian Bogor	48,3	25,7
5.	 Universitas Sumatera Utara	44,5	18,1
6.	 Universitas Indonesia	32,4	30,8
7.	 Universitas Diponegoro	25,9	10,7
8.	 Institut Teknologi Sepuluh Nopember	17,9	16,2
9.	 Universitas Padjajaran	15,7	15
10.	 Universitas Brawijaya	11,1	10,6
11.	 Universitas Pendidikan Indonesia	10,9	9,8

No.	PTN-BH	Nilai Dana Kontrak (Miliar Rupiah)	
		2023	2022
12.	 Universitas Andalas	10,3	9,4
13.	 Universitas Syiah Kuala	10	-
14.	 Universitas Negeri Semarang	9,9	-
15.	 Universitas Terbuka	9,8	-
16.	 Universitas Negeri Surabaya	9,7	-
17.	 Universitas Negeri Yogyakarta	9,7	-
18.	 Universitas Hasanuddin	8,7	9,6
19.	 Universitas Sebelas Maret	8,6	9,7
20.	 Universitas Negeri Padang	7,8	9,3
21.	 Universitas Negeri Malang	7,8	9,5

b. Program Dana Abadi Kebudayaan (DAKB)

Kemajuan tak boleh menggadaikan identitas bangsa. Nyala semangat para pelaku budaya mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa, semakin terang dengan dana abadi di bidang kebudayaan yang lestari.

LPDP melalui DAKB telah menyokong banyak kegiatan seni budaya selama pendanaan 2023, diantaranya seperti festival sastra dan budaya Ubud Writers & Readers Festival, Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) yang merupakan festival film sekawasan Asia, pelestarian keberlanjutan budaya seni teater Longser melalui Pertunjukan Longser Pendekar Gunung Bohong di Bandung, dan banyak lagi.



Pada tahun 2023 ini, terjadi penurunan realisasi penyaluran seiring dengan penurunan jumlah penerima yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek sebagai pengelola program. Penurunan realisasi ini dapat dijelaskan dari pencairan DAKB yang hanya dilakukan untuk termin dua dari perjanjian.



Total realisasi penyaluran DAKB



1.2 Ikhtisar Keuangan

A. Realisasi Anggaran 2022-2023

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi pendapatan secara nominal sebesar Rp9.333.252.912.056 melebihi target Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp8.014.759.998.000 (116,45%). Capaian ini jauh lebih tinggi sebesar Rp2.947.993.494.565 (46,7%) dari tahun sebelumnya dikarenakan antara lain

- tambahan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp20.000.000.000.000;
- dampak strategi *shifting* deposito ke obligasi negara; dan
- kenaikan suku bunga deposito seiring membaiknya kondisi ekonomi pascapandemi.

Realisasi belanja mencatatkan capaian yang cukup baik yaitu sebesar Rp9.845.263.671.127 atau 98,64% dari target DIPA Rp9.980.943.750.000. Capaian ini lebih tinggi sebesar Rp4.911.110.619.625 (99,53%) dari tahun sebelumnya. Penyerapan yang optimal pada tahun 2023 antara lain didukung oleh

- bertambahnya jumlah *owardee* Beasiswa Native yang berangkat studi;
- bertambahnya jenis program kolaborasi kementerian/lembaga teknis; dan
- penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) program kolaborasi sejak awal tahun sehingga pelaksanaan program dan pencairannya dapat dioptimalkan sepanjang tahun.

Uraian	Realisasi			
	2023		2022	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Persentase (%)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Negara dan Hibah	8.014.759.998.000	9.333.252.912.056	116,45	6.835.259.417.419
2. Belanja	9.980.943.750.000	9.845.263.671.127	98,64	4.934.153.051.500
3. Surplus (Defisit) Anggaran	(1.966.183.752.000)	(512.010.759.071)	26,04	(1.451.106.365.991)
4. Pembiayaan	-	-	0,00	-
Selisih Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	(1.966.183.752.000)	(512.010.759.071)	26,04	(1.451.106.365.991)

B. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2022-2023

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai SAL awal tahun per 1 Januari 2023 adalah Rp6.461.440.172.948. Sisa Kurang Anggaran Tahun Berjalan akibat belanja negara yang lebih besar dari pendapatan negara adalah sebesar -Rp512.010.759.071, sehingga SAL per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.949.429.413.877.

Saldo Anggaran Lebih Akhir terdiri dari SAL atas pengelolaan

- DAP sebesar Rp3.793.424.491.195;
- DAPL sebesar Rp1.311.302.371.254;
- DAPT sebesar Rp428.968.628.482;
- DAKB sebesar Rp380.777.111.589; dan
- Nondana Abadi sebesar Rp34.956.811.359.

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	6.461.440.172.948	5.010.333.806.957	1.451.106.365.991	28,96
2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(512.010.759.071)	1.451.106.365.991	(1.963.117.125.062)	-135,28
3. Penyesuaian Transaksi Badan Layanan Umum (BLU) dengan Bendahara Umum Negara (BUN)	-	-	-	0,00
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) setelah Penyesuaian	(512.010.759.071)	1.451.106.365.991	(1.963.117.125.062)	-135,28
5. Koreksi	-	-	-	0,00
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	5.949.429.413.877	6.461.440.172.948	(512.010.759.071)	-7,92

C. Neraca 2022-2023

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp147.262.569.617.004 yang terdiri dari

- Aset Lancar sebesar Rp8.076.855.758.405;
- Investasi Jangka Panjang sebesar Rp139.141.059.723.631;
- Aset Tetap (Bruto) sebesar Rp7.502.068.952; dan
- Aset Tetap Lainnya (Bruto) sebesar Rp37152.066.016.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp139.288.908.626.318 dan Rp 7.973.660.990.686.

Aset mengalami kenaikan sebesar Rp19.953.336.012.614 (15,67%) dari periode 31 Desember 2022 disebabkan antara lain oleh faktor berikut:

1. Kenaikan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen yang bersumber dari pencairan alokasi DAP Rp20.000.000.000.000 tahun 2023 yang di sisi lain menambah saldo Kewajiban Jangka Panjang kepada Bendahara Umum Negara (BUN).
2. Defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun berjalan yang sudah digunakan untuk belanja sehingga menurunkan saldo Ekuitas Dana.

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1. Aset Lancar	8.076.855.758.405	8.077.558.624.924	(702.866.619)	-0,01
2. Investasi Jangka Panjang	139.141.059.723.631	119.117.989.088.883	20.023.070.634.748	16,81
3. Aset Tetap	7.502.068.952	110.171.370.708	102.669.301.756	-93,19
4. Aset Lainnya	37.152.066.016	2.514.519.875	33.637.546.141	0,00
Jumlah Aset	147.262.569.617.004	127.309.233.604.390	19.953.336.012.614	15,67

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1. Kewajiban Jangka Pendek	181.208.626.318	80.563.029.523	100.645.596.795	124,93
2. Kewajiban Jangka Panjang	139.107.700.000.000	119.107.700.000.000	20.000.000.000.000	16,79
3. Ekuitas Dana	7.973.660.990.686	8.120.970.574.867	(147.309.584.181)	-1,81
Jumlah Kewajiban & Ekuitas Dana	147.262.569.617.004	127.309.233.604.390	19.953.336.012.614	15,67



1.3 Peristiwa Penting

Januari

Perpindahan Pusat Kontak Layanan ke Kemenkeu PRIME 134

Integrasi layanan Pusat Kontak Layanan dari masing-masing unit Kementerian Keuangan mulai diintegrasikan dalam satu pintu layanan, Pusat Kontak Layanan LPDP yang semula melalui 1500652 kini berpindah ke Kemenkeu PRIME dengan nomor 134.

Pembukaan Seleksi Beasiswa LPDP Tahap 1

LPDP membuka pendaftaran seleksi tahap 1 pada tanggal 25 Januari 2023. Pendaftaran pada periode ini tercatat sejumlah 20.085 orang.

Sosialisasi Majene, Nias, Tarakan, Kupang, Ternate, dan Blak

Seiring dengan pembukaan seleksi beasiswa LPDP tahap 1 tahun 2023, LPDP berkunjung ke daerah-daerah tersebut guna meningkatkan jumlah pendaftar. Sosialisasi ini berlangsung selama periode 19-26 Januari 2023.

HUT ke-11 LPDP

Sebelas tahun sudah LPDP mendorong kemajuan anak bangsa sejak pertama berdiri tanggal 30 Januari 2013. Tahun ini, LPDP mengusung semangat Nyala Terang Kemajuan Bangsa Indonesia sebagai tema tahunan.



Februari

Pembukaan RISPRO Inovasi Bertema RISPRO Energi

Kesempatan pendanaan riset kembali dibuka melalui RISPRO (Riset Inovatif Produktif) Inovasi pada tanggal 28 Februari 2023. Berbagai perguruan tinggi dalam negeri ditantang untuk mewujudkan proyek inovatif di bidang transisi energi.

eRISPRO Menangkan Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) sebagai Top Inovasi SMV

Direktorat Fasilitas Riset LPDP berhasil menyabet penghargaan Top Inovasi SMV (Special Mission Vehicle) terbaik kedua dalam Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) 2023 melalui eRISPRO.

Pembukaan Beasiswa Kerja Sama Diktiriset-LPDP-OKP/StuNed Joint Scholarship Program

Beasiswa kerja sama Diktiriset-LPDP dan OKP/StuNed kembali dibuka pada 21 Februari 2023. Anak terbaik bangsa dikirim ke Belanda untuk studi lanjut pada program *Water Management & Technology, Entrepreneurship, Sustainable & Circular Economy, Maritime and Logistics, Security and The Rule of Law, Public Health Management*.



Maret

Peluncuran CSO Online

Dalam rangka memperluas layanan komunikasi, LPDP meluncurkan OWLI (Online With LPDP Indonesia) pada tanggal 1 Maret 2023. Layanan ini merupakan sebuah saluran *helpdesk* yang memungkinkan para pengguna tersambung dengan *Customer Service Officer* (CSO) LPDP lewat *video conference*.

Peluncuran Aplikasi e-Beasiswa

Untuk mempermudah layanan untuk penerima manfaat beasiswa, LPDP mengintegrasikan portal SIPENDOB dan SIMONEV dalam satu platform yaitu e-Beasiswa pada tanggal 14 Maret 2023.

LPDP Memperoleh Tiga Penghargaan PRIA 2023

Sebagai apresiasi kerja-kerja kehumasan, LPDP menyabet tiga penghargaan PR Indonesia Awards pada tanggal 21 Maret 2023 dalam kategori:

- PR Campaign of The Year,
- Gold Winner untuk Kanal Digital Subkategori Media Sosial Instagram, dan
- Silver Winner untuk Kanal Digital Subkategori Website www.lpdp.kemenkeu.go.id.



April

Program Sosial Ramadhan - Berbagi dari Hati bersama Warga Kramat Kwitang

Merayakan khidmatnya bulan Ramadhan, LPDP Berbagi dari Hati digelar di depan Mushola Al-Rahmah, RT 09/RW 06, Kramat Kwitang dengan seremoni sederhana. Melalui penggalangan dana di kalangan para pegawai, LPDP Berbagi dari Hati berhasil menyalurkan paket bantuan kepada 50 anak yatim, 150 paket sembako untuk janda dan duafa, serta bantuan kepada tiga masjid dan mushola yang menjadi rumah ibadah masyarakat setempat.



Mei

Peluncuran Business Competition

Dalam rangka meningkatkan iklim kewirausahaan bangsa, pada tanggal 2 Mei 2023 digelar LPDP Business Competition. Para *entrepreneur* yang memiliki usaha rintisan maupun yang masih berupa ide bisnis berkompetisi menawarkan dan mengembangkan inovasi mereka. Terdapat dua kategori bisnis yang diadakan dalam LPDP Business Competition, yaitu *Business Initiation Plan* dan *Business Growth Plan*.



Peluncuran Beasiswa Fellowship Dokter Spesialis

Untuk memenuhi kebutuhan bangsa akan dokter yang berkualitas, LPDP meluncurkan Beasiswa Fellowship Dokter Spesialis pada tanggal 28 Mei 2023. Inisiatif ini bertujuan untuk menambah kompetensi dokter spesialis dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari subspecialis terkait melalui Beasiswa Fellowship Dokter Spesialis.



Juni

Peluncuran Kerja Sama LPDP dan PT SMI

Sebagai sesama SMV Kemenuk, LPDP dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI membangun kerja sama di empat bidang strategis, meliputi kerja sama investasi, pengembangan SDM, penelitian, dan penyaluran dana filantropi.

Peluncuran Lima Program Apresiasi Talenta Riset

Sebagai wujud implementasi perbaikan manajemen talenta nasional, LPDP dan BRIN beri apresiasi kepada para ilmuwan, pakar, atau praktisi yang telah memberikan sumbang nyata dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lima Program Talenta Riset diluncurkan pada tanggal 19 Juni 2023, meliputi Habille Prize, Indonesia Innovator Awards, Nurtanio Awards, Sarwono Awards, dan Sivabessy Awards.

Pembukaan Seleksi Beasiswa LPDP Tahap 2

LPDP membuka pendaftaran seleksi tahap 2 pada tanggal 8 Juni 2023. Sejumlah 33.195 orang tercatat mendaftar beasiswa LPDP sepanjang tahun 2023.



Juli

Pembukaan Beasiswa Kerja Sama Bidang Metalurgi di Tiongkok

LPDP mendukung program kerja sama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemkomarves) dengan Pemerintah Tiongkok di bidang metalurgi dan sains material, yaitu di Central South University (CSU) dan Northeastern University (NEU).



Agustus

Penyelenggaraan LPDP Festival

Pada tanggal 1-2 Agustus 2023, LPDP menyelenggarakan sebuah rangkaian acara akbar, meliputi EduFair, Seminar Beasiswa, Seminar Riset, Seminar Investasi, Job Fair, Research Fair, Pagelaran Budaya, Bioskop Mini Film Indonesia, dan TOEFL/IELTS Mockup Test.

Homecoming Alumni

Dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, para alumni penerima manfaat beasiswa LPDP dipertemukan dengan para tokoh, pemimpin, dan pemangku kebijakan pada tanggal 3 Agustus 2023 untuk berdialog merumuskan langkah kontribusi sekaligus mempresentasikan kebermanfaatannya untuk masyarakat luas.

LPDP Plant a Tree Run

Rangkaian gelaran LPDP Festival ditutup dengan acara lari dan membagikan ribuan bibit pohon kepada peserta dalam rangka pelestarian penghijauan bumi pada tanggal 13 Agustus 2023.



September

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan 2023

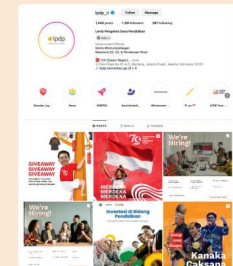
Tak hanya sebagai gambaran penilaian kesuksesan penyelenggaraan layanan sepanjang tahun 2023, survei kepuasan publik juga sangat berguna untuk menyempurnakan kegiatan, program, maupun kebijakan terkait layanan.



Oktober

Akun Media Sosial Instagram LPDP Mencapai 1 Juta Followers

Untuk pertama kalinya, LPDP sebagai satuan kerja di bawah Kemenuk mencapai satu juta pengikut di media sosial Instagram.



November

LPDP Mendapat Predikat ZI-WBBM

Pada tanggal 4 November 2023, Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) diberikan kepada instansi pemerintah yang berhasil mengelola birokrasi dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penghargaan ZI-WBBM hanya diberikan kepada 24 unit kerja terpilih dari ribuan unit kerja di seluruh Indonesia, termasuk LPDP.

LPDP Menerima Penghargaan TOP Digital Awards

LPDP berhasil memenangkan penghargaan PR Campaign of The Year dalam ajang The 8th Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2023 yang diselenggarakan di Denpasar, Bali. Tidak berhenti di situ, LPDP juga memborong tiga piagam penghargaan PRIA 2023 lainnya yang dianugerahkan pada puncak acara yang diselenggarakan hari Jumat, 17 Maret 2023.



Desember

Penandatanganan Kerja Sama LPDP dengan BMGF

Indonesia mulai menjajaki pendanaan riset berskala global. Menggaet Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), LPDP berhasil memperoleh Rp84 miliar yang ditujukan untuk riset di bidang pangan.

Launching Aplikasi TALENTA

Layanan beasiswa LPDP bersifat dari hulu ke hilir. Guna memakselerasi kontribusi alumni pada pembangunan bangsa, LPDP meluncurkan platform TALENTA yang menghubungkan perusahaan dengan Alumni LPDP.



1.4 Penghargaan & Apresiasi

A. Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM)

LPDP berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) yang diberikan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Republik Indonesia pada Rabu, 6 Desember 2023 di Bali. Hadir langsung Andin Hadyanto selaku Direktur Utama LPDP menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas.

Penghargaan prestisius ini diberikan kepada instansi pemerintah yang telah unggul dalam mengelola birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penghargaan ZI-WBBM hanya diberikan kepada 24 unit kerja terpilih dari ribuan unit kerja di seluruh Indonesia. Kementerian Keuangan sekaligus juga menjadi kementerian dengan perolehan predikat ZI-WBBM terbanyak.

Sebelumnya, LPDP sebagai institusi di bawah Kementerian Keuangan juga telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) pada tahun 2016. Capaian ini menunjukkan komitmen berkelanjutan dan upaya nyata dalam menjaga integritas di LPDP.

Proses menuju ZI-WBBM ini telah dimulai sejak dua tahun ke belakang dengan penandatanganan Piagam Pencanangan ZI-WBBM oleh para direksi LPDP pada tanggal 4 November 2021. Selama perjalanan menuju pencapaian ZI-WBBM, LPDP terus melakukan perluasan layanan baru dengan fokus pada inovasi di enam area perubahan utama.

Enam area perubahan tersebut meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM Aparatur, Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Manajemen Risiko, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



Direktur Utama LPDP, Andin Hadyanto (berdua dari kanan) menerima piagam penghargaan atas pencapaian ZI-WBBM dari Menteri PAN RB.
Sumber: Dokumentasi Biro KLI Kementerian Keuangan RI.

B. Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2023

LPDP berhasil memenangkan penghargaan PR Campaign of the Year dalam ajang The 8th Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2023 yang diselenggarakan di Denpasar, Bali. Tidak berhenti di situ, LPDP juga memborong tiga piala penghargaan PRIA 2023 lainnya yang diselenggarakan pada puncak acara yang diselenggarakan hari Jumat, 17 Maret 2023.

Penghargaan terbaik Gold Winner diberikan untuk kategori Kanal Digital Subkategori Media Sosial Instagram dan Program PR Subkategori Digital PR Beasiswa LPDP. Sedangkan untuk kategori Kanal Digital Subkategori Website, situs web LPDP www.lpd.kemkeu.go.id meraih penghargaan Silver Winner.

PRIA 2023 diikuti oleh 236 instansi dengan total mencapai 836 entri. Penjurian sesi nonpresentasi dilaksanakan pada 13-14 Februari 2023, dilanjutkan dengan sesi presentasi pada 14-17 Februari 2023. Proses penjurian melibatkan 16 juri dari kalangan praktisi humas atau *public relations* (PR) senior, jurnalis terkemuka, akademisi senior, hingga PR gurus.

Seperti diketahui, PRIA merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh majalah PR Indonesia untuk mengapresiasi upaya dan kinerja kehumasan di lingkungan pemerintah, lembaga, korporasi, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.



Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi menerima empat penghargaan PRIA 2023. Sumber: Dokumentasi LPDP.

C. TOP Digital Implementation

LPDP berhasil menyabet dua penghargaan TOP Digital Awards 2023 yaitu TOP Digital Implementation 2023 #Star 4 (Bintang 4 – SANGAT BAIK) dan TOP Leader on Digital Implementation 2023 untuk Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto.

Penyerahan plakat Top Digital Awards 2023 diterima langsung oleh Kepala Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi (PSDM-TI) LPDP, Kingkin Rahayu Ningsih yang hadir mewakili Direktur Utama LPDP.

Penghargaan tahunan paling bergengsi di dunia teknologi informasi di Indonesia ini menjadi salah satu bukti bagaimana tata kelola atau manajemen teknologi informasi di LPDP telah dijalankan dengan modern, profesional, dan terpercaya.

Ini adalah kali kedua LPDP mendapat dua penghargaan TOP Digital Awards setelah masuk dalam daftar finalis dan mengikuti sesi presentasi penjurian. Sebelumnya, LPDP juga memenangkan dua penghargaan yang sama pada tahun 2022.

TOP Digital Awards sendiri merupakan kegiatan penghargaan tahunan di bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) yang diselenggarakan oleh majalah *IT Works*. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan/institusi dan manajemen di Indonesia yang dinilai berdasarkan kinerjanya dalam mengimplementasikan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja, layanan, dan daya saing.



Kepala Divisi PSDM-TI LPDP (ketiga dari kiri) menerima penghargaan TOP Digital Awards 2023. Sumber: Dokumentasi LPDP.

D. Pengelola Risiko Terbaik Pertama di Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2023

LPDP meraih penghargaan sebagai Pengelola Risiko Terbaik Pertama di Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2023. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemkeu pada agenda Penandatanganan Kontrak Kinerja Sekretariat Jenderal pada tanggal 31 Januari 2024. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dari LPDP melalui Direktorat Keuangan dan Umum c.q. Divisi Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko.



E. Pengelolaan Keuangan Terbaik Seklaster Kementerian Keuangan

Sebagai satuan kerja dengan pagu lebih dari Rp1 triliun di klaster Kemkeu, LPDP berhasil meraih predikat sangat baik dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KIPA) untuk periode anggaran 2023 mencapai nilai sempurna yaitu 100.

Pencapaian ini menjadikan LPDP sebagai satuan kerja pengelolaan keuangan terbaik seklaster Kemkeu. Ada empat indikator yang dinilai untuk Badan Layanan Umum (BLU) LPDP:

- Deviasi Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- Revisi Anggaran
- Capaian Output
- Dispensas Surat Perintah Membayar (SPM)

Berbagai upaya strategis yang dilakukan oleh LPDP sepanjang tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran, antara lain:

- peningkatan kualitas perencanaan;
- kedisiplinan pelaksanaan anggaran;
- pelaksanaan program dan layanan;
- pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- peningkatan kualitas belanja yang efektif dan efisien; serta
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang cermat.

Segala peningkatan kinerja pada 2023 akhirnya berhasil meningkatkan nilai IKPA LPDP dari penilaian tahun lalu yang mencapai angka 97,64. Piagam penghargaan diberikan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling kepada Kepala Subdivisi Perbendaharaan LPDP, Oktariawan Setyabudi yang mewakili Emmanuel Agust Hartono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Direktur Keuangan dan Umum LPDP.

Apresiasi penghargaan ini diselenggarakan secara tahunan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi DKI Jakarta. Penilaian ini dilakukan tiap tahun oleh DJPb Provinsi DKI Jakarta kepada 1.660 satuan kerja (satker) dari 82 Kementerian/Lembaga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.530 satker berada di dalam negeri dan 130 satker yang berada di luar negeri.

Tentunya capaian ini merupakan bentuk nyata dari kinerja positif kebhendahaan LPDP dalam melayani seluruh pengguna layanan LPDP. Tak sekedar pengakuan atas keunggulan administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, apresiasi ini sekaligus memastikan kontribusi LPDP terhadap pembangunan bangsa melalui pendanaan pendidikan dan riset nasional.



Kepala Subdivisi Perbendaharaan LPDP (kedua dari kiri) menerima penghargaan Pengelolaan Keuangan Terbaik Seklaster Kementerian Keuangan. Sumber: Dokumentasi LPDP.

02 Laporan Manajemen

Pijar Para Penggerak

Layaknya pertunjukan kembang api spektakuler yang tercipta dengan adanya arahan, perencanaan, dan keputusan yang tepat. Tiap dedikasi, bimbingan, inisiatif, serta kerja sama LPDP juga selalu berhasil menyalakan semangat dan harapan cerah anak bangsa.



2.1 Laporan Ketua Dewan Pengawas



*Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Bapak/Ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati.

Mengawali Laporan Dewan Pengawas, izinkan saya atas nama Dewan Pengawas menyampaikan rasa syukur atas dilaksanakannya Laporan Tahunan 2023 LPDP. Melalui laporan ini, Dewan Pengawas akan menyampaikan pandangan terhadap kinerja manajemen LPDP sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan.

Peran Membentang Sebelas Tahun

Bapak/Ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati.

Dalam budaya Jawa, angka sebelas tidak disebut *sepujuh siji* (sepuluh satu), namun khusus angka belasan ini disebut *sewelos*, yang bila ditelusuri berakar dari kata *welos* atau kasih sayang. Ibarat seorang anak, usia belasan adalah saat anak harus mengenal apa itu rasa kasih sayang dan menebarnya dalam bentuk empati.

Di usianya yang juga telah memasuki tahun kesebelas, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) semakin menunjukkan rasa sayangnya dengan memainkan berbagai peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) bangsa. LPDP kini semakin dikenal hingga menjadi *top of mind* bila kita bicara mengenai akses pendidikan dan penelitian di Indonesia.

Hal ini tentu tak lepas dari dukungan manajemen yang konsisten ditunjukkan LPDP dan perlu mendapat apresiasi. Direksi LPDP tetap mampu memimpin lembaga, melahirkan terobosan-terobosan baru, dan melintasi berbagai macam krisis dan tantangan.

Dewan Pengawas juga perlu mengapresiasi komitmen Dewan Direksi LPDP yang senantiasa transparan dan akuntabel pada tiap-tiap langkah kebijakannya. Dalam rapat yang rutin diselenggarakan tiap bulannya, Direksi selalu menyampaikan laporan, membuka diskusi, meminta pendapat dan arahan, sebelum mengambil keputusan-keputusan besar terkait proses bisnis LPDP. Langkah ini telah memastikan setiap rupiah yang dihasilkan dana abadi tepat guna bagi kemajuan SDM dan inovasi bangsa Indonesia.

Ikhtiar selama sebelas tahun terakhir telah membawa manfaat yang lebih masif. Peran LPDP semakin luas seiring dengan semakin beragamnya Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola, meliputi: Dana Abadi Pendidikan (DAP, yang di dalamnya termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian (DAPIL), Dana Abadi Kebudayaan (DAKB), dan Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT). Penyaluran manfaat dana abadi juga meluas dengan melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemendagri), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dengan cakupan program yang lebih luas, penerima manfaat LPDP juga telah menunjukkan dampak mereka kepada masyarakat, baik melalui karier maupun karya/ inovasi yang mereka ciptakan. Setelah sebelas tahun LPDP berdiri, kini Indonesia mulai memanen cahaya, semangat bak bara api kecil yang kita jaga bersama mulai memancar, semangat yang selaras dengan usulan tema Laporan Tahunan 2023: **Nyala Terang Kemajuan Bangsa Indonesia**.

Tinjauan Makroekonomi, Kondisi Pendidikan, dan Iklim Riset di Indonesia

Bapak/Ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Tahun 2023 telah menjadi tahun yang menantang namun penuh peluang bagi perekonomian Indonesia. Seperti kembang api yang menerangi langit dengan kilauan cemerlang, pertumbuhan ekonomi kita juga menunjukkan dinamika menarik. Meskipun menghadapi ketidakpastian global dan fluktuasi pasar, ekonomi Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan yang solid sebesar 5,4%. Konsumsi domestik yang kuat, didorong oleh daya beli masyarakat yang terus meningkat, serta investasi yang berkelanjutan menjadi pilar utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ini memberi kita sinar terang yang membimbing arah pembangunan dan pengembangan ekonomi.

Pada tahun 2023, nilai tukar Rupiah mengalami fluktuasi signifikan, seperti pola berubah dalam pertunjukan kembang api. Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah disebabkan oleh penguatan Dolar AS akibat kebijakan moneter ketat Federal Reserve. Pada awal tahun, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp15.500 hingga Rp15.800 per Dolar AS. Namun, berkat kebijakan Bank Indonesia (BI) dan upaya stabilisasi ekonomi, nilai tukar rupiah kembali bergerak dalam rentang Rp15.600 hingga Rp15.900 per Dolar AS menjelang akhir tahun. Stabilitas nilai tukar ini sangat penting bagi LPDP dalam mengelola investasi dan mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa.

Di sektor perbankan, tahun 2023 juga menunjukkan kinerja yang mengesankan, mirip dengan keindahan kembang api yang mempesona. Perbankan dalam negeri berhasil menjaga ketahanan meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Resiliency keuangan modal (atau CAR) tetap solid dan kualitas aset menunjukkan perbaikan. Bank-bank di Indonesia tetap stabil dalam hal likuiditas dan penyaluran kredit, berkat pengelolaan yang hati-hati dan kebijakan makroprudensial yang tepat. Kinerja perbankan yang kuat ini memberikan landasan yang kokoh bagi LPDP dalam mengelola dana dan investasi, serta mendukung pendanaan proyek-proyek strategis.

Pasar uang Indonesia pada tahun 2023 beroperasi dalam rentang yang dinamis, menghadapi volatilitas yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter global dan sentimen pasar. Meskipun terdapat fluktuasi dalam suku bunga pasar uang, BI berhasil menjaga stabilitas dengan kebijakan yang efektif untuk mengelola likuiditas dan memastikan pasar uang berfungsi dengan baik. Dewan Pengawas menilai kinerja pasar uang yang stabil ini adalah momentum penting bagi LPDP dalam proses

investasi dan pengelolaan dana, memastikan bahwa dana dapat dialokasikan dengan efisien dan efektif untuk mendukung pengembangan SDM dan inovasi bangsa.

Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing tak dapat ditawar lagi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Bukan tanpa tantangan, tujuan ini membutuhkan komitmen tinggi dan peran sentral negara, terlebih saat ini Indonesia masih tertinggal dari negara lain, termasuk di kawasan ASEAN.

Dalam pertemuan antara LPDP dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada Rapat Kerja LPDP Tahun 2023, kami mencapai kesepakatan bahwa BAPPENAS akan memperbarui dokumen daftar kebutuhan kritis (*critical occupancy list*). Dokumen ini akan mencantumkan prioritas program studi yang diperlukan di masa depan dalam pendidikan tinggi, serta menangani ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan lulusan perguruan tinggi, termasuk pemetaan bidang *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM). Beberapa pihak juga mengusulkan agar disiplin Seni (Arts) turut dimasukkan, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam menyelesaikan tantangan pembangunan.

Sebagai langkah lanjut dari kesepakatan ini, kebijakan pendidikan akan difokuskan pada peningkatan kualitas melalui perbaikan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan ekosistem pendidikan. Anggaran pendidikan tahun 2024 yang sejalan dengan visi dan misi LPDP akan mencakup peningkatan investasi di sektor pendidikan, termasuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemaparan kebudayaan, serta penguatan perguruan tinggi.

Perhatian utama kami adalah memastikan bahwa riset yang dilakukan berkaitan dengan sektor-sektor yang memiliki potensi efek penganda yang besar. Pengembangan industri nasional, misalnya, membutuhkan penguasaan teknologi yang dilakukan secara bertahap, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri. Tujuan akhirnya adalah agar industri nasional mampu bersaing di pasar domestik maupun global, melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri.

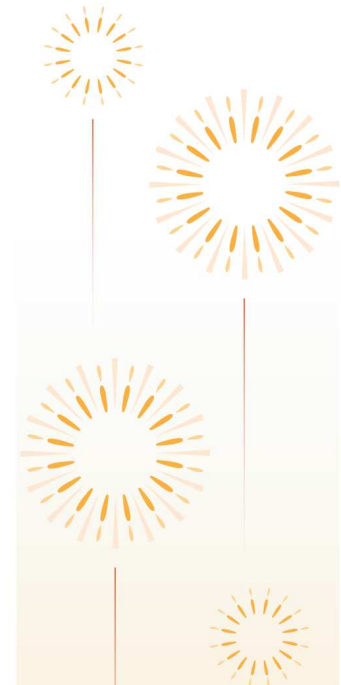
Sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah, pada tahun 2019 dibentuklah BRIN sebagai lembaga nonkementerian. Pada April 2021, BRIN dipisahkan dari Kemdikbudristek dan kini berada langsung di bawah tanggung jawab Presiden. BRIN bertugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi. Pembentukan BRIN diharapkan dapat meningkatkan kualitas riset nasional dan mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bermanfaat melalui integrasi berbagai kegiatan penelitian.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, tercantum bahwa produk inovasi dan riset prioritas nasional diharapkan mampu mencapai 40 produk yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk mewujudkan iklim riset dan inovasi yang kredibel, kami di LPDP bekerja sama dengan BRIN dalam hal pendanaan program riset. Kami menetapkan arah dan target penelitian serta riset Indonesia yang berfokus pada tiga hal utama:

- 01 **Integrasi sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).**
- 02 **Penciptaan ekosistem riset yang berstandar global, terbuka (inklusif), dan kolaboratif.**
- 03 **Membangun fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkelanjutan.**

Dengan kebijakan ini, kami berharap riset dan inovasi nasional mampu meningkatkan dampak ekonomi langsung dari aktivitas riset, menjadikan sektor IPTEK sebagai tujuan investasi jangka panjang, serta menarik devisa. Hal ini sejalan dengan pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) LPDP, di mana riset yang didanai diharapkan menjadi bagian dari industri dan memberikan kontribusi langsung pada perekonomian. Kami juga menyadari bahwa tantangan utama LPDP adalah terbatasnya alokasi dana untuk riset dan inovasi, yang dapat mempengaruhi upaya menciptakan ekosistem riset dan inovasi dengan daya saing global.

Melalui pendanaan RISPRO LPDP, kami berharap riset yang didanai tidak hanya menjadi bagian dari industri tetapi juga memberikan dampak signifikan pada perekonomian. Selain itu, koordinasi yang lebih intensif antara BRIN dan LPDP, serta perumusan program bersama, diperlukan untuk membangun ekosistem riset dan inovasi yang berdaya saing di Indonesia. Alokasi anggaran riset juga harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti hasil yang terukur, tema prioritas yang jelas, serta akuntabilitas. Penetapan besaran dan jumlah pendanaan riset oleh LPDP diharapkan dapat mendorong riset terapan yang menghasilkan penemuan dan inovasi yang berdampak.



Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas

Bapak/Ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Dalam hal tata kelola, LPDP secara umum telah melaksanakan ketentuan-ketentuan terkait Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-129/PMK.05/2020, yang kemudian telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor PMK-129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

LPDP telah melaksanakan rapat untuk mendapatkan arahan strategis dari Dewan Penantuan dengan frekuensi dua kali di tahun 2023. Rapat pertama diselenggarakan secara daring pada tanggal 14 Juni 2023, sedangkan rapat kedua diadakan pada 28 Desember 2023. Dalam rapat tersebut hadir pada Dewan Penantuan LPDP secara lengkap, dan menghasilkan output berbagai arahan Dewan Penantuan untuk selanjutnya telah dirumuskan menjadi Keputusan Dewan Penantuan.

Sepanjang tahun 2023, telah diselenggarakan 12 rapat rutin Dewan Pengawas LPDP dengan manajemen LPDP, baik secara fisik, *hybrid*, maupun daring, menyesuaikan agenda rapat dan jadwal para pimpinan. Rapat tersebut menghasilkan matriks tindak lanjut arahan/masukan Dewan Pengawas, yang kemudian dilaporkan oleh manajemen LPDP pada rapat Dewan Pengawas selanjutnya.

Selain itu, LPDP juga secara konsisten telah menyampaikan laporan hasil investasi setiap bulan dan laporan perkembangan kinerja triwulanan.

Dalam hal tingkat kematangan institusi yang diukur berdasarkan enam aspek BLU (Keuangan, Kapabilitas Internal, Inovasi, Pelayanan, Tata Kelola dan Kepemimpinan), telah diperoleh hasil penilaian *maturity rating* BLU atas LPDP adalah 3,87 dari skala 5,0. Nilai yang semakin mendekati angka 5,0 menunjukkan bahwa LPDP sebagai BLU sudah semakin matang, terlebih bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 3,01. Meski demikian, masih terdapat *room for improvement* untuk aspek Inovasi, Lingkungan, Keuangan, dan Kapabilitas Internal.

Di bidang peningkatan integritas dan pelayanan publik, LPDP telah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2023. Selain itu LPDP juga telah meraih kualitas manajemen mutu layanan yang *comply* terhadap ISO 9001:2015. Pencapaian ISO dan WBBM tersebut penting bagi masa depan LPDP, dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus *image branding* institusi yang amanah dalam mengawala dana masyarakat di lingkup nasional maupun internasional.

Detail penilaian *maturity rating* BLU LPDP berdasarkan enam aspek pengukuran



Penilaian Atas Kinerja

Bapak/ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Capaian kinerja strategis LPDP per 31 Desember 2023 sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya (2022). *Asset Under Management* (AUM) LPDP per 31 Desember 2023 sebesar Rp145,05 triliun, yang terdiri dari Pokok Dana Abadi sebesar Rp139,07 triliun, dana kerja sama sebesar Rp5,20 miliar, dan imbal hasil investasi sebesar Rp5,91 triliun.

Kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat baik, mencapai Rp9,333 triliun atau 116,45% dari target pendapatan sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 2023 yaitu Rp8,014 triliun (tumbuh sebesar 46,77% dari pendapatan tahun 2022). Realisasi belanja juga sangat baik, mencapai Rp9,845 triliun atau 98,64% dari total pagu belanja pada tahun 2023 sebesar Rp9,980 triliun (tumbuh hampir dua kali lipat dibanding realisasi tahun 2022, Rp4,934 triliun).

LPDP secara konsisten telah memberikan pembiayaan pendidikan kepada sebanyak 45.500 orang, dengan rincian 21.794 Beasiswa Umum, 12.624 Beasiswa Targeted, dan 11.082 Beasiswa Afirmasi. Pada tahun 2023, total penerima beasiswa LPDP mencapai 9.364 orang (hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya). Program ini juga semakin inklusif dengan mencakup keluarga prasejahtera, daerah 3T, dan penyandang disabilitas.

Selain itu, program beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbudristek dan Kemenag juga telah dilaksanakan dengan sangat baik, mencapai lebih dari 450 ribu penerima beasiswa baik untuk program *degree* maupun *non-degree*.

Terkait pendanaan riset, LPDP telah berjalan sesuai dengan target per 31 Desember 2023. LPDP telah membiayai total 2.791 proyek riset, dengan rincian 938 proyek telah selesai dan 1.853 proyek riset masih berlangsung. LPDP juga telah mendukung pelaksanaan delapan skema Riset dan Inovasi Indonesia Maju (RIIM), serta mendukung program-program kolaborasi riset dengan Kemendikbudristek, termasuk program riset UK-Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences (UKICIS), Program for Research and Innovation in Science and Technology (PRIME), dan Indonesia Science Partnership for Research and Innovation (INSPIRASI).

Jajaran manajemen LPDP secara umum telah menindaklanjuti arahan Dewan Penyalur sepanjangan tahun 2023. LPDP telah melakukan

- penyempurnaan strategi, visi, dan misi;
- diversifikasi portofolio dana kelolaan;
- mendukung program prioritas nasional;
- meningkatkan perhatian pada bidang STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art, and Math*);
- menyusun kajian steady state jangka panjang;
- memperluas skema beasiswa melalui *co-funding*, *co-supervision*, dan mengkaji *student loan*; serta
- mendukung perluasan peningkatan riset dan kolaborasi untuk menyiapkan generasi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Selain itu, LPDP juga telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas untuk berperan sebagai penghubung antarkementerian/lembaga (K/L) dan menjalin hubungan dengan lembaga filantropis. LPDP juga mendukung kebijakan afirmasi di bidang riset dan pendidikan, meningkatkan dukungan dan prioritas untuk bidang studi seperti geotermal, energi baru terbarukan, dan kendaraan listrik *hybrid*. Optimalisasi teknologi informasi (TI) melalui aplikasi e-Beasiswa dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan beasiswa. LPDP juga mendorong peningkatan jumlah *awardee* di tahun 2023, mendukung pencapaian beasiswa *degree* dan *non-degree* program kolaborasi, serta mengembangkan variasi skema beasiswa dan magang di luar negeri yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Penilaian Terhadap Strategi ke Depan dan Ruang Perbaikan

Bapak/ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Dewan Pengawas menaruh keyakinan bahwa Manajemen LPDP mampu melaksanakan target yang telah disusun dalam RBA tahun 2023, tetap realistis namun mampu memberi cakupan dan manfaat layanan yang tetap maksimal.

Demikian juga dengan strategi yang akan dijalankan, telah sejalan dengan rencana jangka pendek dan panjang. Untuk semakin menyempurnakan target dan strategi menyongsong tahun 2024, Dewan Pengawas juga memberikan beberapa saran perbaikan:



1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penerima beasiswa LPDP

- LPDP perlu meningkatkan jumlah penerima beasiswa LPDP dengan memperhatikan proporsi bidang studi STEM dan Non-STEM sesuai kebutuhan Indonesia, serta memperbanyak proporsi studi di luar negeri dibandingkan di dalam negeri.
- Kesempatan magang di luar negeri bagi alumni LPDP selama setidaknya dua tahun, perlu dilembagakan dalam Peraturan Direktur Utama dengan tetap mendorong seluas-luasnya kesempatan magang di lembaga internasional serta perusahaan strategis di bidang energi, geotermal, dan teknologi, sehingga dapat mendorong percepatan transfer pengetahuan ketika para penerima beasiswa kembali ke Indonesia.
- Mempertimbangkan tingkat ketepatan waktu penyelesaian studi, masih tingginya alumni yang hilang komunikasi, dan peran alumni LPDP di bidang wirausaha yang masih belum mencapai

target, LPDP perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada *awardee* selama studi dalam rangka pembekalan nasionalisme, asistensi *survival* dalam studi, mendorong ketepatan waktu penyelesaian studi, dan sosialisasi untuk magang maupun penguatan jiwa kewirausahaan.

- LPDP perlu terus meningkatkan jejaring global dalam hal opsi perguruan tinggi yang lebih luas di berbagai negara maju dan memiliki keunggulan bidang studi tertentu, dengan memperhatikan efisiensi *tuition fee* dan *allowance*, seperti negara-negara Eropa selain Inggris, negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.
- LPDP perlu proaktif mendorong akselerasi program beasiswa kolaborasi Kemendikbudristek, maupun *non-degree* dengan pendekatan perbaikan tata kelola beasiswa kolaborasi, peningkatan jumlah SDM, dan optimalisasi teknologi informasi.



2. Peningkatan luaran riset yang berkualitas

- LPDP perlu meningkatkan riset yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk tata kelola Ibu Kota Negara (IKN) di masa yang akan datang, termasuk riset terkait *New Ways of Working* (NWOW), maupun riset terkait penguatan ekonomi, pengelolaan energi, bangun ruang, dan penataan lingkungan IKN.
- LPDP agar memperkuat koordinasi dengan BRIN dan menguatkan SDM di bidang evaluasi riset dan terus melanjutkan monitoring dan evaluasi (monev) atas riset yang sudah berjalan sehingga benar-benar tepat sasaran, berkualitas, dan memiliki hasil yang berdampak.

- LPDP bersama-sama BRIN, Kemendikbudristek, dan Kemenag perlu menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai indikator pencapaian riset dalam bentuk kuantitatif dan menampilkan hasil riset inovasi unggulan yang dihasilkan kepada masyarakat misalnya ke dalam suatu kegiatan Indonesia Research Week.



3. Implementasi penyaluran DAPT dan DAKB yang ekspansif dan tetap berkualitas

- LPDP perlu memperluas penyaluran DAPT sehingga lebih inklusif, namun juga perlu mengevaluasi/mengukur dampak atas penyaluran DAPT tersebut terhadap peningkatan ranking perguruan tinggi penerima, sehingga dapat benar-benar mendorong ketercapaian indikator *World Class University*.
- LPDP agar mengakselerasi proses seleksi dan penyerapan DAKB melalui pengembangan metode sosialisasi dana di bidang kebudayaan kepada para budayawan, penggerak seni, organisasi kebudayaan lokal, *content creator*, maupun melalui tokoh budaya.



4. Penguatan tata kelola organisasi yang modern, *agile*, dan visioner

- LPDP perlu segera menyusun Peta Jalan (*roadmap*) 2024-2045 yang mencakup visi, misi, dan strategi untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, kepada Dewan Penantuan dan para pemangku kepentingan.
- LPDP perlu melakukan penguatan struktur organisasi dan jumlah SDM sesuai Analisis Beban Kerja (ABK). Pendekatan ABK dengan catatan bahwa ABK tersebut dihitung dengan menggunakan standar prosedur operasi (SOP) LPDP yang terbaru sesuai dengan tugas dan fungsi LPDP yang saat ini telah berkembang.
- LPDP perlu melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi untuk mengawal penyaluran dan penatausahaan DAKB dan DAPT yang semakin berkembang di masa datang.

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas

Dengan berakhirnya masa bakti Dr. Hadiyanto, S.H., L.L.M. sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas sebelumnya, maka susunan Dewan Pengawas mengalami penyesuaian kembali. Pengangkatan Dewan Pengawas LPDP yang baru kemudian didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/KMK.01/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 3291/KMK.01/2021 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun 2021-2026. Berikut komposisi Dewan Pengawas LPDP saat ini:

Heru Pambudi, S.E., L.L.M.
Ex-Officio Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota

Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.
Sebagai Anggota

Ir. Suharti, M.A., Ph.D.
Ex-Officio Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Anggota

Prof. Dr. Lincoln Arsyad, M.Sc.
Sebagai Anggota

Rr. Nur Tri Aries Suestiningtyas, M.A.
Ex-Officio Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Anggota

Pandangan Atas Kanal Informasi

Bapak/Ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati.

Tren tata kelola di lembaga publik kini bergerak ke arah penerapan suatu konsep yang disebut dengan GRC, yang mencakup *governance* (tata kelola), *risk* (risiko), dan *compliance* (kepatuhan) dan terintegrasi. Penerapan GRC Terintegrasi bertujuan agar organisasi dapat mengambil keputusan dengan lebih berbasis data dalam lingkungan yang sadar risiko, perspektif yang holistik, dan tetap pada koridor aturan atau perundang-undangan. GRC Terintegrasi

membantu organisasi bersatu dalam kebijakan, keputusan, dan tindakan yang efektif, dan Manajemen LPDP tengah menuju ke arah tersebut.

Langkah Manajemen LPDP yang kini juga menginisiasi GRC Terintegrasi adalah hal yang patut kita apresiasi sebagai wujud menunjukkan komitmen keberlanjutan untuk menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada tahun 2023 ini, LPDP tengah menyusun dan menguji coba parameter GRC Terintegrasi, dengan parameter awal yang digunakan meliputi 22 parameter:

01	Indeks Pelayanan Publik	12	Pemantauan Risiko Investasi
02	Indeks Persepsi Kepuasan Stakeholder	13	Risiko Reputasi
03	Perencanaan Kinerja Organisasi yang dirumuskan dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)	14	Hasil pengawasan internal terhadap aspek GRC
04	Pemberian arahan Dewan Penantuan dan/atau Dewan Pengawas sebagai salah satu implementasi tata kelola yang baik LPDP	15	Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)
05	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi/hasil evaluasi Sistem Manajemen Antipenyipuan	16	Pemanfaatan <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS)
06	Manajemen SDM	17	Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA)
07	Kode Etik dan Kode Perilaku	18	Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE)
08	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan	19	Pelaksanaan <i>Know Your Employee</i> (KYE) oleh atasan langsung
09	Penyusunan Profil Risiko Tahun Berjalan	20	Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) LPDP
10	Hasil pengelolaan Risiko Triwulanan	21	Pengelolaan pengaduan melalui WISE Kemenkeu
11	Ketaatan pemantauan Risiko Bulanan oleh pemilik proses bisnis	22	Kepatuhan pelaporan gratifikasi

Uji coba parameter yang telah digelar oleh Manajemen LPDP tersebut akan dilanjutkan dengan pembuatan *dashboard* GRC Terintegrasi yang akan dimulai pada tahun selanjutnya, Dewan Pengawas tentu mendukung dan terus memberikan berbagai masukan perbaikan.

Bapak/ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Dalam mengawal aspek akuntabilitas dan transparansi, LPDP telah membuka berbagai akses kanal informasi publik. LPDP terus proaktif memberikan informasi layanan yang luas di seluruh kanal media sosial yang dimiliki, tersedianya petugas membuat fitur komentar dan pesan langsung (*direct message*) telah cukup mudah dan responsif membalas. Keterbukaan informasi, konten yang menarik, dan kemudahan akses telah mendapat apresiasi dari masyarakat. Bahkan di kanal Instagram, LPDP telah mencatatkan perolehan lebih dari 1 juta pengikut (*followers*), sebuah pencapaian yang masih jarang dapat didapatkan akun-akun pemerintahan. Kanal media sosial LPDP tersedia pada:

Instagram:

X:

@lpdp_ri

@LPDP_RI

TikTok:

YouTube:

lpdp_ri

LPDP RI

Facebook:

LPDP Kementerian Keuangan RI

LinkedIn:

LPDP Kementerian Keuangan RI

Google My Business:

LPDP Kementerian Keuangan

Selain melalui kanal media sosial, permintaan informasi yang langsung terkait dengan layanan beasiswa dan riset LPDP dapat juga dilakukan secara fisik. Dengan kehadiran layanan *Customer Service*, masyarakat dapat langsung datang di kantor layanan LPDP Gedung Danadyaksa Cikini, Jl. Cikini Raya No.91 A-D 1. Pada tahun 2023 ini pula, LPDP berhasil melahirkan inovasi mendigitalisasikan layanan *Customer Service* secara daring, yang kemudian dinamakan *Online With LPDP Indonesia* (OWL).

Sebagai unit kerja di bawah Kementerian Keuangan, LPDP juga bergabung dalam ekosistem layanan informasi Kemenkeu PRIME, masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi dan keluhan melalui telepon 134 maupun surel kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id. Permohonan informasi publik juga dapat dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu yang mencakup situs web ppid.kemenkeu.go.id, aplikasi *Mobile m-PPID*, surel ppid.setjen@kemenkeu.go.id, maupun bersurat fisik yang dapat ditujukan kepada PPID Tingkat I Sekretariat Jenderal Kemenkeu.

Dalam hal pengaduan, LPDP telah membuka dua kanal yang disesuaikan dengan peruntukan atau tujuannya. Pengaduan yang menyangkut dengan indikasi pelanggaran pegawai dapat disampaikan melalui wise.kemenkeu.go.id yang merupakan *Whistleblowing System* Kementerian Keuangan (*WISE Kemenkeu*). Jenis pelanggaran pelanggaran yang dapat disampaikan melalui mekanisme WBS berkaitan dengan dugaan korupsi, pencurian, kecurangan (*fraud*), praktik suap, gratifikasi, pembocoran rahasia, pelanggaran etika, pemerasan, penggelapan aset, penipuan, benturan kepentingan, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, tindakan yang melanggar hukum dan kebijakan prosedur perilaku melawan hukum, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan LPDP dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan LPDP.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam WISE Kemenkeu, Seluruh pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) maupun Unit Kepatuhan Internal (UKI). Hasil dari tindak lanjut tersebut adalah rekomendasi berupa

- usulan kepada pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai yang terbukti melanggar disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- pengembalian uang;
- pelimpahan kasus oleh UKI kepada IBI (apabila dalam penanganan pengaduan ternyata terdapat dugaan pelanggaran disiplin berat);
- dan pelimpahan kasus oleh Itjen kepada Aparat Penegak Hukum (dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana).

Sementara itu, pengaduan indikasi pelanggaran yang menyangkut penerima manfaat LPDP (beasiswa maupun riset) dapat melalui kanal bantuan lpdp.kemenkeu.go.id. Penindakan terhadap aduan ini akan diserahkan kepada Satuan Pemeriksaan Intern.

Sepanjang tahun 2023, LPDP memproses pengaduan masyarakat yang keseluruhannya adalah mengenai *awardde* dan alumni LPDP dengan rincian sebagai berikut:

Subjek Pengaduan	Jumlah Pengaduan
Pengaduan mengenai alumni yang belum melakukan kewajiban kontribusi di Indonesia.	81%
Pengaduan mengenai <i>awardde</i> yang menyalahi persyaratan seleksi.	7%
Pengaduan mengenai <i>awardde</i> yang sudah pernah kuliah dan/atau sudah mendapatkan gelar sama seperti jenjang beasiswa yang didapatkan.	4%
Pengaduan mengenai <i>awardde</i> yang bekerja saat menerima beasiswa.	1%
Pengaduan mengenai <i>awardde</i> atas hal lainnya.	7%

Apresiasi

Bapak/ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Mengakhiri laporan singkat ini, izinkan saya atas nama Dewan Pengawas, mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda dan berbagai pihak pemangku kepentingan yang telah membantu pelaksanaan fungsi pengawasan selama tahun 2023. Kami berharap dukungan tersebut dapat terus membersama kami demi peningkatan kualitas kinerja LPDP.

Sekali lagi, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Direksi dan segenap Insan LPDP yang telah bekerja keras, cerdas, dan tuntas dalam menjalankan misi mulia meningkatkan kualitas SDM bangsa. Sebelas tahun sudah LPDP berdiri, bilangan usia yang tentu masih sedikit namun telah memiliki bekal pengalaman yang cukup menghadapi berbagai dinamika yang terjadi satu dekade terakhir.

Komitmen dan integritas yang ditunjukkan jajaran Direksi dan Insan LPDP benar-benar telah menghadirkan kebermanfaatn setiap rupiah. Terobosan baru baik yang bersifat inisiatif LPDP maupun program kolaborasi kita harapkan dapat terus berlanjut menjadikan LPDP semakin masif semakin inklusif, serta menghadirkan **Nyala Terang Kemajuan Bangsa Indonesia**.

Jakarta, 3 Januari 2024



Heru Pambudi, S.E., LL.M.
Ketua Dewan Pengawas

2.2 Laporan Direktur Utama LPDP



*Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh,*

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swastyastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Bapak/Ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Untuk membuka dan mengawali Laporan Direktur Utama, izinkan saya atas nama manajemen dan saganas Insan LPDP yang berkarya di dalamnya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kasih sayangnya tak pernah berhenti membersamai dan meridhol karya dan pengabdian kami. Tak lupa pula kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia, atas segala wujud kerja sama dan perhatiannya kepada LPDP sepanjang tahun 2023. Meski pandemi dan segala tantangannya belum juga usai, namun kesamaan visi kita semua terhadap pembangunan SDM dan daya saing bangsa terus menjaga kinerja positif LPDP. Kami sampaikan Laporan Tahunan LPDP Tahun 2023 dengan tema **Nyala Terang Kemajuan Bangsa Indonesia**.

Tinjauan Kondisi Kualitas Sumber Daya Manusia

Bapak/Ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Ibarat pertunjukan kembang api, gemerlap, dan gegap gempitanya ditopang oleh persiapan konsep yang matang, bahan bakar, dan api pemantik yang membara. Begitu pun dengan predikat sebagai sebuah bangsa yang maju, sinarnya yang terang di kancah global adalah berkat dedikasi pembangunan SDM dan iklim inovasi yang unggul dengan keberpihakan anggaran adalah kuncinya.

Meski belum lama kita bertransisi dari era pandemi, likhtiar bangsa ini menuju kemajuan terus berjalan di atas rel yang tepat. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023, Indonesia mendapat skor 0,725, menunjukkan bahwa indikator kesehatan, pendidikan, dan pendapatan telah mengalami kemajuan yang relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, skor ini masih berada di bawah rata-rata negara berpenghasilan tinggi, dengan Indonesia berada pada peringkat 108 dari 191 negara. Ini mencerminkan masih banyak ruang untuk perbaikan dan perjalanan penuh tantangan untuk mampu bersinar terang di kancah dunia.

Harapan hidup meningkat menjadi 72 tahun, menunjukkan perbaikan pada sektor kesehatan, baik dari segi sarana dan infrastruktur kesehatan yang semakin maju, maupun dari terbukanya informasi yang meningkatkan literasi masyarakat mengenai kesehatan.

Pada sektor pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga menunjukkan tren positif. Data tahun 2023 menunjukkan APS di kelompok usia 7–12 tahun mencapai 99,16%, kelompok usia 13–15 tahun mencapai 96,3%, kelompok usia 16–18 tahun mencapai 73,42%, dan kelompok usia 19–23 tahun mencapai 28,96%. Tingkat partisipasi sekolah di Indonesia semakin kecil seiring dengan kenaikan usia.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia bersekolah selama sekitar 8,77 tahun, setara dengan tingkat sekolah menengah pertama (SMP), dengan beberapa melanjutkan ke pendidikan menengah atas (SMA). Angka tersebut cukup positif dan meningkat setiap tahunnya, meskipun aksi-aksi akselerasi mendesak dilakukan seiring dengan persaingan global yang semakin meningkat.

Pada pendidikan tinggi, jumlahnya lebih rendah lagi. Rasio orang berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi usia produktif di Indonesia hanya 0,45%, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang mencapai 2,43%, apalagi jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Kanada, dan Selandia Baru yang rasionya mencapai 9,80%.

Tingkat pendidikan ini juga berkorelasi dengan aspek pendapatan. Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Indonesia saat ini diperkirakan sekitar 4.500 Dolar AS (sekitar Rp70 juta). Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand (7.000 Dolar AS), Malaysia (13.000 Dolar AS), Singapura (87.000 Dolar AS), dan Brunei (88.000 Dolar AS).

Kondisi kualitas SDM bangsa juga dapat dilihat dari posisi Indonesia pada indeks inovasi Global (Global Innovation Index atau GII). GII bertujuan mengukur dan membandingkan bagaimana negara-negara di seluruh dunia mengelola inovasi mereka dan hasil-hasil yang dihasilkan dari aktivitas inovatif. Laporan yang diterbitkan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization atau WIPO) menempatkan Indonesia di peringkat 61 dari 132 negara. Meskipun meningkat 12 peringkat dari tahun sebelumnya, pada aspek seperti keberpihakan anggaran, Indonesia masih tertinggal jauh. Anggaran riset Indonesia tak pernah menyentuh 1% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), berbeda dengan negara-negara maju seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat yang anggaran risetnya berkisar 2–3% dari PDRB.

Pekerjaan rumah dalam aspek SDM bangsa mendesak untuk segera digarap. Angka-angka yang optimistis dan terus naik tersebut tidak dapat serta merta dianggap sebagai kabar baik. Aksi-aksi terobosan yang inovatif, masif, dan inklusif perlu dilakukan. Tantangan peningkatan tersebut juga ditirungi dengan isu redistribusi atau pemerataan akses. Keberadaan LPDP terus diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dan pemanfaatannya dalam berbagai program yang bersifat *native* maupun kolaborasi.

Realisasi Sepanjang 2023

Bapak/Ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati.

Dalam perjalanannya, LPDP mampu menjaga kualitas proses bisnis dan layanan yang bahkan lebih masif dari sebelumnya. Sampai dengan 31 Desember 2023, total *Asset Under Management* (AUM) LPDP mencapai Rp145,05 triliun, yang terdiri atas DAP Rp111,11 triliun, DAPL Rp12,99 triliun, DAPT Rp10 triliun, DAKB Rp5 triliun, serta Nondana Abadi (Kas) sebesar Rp5,95 triliun.

Pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan tersebut menghasilkan pendapatan realisasi sebesar Rp9,333 triliun, melebihi target Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp8,014 triliun (116,45%).

Capaian ini jauh lebih tinggi sebesar Rp2,947 triliun (46,17%) dibanding tahun sebelumnya, yang didorong oleh beberapa faktor:

- 01 **Tambahan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp20 triliun.**
- 02 **Pergeseran strategi dari deposito ke obligasi negara.**
- 03 **Kenaikan suku bunga deposito seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi.**

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, investasi dalam deposito tahun 2023 mengalami penurunan nilai sebesar Rp7,951 miliar, atau berkurang sebesar 9,50% secara proporsi persentase. Sebaliknya, investasi dalam obligasi negara meningkat sebesar Rp21,427 miliar atau naik 7,59% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini mencerminkan keberhasilan LPDP dalam kebijakan *shifting* investasi dari deposito ke obligasi dengan signifikan.

Realisasi belanja mencatatkan capaian yang cukup baik yaitu sebesar Rp9.845.263.671,127 atau 98,64% dari target DIPA Rp9.980.943.750.000. Capaian ini lebih tinggi sebesar Rp4.911.110.619.625 (99,53%) dari tahun sebelumnya. Penyerapan yang optimal pada tahun 2023 disebabkan di antaranya adalah bertambahnya jumlah *owardee* Program Beasiswa *Native* yang berangkat studi, bertambahnya jenis program kolaborasi Kementerian/Lembaga Teknis, dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama program kolaborasi sejak awal tahun sehingga pelaksanaan program dan pencairannya dapat dioptimalkan sepanjang tahun.

Dalam layanan beasiswa, LPDP telah mendanai secara berkesinambungan mahasiswa pascasarjana bagi masyarakat Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), serta kelompok masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi melalui program Beasiswa Umum, Beasiswa Afirmasi, dan Beasiswa Targeted. LPDP secara konsisten telah memberikan pembiayaan pendidikan dari tahun 2013 s.d. Desember 2023 dengan akumulasi sebanyak 45.500 orang. Sepanjang tahun 2023, seleksi beasiswa LPDP dilakukan sebanyak dua kali. Dalam dua gelombang seleksi tersebut, LPDP meloloskan 9.964 orang, dengan peserta lulus program dalam negeri sebesar 5.914 orang (59,4%) dan program luar negeri sebesar 4.050 orang (40,6%). Jumlah tersebut melesat dua kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu 5.664 orang.

LPDP secara bertahap akan meningkatkan persentase penerima beasiswa STEM (*science, technology, engineering, mathematics*) baik melalui pendanaan penuh (*fully funded*) maupun pendanaan bersama (*co-funding*) dengan universitas atau negara mitra. Dalam jangka menengah panjang program studi STEM akan ditingkatkan menjadi 60% s.d. 70%. Program studi unggulan yang diambil *owardee* LPDP antara lain dibagi berdasarkan STEM sebanyak 48% dan non-STEM sebanyak 52%.

Masifnya pemanfaatan program pendanaan beasiswa LPDP juga ditunjukkan dengan disalurkannnya pendanaan beasiswa yang bersifat kolaborasi bersama Kemendikbudristek dan Kemenag. Seluruh proses bisnis

program kolaborasi bersama Kemendikbudristek dan Kemenag berada pada Kementerian masing-masing dan LPDP berperan dalam dukungan pendanaan.

Pada tahun 2023, kolaborasi LPDP dengan Kemendikbudristek berhasil merealisasikan 14.883 penerima manfaat untuk program beasiswa *degree*, mencapai sekitar 86% dari target awal sebesar 17.244 orang. Untuk program beasiswa *non-degree*, kami berhasil merealisasikan 315.962 orang, atau sekitar 99% dari target sebanyak 322.149 orang. Total alokasi anggaran untuk program kolaborasi LPDP-Kemendikbudristek tahun 2023 adalah sebesar Rp4,649 miliar.

Realisasi Program Beasiswa Kolaborasi Kemendikbudristek 2022-2023

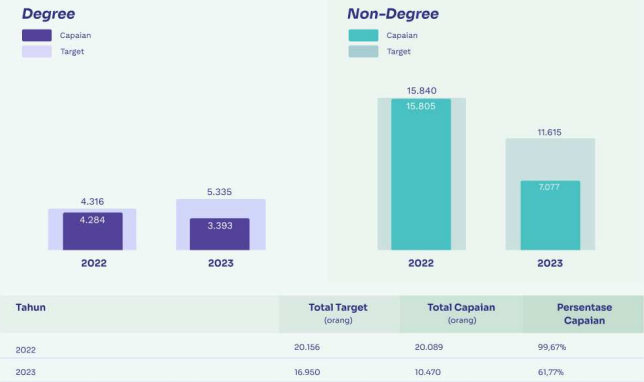


Tahun	Total Target (orang)	Total Capaian (orang)	Persentase Capaian
2022	52.556	51.107	97,24%
2023	323.752	315.962	97,59%

Pada Program Beasiswa Kolaborasi LPDP bersama Kemenag, jumlah penerima beasiswa program *degree* berhasil mencapai 3.393 orang, atau sekitar 63,5% dari target awal yang mencapai 5.335 orang. Sedangkan untuk beasiswa program *non-degree*, terdapat sebanyak 7.077 orang, atau sekitar 60,9% dari target yang mencapai 11.615 orang. Kami menyadari bahwa capaian untuk kedua program ini belum mencapai target, bahkan menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Evaluasi tentu kami laksanakan, khususnya menemukan cara untuk terus mengakselerasi proses tahapan seleksi untuk program *degree* dan *non-degree* pada program kolaborasi Kemenag, mengingat tahapan seleksi masih berlangsung. Total alokasi anggaran untuk program kolaborasi LPDP dan Kemenag tahun 2023 adalah sebesar Rp1,338 miliar, termasuk alokasi untuk pesantren.

Realisasi Program Beasiswa Kolaborasi Kemenag 2022-2023



Rangkuman realisasi layanan beasiswa

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Per 31 Desember 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenalkan/ Penurunan (Rp)	Persentase (%)
Beasiswa	8.898.855.094.000	8.863.641.520.142	99,60	4.190.005.000.899	4.673.636.519.243	111,54
LPDP	4.386.158.272.000	4.361.244.061.178	99,43	2.601.523.284.054	1.759.720.777.124	67,64
Kemendikbudristek	4.132.045.447.000	4.122.607.356.980	99,77	1.476.787.243.170	2.645.820.113.810	179,16
Kemenag	380.671.375.000	379.790.101.984	99,77	111.694.473.675	268.095.628.309	240,03

Bapak/Ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati.

Di tahun 2023, LPDP tetap melanjutkan program-program pendanaan riset yang sifatnya lintas tahun serta memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi atas Riset BRIN dan Kemendikbudristek. Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan yang mengharapkan agar alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan di APBN tidak menjadi satu-satunya sumber pendanaan layanan atau program LPDP, maka LPDP berupaya untuk mengembangkan kerja sama pendanaan program dengan mengedepankan portofolio layanan LPDP, salah satunya adalah pendanaan riset.

Selama tahun 2023, LPDP menyalurkan pendanaan riset sebesar Rp349,69 miliar, mencapai 84,01% dari total target yang sebesar Rp416,235 miliar. Selain untuk riset-riset dari Program Beasiswa Native LPDP, pendanaan riset juga dialokasikan untuk program kolaborasi bersama BRIN, yang dibiayai dari DAPL dan Kemendikbudristek yang bersumber dari DAP. Secara rinci, realisasi pendanaan riset LPDP mencapai 79,69% dari target, Kemendikbudristek mencapai 92,36%, dan BRIN mencapai 78,94%.

Pendanaan riset pada Program Beasiswa Native LPDP tahun 2023 terealisasi sebesar Rp91,829 miliar, mengalami penurunan drastis sebesar -38,10% dari tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp148,352 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh absennya seleksi baru untuk skema RISPRO Kompetisi dan hanya melanjutkan pembayaran untuk riset yang sudah berjalan sesuai kontrak.

Di sisi lain, dalam kolaborasi bersama Kemendikbudristek, LPDP menyalurkan pendanaan riset sebesar Rp139,461 miliar, meningkat sebesar 225,94% dari realisasi tahun

sebelumnya, seiring dengan adanya pendanaan lanjutan dari program RISPRO Mandatory PRIME, UKICIS, Keilmuan Akademik (DIKTI), dan Keilmuan Terapan (DIKSI) yang telah berkontrak pada tahun sebelumnya.

Pada program kolaborasi bersama BRIN, LPDP juga berhasil menyalurkan pendanaan riset sebesar Rp118,408 miliar, meningkat signifikan sebesar 111,06% dari realisasi tahun lalu. Naiknaikan ini terjadi berkat pencairan dana untuk program baru, yaitu RIIM.

Rangkuman realisasi layanan pendanaan riset

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Per 31 Desember 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenalkan/ Penurunan (Rp)	Persentase (%)
Pendanaan Riset	416.235.779.000	349.698.702.720	84,01	247.241.385.909	102.457.835.074	41,44
LPDP	115.235.779.000	91.829.375.031	79,69	148.352.210.105	(56.522.835.074)	-38,10
Kemendikbudristek	151.000.000.000	139.461.053.794	92,36	42.787.277.241	96.673.776.553	225,94
BRIN	150.000.000.000	118.408.275.895	78,94	56.101.896.563	62.306.377.332	111,06

Secara akumulatif per 31 Desember 2023, LPDP menetapkan 2.791 proyek riset dengan total nilai pendanaan mencapai Rp2,66 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.853 proyek riset yang masih berlangsung dengan nilai pendanaan Rp1,86 triliun, sementara 938 proyek riset telah selesai dengan nilai pendanaan Rp794,19 miliar.

Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2023, LPDP juga melanjutkan penyaluran DAPT sebesar Rp458,311 miliar. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 56,61% dari tahun sebelumnya, karena penambahan jumlah perguruan tinggi yang menerima manfaat DAPT, dari 16 Perguruan

Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di tahun 2022 menjadi 21 PTN-BH di tahun 2023. Dukungan pendanaan ini mencerminkan komitmen LPDP untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia sehingga dapat bersaing secara global.

Modernisasi dan pengembangan teknologi tidak dapat mengabaikan aspek kelestarian budaya, oleh karenanya di tahun 2023 LPDP juga turut melanjutkan penyaluran manfaat DAKB kepada 230 penerima. Pendanaan ditargetkan mencapai Rp47 miliar dan berhasil terealisasi sebesar Rp44,755 miliar atau mencapai 95,22%.

Bapak/ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati.

Sepanjang tahun 2023, LPDP menetapkan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan empat Sub-IKU. Sesuai dengan KMK Nomor 300 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dipedomani LPDP dalam menyusun target kinerja, pengisian target kinerja tersebut dapat diukur dengan satuan indeks ataupun persentase. Satu IKU dengan kode IKU 4b-N yaitu Nilai Kinerja Regulasi pada perkembangannya

tidak diimplementasikan di level LPDP karena masih berproses di Biro Umum Kementerian Keuangan, sehingga tidak dapat dilakukan penghitungan nilai (N/A). Namun, berkat kedisiplinan Dewan Direksi dan segenap insan LPDP yang berkarya di dalamnya dalam menjalankan amanat dan tanggung jawab membawa lembaga ini mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 115,63, nilai tersebut meningkat lebih tinggi dari tahun 2022 yang mencapai 114,05, sekaligus lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 105,99.

Nilai Kinerja Organisasi
Tahun 2023

Nilai
Total  115,63

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis (IKU)	Target	Realisasi	Indeks
1a-CP	Tingkat Imbal Hasil Pengelolaan Dana	100%	161,99%	120,00
1b-CP	Indeks Talenta Dan Luaran Riset Yang Berkualitas	4,0	4,63	115,75
1b-1-CP	Indeks Talenta Yang Berkualitas	3,875	4,26	109,86
1b-2-CP	Indeks Luaran Yang Berkualitas	4,25	5,00	117,65
1c-N	Indeks Persepsi Stakeholder Dan Publik LPDP	4,1	4,60	112,20
2a-CP	Tingkat Pemenuhan Kepuasan Publik Atas Layanan LPDP	100	102,22	102,22
2b-N	Tingkat Kecepatan Pemenuhan Layanan LPDP	95%	132,75%	120,00
3a-N	Indeks Capaian Kolaborasi Jejaring Global	100%	120%	120,00
4a-N	Tingkat Kualitas Laporan Keuangan LPDP	4,0	5,0	120,00
4b-N	Nilai Kinerja Regulasi	85%	N/A	N/A
5a-N	Indeks Capaian Program Kegiatan Prioritas LPDP	80%	100%	120,00
5b-N	Tingkat Keandalan Pengelolaan Layanan Pendanaan Riset	100%	120%	120,00
5b-1-N	Tingkat Penyelesaian Kerja Sama Money Beasiswa Dengan Perguruan Tinggi	80%	100%	120,00
5b-2-N	Presentase Tidak Lanjut Hasil Money Perguruan Tinggi Terhadap Penerima Beasiswa	80%	100%	120,00
5c-N	Tingkat Keandalan Pengelolaan Layanan Pendanaan Riset	100%	100%	120,00
6a-CP	Indeks Penguatan Budaya Kemenkeu Satu	100	110,82	110,82
6b-CP	Tingkat Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia LPDP	100	114,12	114,12
7a-N	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	120	120,00
7b-CP	Tingkat Kemandirian BLU	82,50%	100%	120,00
8a-CP	Tingkat Pembangunan Sistem TIK Strategis Sekretariat Jenderal	100%	120%	120,00
8b-N	Presentase Penyelesaian Sistem Informasi Yang Terintegrasi Tahap II	80%	100%	120,00
9a-N	Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi/Audit Internal Dan Eksternal	90%	100%	111,11

Sasaran Strategis

Bapak/ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati.

Dalam pengukuran pencapaian tujuan organisasi, LPDP menerjemahkannya ke dalam sasaran strategis yang merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai LPDP (bersifat *output/outcome*) atau apa yang ingin dilakukan LPDP (bersifat *proses*) dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Sasaran strategis yang ingin dicapai LPDP dikelompokkan dalam empat perspektif:

01 **Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective)**
Dalam perspektif ini, dilihat sejauh mana LPDP memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dari pemangku kepentingan. Hal ini dapat dicapai dengan mengupayakan pencapaian sasaran strategis berupa Pengelola Terbaik Regional.

02 **Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)**
Untuk perspektif dari pelanggan, keberhasilannya adalah mencapai target kualitas berupa indeks kepuasan pengguna layanan program yang telah ditetapkan. Indeks kepuasan pengguna layanan adalah suatu ukuran atas seberapa besar program layanan yang diberikan LPDP dapat memenuhi harapan pengguna.

03 **Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective)**
Dalam perspektif ini, dilihat sejauh mana LPDP mengembangkan serangkaian aktivitas/proses untuk menciptakan dan menyampaikan produk layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan penerima layanan. Serangkaian aktivitas/proses tersebut diterjemahkan dalam beberapa sasaran strategis seperti perencanaan yang andal, pengelolaan beasiswa yang andal, pengelolaan riset yang andal, dan penguatan tata kelola dalam menunjang Layanan LPDP.

04 **Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective)**
Dalam perspektif ini, dilihat sejauh mana LPDP membangun beberapa infrastruktur yang diperlukan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Infrastruktur yang perlu dibangun termasuk sumber daya manusia, peralatan dan keuangan. Di dalam perspektif ini, LPDP menetapkan beberapa sasaran strategis yang mencakup empat infrastruktur tersebut, yaitu SDM yang kompetitif, organisasi sehat yang berkinerja tinggi, otomasi layanan (e-PRIME), dan pelaksanaan anggaran yang optimal.

- SDM yang kompetitif mampu membangun organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu memiliki kepemimpinan yang tepat, memanfaatkan semua informasi yang diterima dengan tepat dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.
- Organisasi yang sehat memenuhi kriteria kondisi internal mencakup unsur: arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, kepemimpinan, inovasi dan pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya, dan iklim.
- Otomasi layanan merupakan upaya LPDP untuk mewujudkan *e-government*. Melalui layanan yang dikelola secara elektronik, diharapkan pelayanan LPDP menjadi lebih efisien, akurat dan dapat dimanfaatkan secara *real-time*.
- Pelaksanaan anggaran yang optimal ditujukan untuk memberikan dukungan keuangan yang efektif bagi tugas-tugas LPDP.

Lebih lanjut, sasaran strategi ini dapat ditetapkan dalam peta strategi berikut. Peta strategi yang merupakan panel instrumen yang menggambarkan keterkaitan dan kontribusi setiap sasaran strategis dalam mendukung sasaran strategis yang lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Peta strategis tersebut diharapkan memudahkan LPDP dalam mengomunikasikan keseluruhan strategi kepada seluruh anggota organisasi. Dengan peta strategi, visi-misi LPDP didefinisikan dengan jelas dan proses manajemen yang lengkap (input/sumber daya, proses internal, dan output/outcome).

Peta Strategis

Perspektif Pemangku Kepentingan

- Menteri Keuangan
- Dewan Penantuan
- Dewan Pengawas
- DPR RI

Kredibilitas LPDP yang Tinggi

Perspektif Pelanggan

- Masyarakat (WNI)
- Kementerian/Lembaga/Pemda
- Perguruan Tinggi
- Lembaga Riset
- Industri

Pengelolaan Investasi dan Layanan yang Andal

Perspektif Proses Internal

Pengelolaan Investasi dan Layanan yang Andal

Talenta/Hasil Riset yang Optimal

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang Optimal

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang Kredibel dan Akuntabel

Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Menatap Tahun 2024

Bapak/libu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati.

Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2023 tercatat sebesar 5,37% (tahun-ke-tahun), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (tahun-ke-tahun). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kuatnya permintaan domestik seiring dengan kenaikan konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta peningkatan investasi, meskipun kinerja ekspor menurun akibat melemahnya perekonomian global dan harga komoditas dunia. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2024. Fokus kebijakan moneter diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk memitigasi dampak ketidakpastian pasar keuangan global.

Berdasarkan kondisi ekonomi makro di atas, APBN tahun 2024 juga diarahkan agar tetap responsif dan fleksibel sebagai penyangga guncangan (shock absorber) untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta melanjutkan pemulihan ekonomi. Namun, pada saat yang sama, APBN juga harus dipastikan tetap sehat dan berkelanjutan.

Pemerintah akan mendukung konsolidasi APBN menuju defisit di bawah 3% pada tahun depan. Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi yang terkendali sebesar 2,8%, nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/Dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7%.

Pagu alokasi anggaran belanja K/L juga akan dijaga agar tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan cara yang lebih efisien, efektif, dan produktif. Sejalan dengan arahan Menteri Keuangan mengenai salah satu fokus APBN untuk meningkatkan produktivitas melalui belanja di sektor SDM dan reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial (bansos), LPDP memiliki peran penting dalam mewujudkan hal tersebut. LPDP akan mengelola investasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan secara optimal dan terukur, guna memberikan manfaat kepada masyarakat serta membantu pemulihan ekonomi melalui pendanaan beasiswa dan riset.

Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024, pada tahun ini pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas dana abadi dengan tambahan sebesar Rp15 triliun. Melalui pengelolaan dana yang berprinsip pada kehati-hatian, portofolio investasi, dan tingkat pengembalian, Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola oleh LPDP diproyeksikan dapat menghasilkan imbal hasil sekitar Rp7,416 triliun. Dana tersebut akan disalurkan untuk seluruh program LPDP, baik yang bersifat native maupun kolaborasi.

Pada tahun 2024, LPDP kembali optimis untuk menjangkir 7.000 anak terbaik bangsa dalam program Beasiswa Native LPDP. Untuk program Beasiswa Kolaborasi bersama Kemendikbudristek, ditargetkan akan ada 10.805 orang penerima beasiswa degree dan 245.340 orang penerima beasiswa non-degree. Sedangkan bersama Kemenag, LPDP menargetkan 835 orang penerima beasiswa degree dan 18.784 orang penerima beasiswa non-degree.

Pada program riset, LPDP terus menyalurkan pendanaan untuk program-program RISPRO, baik yang bersifat native maupun kolaborasi. Proyeksi ambisius dalam perbaikan iklim penelitian dan inovasi bangsa diwujudkan melalui keberpihakan anggaran. Pada tahun 2024, pendanaan RISPRO LPDP ditargetkan untuk disalurkan baik dari DAP maupun DAPL, yaitu:

- **Layanan Riset DAP Rp530.620.786.000**
 - Riset Native LPDP Rp170.620.786.000
 - Riset Kolaborasi (Mandatory) dengan Kemendikbudristek Rp360.000.000.000.
- **Layanan Riset DAPL dengan BRIN Rp326.136.475.000**
 - Skema RIIM Kompetisi Rp253.500.000.000
 - Skema RIIM Pengujian Produk Inovasi Kesehatan Rp3.750.000.000
 - Skema RIIM Ekspedisi Rp16.336.475.000
 - Skema RIIM Start-Up Rp12.400.000.000
 - Skema RIIM Kolaborasi Riset Rp36.000.000.000
 - Skema RIIM Award Rp450.000.000
 - Skema Manajemen Talenta Nasional Rp3.700.000.000
- **Layanan Riset DAPT Rp675.000.000.000**
- **Layanan DAKB Rp337.500.000.000**

Riset yang didanai LPDP akan terus disesuaikan dengan Fokus Riset Prioritas Riset Nasional (PRN) yang diatur pada Permenristekdikti No.38 Tahun 2019 yaitu:

01	Pangan	06	Pertahanan dan Keamanan
02	Energi	07	Kemaritiman
03	Kesehatan	08	Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni, dan Budaya
04	Transportasi	09	Multidisiplin dan Lintas Sektoral
05	Rekayasa Keteknikan		

LPDP juga telah merumuskan beberapa kebijakan umum yang akan dipedomani dalam menghadirkan layanan:

- **Intensifikasi Beasiswa Afirmasi** yaitu peningkatan *awardee* di 96 daerah tertinggal, Peningkatan *awardee* di Provinsi Papua dan Papua Barat dan peningkatan *awardee* Prasejahtera dan Disabilitas, perluasan Beasiswa Co-Funding Kerja Sama dan Targeted; dan pengembangan layanan Student Loan (Bantuan Pinjaman Bunga).
- **Peningkatan kontribusi alumni** yaitu alumni LPDP sebagai *think tank* berupa kelompok keahlian dan program Leadership Enrichment, Attachment, dan Development, yaitu program pendampingan selama masa studi bagi *awardee* LPDP berupa pengayaan *soft skills*, kepedulian pada agenda pembangunan bangsa, dan pengembangan karier.
- **Penajaman Layanan Beasiswa** baik sektor publik maupun sektor privat. Sektor publik antara lain Beasiswa Dokter Spesialis dengan Kementerian Kesehatan dan Beasiswa Dosen/Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi Akademik (PTA) dan Vokasional dengan Kemendikbudristek. Sementara sektor privat berupa Beasiswa Sektor Industri Strategis: Hilirisasi (Mineral, Pertanian, Perikanan/Kelautan), Industri Hijau, dan Industri Digital serta Beasiswa Kewirausahaan di Perguruan Tinggi.
- **Optimalisasi pengelolaan investasi** dalam rangka mendapatkan imbal hasil terbaik agar dapat meningkatkan kapasitas program beasiswa dan pendanaan riset.
- **Pelaksanaan pengelolaan investasi** yang mendukung proyek strategis nasional dan ekosistem keuangan berkelanjutan.
- **Menjaga peran LPDP sebagai fiscal tools.**
- **Optimalisasi pendanaan riset** untuk pengembangan produk/teknologi startup yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau/biru/digital dan pendanaan riset kerja sama industri.

Komposisi Dewan Direksi

Bapak/Ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati.

Sepanjang tahun 2023, belum ada perubahan dalam komposisi Dewan Direksi. Saat ini, LPDP masih dinakhodai oleh:

Andin Hadiyanto

Direktur Utama

Emmanuel Agust Hartono

Direktur Keuangan dan Umum LPDP

Dwi Larso

Direktur Beasiswa LPDP

Penutup

Bapak/Ibu pembaca, para pemangku kepentingan yang kami hormati.

Dengan komitmen menjaga visi pembangunan kualitas SDM bangsa, Direksi beserta seluruh insan LPDP terus merumuskan rencana dan implementasi program yang semakin masif dan inklusif, baik pada aspek jumlah, pendanaan maupun cakupan penerimaannya. Kami juga terus menjamin agar tiap-tiap Rupiah yang dikelola mampu tersalurkan dan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluas-luasnya kalangan masyarakat.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan saya juga mengucapkan terima kasih atas perolehan apresiasi dan pengakuan dari berbagai pihak. Apresiasi dan pengakuan dari berbagai pihak, menambah motivasi semua pihak untuk bekerja lebih keras, sehingga manfaat keberadaan LPDP semakin dapat dirasakan masyarakat.

Muhammad Oriza

Direktur Investasi LPDP

Wisnu Sardjono Soenarso

Direktur Fasilitas Riset LPDP

Jakarta, 03 Januari 2024



Andin Hadiyanto
Direktur Utama LPDP

Kami juga mengakui masih banyak ruang-ruang perbaikan yang perlu dilakukan oleh LPDP, dengan berbagai keterbatasan, kekurangan, dan dinamika yang terjadi, LPDP memerlukan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan. Tantangan akan dapat kita hadapi, peluang akan dapat tercipta, dan keberlanjutan akan terus terjaga. Ibaratkan kita dengan kembang api yang meledak di malam gelap, yang membawa cahaya dan warna yang membedakan keindahan dari kegelapan. Begitu pula, kemajuan yang kita raih di tahun 2023 ini memberi kita gambaran bagaimana terang dan cerahnya masa depan Indonesia.

Selamat merayakan nyala terang kemajuan bangsa!

2.3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN LPDP

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan LPDP Tahun 2023 telah dimuat secara lengkap, dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan LPDP. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 03 Januari 2024



Andin Hadiyanto

Direktur Utama



Emmanuel Agust Hartono

Direktur Keuangan dan Umum LPDP



Dwi Larso

Direktur Beasiswa LPDP



Muhammad Oriza

Direktur Investasi LPDP



Wisnu Sardjono Soenarso

Direktur Fasilitas Riset LPDP



03 Profil LPDP

Kilau Asa untuk Bangsa



Tersusun atas unsur-unsur kimia yang memiliki peran berbeda, kembang api selalu dapat membentuk pola dan warna memukau. Demikian pula LPDP, yang senantiasa mengemban nilai, visi, dan misi mulia, serta menerapkan struktur organisasi yang kokoh demi mendukung mimpi-mimpi anak bangsa.



3.1 Selayang Pandang LPDP

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan satuan kerja noneseton di Kementerian Keuangan yang melaksanakan pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan agar program pendidikan dapat terjamin keberlangsungannya untuk generasi berikutnya. Sebagian program pendidikan seperti pendanaan beasiswa dan riset membutuhkan jaminan pendanaan yang berkesinambungan tiap tahunnya. Dengan skema pendanaan bersumber dari dana abadi, program-program yang bersifat tahun jamak (*multi-years*) akan terjamin keberlangsungannya.

Alokasi dana abadi tiap tahun dalam APBN secara kumulatif akan menambah nilai dana abadi. Pemanfaatan Dana Abadi di Bidang Pendidikan tidak dilakukan dengan skema belanja, melainkan diinvestasikan dan hasil pengembangannya akan digunakan untuk melangsungkan berbagai program pendidikan. Untuk mencapai hasil pengembangan yang optimal, Dana Abadi di Bidang Pendidikan juga diinvestasikan dalam berbagai portofolio investasi dengan tingkat risiko yang terkendali.

Nama lembaga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	Jumlah pegawai 218 pegawai (per 31 Desember 2023)
Tanggal pendirian 30 Januari 2012	Alamat Gedung Danadyaksa Jl. Cikini Raya No. 91 A-D Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
Dasar hukum pembentukan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan LPDP sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum	Telepon 134
Tujuan pendirian Melakukan pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan	Situs web lpdp.kemenkeu.go.id





3.2 Riwayat Singkat

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa sekurang-kurangnya dua puluh persen Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah untuk fungsi pendidikan.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2010 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2010 tentang APBN-P 2010 menyepakati bahwa sebagian dana dari alokasi dana fungsi pendidikan dalam APBN-P tersebut dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) yang dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi (*Endowment Fund*) oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU).

Pada tahun 2011, Menteri Keuangan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyepakati bahwa pengelolaan DPPN dan pemanfaatan hasil pengelolaan dana tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu), namun dengan kelembagaan yang akan didukung pejabat dan pegawai dari kedua kementerian tersebut.

Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 menetapkan Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai sebuah lembaga nongeselon yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP yang terdiri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012, LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU.

Selanjutnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana abadi pendidikan, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan (DAP). Arah kebijakan strategis dalam pengelolaan DAP ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP yang terdiri atas sembilan jajar menteri.

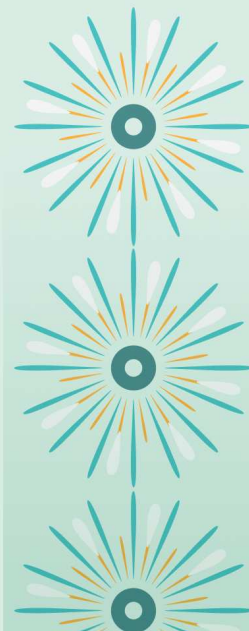
LPDP diberi amanah untuk melakukan pengelolaan dana abadi selain DPPN yaitu Dana Abadi Penelitian (DAPL), Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) dan Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) dengan diterbitkannya Perpres Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan.

Dengan regulasi dimaksud, program-program pemanfaatan dana abadi di bidang pendidikan dilakukan oleh LPDP bekerja sama dengan

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek),
- Kementerian Agama (Kemenag), dan
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pada tahun 2022 LPDP ditetapkan sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dengan kewenangan investasi yang lebih luas. LPDP kini berwenang untuk berinvestasi pada instrumen investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang berbentuk surat berharga maupun nonsurat berharga di dalam dan luar negeri. Imbal hasil investasi dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang mendukung target komitmen LPDP.

Memasuki usianya yang kesebelas di tahun 2023, LPDP terus memainkan peran strategisnya dalam menjaga nyala terang kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kemajuan inovasi bangsa. Semakin bertambahnya jumlah kelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang semakin masif berbanding lurus dengan cakupan penerima manfaat yang semakin masif pula. Pada tahun ini, Dana Abadi di Bidang Pendidikan kembali mendapat tambahan sebesar Rp20 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp139,11 triliun.



3.3 Visi, Misi, dan Nilai-nilai

Semburat cahaya kembang api tak menyalakan dan menggelegar begitu saja, prosesnya tentu diawali dengan proses peluncuran dari titik terendah. Begitu pula dengan perjalanan bangsa ini membangun kemajuan, keberadaan LPDP menyalurkan tiap rupiah yang dihasilkan dari Dana Abadi di Bidang Pendidikan membantu kembang api menapak titik demi titik menuju ketinggian. Keindahan nyala kembang api tersebut ibarat "visi" yang hendak dituju oleh LPDP.



Visi

Menjadi lembaga pengelola dana yang terbaik di tingkat regional untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.



Misi

Visi keindahan kembang api yang menyalakan tentu membutuhkan pemantik, aktor perlu memiliki fokus pada langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mewujudkannya. Ibarat nyala terang kembang api yang tentu membutuhkan bahan bakar dan aksi percikan api, Visi LPDP juga membutuhkan pedoman langkah yang kemudian diterjemahkan dalam Misi LPDP.



Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan.



Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan yang optimal.



Mendorong riset strategis dan/atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset.



Nilai-nilai

Titik tujuan telah terlihat, semburat cahaya indah dari kembang api yang nyata menyala. Aksi-aksi pemantik juga telah siap, kini pertunjukan cahaya tentu akan lebih indah dengan panduan orkestrasi, ibarat warna apa saja yang akan muncul, bentuk apa yang akan tercipta, hingga kapan masing-masing kembang api akan berpadar, terjalin simpul yang mengikat harmoni. Panduan orkestrasi tersebut kemudian LPDP terjemahkan sebagai nilai-nilai, yakni seperangkat panduan yang mampu menumbuhkan pemahaman bersama tentang apa yang penting, menciptakan rasa kohesi, kolaborasi, dan sama-sama produktif untuk satu tujuan yang sama.

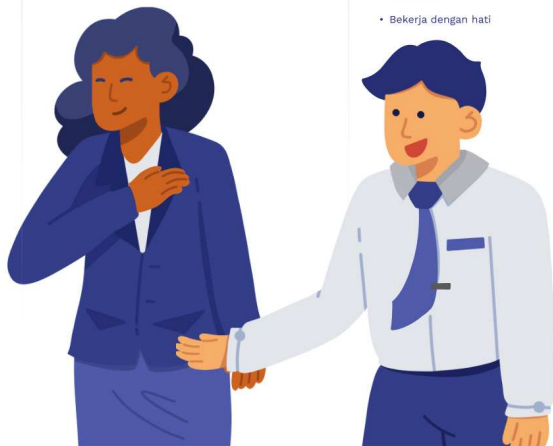
Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, LPDP turut mengadopsi nilai-nilai berikut:



Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Nilai ini terejawantahkan dalam perilaku utama berikut:

- Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya
- Bertindak transparan dan konsisten
- Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
- Bertanggungjawab atas hasil kerja
- Bersikap objektif



Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Nilai ini terejawantahkan dalam perilaku utama berikut:

- Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas
- Memiliki kepercayaan diri yang tinggi
- Bekerja cerdas, cepat, cermat, dan tuntas
- Bekerja dengan hati



Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Nilai ini terejawantahkan dalam perilaku utama berikut:

- Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati
- Berkomunikasi dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan
- Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik
- Berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah



Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Nilai ini terejawantahkan dalam perilaku utama berikut:

- Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*)
- Menghindari arogansi kekuasaan
- Bersikap ramah dan santun
- Bersikap proaktif dan cepat tanggap



Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Nilai ini terejawantahkan dalam perilaku utama berikut:

- Melakukan perbaikan terus menerus
- Berwawasan ke depan dan adaptif
- Mengembangkan inovasi dan kreativitas
- Peduli terhadap lingkungan



3.4 Tugas dan Fungsi

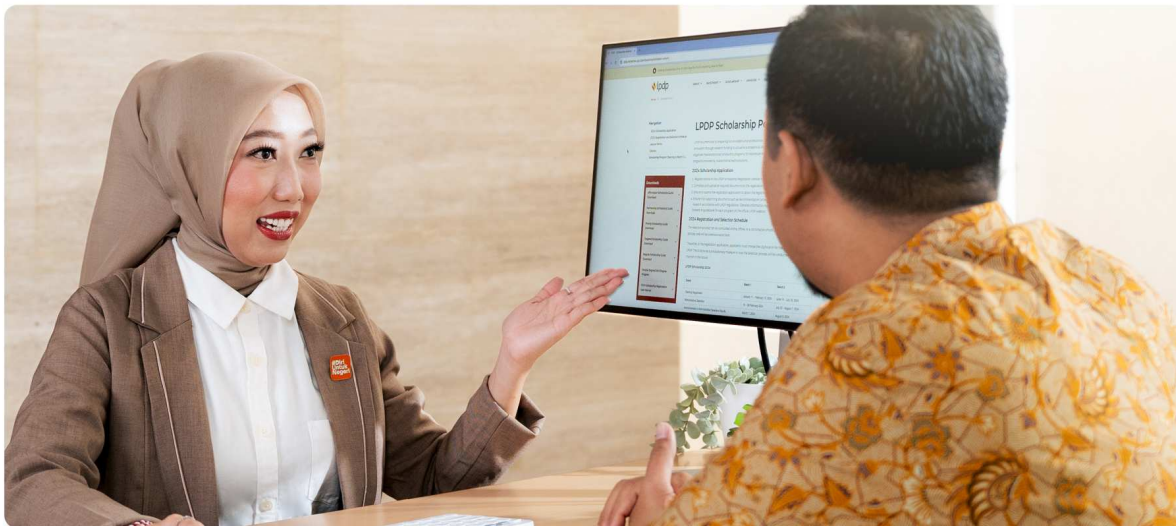
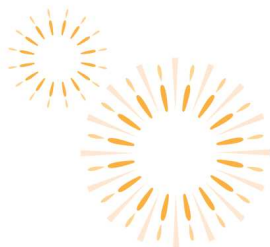
Sebagai sebuah lembaga publik, marwah tugas dan fungsi LPDP telah secara sah dijabarkan dalam PMK nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP. Dalam aturan yang dipedomani tersebut, LPDP bertugas melaksanakan pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Berikut fungsi yang dijalankan LPDP:

- 01 Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan di bidang investasi
- 02 Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan beasiswa
- 03 Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan fasilitas pendanaan riset
- 04 Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LPDP
- 05 Pelaksanaan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas LPDP
- 06 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan

3.5 Layanan

Layanan LPDP secara umum adalah melaksanakan pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dan penyalurannya untuk program beasiswa dan pendanaan riset. Dana Abadi di Bidang Pendidikan berasal dari APBN. Seperti tercermin dalam kata *abadi* dalam namanya, dana tersebut tak bisa digunakan untuk belanja, melainkan harus terlebih dahulu dikelola dalam berbagai instrumen investasi. Hal tersebut tentu menjadi wujud komitmen negara untuk menghadirkan keberpihakan anggaran untuk menjaga nyala terang kemajuan bangsa secara berkelanjutan.



A. Layanan Pengembangan Dana

Pengembangan dana LPDP dilaksanakan melalui dua aktivitas utama:

01 Pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan

Pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan melalui pengembangan dana dengan melaksanakan investasi pada berbagai instrumen untuk mendapatkan nilai tambah yang diharapkan (*expected return*).

02 Pengelolaan Sumber Pendanaan Lain

Pengelolaan sumber pendanaan lain di luar APBN seperti hibah, hasil kerja sama dengan masyarakat, perusahaan, optimalisasi hasil komersialisasi hasil riset dan hasil usaha lainnya.

B. Layanan Penyaluran Dana

Dalam Layanan Penyaluran Dana, dana yang disalurkan merupakan hasil dari pengembangan dana atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dana ini dipakai untuk membiayai beasiswa dan pendanaan riset.

01 Beasiswa

Layanan Beasiswa LPDP tidak hanya akan berada dalam pengelolaan LPDP saja, namun juga berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dan Kemenag.

02 Pendanaan Riset

Pendanaan riset LPDP yang disebut dengan program Riset Inovatif dan Produktif (RISPRO) adalah program pendanaan riset unggulan yang diarahkan pada komersialisasi/implementasi hasil riset sehingga diharapkan dapat memberi nilai tambah dan/atau inovasi.

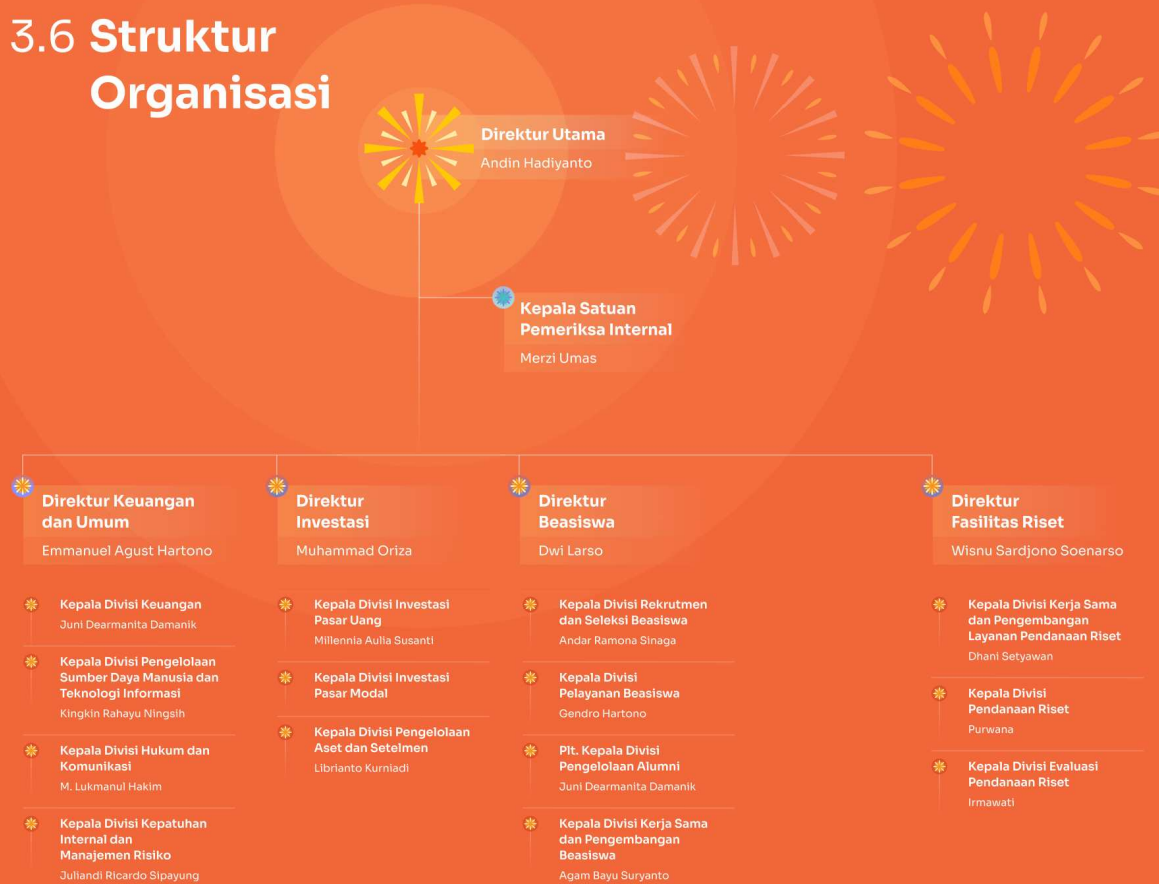
03 Pendanaan Kegiatan Kebudayaan

Pendanaan kegiatan kebudayaan dilakukan pengelolaannya oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan. Pendanaan program ini menggunakan DAKB atau yang juga disebut dengan Dana Indonesiana.

04 Pendanaan Kegiatan Perguruan Tinggi

Pendanaan kegiatan program perguruan tinggi dilakukan pengelolaannya oleh Ditjen Dikti dan perguruan tinggi untuk meningkatkan peringkat kampus menuju *World Class University*. Pendanaan program ini menggunakan DAPL.

3.6 Struktur Organisasi



Struktur organisasi memberikan kerangka kerja yang memungkinkan organisasi berfungsi dengan baik, menyusun strategi, dan mencapai tujuan dengan efisien. Hal ini sangat mirip dengan cara kembang api dirancang dan dikelola untuk menciptakan pertunjukan yang spektakuler. Keduanya, baik dalam struktur organisasi maupun dalam perencanaan kembang api, memerlukan koordinasi yang cermat, pengelolaan risiko, dan kontrol kualitas untuk mencapai hasil yang sukses.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai struktur organisasi LPDP dijabarkan sebagai berikut.

A. Direktorat Keuangan dan Umum

Direktorat Keuangan dan Umum dipimpin oleh Direktur Keuangan dan Umum yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LPDP.

Direktorat Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi berikut:

1. Penyusunan perencanaan rencana strategis dan rencana bisnis dan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan
2. Pengelolaan urusan organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, dan teknologi informasi
3. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik negara
4. Penyusunan peraturan dan pertimbangan hukum serta pengelolaan komunikasi dan layanan informasi
5. Penyusunan pelaksanaan pemantauan kepatuhan internal dan pengelolaan manajemen risiko

Direktorat Keuangan dan Umum terdiri dari empat divisi:

1. **Divisi Keuangan**
Divisi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana bisnis dan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan.
2. **Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi**
Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengelolaan urusan organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara, dan teknologi informasi.

3.7 Profil Dewan Penyantun



Ketua

Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan



Wakil Ketua

**Sri Mulyani
Indrawati**

Menteri
Keuangan



Anggota

**Nadiem Anwar
Makarim**

Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi



Anggota

**Yaqu Cholil
Qoumas**

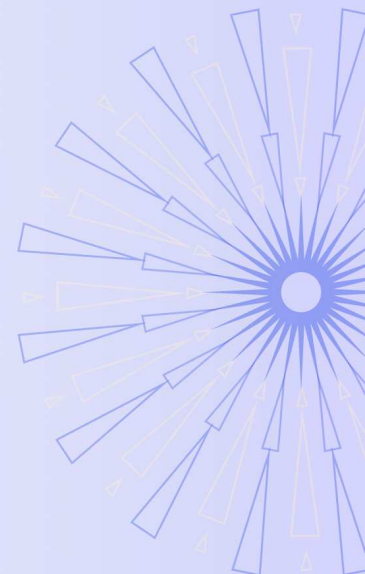
Menteri Agama



Anggota

**Laksana Tri
Handoko**

Kepala Badan Riset
dan Inovasi Nasional



Dalam tata kepengurusan LPDP, terdapat posisi Dewan Penyantun yang bertugas memberikan arahan kebijakan strategis dalam pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Arahan kebijakan strategis Dewan Penyantun menetapkan sekurang-kurangnya

- bidang prioritas pada program layanan;
- kebijakan afirmasi pada program layanan dengan memperhatikan kondisi, wilayah, kelompok masyarakat tertentu dan/atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- proporsi penggunaan hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan;
- pembagian tugas pelaksanaan program layanan oleh kementerian/lembaga teknis dan/atau LPDP; dan
- hal-hal lain yang diusulkan anggota Dewan Penyantun.

Dewan Penyantun terdiri dari lima menteri:

01 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Ketua merangkap Anggota

02 Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota

03 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Anggota

04 Menteri Agama sebagai Anggota

05 Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Anggota

01

Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan



Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang (UNM, dulu IKIP Malang), ia kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan gelar Magister Administrasi Publik (M.A.P.) dan mendapatkan gelar doktor di bidang sosiologi militer dari Universitas Airlangga.

Sebelum terjun ke dunia pemerintahan, Muhadjir Effendy memiliki perjalanan panjang di dunia pendidikan tinggi. Ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selama tiga periode (2000–2016). Karier barunya di pemerintahan dimulai saat ia ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 hingga 2019 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, beliau diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

02

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan



Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D. meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), ia melanjutkan studi magister dan doktoratnya di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat, di bidang ekonomi. Ia pernah menjadi pengajar dan peneliti di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) dan turut berkontribusi dalam pengembangan kurikulum serta penelitian di bidang ekonomi. Sri Mulyani juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF) mewakili 12 negara Asia Tenggara pada tahun 2002–2004.

Sri Mulyani Indrawati pertama kali diangkat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2005 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menjabat hingga tahun 2010 sebelum kemudian menjabat sebagai *Managing Director* dan *Chief Operating Officer* di Bank Dunia (World Bank). Pada tahun 2016, Sri Mulyani kembali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo, dan terus menjabat hingga sekarang. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Dewan Penantuan LPDP, Sri Mulyani memainkan peran strategis dalam memastikan program beasiswa LPDP terus berjalan dan senantiasa memperhatikan kontribusi para alumni beasiswa LPDP.

03

Nadiem Anwar Makarim

Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi



Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. menyelesaikan pendidikan sarjananya di Brown University, Amerika Serikat, dengan gelar Bachelor of Arts di bidang Hubungan Internasional. Beliau kemudian melanjutkan studi magister dan meraih gelar Master of Business Administration (M.B.A.) dari Harvard Business School, Amerika Serikat. Sebelum menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim sukses mendirikan Gojek, sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan transportasi dan berbagai layanan lainnya berbasis aplikasi.

Nadiem Makarim diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2021, kementerian yang ia pimpin mengalami perubahan nama menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan penambahan bidang riset dan teknologi ke dalam portofolionya. Nadiem Makarim memfokuskan upayanya pada transformasi sistem pendidikan di Indonesia melalui berbagai inisiatif inovatif, salah satu program utamanya adalah *Merdeka Belajar*.

04

Yaqut Cholil Qoumas

Menteri Agama



K. H. Yaqut Cholil Qoumas, sering dipanggil Gus Yaqut, menempuh pendidikan tingginya di Universitas Indonesia (UI). Meski demikian, beliau lebih dikenal luas karena perannya dalam organisasi sosial dan keagamaan daripada latar belakang akademiknya. Sebelum menjadi Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU), salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua GP Ansor, organisasi kepemudaan di bawah naungan NU, di mana beliau dikenal atas berbagai inisiatif dan program yang mendukung toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Yaqut Cholil Qoumas diangkat sebagai Menteri Agama oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2020. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama, beliau bertanggung jawab atas berbagai urusan keagamaan di Indonesia, termasuk pendidikan agama dan pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan. Fokus kerjanya dikenal pada penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas pendidikan agama, serta perbaikan manajemen haji dan umrah. Ia mendorong inklusivitas dan toleransi antarumat beragama serta berupaya untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan keagamaan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

05

Laksana Tri Handoko

Kepala Badan Riset dan
Inovasi Nasional



Prof. Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc. menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang Fisika di Universitas Gadjah Mada (UGM). Beliau kemudian melanjutkan pendidikan magister dan doktoratnya di Universitas Hiroshima, Jepang, di bidang Fisika Teori. Sebelum menjabat sebagai Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko ia pernah menjadi peneliti dan dosen di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di mana beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Fisika. Laksana Tri Handoko juga dikenal sebagai salah satu fisikawan terkemuka di Indonesia dengan berbagai publikasi ilmiah di jurnal internasional.

Laksana Tri Handoko diangkat sebagai Kepala BRIN pada tahun 2021. BRIN adalah lembaga baru yang bertanggung jawab atas koordinasi, pengembangan, dan pengelolaan riset dan inovasi di Indonesia. Sebagai Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas riset serta inovasi di Indonesia. Ia mendorong kolaborasi antara berbagai lembaga riset, universitas, dan industri untuk menciptakan ekosistem riset yang lebih baik dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

3.8 Profil Dewan Pengawas



Ketua
Heru Pambudi
Sekretaris Jenderal
Kementerian
Keuangan



Anggota
Suharti
Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan
Teknologi



Anggota
**Rr. Nur Tri Aries
Suestiningtyas**
Sekretaris Utama
Badan Riset dan
Inovasi Nasional



Anggota
Nizar Ali
Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Agama



Anggota
Lincolin Arsyad
Guru Besar Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Universitas Gadjah
Mada

Selain Dewan Penyalutun, terdapat Dewan Pengawas dalam struktur kepengurusan LPDP yang bertugas melakukan pengawasan terhadap

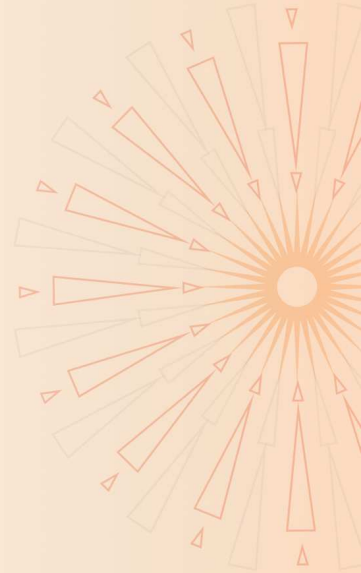
1. pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Direksi;
2. pelaksanaan Rencana Strategi Bisnis (Renstra) yang dilakukan oleh Direksi;
3. pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) oleh Direksi; dan
4. pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Berikut formasi Dewan Pengawas LPDP:

- | | |
|----|---|
| 01 | Satu orang pejabat dari
Kemenkeu sebagai Ketua |
| 02 | Satu orang pejabat dari
Kemendikbudristek |

- | | |
|----|------------------------------------|
| 03 | Satu orang pejabat dari
BRIN |
| 04 | Satu orang pejabat dari
Kemenag |

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 05 | Satu orang dari unsur
tenaga ahli |
|----|--------------------------------------|



01 Heru Pambudi

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan



Lahir di Bondowoso pada tanggal 11 Februari 1970, Heru Pambudi, SE, LL.M. menempuh pendidikan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Indonesia (UI). Gelar Sarjana Ekonomi diraihnya pada tahun 1996. Heru Pambudi melanjutkan pendidikan S2 di University of Newcastle Upon Tyne, Inggris dan mendapatkan gelar Master of Law pada tahun 2001.

Pada tahun 1992, Heru Pambudi mengawali karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana di Kemenku, tepatnya di Direktorat Verifikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II pada tahun 2002, kemudian sebagai Kepala Seksi Impor pada tahun 2003. Pada tahun 2007, Heru Pambudi dipromosikan menjadi Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Tanjung Uban, kemudian tahun 2008 menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kerja Sama Internasional III.

Pada 26 Maret 2010, Heru Pambudi dipromosikan menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Setahun kemudian, ia menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi, dan pada 19 Maret 2015, ia menjadi Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai. Sementara pada 1 Juli 2015, Heru dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal yang dilantik pada 12 Maret 2021.

Atas pengabdian Heru Pambudi hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX tahun.

02 Suharti

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi



Lahir di Lampung, 21 November 1969, Ir. Suharti, M.A., Ph.D. menempuh pendidikan S1 Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga di Institut Teknologi Bandung (ITB) selama periode 1987-1991.

Ia kemudian melanjutkan studi S2 Applied Economics di University of Michigan, Amerika Serikat (1988-1999), dan S3 Demographic and Social Research Institute di Australian National University, Australia (2009-2013).

Suharti mengawali karier di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 1994 sebagai Kepala Subbagian Sarana Akademik pada Bagian Pendidikan Tinggi, Biro Agama, Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga. Suharti juga pernah menjabat sebagai Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bappenas pada 2014.

Di lingkungan Kemendikbudristek, Suharti pernah menjadi Anggota Kelompok Kerja Gender Bidang Pendidikan (2003-2009) dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (2015-2019). Suharti juga tercatat menjabat sejumlah jabatan penting di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti Deputi Gubernur Pengendalian Kependudukan dan Permukiman (2019-2021), Ketua Jakarta Development Collaboration Network (2020-2021), Ketua Bidang Kolaborasi dan Kemitraan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (2020-2021).

Pada 24 Agustus 2021, Suharti dipercaya untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek.

03 Rr. Nur Tri Aries Suestiningtyas

Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional



Sejak 31 Januari 2019, Dra. Rr. Nur Tri Aries Suestiningtyas, MA. menjabat sebagai Sekretaris Utama LIPI, yang pada tahun 2021 melebur ke dalam BRIN. Sebelumnya, Nur menjabat sebagai Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas (BKHH) LIPI sejak 2014. Ia merupakan lulusan sarjana dalam bidang Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 1994.

Nur Tri Aries Suestiningtyas meraih gelar Master of Arts in International Studies dari Griffith University, Australia pada tahun 2010. Ia mengawali kariernya di LIPI sebagai sivitas yang bertugas dalam bidang kerja sama internasional di Biro Kerja Sama Iptek (BK) LIPI pada 1994. Sejak 1999, Nur Tri Aries Suestiningtyas dipercaya sebagai Kepala Subbagian Kerja Sama Bilateral BK LIPI dan kemudian beralih sebagai Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri pada unit kerja yang sama pada 2001. Karirnya kemudian berlanjut sebagai Kepala Bagian Kerja Sama, Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Iptek (BKPI) LIPI sejak 2005.

Pada tahun 2013, Nur Tri Aries Suestiningtyas diangkat menjadi Kepala Bagian Humas BKPI LIPI. Ia naik jabatan menjadi Kepala BKPI LIPI setahun kemudian, hingga jabatan tersebut berubah nama menjadi BKHH LIPI. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman di lembaga penelitian, Nur Tri Aries Suestiningtyas memiliki keterampilan yang mumpuni dalam bidang perencanaan strategis, penerapan, dan evaluasi layanan dan program untuk memajukan sains dan teknologi melalui bidang kerja sama, hukum, dan hubungan masyarakat.

04 Nizar Ali

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama



Lahir di Jepara, 21 Maret 1964, Prof. Dr. KH. Nizar Ali, M. Ag. saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kemenag sejak dilantik pada 20 Oktober 2020. Nizar Ali menempuh pendidikan tinggi hingga mendapat gelar guru besarnya di Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tahun 2015, Nizar Ali mendapatkan amanah untuk menjadi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta dan terakhir menjabat sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, sampai akhirnya Menteri Agama melantiknya menjadi nakhoda baru Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada tanggal 2 Agustus 2017.

05 Lincoln Arsyad

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada



Prof. Lincoln Arsyad M.Sc., Ph.D. adalah ekonom, intelektual, sekaligus akademisi asal Lampung Barat yang menjadi Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Gadjah Mada (UGM). Pendidikan sarjannya ditempuh di Fakultas Ekonomi UGM dengan jurusan Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. Lulus tahun 1984, Lincoln Arsyad kemudian menjadi dosen di Fakultas Ekonomi UGM pada tahun berikutnya.

Memperdalam kelimuan, Lincoln melanjutkan pendidikannya ke University of Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan mendapat gelar M.Sc. dalam bidang Energy Management dua tahun kemudian. Di Indonesia, Lincoln mendapat sejumlah posisi penting baik di lingkungan kampus UGM maupun lembaga pemerintah lainnya. Ia pernah menjadi konsultan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta (1991-1992), Konsultan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Dalam Negeri (1994-1995), Deputi Direktur Bidang Akademik Magister Ekonomika Pembangunan UGM (2004-2005), dan banyak lagi.

3.9 Profil Direksi dan Manajemen

Dalam menjalankan tugasnya menjaga nyala terang kemajuan bangsa melalui manfaat Dana Abadi di Bidang Pendidikan, LPDP dinakhodai oleh seorang Direktur Utama dan empat orang direktur lainnya, yaitu Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Investasi, Direktur Beasiswa, dan Direktur Fasilitas Riset.



Andin Hadiyanto
Direktur Utama

Dwi Larso

Direktur Beasiswa

**Emmanuel
Agust Hartono**

Direktur Keuangan
dan Umum

Muhammad Oriza

Direktur Investasi

**Wisnu Sardjono
Soenarso**

Direktur Fasilitas Riset

Merentang dari Direktur Utama, berikut tugas individu dalam struktur Direksi Manajemen LPDP:

1. Direktur Keuangan dan Umum bertugas memimpin Direktorat Keuangan dan Umum dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan LPDP.
2. Direktur Investasi bertugas memimpin Direktorat Investasi dalam menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang investasi.
3. Direktur Beasiswa bertugas memimpin Direktorat Beasiswa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, monitoring, evaluasi di bidang beasiswa dan pengelolaan alumni.
4. Direktur Fasilitas Riset bertugas memimpin Direktorat Fasilitas Riset dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi pendanaan riset.

01 Andin Hadiyanto

Direktur Utama



Posisi Direktur Utama LPDP saat ini dijabat oleh Andin Hadiyanto, S.E., M.A., Ph.D. Lahir di Wonosobo, 9 Juni 1965, ia mendapatkan gelar Sarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1989, kemudian gelar Master of Arts (1997) dan Doctor of Philosophy (2000) dari Nagoya University, Jepang.

Mengawali karier di Kementerian Keuangan pada 1 Desember 1990, segudang posisi penting pernah diembannya. Tercatat, Andin Hadiyanto pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Kerja Sama Internasional (2009-2011), Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2011-2012), dan Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (2012). Pada tahun 2013, ia mulai menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional dan sempat pula merangkap sebagai Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (2013-2015).

Pada 7 Desember 2018, Andin Hadiyanto kembali dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional setelah sebelumnya menempati posisi sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia (2016-2018). Pada tahun 2019 hingga 2021, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2021, Andin Hadiyanto dipercaya sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta Plt. Direktur Umum LPDP.

Atas pengabdianya hingga saat ini, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya.

02 Dwi Larso

Direktur Beasiswa



Posisi Direktur Beasiswa LPDP saat ini dijabat oleh Ir. Dwi Larso, MSIE, Ph.D. yang berlatar belakang akademisi. Ia menamatkan pendidikan sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1989. Dwi Larso kemudian melanjutkan pendidikan magister Industrial Engineering dan pendidikan doktor Industrial Engineering-Business Administration-Statistic di Oregon State University, Amerika Serikat.

Kariernya dimulai sebagai konsultan dan research associate di Oregon pada tahun 1997. Dwi Larso kemudian menjadi dosen di ITB dan dipercaya sebagai Ketua Program Magister Bisnis Administrasi (MBA) Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB pada 2005. Selama periode 2014-2016, Dwi Larso dipercaya sebagai Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Universitas Kebangsaan. Sepanjang 2017-2020, ia menjabat sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik di Universitas Presiden.

Dwi Larso dilantik sebagai Direktur Beasiswa LPDP pada tanggal 19 Mei 2020.

03 Emmanuel Agust Hartono

Direktur Keuangan
dan Umum



Direktorat Keuangan dan Umum LPDP dijabat oleh Emmanuel Agust Hartono, M.A. Pria yang akrab disapa Agust ini mulai bekerja di Kemenuk sejak tahun 1991. Sebelumnya, Agust Hartono pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Analisis dan Harmonisasi Belanja dan Kekayaan Negara pada Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka), Sekretariat Jenderal Kemenuk sejak tahun 2016 hingga Oktober 2020.

Agust diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Umum secara definitif sejak November 2020.

04 Muhammad Oriza

Direktur Investasi



Direktur Investasi LPDP sejak November 2019, Muhammad Oriza, S.E. memiliki latar belakang praktis di bidang perbankan dan keuangan. Pria yang akrab disapa Ori ini menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1997, kemudian menyelesaikan pendidikan Magister bidang Intelektual di UI.

Selain berkarir sebagai praktis di bidang perbankan, selama periode 1998-2015 Muhammad Oriza juga merupakan profesional di bidang jasa keuangan dan manajemen risiko, baik di dalam dan luar negeri. Ia pernah bekerja di Standard Chartered, CIMB Niaga, Maybank, dan Alimma Bank di Saudi Arabia, di mana ia terlibat dalam proses pendirian bank syariah milik Kerajaan Saudi Arabia tersebut.

Pada tahun 2015, Muhammad Oriza bergabung dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI sebagai *Senior Vice President, Risk Management* dan mengembangkan Direktorat Manajemen Risiko pada lembaga pembiayaan negara di bidang pembangunan infrastruktur tersebut.

05 Wisnu Sardjono Soenarso

Direktur
Fasilitasi Riset



Ir. Wisnu Sardjono Soenarso, M.Eng. menyelesaikan pendidikan Sarjana Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1986 dan melanjutkan pendidikan Mining Engineering di University of South Australia, Australia. Memulai karir di Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada 1987, pada tahun 2000 Wisnu Sardjono Soenarso dipercaya sebagai Kepala Biro Perencanaan Kemenristek.

Pada tahun 2019, Wisnu Sardjono Soenarso diangkat sebagai Dewan Pengawas Universitas Sam Ratulangi. Ia kemudian menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemenristek selama periode 2015-2020.

Pada 19 Mei 2020, Wisnu Sardjono Soenarso dilantik sebagai Direktur Fasilitasi Riset dan Rehabilitasi LPDP.

3.10 Sumber Daya Manusia

Percikan api yang menjaga nyala terang bangsa bersemayam dalam pribadi "Insan LPDP". Mereka yang berkarya di dalam LPDP merupakan orang-orang terpilih yang dalam kesehariannya terus menjadikan inovasi sebagai nafas utama, menghasilkan masing-masing layanan yang semakin tepat sasaran dan memperluas cakupan.

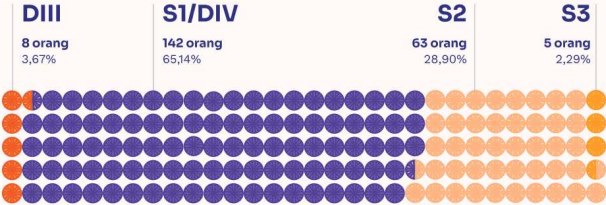
Sampai dengan 31 Desember 2023, total Insan LPDP yang berkarya di dalamnya mencapai 218 orang.



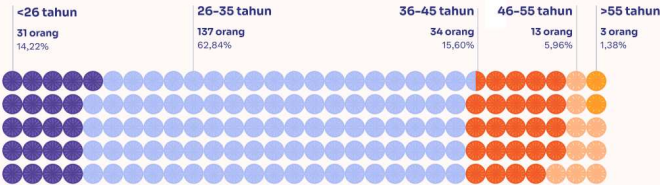
A. Komposisi status pegawai LPDP



B. Demografi pegawai LPDP berdasarkan jenjang pendidikan



C. Demografi pegawai LPDP berdasarkan rentang usia



D. Demografi status pegawai LPDP berdasarkan gender





3.11 Sarana dan Prasarana

Kantor LPDP saat ini berada di Gedung Danadyaksa, Jalan Cikini Raya No 91 A-D, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Gedung tersebut merupakan kerja sama operasional dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Seluruh kegiatan pelayanan umum dan aktivitas perkantoran LPDP diselenggarakan di Gedung Danadyaksa.

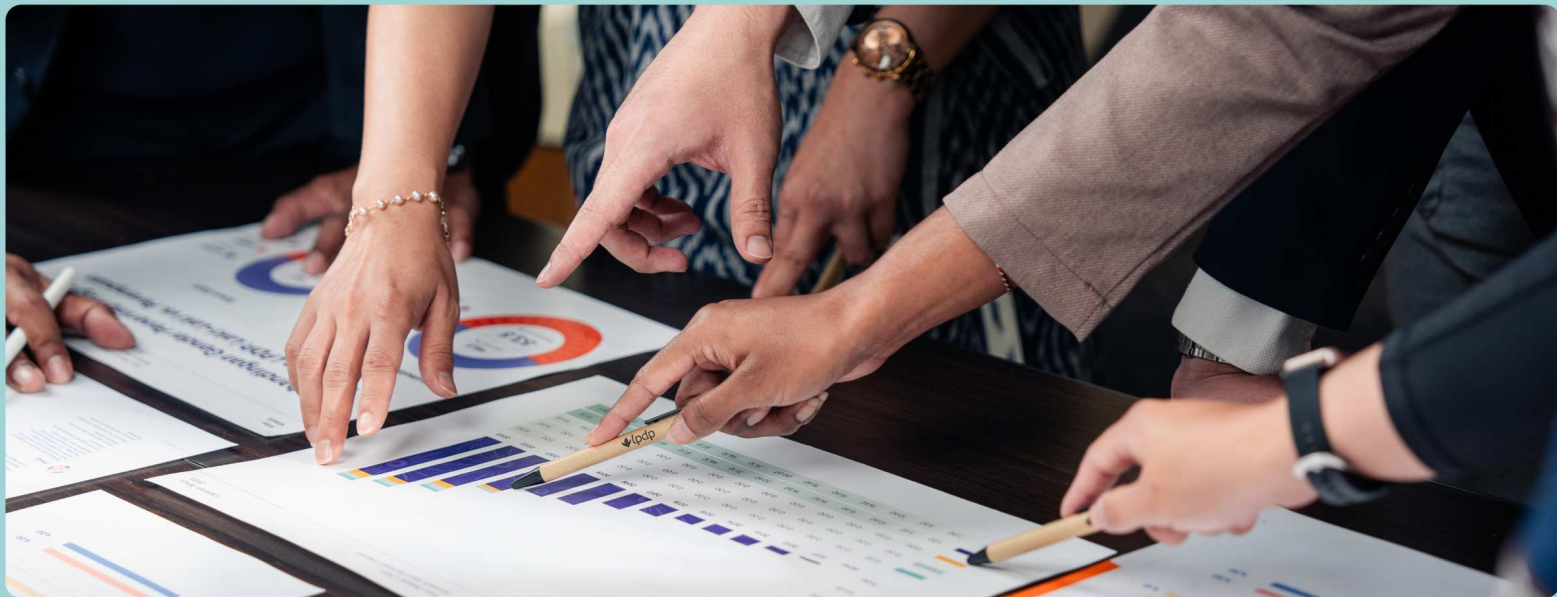
Peralatan dan fasilitas menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan LPDP yang mutlak dibutuhkan. Peralatan dan fasilitas di Gedung Danadyaksa meliputi peralatan, mesin, dan jaringan yang dimanfaatkan untuk menunjang seluruh pekerjaan dan kegiatan operasional. Berbagai alat produksi di LPDP diadakan melalui skema kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dalam Rencana Kebutuhan BMN sesuai dengan KMK Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen

Denyar Karya yang Benderang

Seperti keragaman pola warna dan keteraturan serta konsistensi letusan dari kembang api yang menyinari langit malam, LPDP mengimplementasikan inisiatif yang beragam. Dari beasiswa yang berkesinambungan hingga pendanaan penelitian yang berkelanjutan, semua upaya dijalankan secara konsisten untuk mendukung kemajuan bangsa.





4.1 Tinjauan Umum

A. Kondisi Perekonomian

Sepanjang tahun 2023, kondisi perekonomian dunia berjalan di atas jalan terjal dan tidak menentu, yang tentu turut berpengaruh pada kondisi perekonomian tanah air. Perekonomian global masih melambat pasca-COVID-19. Keadaan semakin tidak menentu dengan memanasnya geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah, serta kesenjangan pertumbuhan antarnegara yang semakin melebar. Hal ini berkontribusi pada dampak signifikan terhadap harga komoditas di pasar global, terutama energi, logam, dan pertanian, penurunan permintaan global, serta pembatasan hubungan diplomatik. Di sisi lain, dampak *scarring effect* memicu gangguan pasokan (*supply disruption*) yang menyebabkan kenaikan inflasi tinggi di beberapa negara.

Inflasi tinggi kemudian disrespon oleh negara-negara maju dengan menaikkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga tersebut di satu sisi menurunkan inflasi seiring dengan menurunnya permintaan agregat, di samping harga komoditas energi yang juga menurun. Tercatat sepanjang 2023, harga gas dibandingkan tahun 2022 turun sebesar 38,8%, minyak mentah 10,3%, dan batu bara bahkan turun hingga 63,8%. Sementara minyak sawit, yang juga merupakan komoditas penting bagi perekonomian Indonesia setelah batu bara, turun 12,3%.

Namun, meskipun inflasi negara-negara maju cenderung menurun utamanya pada paruh kedua 2023, yakni setelah bulan September, bank-bank sentral negara-negara maju masih tetap mempertahankan tingkat suku bunga tinggi. Tingkat inflasi dan suku bunga acuan yang *higher for longer* menyebabkan pelemahan ekonomi dunia. Kondisi tersebut mendorong arus keluar modal yang meningkat dari negara berkembang dan *emerging*. Biaya suku bunga tinggi juga menyebabkan defisit di berbagai negara meningkat tajam. Terbatasnya ruang fiskal negara-negara akibat pandemi menyebabkan berkurangnya kemampuan mengatasi guncangan pascapandemi.

Di samping disrupted rantai pasok dan volatilitas sektor keuangan, gejala lain juga datang dari faktor alam akibat perubahan iklim seperti cuaca ekstrem dan bencana alam, serta disrupted teknologi dan keamanan nasional. Dinamika situasi global tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia cenderung lemah dan tidak merata. Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan sinyal *soft landing*, artinya aktivitas perekonomian menurun tapi tidak terbanting keras. Bahkan perekonomian Amerika cenderung tangguh. Sementara pemulihan ekonomi Tiongkok tertahan dan dihadapkan pada krisis di sektor properti. Negara-negara berkembang dan *emerging* mulai pulih, namun tidak cukup kuat.

Ekonomi Indonesia Tetap Terjaga dan Tumbuh Efektif

Laju Pertumbuhan Ekonomi (% q-to-q atau kuartal-ke-kuartal)



Kuartal ketiga 2023 menjadi tantangan tersendiri bagi nilai tukar Rupiah. Ketidakpastian global dan kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang masih ketat kembali memberikan tekanan pada mata uang. Nilai tukar Rupiah sempat melemah lebih jauh, berada dalam kisaran Rp15.700 hingga Rp16.000 per Dolar AS. Tekanan ini mencerminkan kekuatan Dolar AS yang terus mendominasi pasar valuta asing global, serta kekhawatiran akan dampak dari kebijakan luar negeri yang tidak menentu.

Namun, memasuki kuartal keempat, situasi mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Bank Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memitigasi dampak dari ketidakpastian eksternal. Langkah-langkah tersebut termasuk intervensi di pasar valuta asing dan pengelolaan suku bunga yang berhati-hati. Nilai tukar Rupiah cenderung bergerak dalam kisaran yang lebih stabil menjelang akhir tahun, meskipun masih ada fluktuasi yang dipengaruhi oleh sentimen pasar global dan faktor-faktor domestik.

Industri perbankan Indonesia per Desember 2023 tetap resilien dan berada saing, didukung oleh tingkat profitabilitas (ROA) sebesar 2,74% (November 2023: 2,72%) dan *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 4,81% (November 2023: 4,83%). Tingkat permodalan (*Capital Adequacy Ratio* atau CAR) yang tinggi sebesar 27,65% (November 2023: 27,86%) atau jauh di atas rata-rata CAR negara lain yang berada di bawah 20% menunjukkan bahwa kebijakan prudensial yang konservatif sangat membantu menangani situasi global yang masih ditandai dengan kondisi *VUCA* (*Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity*).

Per Desember 2023, kinerja intermediasi perbankan tetap terjaga dengan pertumbuhan kredit sebesar 10,38% tahun-ke-tahun (November 2023: 9,74 % tahun-ke-tahun) menjadi Rp7,090 triliun. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh kredit investasi sebesar 12,26% tahun-ke-tahun dan kredit modal kerja sebesar 10,05% tahun-ke-tahun. Ditinjau dari kepemilikan bank per Desember 2023, Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan kredit sebesar 12,02% tahun-ke-tahun dan porsi kredit sebesar 45,44% dari total kredit perbankan.



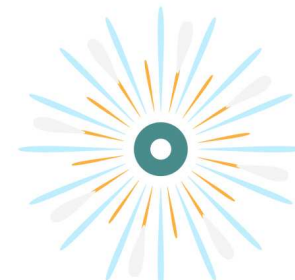
Di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Desember 2023 tercatat 3,73% tahun-ke-tahun (November 2023: 3,04% tahun-ke-tahun) atau menjadi Rp8,458 triliun, dengan giro menjadi kontributor pertumbuhan terbesar yaitu 4,57% tahun-ke-tahun. Likuiditas industri perbankan pada Desember 2023 meningkat dengan rasio-rasio likuiditas jauh di atas level kebutuhan pengawasan. Rasio *Alat Likuid/Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan *Alat Likuid/DPK* (AL/DPK) masing-masing naik menjadi 120,07% (November 2023: 115,73%) dan 28,73% (November 2023: 26,04%), namun tetap jauh di atas ambang batas (*threshold*) masing-masing sebesar 50% dan 10%. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) net perbankan sebesar 0,71% (November 2023: 0,75%) dan NPL gross sebesar 2,19% (November 2023: 2,36%).

Seiring pertumbuhan perekonomian nasional, jumlah kredit restrukturisasi COVID-19 melanjutkan tren penurunan menjadi sebesar Rp265,78 triliun (November 2023: Rp285,32 triliun) atau turun Rp19,53 triliun, dengan jumlah nasabah tercatat sebanyak 1,04 juta nasabah (November 2023: 114 juta nasabah). Menurunnya jumlah kredit restrukturisasi berdampak positif bagi penurunan rasio *Loan at Risk* menjadi 10,94% (November 2023: 11,61%). Adapun jumlah kredit restrukturisasi COVID-19 yang bersifat *targeted* (segmen, sektor, industri dan daerah tertentu yang memerlukan periode restrukturisasi kredit/ pembiayaan tambahan selama satu tahun sampai 31 Maret 2024) adalah 43,32% dari total porsi kredit restrukturisasi COVID-19.

Di sisi risiko pasar, penurunan *yield* (timbal hasil) pada bulan Desember berdampak pada penurunan *unrealized loss* perbankan. Posisi *Devisa Neto* (PDN) perbankan juga mengalami penurunan menjadi sebesar 1,44% (November 2023: 1,58%), masih jauh di bawah *threshold* 20%. Berdasarkan hasil asesmen, industri perbankan tetap resilien dan mampu menyerap potensi risiko di tengah kondisi tersebut. Namun demikian, bank terus melakukan *stress test* pada berbagai skenario untuk menguji ketahanan permodalan maupun likuiditas sesuai dengan prinsip manajemen risiko.

Kinerja perbankan di tanah air semakin membaik dari sisi penyaluran kredit maupun perolehan laba yang tercermin dari laporan bulanan bank-bank besar seperti Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan sektor keuangan tetap stabil hingga akhir tahun 2023, sejalan dengan peningkatan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan. Guna merespon kondisi tersebut maka OJK mengeluarkan tiga arah kebijakan dalam memperkuat sektor jasa keuangan, yaitu terkait penguatan infrastruktur penguatan dan pengawasan terintegrasi, peningkatan daya saing sektor jasa keuangan dan pendalaman pasar keuangan hingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sektor jasa keuangan.

Faktor pendorong pertumbuhan tahun ini adalah program pemulihan ekonomi pascapandemi serta kemampuan sektor perbankan dalam beradaptasi di era normal baru. Tantangan terbesar yang dihadapi perbankan tahun ini adalah inflasi dan suku bunga. Namun, potensi kenaikan suku bunga akan bisa ditekan diprediksi akan memberikan dampak tekanan terhadap pasar perbankan dalam jangka pendek atau kejutan budaya sesaat saja dan akan membaik dalam jangka menengah maupun panjang.



Selain mempertimbangkan kinerja perbankan, proses bisnis pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan juga penting memperhatikan kinerja pasar keuangan. Indeks reksa dana pasar yang menerbitkan kinerja positif sepanjang tahun berjalan dengan kenaikan 41,4% secara *year-to-date* (YTD) pada periode Desember 2023. Disusul, kinerja reksa dana campuran dengan return sebesar 1,37% YTD. Sementara, reksa dana saham terpantau koreksi 2,93% YTD. Berkaca pada *yield* Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di sepanjang 2023, *yield* sempat berada di angka 6,2% tepat pada saat aliran modal asing sebesar Rp4,67 triliun pada Juli 2023. *Yield* yang turun menandakan kenaikan harga SBN, yang mana membuat kinerja reksa dana pendapatan tetap dengan *underlying* SBN ikut naik.

Sementara pada Oktober 2023, terjadi lonjakan *yield* US Treasury tenor 10 tahun sebesar 4,85% pada Jumat (27/10/2023). Lonjakan tersebut berimbas pada *yield* SBN tenor 10 tahun yang pada saat itu sudah tembus 7,37%. Kebijakan pemerintah AS yang menerbitkan utang baru di tengah imbal hasil yang tinggi juga ikut membuat investor beralih ke AS. Melihat imbal hasil US Treasury yang cukup tinggi, maka investor berbondong-bondong membeli obligasi pemerintah AS, meninggalkan obligasi di negara berkembang. Seiring dengan berjalannya waktu, *yield* SBN pun terus menurun. Namun kinerja reksa dana pendapatan tetap masih belum bisa mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 2023.

Hingga akhir Desember 2023, beberapa produk reksa dana masih mampu mencatat *return* yang cukup tinggi, mengalahkan indeks yang menjadi acuan dasar (*underlying asset*), terutama untuk jenis reksa dana saham yang bahkan ada yang mencatat *return* hingga 30% YTD. Namun, secara keseluruhan, kinerja reksa dana saham (*equity fund*) tahun ini tergolong buruk. Keadaan ekonomi global berada pada fase ketidakpastian yang tinggi, memengaruhi kerapuhan, volatilitas ekonomi yang lebih tinggi, konfrontasi geopolitik, dan bencana alam. Meski demikian, reksa dana pasar uang masih menjadi salah satu alternatif bagi pelaku pasar untuk memarkirkan dananya karena memiliki profil risiko yang cenderung rendah.

Dengan potensi kenaikan suku bunga akan BI 7-Day *Reverse Repo Rate* (B7DRR), reksa dana pasar uang dinilai memiliki prospek yang menarik ke depan. Mengingat situasi ekonomi makro yang telah dipaparkan di atas, APBN diarahkan agar tetap responsif dan fleksibel sebagai *shock absorber* untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta melanjutkan pemulihan ekonomi. Di saat yang sama, APBN juga dipastikan tetap sehat dan berkelanjutan. Pemerintah akan mendukung konsolidasi APBN menuju defisit di bawah 3% pada tahun depan. Pagu alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) juga akan dijaga agar tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, namun dengan cara yang lebih efisien, efektif, dan produktif.



Tren pertumbuhan ekonomi yang kian membaik ini merupakan momentum yang perlu terus dijaga, terutama jika Indonesia ingin keluar dari *middle-income trap* dan mendorong laju pertumbuhan kembali ke lintasan prapandemi menuju visi Indonesia Emas 2045. Akselerasi transformasi ekonomi perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai level optimalnya serta menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) menjadi gambaran umum untuk merumuskan desain kebijakan fiskal dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional jangka pendek dan panjang. Pada tahun 2024, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pemerintah dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati angka-angka asumsi makro dan postur awal kebijakan fiskal untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, antara lain kisaran indikator ekonomi makro dalam RAPBN 2024 sebagai berikut:

- ✳ **Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%**
- ✳ **Laju inflasi 2,8%**
- ✳ **Nilai tukar Rupiah Rp15.000/Dolar AS**
- ✳ **Tingkat Bunga SBN 10 tahun 6,7%**
- ✳ **Asumsi harga minyak mentah Indonesia 80 Dolar AS/barel**
- ✳ **Lifting minyak bumi sebesar 625 ribu barel/hari**
- ✳ **Lifting gas sebesar 1,03 juta barel setara minyak/hari**

Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan, yakni penurunan kemiskinan (6,5–7,5%), rasio gini (0,374–0,377), tingkat pengangguran terbuka (5,0–5,7%), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (73,99–74,02), Nilai Tukar Petani (NTP) (105–108), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107–110). Di tahun 2024, APBN terus diperkuat dengan mendorong belanja produktif serta memfasilitasi implementasi reformasi kebijakan struktural.

Sejalan dengan arahan Menteri Keuangan mengenai salah satu fokus APBN untuk meningkatkan produktivitas melalui belanja di sektor sumber daya manusia (SDM) serta reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial atau bansos, LPDP memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Melalui pengelolaan investasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan secara optimal dan terukur, LPDP bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi melalui pendanaan beasiswa dan riset.



B. Kondisi Pendidikan

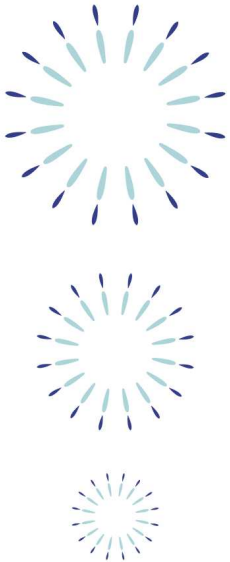
SDM berkualitas adalah modal kemajuan bangsa, dan modal kemajuan bangsa tersebut tak lepas dari investasi pada pendidikan dan kesehatan. Investasi tersebut mencakup kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan individu untuk meningkatkan produktivitas. Saat ini, ekosistem pendidikan menghadapi kondisi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity*). Kondisi ini mendorong lembaga penyelenggara pendidikan tinggi untuk bertransformasi menjadi lebih adaptif dan lincah sebagai respons terhadap tantangan di dunia pendidikan, yang meliputi digitalisasi, akses dan kesetaraan, biaya pendidikan, kualitas pendidikan, penelitian dan inovasi, isu keberlanjutan, mobilitas internasional, serta penyesuaian dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Guna merespons tantangan tersebut, sistem pendidikan harus senantiasa mengeksplorasi berbagai sudut pandang dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi global. Kualitas pendidikan memerlukan partisipasi aktif individu di bidang pendidikan yang dikelola secara profesional oleh institusi pendidikan. Penyiapan SDM unggul melalui penguatan sektor pendidikan akan berdampak positif bagi pembangunan masyarakat yang dinamis, cerdas, dan berakarakter, menuju peradaban yang lebih baik.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB merupakan komitmen global dan nasional. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), TPB mencakup 17 tujuan dan 169 target pembangunan, dengan pendidikan berkualitas sebagai tujuan nomor empat. TPB telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Prioritas Nasional ketiga Pemerintah Indonesia di dalam RPJMN 2020–2024 adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 salah satunya dalam bidang Pembangunan SDM, berikut merupakan penjabaran strategi dan sorotan sasaran di tahun 2024.

Tantangan global untuk mewujudkan TPB mengharuskan negara mengambil peran sentral. Arus globalisasi dan perekonomian dunia yang digerakkan oleh ilmu pengetahuan dan inovasi (*innovation and knowledge-based economy*) menjadi kerangka dalam pemilihan arah pengembangan pendidikan tinggi di setiap negara (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2009). Berikut adalah strategi serta sorotan sasaran untuk tahun 2024.



Strategi dan sorotan sasaran pembangunan SDM tahun 2024

Pembangunan SDM		
Strategi		
Layanan Dasar dan Perlindungan Nasional	Produktivitas	Pembangunan Karakter
1. Tata Kelola Kependudukan 2. Perlindungan Sosial 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Pengantasan Kemiskinan 6. Keluarga Anak, Perempuan, dan Pemuda	1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2. Pendidikan Tinggi 3. IPTEK dan Inovasi 4. Prestasi Olahraga	1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan 3. Moderasi Beragama 4. Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas

Sorotan sasaran 2024		
100% penduduk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran, buku kematian serta penyebab kematian	Indeks Pembangunan Gender (IPG): 91,39	Indeks Capaian Revolusi: 74,3
98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 74,18	Indeks Pembangunan Kebudayaan: 62,7
183 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (KHI)	49,8% angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	Indeks Pembangunan Masyarakat: 0,65
9,18 tahun rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas	66,7% lulusan perguruan tinggi langsung bekerja dalam waktu satu tahun setelah kelulusan	Indeks Kerukunan Umat Beragama: 75,8
40% rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif	40% hasil inovasi prioritas	Nilai Budaya Literasi: 71,0
Indeks Perlindungan Anak: 73,49	Tiga medali emas baik Olympic Games maupun Paralympic Games tahun 2024	Indeks Pembangunan Keluarga: 61,0
Indeks Pembangunan Pemuda: 57,67	50% pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi	Median Usia Kawin Pertama Perempuan: 22,1

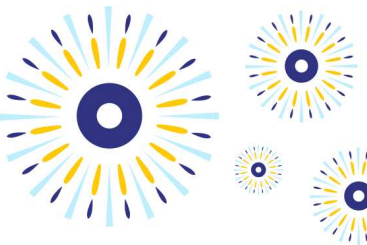
Salah satu penjabaran pembangunan SDM dalam Prioritas Pemerintah adalah berupa “Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas.” Pembangunan pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong peningkatan jumlah SDM Indonesia unggul, yaitu yang berkualitas dan berdaya saing.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir implementasi dari RPJMN 2020–2024, sehingga setiap program dalam RRKP tahun 2024 seyogyanya difokuskan untuk pencapaian target yang terdapat dalam RPJMN 2023–2024, KEM-PPKF dan RKP pada tahun 2024 ini mengangkat tema *Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Seiring dengan tema RKP tahun ini maka pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditujukan untuk merespons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai kebijakan yang akan ditempuh merupakan penguatan atas berbagai kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya agar capaian berbagai indikator pendidikan di masa mendatang dapat terus meningkat untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045.

Berdasarkan hasil pertemuan antara LPDP dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam rangkaian Rapat Kerja LPDP Tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas akan menyusun pembaruan dokumen daftar kebutuhan kritis. Dokumen ini akan memuat prioritas program studi pada pendidikan tinggi yang dibutuhkan di masa depan, respons isu ketidaksesuaian antara permintaan industri dan lulusan perguruan tinggi, serta memetakan Ilmu Sains, Teknologi, Teknik dan Matematika (STEM). Beberapa kalangan juga menambahkan disiplin Seni (Ar) ke dalamnya karena Seni memiliki peran penting dalam berkontribusi terhadap pemecahan masalah pembangunan.

Ke depan, kebijakan bidang pendidikan diarahkan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas melalui perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan. Arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2024 yang selaras dengan Visi dan Misi LPDP adalah peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan, dan penguatan perguruan tinggi.

Program layanan LPDP menjadi salah satu pendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui penyaluran pembiayaan pendidikan melalui Dana Abadi Pendidikan (DAP), Dana Abadi Pemelitian (DAPL), Dana Abadi Kebudayaan (DAKB), dan Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) guna penyalpan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing.



LPDP berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hal ini ditempuh agar mampu mendukung pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas serta memiliki nilai kebermanfaatn yang luas.

Masyarakat yang terkendala finansial untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dapat memperoleh kesempatan dengan mengakses layanan yang disediakan oleh LPDP, dan bagi masyarakat yang memiliki kendala geografis dapat mengakses program beasiswa *Targeted* untuk daerah afirmasi. Program layanan LPDP DAPT bertujuan untuk meningkatkan peringkat kampus di Indonesia menuju *World Class University*. DAP juga dimanfaatkan untuk menyalurkan program Dana Abadi Pesantren yang digunakan untuk program layanan *beasiswa degree* dan *non-degree*, peningkatan kompetensi *degree* dan *non-degree*, pendanaan riset, pendidikan keagamaan dan pesantren. Selain itu LPDP kini menyalurkan DAKB yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan melalui dukungan keikutsertaan dalam pelatihan dan uji kompetensi, penyelenggaraan lokakarya, seminar, dan konferensi, serta peningkatan kapasitas dan kesinambungan organisasi.

Adapun program-program kolaborasi yang telah disebutkan merupakan kolaborasi antara LPDP dengan Kemdikbudristek, Kemenag, dan BRIN yang bertujuan untuk optimalisasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan agar mampu memberikan dampak pada lapisan masyarakat yang lebih luas lagi. Hal ini dilaksanakan demi mencapai target pembangunan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menaruh perhatian tinggi serta meningkatkan komitmennya terhadap sektor pendidikan dengan tujuan untuk menciptakan SDM yang unggul.

C. Perkembangan Riset

Mengacu pada dokumen RJUMN 2020-2024, terdapat arah dan kebijakan strategi ketujuh yang dijelaskan dalam dokumen tersebut, yaitu peningkatan kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta penciptaan inovasi. Berikut sejumlah strategi yang telah dijalankan oleh LPDP:

- a)

Pemanfaatan IPTEK dan inovasi dalam bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk integrasi pelaksanaan riset dengan skema unggulan Prioritas Riset Nasional untuk menghasilkan produk riset dan produk inovasi strategis
- b)

Pengembangan *Research Powerhouse*
- c)

Penciptaan ekosistem inovasi, yang meliputi penguatan kerja sama *triple-helix* (pemerintah, industri, dan akademisi), perbaikan tata kelola paten dan kekayaan intelektual, serta penguatan *Science Techno Park* (STP) utama
- d)

Peningkatan kualitas belanja penelitian dan pengembangan (litbang) melalui koordinasi BRIN, yang didukung oleh peningkatan belanja litbang dari hasil pengembangan Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan inovasi dan inovasi. Ini juga termasuk penguatan pendanaan, fasilitas pendanaan alternatif dari luar pemerintah, dan pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan IPTEK serta inovasi

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang berdaya saing tersebut muncul beberapa kelemahan, antara lain adalah kapasitas dan kompetensi riset, kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan berbasis IPTEK, jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional, dan global, produktivitas dan relevansi litbang nasional untuk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat, pendayagunaan riset dan pengembangan nasional untuk penciptaan nilai tambah pada sumber daya alam.

Kondisi tersebut merupakan implikasi dari rendahnya budaya dan literasi iptek bangsa Indonesia, sehingga tidak jarang muncul beragam fenomena lanjutan seperti diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri, diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset, dan di sisi lain belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa dan dosen; anggaran; dan fasilitas riset). Kondisi ini ditambah dengan belum adanya perencanaan sektor riset jangka panjang yang menjabarkan dari hulu hingga hilir mengenai ekosistem riset di Indonesia.

Kedudukan posisi dan kontribusi riset Indonesia dapat diukur dari publikasi ilmiah yang terindeks secara global dan paten yang terdaftar. Keluaran riset nasional dalam bentuk publikasi yang terindeks secara global dan jumlah paten terdaftar tersedia di berbagai sistem pengindeks global. Berdasarkan peringkat *Global Innovation Index* (GII) yang dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 27 September 2023, Indonesia menempati peringkat 61 dari 132 negara. Ini merupakan kabar gembira karena pada tahun 2022 Indonesia menduduki peringkat 75, yang berarti telah mengalami lompatan peningkatan lebih dari 10 peringkat. Namun, apabila dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, sayangnya Indonesia masih kalah dari Filipina yang menempati peringkat 56, Vietnam pada peringkat 46, Thailand pada peringkat 43, dan Malaysia pada peringkat 36. Oleh karena itu, sektor riset dan inovasi di Indonesia masih perlu terus didukung pengembangannya.

WIPO juga telah menerbitkan *Data Innovation Performance of Different Income Levels* 2023, Indonesia masuk kedalam kategori *performa diatas harapan* untuk level pembangunan (*Performance Above Expectation for Level of Development*) untuk kelompok negara berpendapatan menengah kebawah, hal ini menunjukkan sinyal yang bagus bagi ekosistem riset inovasi Indonesia bahwa performa riset inovasi Indonesia masih diatas rata-rata, akan tetapi harus terus didukung agar mampu meningkatkan peringkat GIi Indonesia untuk tahun-tahun selanjutnya melalui optimalisasi pemanfaatan Dana Abadi di Bidang Pendidikan, DAPT, dan DAPL yang khususnya dikelola oleh LPDP. Menurut SCImago, jurnal dan ranking Indonesia menduduki peringkat ke-39 dari 243 negara, dengan jumlah dokumen 311.467 dan jumlah sitiran mencapai 1.756.261. Berikut merupakan data yang dapat menjelaskan mengenai sebaran dokumen berdasarkan subjek area riset yang telah menembus jurnal internasional.

Sebaran dokumen berdasarkan subjek area riset yang telah menembus jurnal internasional

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ilmu Pertanian dan Biologi	751	877	1.044	1.240	1.543	1.975	2.657	3.230	4.078	4.314	4.818	5.470
Seni dan Humaniora	101	155	231	224	346	378	600	2.127	1.854	1.020	1.177	1.585
Biokimia, Genetika, dan Biologi Molekuler	320	367	424	555	805	963	1.987	1.866	2.609	2.993	3.198	3.485
Binis, Manajemen, dan Akuntansi	159	210	369	592	1.194	1.571	2.111	3.941	3.740	3.524	2.675	2.884
Teknik Kimia	174	197	252	331	572	530	1.164	942	1.399	1.417	1.572	1.784
Kimia	243	285	340	457	720	787	2.153	974	1.265	1.523	1.901	2.055
Ilmu Komputer	615	991	1.295	1.928	2.465	5.858	5.730	7.821	7.215	7.500	8.025	4.758
Ilmu Pengambilan Keputusan	35	43	62	94	355	729	1.346	2.548	2.948	3.218	3.337	1.276
Kedokteran Gigi	13	11	10	15	70	178	241	460	408	405	435	522
Ilmu Bumi dan Planet	307	315	330	435	737	1.387	5.744	6.691	8.039	12.580	5.996	7.463
Ekonomi, Ekonometri, dan Keuangan	98	120	211	445	690	1.042	939	1.099	1.333	1.470	1.440	1.640
Energi	206	217	401	646	644	2.196	2.245	2.602	3.117	3.123	2.895	3.009
Teknik	810	1.305	1.937	2.511	3.743	7.612	9.882	12.458	11.691	6.617	7.592	6.381
Ilmu Lingkungan	435	517	661	884	1.176	2.844	7.097	8.195	10.255	14.739	8.622	10.882
Profesi Kesehatan	21	16	17	37	34	62	86	186	302	609	699	999
Innovologi dan Mikrobiologi	150	158	182	277	270	291	424	389	525	655	772	672
Ilmu Material	210	291	260	449	1.026	2.245	5.323	5.214	5.516	2.547	1.953	2.139
Matematika	251	339	481	680	769	2.428	1.283	2.471	1.806	2.310	2.114	1.698
Kedokteran	655	715	772	1.139	1.401	1.853	3.088	5.297	5.752	7.251	7.669	7.931
Multidisiplin	157	188	185	247	344	280	393	426	700	768	916	1.186
Ilmu Saraf	17	16	21	24	80	59	67	76	140	191	227	285
Keperawatan	37	52	78	125	158	236	399	706	1.045	876	789	982
Farmakologi, Toksikologi, dan Farmasi	119	153	317	429	716	829	1.423	1.319	2.915	1.785	1.921	2.043
Fisika dan Astronomi	315	461	628	966	2.478	5.478	10.828	16.965	16.350	20.309	9.484	14.902
Psikologi	15	35	30	36	45	94	154	241	382	394	560	669
Ilmu Sosial	400	500	697	1.010	1.452	2.843	3.180	6.834	8.023	6.796	7.205	8.287
Kedokteran Hewan	100	112	129	127	163	180	302	464	532	553	599	698

Melansir sumber data dari SCImago per April 2023, total jumlah dokumen jurnal yang telah diterbitkan di Indonesia mencapai 311.467. Bidang-bidang keilmuan yang memberikan kontribusi besar antara lain adalah fisika dan astronomi, teknik, ilmu lingkungan hidup, pertanian dan biologi, kedokteran, ilmu komputer, biokimia, genetika dan biologi molekuler, ilmu sosial, ilmu kebumihuan dan planet, kimia, serta ilmu sosial.

Tentunya, berbicara mengenai sektor riset erat kaitannya dengan institusi pendidikan. Menurut laman resmi www.scimagoir.com per 22 Oktober 2023, terdapat 10 universitas terbaik menurut SCImago Institutions Rankings (SIR) 2023:

1. Universitas Indonesia (peringkat global 1.531)
2. Universitas Gadjah Mada (peringkat global 2.553)
3. Universitas Syiah Kuala (peringkat global 2.887)
4. Universitas Diponegoro (peringkat global 3.013)
5. Universitas Sumatera Utara (peringkat global 3.052)
6. Institut Teknologi Bandung (peringkat global 3.379)
7. Institut Pertanian Bogor (peringkat global 3.382)
8. Universitas Pendidikan Indonesia (peringkat global 3.480)
9. Universitas Lampung (peringkat global 3.694)
10. Universitas Sebelas Maret (peringkat global 3.719)

Riset dan teknologi diakui berperan penting dalam mendorong perekonomian suatu negara. Berbagal teori pertumbuhan ekonomi dan fakta empiris telah membuktikan pentingnya peranan riset terhadap ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peranan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor teknologi dapat menciptakan efisiensi dalam penggunaan modal dan tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Fakta empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung oleh besarnya kontribusi riset dan teknologi yang diperlihatkan oleh produktivitas multifaktor (*Multifactor Productivity* atau MFP).

Sumbangan kegiatan riset terhadap ekonomi juga dapat diidentifikasi dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ketenagakerjaan, dan jumlah perusahaan. Mengingat peran riset terhadap perekonomian semakin signifikan, maka penting bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan kegiatan riset

guna mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, memprioritaskan perkembangan ekosistem riset, sehingga kegiatan riset yang dilakukan dapat berperan sebagai daya ungkit dalam mendorong efisiensi penggunaan modal dan tenaga kerja.

Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan fokus pada kegiatan riset yang terkait dengan sektor-sektor yang memiliki potensi efek pengganda (*multiplier effect*), serta daya ungkit yang besar, karena pembangunan industri nasional memerlukan penguasaan teknologi yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar domestik dan pasar global. Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional.

Prioritas Riset Nasional ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai dokumen sistem perencanaan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, serta Prioritas Utama Nasional (PUNAS) Riset dan RPJMN 2015-2019. Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, penyelenggaraan riset difokuskan pada tujuh bidang PUNAS Riset:

- (1) Ketahanan Pangan
- (2) Energi, Energi Baru dan Terbarukan
- (3) Kesehatan dan Obat
- (4) Transportasi
- (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- (6) Teknologi Pertahanan dan Keamanan
- (7) Material Maju

Pada tahun 2019, Pemerintah membentuk BRIN sebagai lembaga pemerintah nonkementerian. Pada April 2021, BRIN dipisahkan dari Kemdikbudristek dan kini menjadi lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BRIN bertanggung jawab menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi. Pembentukan BRIN diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas riset nasional dan mendorong roda riset Indonesia melalui integrasi dari kegiatan penelitian, sehingga mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 tertulis produk inovasi dan riset prioritas nasional yang dihasilkan mampu menembus angka 40 dan bermanfaat kepada masyarakat. Untuk mewujudkan iklim riset dan inovasi yang kredibel, LPDP berkolaborasi dengan BRIN dalam hal pendanaan program riset.

Berikut adalah arah dan target penelitian dan riset Indonesia yang disampaikan oleh BRIN, yang berfokus pada tiga hal utama:

- * Integrasi sumber daya ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- * Menciptakan ekosistem riset berstandar global, terbuka (inklusif) dan kolaboratif
- * Menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan

Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan riset dan inovasi nasional dapat meningkatkan dampak ekonomi langsung dari aktivitas riset, menjadikan sektor IPTEK sebagai tujuan investasi jangka panjang, serta menarik devisa. Hal ini sejalan dengan arah pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) LPDP, di mana riset-riset yang didanai diharapkan menjadi bagian dari industri dan memberikan kontribusi langsung kepada perekonomian. Tantangan tersendiri bagi LPDP adalah masih minimnya alokasi dana untuk riset dan inovasi, yang mempengaruhi upaya menciptakan ekosistem riset dan inovasi dengan daya saing global.

Melalui pendanaan RISPRO LPDP, riset-riset yang didanai merupakan riset yang diharapkan menjadi bagian dari industri sehingga dapat berkontribusi langsung kepada perekonomian. Selain itu, diperlukan adanya koordinasi yang lebih intensif antara BRIN dan LPDP serta perumusan program dalam membangun ekosistem riset dan inovasi untuk Indonesia yang berdaya saing. Alokasi anggaran riset harus memperhatikan beberapa hal seperti riset harus bisa terukur, baik hasilnya, tema prioritasnya maupun skuntabilitasnya. Peningkatan besaran dan jumlah pendanaan riset oleh LPDP diharapkan dapat mendorong riset terapan untuk menghasilkan penemuan (*invention*) dan inovasi (*innovation*).



- Pemerintah berkomitmen untuk mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, dengan hilirisasi sumber daya alam (SDA) sebagai salah satu strategi utamanya. Untuk mendukung hilirisasi SDA, pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal, antara lain sebagai berikut:
- Pembebasan bea masuk impor untuk peralatan, pembebasan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) untuk mesin dan barang strategis lainnya, tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nol persen, larangan ekspor bahan mentah, dan bea keluar bahan mentah/baku untuk mendukung ketersediaan dan kecukupan bahan baku serta peralatan
 - Pengembangan kawasan khusus, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan belanja K/L untuk mendukung penyediaan infrastruktur serta pemberian fasilitas perpajakan
 - Penjaminan Pemerintah, seperti *government guarantee*, *Viability Gap Fund* (VGF), dan *Project Development Facility* (PDF) untuk mendukung skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KSPBU)

- *Tax holiday* dan *tax allowance*, fasilitas perpajakan, royalti nol persen untuk peningkatan nilai tambah batu bara, pembedaan tarif royalti untuk komoditas mineral, fasilitas ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan perjanjian perdagangan *Free Trade Agreement* (FTA) untuk mendorong investasi dan memperluas akses pasar
 - *Superdeduction* PPh untuk penelitian dan pengembangan serta vokasi, pemanfaatan DAPL, alokasi dana riset melalui K/L, dan alokasi anggaran pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri guna mendorong riset dan pengembangan SDM unggul
- Agar pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) sesuai dengan arah kebijakan RKP Tahun 2024, poin ketiga yaitu revitalisasi industri dan penguatan riset terapan maka harapannya program yang akan didanai di tahun 2024 ke depan sejalan dengan penguatan ekosistem riset sehingga mampu memberikan sumbangsih yang nyata bagi Indonesia.

4.2 Analisis Kinerja Keuangan

A. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Realisasi pendapatan secara nominal sebesar Rp9.333.252.912,056 melebihi target Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp8.014.759.998.000 (116,45%). Capaian ini jauh lebih tinggi sebesar Rp2.947.993.494,565 (46,17%) dari tahun sebelumnya, disebabkan antara lain oleh

Realisasi belanja mencatatkan capaian yang cukup baik yaitu sebesar Rp9.845.263.671,127 atau 98,64% dari target DIPA Rp9.980.943.750.000. Capaian ini lebih tinggi sebesar Rp4.911.110.619,625 (99,53%) dari tahun sebelumnya. Penyerapan yang optimal pada tahun 2023 disebabkan antara lain oleh: bertambahnya jumlah *owardee Program* Beasiswa Native yang berangkat studi, bertambahnya jenis program kolaborasi Kementerian/Lembaga Teknis, dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama program kolaborasi sejak awal tahun sehingga pelaksanaan program dan pencairannya dapat dioptimalkan sepanjang tahun.

- tambahan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp20.000.000.000.000;
- dampak strategi pergeseran deposito ke obligasi negara; dan
- kenaikan suku bunga deposito seiring membaiknya kondisi ekonomi pascapandemi.

Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023

Uraian		2023			2022	
		Catatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara dan Hibah						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1		8.014.759.998.000	9.333.252.912.056	116,45	6.385.259.417.491
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah			8.014.759.998.000	9.333.252.912.056	116,45	6.385.259.417.491
Belanja						
Belanja Barang	B.2.1		9.971.160.476.000	9.837.383.554.259	98,66	4.930.209.479.541
Belanja Modal	B.2.2		9.783.274.000	7.880.116.868	80,55	3.943.571.959
Jumlah Belanja			9.980.943.750.000	9.845.263.671.127	98,64	4.934.153.051.500
Surplus (Defisit) Anggaran	B.3		(1.966.183.752.000)	(512.010.759.071)	26,04	1.451.106.365.991
Pembiayaan	B.4		-	-	0,00	-
Jumlah Pembiayaan			-	-	0,00	-
Selisih Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	B.5		(1.966.183.752.000)	(512.010.759.071)	26,04	1.451.106.365.991

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Saldo Anggaran Lebih awal tahun per 1 Januari 2023 adalah Rp6.461.440.172.948, Sisa Kurang Anggaran tahun berjalan akibat Belanja Negara yang lebih besar dari Pendapatan Negara adalah sebesar -Rp512.010.759.071, sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.949.429.413.877.

Saldo Anggaran Lebih akhir terdiri dari Saldo Anggaran Lebih atas pengelolaan DAP sebesar Rp3.793.424.491.195; DAPL sebesar Rp1.311.302.371.254; DAPT sebesar Rp428.968.628.482; DAKB sebesar Rp380.777.111.589; dan Nondana Abadi sebesar Rp34.956.811.359.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
per 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	C.1	6.461.440.172.948	5.010.333.806.957	1.451.106.365.991	28,96
Penggunaan SAL	C.2				0,00
Sub Total		6.461.440.172.948	5.010.333.806.957	1.451.106.365.991	28,96
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	C.3	(512.010.759.071)	1.451.106.365.991	(1.963.117.125.062)	-135,28
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	C.4	-	-	-	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Setelah Penyesuaian	C.5	(512.010.759.071)	1.451.106.365.991	(1.963.117.125.062)	-135,28
Sub Total		5.949.429.413.877	6.461.440.172.948	(512.010.759.071)	-7,92
Koreksi	C.6	-	-	-	0,00
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	C.7	5.949.429.413.877	6.461.440.172.948	(512.010.759.071)	-7,92



C. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp147.262.569.617.004 yang terdiri dari

- Aset Lancar sebesar Rp8.076.855.758.405;
- Investasi Jangka Panjang sebesar Rp139.141.059.723.631;
- Aset Tetap (Bruto) sebesar Rp7.502.068.952; dan
- Aset Tetap Lainnya (Bruto) sebesar Rp37.152.066.016.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp139.288.908.626.318 dan Rp7.973.660.990.686.

Aset mengalami kenaikan sebesar Rp19.953.336.072.614 (16,67%) dari periode 31 Desember 2022 disebabkan oleh

- kenaikan Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang bersumber dari pencairan alokasi DAP Rp20 triliun tahun 2023 yang di sisi lain menambah saldo Kewajiban Jangka Panjang kepada Badan Usaha Niaga (BUN); serta
- defisit Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun berjalan yang sudah digunakan untuk belanja sehingga menurunkan saldo Ekuitas Dana.

Neraca per 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)	D.1.1.1	3.022.889.508.177	1.834.885.595.496	1.188.003.912.681	64,75
Investasi Jangka Pendek - BLU	D.1.1.2	2.891.155.823.369	4.625.554.577.452	(1.734.398.754.083)	-37,50
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	D.1.1.3	1.357.410.725.985	819.479.415.595	537.931.310.390	65,64
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	D.1.1.4	803.731.693.873	795.987.148.126	7.744.545.747	0,97
Piutang dari Kegiatan Nonoperasional Badan Layanan Umum	D.1.1.5	6.349.402.986	5.462.493.489	886.909.497	16,24
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Nonoperasional BLU	D.1.1.6	(4.782.633.685)	(3.924.579.484)	(858.054.201)	21,86
Persediaan	D.1.1.7	101.237.700	113.974.250	(12.736.550)	-11,17
Jumlah Aset Lancar		8.076.855.758.405	8.077.558.624.924	(702.866.519)	-0,01
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya	D.1.2.1	140.037.133.951.947	119.844.502.324.242	20.192.631.627.705	16,85
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya	D.1.2.2	(896.074.228.316)	(726.513.235.359)	(169.560.992.957)	23,34
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya (Netto)		139.141.059.723.631	119.117.989.088.883	20.023.070.634.748	16,81
Jumlah Investasi Jangka Panjang		139.141.059.723.631	119.117.989.088.883	20.023.070.634.748	16,81

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
ASET TETAP					
	D.1.3	-			
Tanah	D.1.3.1	-	103.873.814.000	(103.873.814.000)	-100,00
Peralatan dan Mesin	D.1.3.2	18.193.453.869	13.487.183.361	4.706.270.508	34,89
Gedung dan Bangunan	D.1.3.3	-	1.929.044.000	(1.929.044.000)	-100,00
Aset Tetap Lainnya	D.1.3.4	25.696.500	25.696.500	-	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.1.3.5	-	120.990.000	(120.990.000)	-100,00
Akumulasi Penyusutan	D.1.3.6	(10.717.081.417)	(9.265.357.153)	(1.451.724.264)	15,67
Jumlah Aset Tetap		7.502.068.952	110.171.370.708	(102.669.301.756)	-93,19
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	D.1.4.1	5.758.094.401	5.758.094.401	-	0,00
Aset Lain-lain pada BLU	D.1.4.2	35.355.980.391	1.000.000.000	34.355.980.391	3.435,60
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	D.1.4.3	(3.962.008.776)	(3.243.574.526)	(718.434.250)	22,15
Jumlah Aset Lainnya		37.152.066.016	2.514.519.875	33.637.546.141	0,00
Jumlah Aset		147.262.569.617.004	127.309.233.604.390	19.953.336.012.614	15,67
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	D.2.1.1	181.208.626.318	80.563.029.523	100.645.596.795	124,93
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		181.208.626.318	80.563.029.523	100.645.596.795	124,93
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	D.2.2.1	139.107.700.000.000	119.107.700.000.000	20.000.000.000.000	16,79
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		139.107.700.000.000	119.107.700.000.000	20.000.000.000.000	16,79
JUMLAH KEWAJIBAN		139.288.908.626.318	119.188.263.029.523	20.100.645.596.795	16,86
EKUITAS DANA					
EKUITAS					
Ekuitas	D.3.1.1	7.973.660.990.686	8.120.970.574.867	(147.309.584.181)	-1,81
Jumlah Ekuitas Dana		7.973.660.990.686	8.120.970.574.867	(147.309.584.181)	-1,81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		147.262.569.617.004	127.309.233.604.390	19.953.336.012.614	15,67

D. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban LO, surplus/defisit dari kegiatan operasional, serta surplus/defisit dari kegiatan non-operasional yang diperlukan untuk penyalan yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.296.514.384.362, yang terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat sebesar Rp9.257.840.738.768 dan Pendapatan BLU Lainnya sebesar Rp38.673.645.594.

Beban Operasional sebesar Rp9.231.601.645.081, yang mencakup seluruh beban akrual dan kas, terdiri dari

- beban layanan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp9.221.560.155.525;
- beban operasional Rp265.024.287.855; beban penyusutan dan amortisasi Rp2.904.997.544;
- beban persediaan Rp61.853.306; beban penyisihan piutang Rp858.054.201; dan
- beban aset ekstrakomptabel Rp52.149.415.

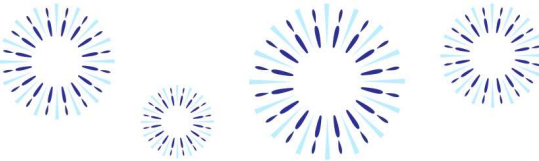
Surplus/(Defisit) – LO untuk 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp133.328.154.027, yang lebih rendah sebesar -Rp1.933.408.978.522 atau -93,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara umum, LO tahun ini mengalami surplus karena secara akrual, pendapatan tahun berjalan melebihi beban tahun berjalan.

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
Pendapatan Operasional	E.1.1				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	E.1.1.1	9.257.840.738.768	6.582.281.065.119	2.675.559.673.649	40,65
Pendapatan BLU Lainnya	E.1.1.2	38.673.645.594	3.150.097.332	35.523.548.262	1.127,70
Jumlah Pendapatan Operasional		9.296.514.384.362	6.585.431.162.451	2.711.083.221.911	41,17
Beban Operasional	E.1.2				
Beban Pegawai	E.1.2.1	73.711.308.072	63.375.788.790	10.335.519.282	16,31
Beban Persediaan	E.1.2.2	61.853.306	144.812.036	(82.958.730)	-57,29



Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Beban Barang dan Jasa	E.1.2.3	9.081.920.010.812	4.455.308.560.872	4.626.611.449.940	103,84
Beban Pemeliharaan	E.1.2.4	619.408.398	527.992.500	91.415.898	17,31
Beban Perjalanan Dinas	E.1.2.5	71.526.012.748	27.611.469.853	43.914.542.895	159,04
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.1.2.6	2.904.997.544	1.906.253.943	998.743.601	52,39
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.1.2.7	858.054.201	(01.089.745)	959.143.946	-948,80
Beban Lain-lain	E.1.2.8	-	-	-	0,00
Jumlah Beban		9.231.601.645.081	4.548.773.788.249	4.682.827.856.832	102,95
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional		64.912.739.281	2.036.657.374.202	(1.971.744.634.921)	-96,81
KEGIATAN NONOPERASIONAL					
Surplus/ (Defisit) Penjualan Aset Nonlancar					
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar	E.2.1	-	68.365.700	(68.365.700)	-100,00
Beban Pelepasan Aset Nonlancar	E.2.1	-	-	-	0,00
Surplus/ (Defisit) Penjualan Aset Nonlancar	E.2.1	-	68.365.700	(68.365.700)	-100,00
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya					
Pendapatan Kegiatan Nonoperasional Lainnya	E.2.2	74.234.531.007	30.011.392.647	44.223.138.360	147,35
Beban Kegiatan Nonoperasional Lainnya	E.2.2	5.819.116.261	-	5.819.116.261	100,00
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lain	E.2.2	68.415.414.746	30.011.392.647	38.404.022.099	127,96
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Nonoperasional	E.2	68.415.414.746	30.079.758.347	38.335.656.399	127,45
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		133.328.154.027	2.066.737.132.549	(1.933.408.978.522)	-93,55
POS LUAR BIASA	E.3	-	-	-	0,00
SURPLUS/ DEFISIT - LO	E.4	133.328.154.027	2.066.737.132.549	(1.933.408.978.522)	-93,55



E. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas dalam tiga jenis aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas entitas pada periode pelaporan.

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar -Rp504.130.642.203. Arus Kas dari Aktivitas Operasi berasal dari arus kas masuk berupa pendapatan Rp9.333.252.912.056 dan arus kas keluar berupa belanja nonmodal Rp9.837.383.554.259. Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebesar -Rp20.007.880.116.868 yang berasal dari arus kas masuk berupa pendapatan arus kas sebesar nihil dan arus kas keluar berupa belanja modal Rp7.880.116.868 dan penempatan investasi Dana Abadi Rp20 triliun.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp20 triliun yang merupakan transaksi penerimaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dari APBN berupa SAP. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp6.461.440.172.948. Kenaikan/Penurunan Kas sebesar -Rp512.010.759.071, dan selisih kurs sebesar -Rp28.101.940 sehingga Saldo Akhir Kas adalah sebesar Rp5.949.401.311.937.

Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi					
Arus Masuk Kas					
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	F.1.1.1	9.250.096.193.021	6.360.547.911.586	2.889.548.281.435	45,43
Pendapatan Lainnya	F.1.1.2	48.201.031.611	24.343.140.205	23.857.891.406	98,01
Pendapatan Hibah	F.1.1.3	34.955.687.424	300.000.000	34.655.687.424	11.551,90
Jumlah Arus Masuk Kas		9.333.252.912.056	6.385.191.051.791	2.948.061.860.265	46,17
Arus Keluar Kas					
Pembayaran Pegawai	F.1.2.1	73.711.308.072	63.375.788.790	10.335.519.282	16,31
Pembayaran Barang	F.1.2.2	30.719.352.868	17.540.259.835	13.179.093.033	75,14
Pembayaran Jasa	F.1.2.3	89.438.396.897	51.826.620.618	37.611.776.279	72,57
Pembayaran Pemeliharaan	F.1.2.4	619.408.398	527.992.500	91.415.898	17,31
Pembayaran Perjalanan Dinas	F.1.2.5	71.931.710.647	27.664.905.853	44.266.804.794	160,01
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	F.1.2.6	9.570.914.260.621	4.769.171.413.857	4.801.742.846.764	100,68
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	F.1.2.7	49.116.756	102.498.088	(53.381.332)	-52,08
Jumlah Arus Keluar Kas		9.837.383.554.259	4.930.209.479.541	4.907.174.074.718	99,53
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		(504.130.642.203)	1.454.981.572.250	(1.959.112.214.453)	-134,65

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenalkan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Arus Masuk Kas					
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	F.2.1	-	68.365.700	(68.365.700)	-100,00
Jumlah Arus Masuk Kas		-	68.365.700	(68.365.700)	-100,00
Arus Keluar Kas					
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	F.2.2				
	F.2.2.1	4.332.081.128	3.688.982.359	643.098.769	17,43
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	F.2.2.2	3.548.035.740	254.589.600	3.293.446.140	1.293,63
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	F.2.2.3	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	-	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		20.007.880.116.868	20.003.875.206.259	3.936.544.909	0,02
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(20.007.830.116.868)	(20.003.875.206.259)	(4.004.910.609)	0,02
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Arus Masuk Kas					
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	F.3.1.1	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	-	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	-	0,00
Arus Keluar Kas					
Jumlah Arus Keluar Kas	F.3.2	-	-	-	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	-	0,00
KENAIKAN (PENURUNAN)	F.4	(512.010.759.071)	1.451.106.365.991	(1.963.117.125.062)	-135,28
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS		(28.101.940)	-	(28.101.940)	-100,00
SALDO AWAL KAS		6.461.440.172.948	5.010.333.806.957	1.451.106.365.991	28,96
SALDO AKHIR KAS	F.6	5.949.401.311.937	6.461.440.172.948	(512.038.861.011)	-7,92
Rincian Saldo Akhir Kas:					
Saldo Akhir Kas pada BLU		3.022.889.508.177	1.834.885.595.496	1.188.003.912.681	64,75
Investasi Jangka Pendek BLU		2.891.155.823.369	4.625.554.577.452	(1.734.398.754.083)	-37,50
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya		35.355.980.391	1.000.000.000	34.355.980.391	3.435,60
Jumlah Rincian Saldo		5.949.401.311.937	6.461.440.172.948	(512.038.861.011)	-7,92



F. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.973.660.990.686, lebih rendah sebesar -Rp147.391.857.481 atau -1,81% dari periode yang sama tahun sebelumnya di antaranya karena defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2023.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenalkan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
EKUITAS AWAL	G.1	8.120.970.574.867	6.061.540.057.465	2.059.430.517.402	33,98
SURPLUS/DEFISIT - LO	G.2	133.328.154.027	2.066.737.132.549	(1.933.408.978.522)	-93,55
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS					
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi	G.3	-	(117.726.700)	117.726.700	100,00
Koreksi Lain-lain	G.3	(172.323.483.393)	(7.188.888.447)	(165.134.594.946)	2.297,08
Jumlah Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	G.3	(172.323.483.393)	(7.306.615.147)	(165.016.868.246)	2.258,46
TRANSAKSI ANTARENTITAS	G.4	(108.314.254.815)	-	(108.314.254.815)	100,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.5	(147.309.584.181)	2.059.430.517.402	(2.206.740.101.583)	-107,15
EKUITAS AKHIR	G.6	7.973.660.990.686	8.120.970.574.867	(147.309.584.181)	-1,81



4.3 Analisis Kinerja Operasional

A. Layanan Investasi Dana Abadi

a. Deskripsi Investasi Dana Abadi yang Dikelola oleh LPDP

LPDP telah mengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai Undang-Undang dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2021 pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa Dana Abadi di Bidang Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja. Dalam Perpres tersebut, Dana Abadi di Bidang Pendidikan terdiri atas

- Dana Abadi Pendidikan atau DAP, (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional atau DPPN),
- Dana Abadi Penelitian atau DAPL,
- Dana Abadi Kebudayaan atau DAKB, dan
- Dana Abadi Perguruan Tinggi atau DAPT.

Akumulasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan naik signifikan dari Rp51,117 triliun di tahun 2019 menjadi Rp139,107 triliun s.d. 31 Desember 2023. Dana Abadi di Bidang Pendidikan pada APBN 2023 dianggarkan Rp20 triliun termasuk di dalamnya terdapat Dana Abadi Pesantren. Pada 27 Maret 2023 dana tersebut telah dicairkan sebesar Rp15 triliun dan pada 7 Desember 2023 telah dicairkan Rp5 triliun dengan rincian sebagai berikut:

- DAP sebesar Rp10 triliun
- DAPL sebesar Rp5 triliun
- DAPT sebesar Rp3 triliun
- DAKB Sebesar Rp2 triliun

Pada masing-masing Dana Abadi di Bidang Pendidikan dibukukan tersendiri sesuai dengan peruntukannya. Rencana pencairan Dana Abadi di Bidang Pendidikan pada tahun 2024 sebesar Rp25 triliun. Adapun rincian realisasi dan proyeksi pencairan Dana Abadi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Angka dalam triliun Rupiah

Uraian	Akumulasi (Rp) (per 1 Januari 2023)	Pencairan (Rp) (per 1 Januari 2023)	Akumulasi (Rp) 31 Desember 2023	Rencana Pencairan (Rp) 2024	Proyeksi (Rp) (31 Desember 2024)
DA Pendidikan	101,117	10,00	111,117	15,00	126,117
DA Penelitian	7,99	5,00	12,99	4,00	16,99
DA Perguruan Tinggi	7,00	3,00	10,00	4,00	14,00
DA Kebudayaan	3,00	2,00	5,00	2,00	7,00
Akumulasi Dana Abadi	119,107	20,00	139,107	25,00	164,107

Akumulasi dana abadi tahun 2023 (Angka dalam triliun Rupiah)



b. Analisis Kinerja Investasi, Termasuk Hasil Investasi dan Imbal Hasil yang Diperoleh

LPDP telah menempatkan Dana Abadi di Bidang Pendidikan pada instrumen investasi dengan risiko terkendali sehingga dapat menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal.

Realisasi PNBP per 31 Desember 2023 adalah Rp9,333 triliun atau 116,45% dari target pendapatan pada DIPA 2023 sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 2023 sebesar Rp8,014 triliun. PNBP yang diperoleh LPDP senantiasa dioptimalkan namun dengan tetap memperhatikan risiko investasi yang terukur dan terkendali. Pada 7 Desember 2023 LPDP telah menerima pencairan tambahan Dana Abadi di Bidang Pendidikan senilai Rp5 triliun. Sesuai strategi investasi LPDP, akan dilakukan pergeseran strategi ke instrumen pasar modal mempertimbangkan peluang dan kondisi ke depan dengan memperhatikan manajemen risiko investasi yang terukur.

LPDP telah melakukan pergeseran strategi dari instrumen deposito ke obligasi sehingga saat ini bauran investasi LPDP terdiri dari deposito sebesar Rp40,232 triliun (27,74%), obligasi negara sebesar Rp102,647 triliun (70,77%), obligasi korporasi sebesar Rp2,261 triliun (1,49%). LPDP memiliki investasi obligasi korporasi pada 12 emiten: PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Danareksa, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Pupuk Indonesia, PT Semen Indonesia, PT Waskita Karya, LPEI (Indonesia Eximbank), PT KAI Persero, dan PT Angkasa Pura II.

Pada saat ini, LPDP sedang menyusun peraturan-peraturan pelaksana terkait Operator Investasi Pemerintah (OIP) agar LPDP dapat lebih agresif dalam berinvestasi guna mencapai imbal hasil yang lebih tinggi. Peraturan ini mencakup pengelolaan investasi dalam denominasi asing dan investasi di jejaring global.

Pelaksanaan strategi investasi jangka panjang LPDP dilakukan dengan melaksanakan peran sebagai alat fiskal melalui investasi pada SBN dan mendukung proyek-proyek strategis nasional melalui pembelian obligasi korporasi serta investasi lainnya.

Akumulasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan per 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar Rp139,107 triliun dan Asset *Under Management* (AUM) per 31 Desember 2023 sebesar Rp145,050 triliun. Guna mencapai imbal hasil tersebut Dana Abadi diinvestasikan ke beberapa portfolio investasi dengan laba optimal namun dengan risiko yang terukur dan terkendali.

AUM atau Total Dana Kelolaan LPDP telah meningkat sejak tahun 2022. Saat ini total AUM LPDP menjadi Rp145,050 triliun yang tersebar pada beberapa instrumen investasi yaitu deposito sebesar Rp40,232 triliun (27,74%), obligasi negara sebesar Rp102,647 triliun (70,77%), dan obligasi korporasi sebesar Rp2,361 triliun (1,49%).

Angka dalam miliar Rupiah

Uraian	Instrumen Investasi				Total Dana Kelolaan (Rp)
	Deposito (Rp)	Obligasi Negara (Rp)	Obligasi Korporasi (Rp)	Kas (Rp)	
Pokok Dana Abadi	34.292,39	102.647,64	2.161,25	-	139.101,28*
Dana Kerja Sama	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20
Imbal Hasil Investasi	5.904,60	0,00	0,00	9,54	5.914,14
	40.232,20	102.647,64	2.161,25	9,54	145.050,62
Grand Total	27,74%	70,77%	1,49%		

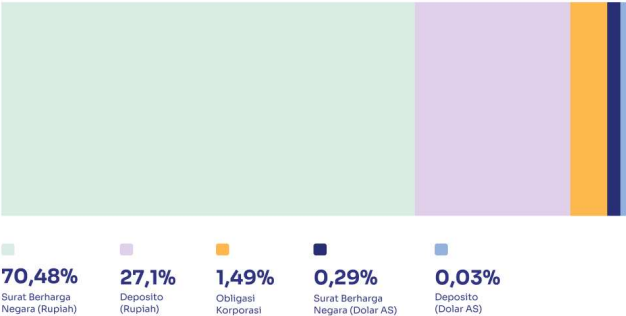
* Terdapat instrumen valas yang dijabarkan dengan Kurs Tengah Bank Indonesia (KTB) per 31 Desember 2023 yaitu Rp15,416.



Per 31 Desember 2023, total *yield* Investasi jangka panjang LPDP mencapai 7,11%, melebihi target Program Kinerja Investasi Pemerintah (PKIP) 2023 yang sebesar 5,94% (rata-rata *yield* SBN-SY, 3 tahun terakhir). Pada tahun 2023, LPDP menerima Dana Hibah dari Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) dengan total nilai kerja sama hibah sebesar Dolar AS 5,43 juta (Rp84 miliar). Pencairan Tahap I sebesar Dolar AS 2,26 juta diterima pada 1 Desember 2023 dan telah ditempatkan pada Instrumen Investasi yang likuid sesuai dengan perjanjian.



Bauran portfolio investasi 31 Desember 2023



c. Strategi Pengelolaan Investasi yang Diterapkan untuk Mencapai Tujuan Jangka Panjang

- Dalam pengelolaan dana yang optimal, LPDP senantiasa menyusun strategi investasi dalam pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan antara lain sebagai berikut:
- Investasi jangka panjang akan dilaksanakan melalui pergeseran ke obligasi negara, obligasi korporasi, *Medium Term Notes* (MTN), dan Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP)
 - Melanjutkan diversifikasi investasi melalui pembelian MTN emiten PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pertamina serta pembelian obligasi *global bond*
 - Membuka peluang investasi pada saham dan reksa dana terkait saham serta titip kelola dana
 - Investasi jangka pendek dengan mengoptimalkan deposito dan instrumen lain, seperti *structured product* perbankan, produk *treasury* perbankan, instrumen fiskal dan instrumen operasi moneter, baik dalam Rupiah maupun valuta asing
 - Pengembangan *e-fund* (sistem terintegrasi dengan aplikasi lainnya pada ekosistem investasi dan keuangan) serta *e-tender* (fitur *seamless offering rate data*)

LPDP turut mengembangkan kerja sama investasi, khususnya kerja sama jejaring global dengan memperluas jaringan dengan lembaga pengelola investasi atau institusi keuangan terkemuka lainnya untuk diversifikasi investasi. Salah satunya adalah eksplorasi potensi kerja sama investasi tiga pihak antara Goldman Sachs/BlackRock, LPDP, dan berkolaborasi dengan Manajer Investasi lokal. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan kerja sama investasi jejaring global.

Strategi lainnya adalah perluasan jejaring dengan lembaga filantropi atau institusi lainnya untuk menghimpun alternatif sumber pendanaan baru/hibah. LPDP akan intensif mengupayakan penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) kerja sama investasi dan jejaring global dengan mitra lain serta melakukan perluasan calon mitra jejaring global. Agar investasi dilakukan dengan lebih hati-hati, LPDP turut menjaga tata kelola investasi dengan penyempurnaan dan persiapan pemenuhan peraturan yang dibutuhkan.



B. Layanan Beasiswa

Hingga Desember 2023, total jumlah penerima beasiswa LPDP adalah sebanyak 45.500 orang yang terdiri dari penerima Beasiswa Umum sebanyak 22.093 orang, Targeted sebanyak 12.029 orang, Afirmasi sebanyak 11.082 orang, dan lainnya (Beasiswa Top Up dan Beasiswa Presiden Republik Indonesia) sebanyak 296 orang.

Selanjutnya, jumlah penerima beasiswa jika dilihat dari program beasiswa dari rentang tahun 2013-2023 adalah sebagai berikut.



Berdasarkan demografi jenis kelamin, 21.228 penerima beasiswa (46,4%) adalah laki-laki, dan 24.372 penerima beasiswa (53,6%) adalah perempuan.

Untuk jenjang studi, 33.251 penerima beasiswa (73,08%) adalah mahasiswa magister, 10.035 penerima beasiswa (22,05%) adalah mahasiswa doktor, dan 2.214 penerima beasiswa (4,87%) adalah mahasiswa spesialis.

Data tren penerimaan beasiswa untuk tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang positif, sebagaimana terlihat dari diagram data sebaran penerima beasiswa LPDP tahun 2013-2023 pada tabel di bawah ini.

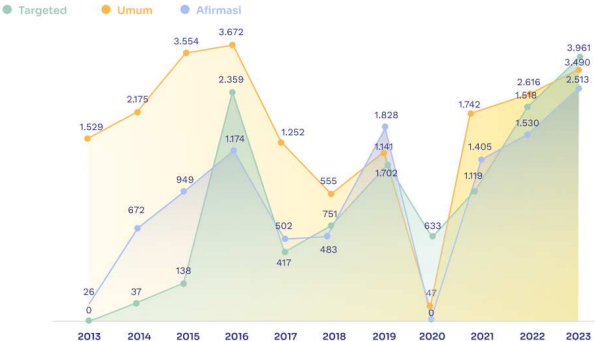
Data sebaran penerima beasiswa LPDP 2013-2023

Penerima beasiswa LPDP berdasarkan tahun lolos seleksi



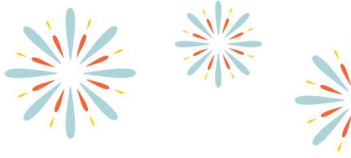
Tahun Lolos Seleksi

Penerima beasiswa LPDP berdasarkan jenis beasiswa



Tahun Lolos Seleksi

Beasiswa Top Up adalah beasiswa yang diberikan kepada warga Indonesia yang menjadi penerima beasiswa negara lain, dengan tujuan menyubsidi dana hidup agar dapat tercukupi, program tersebut berlangsung pada tahun 2014 dan berakhir tahun 2017. Sedangkan pada Beasiswa Presiden Republik Indonesia hanya memberangkatkan satu angkatan pada tahun 2014.



Penerima beasiswa LPDP berdasarkan jenjang studi



Tahun Lolos Seleksi

Penerima beasiswa LPDP berdasarkan tujuan studi



Tahun Lolos Seleksi

a. Layanan Beasiswa Native

Beasiswa LPDP telah secara berkesinambungan mendanai mahasiswa pascasarjana dari masyarakat Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), serta kelompok masyarakat dari daerah afirmasi melalui program Beasiswa Umum, Beasiswa Afirmasi, dan Beasiswa Targeted. Dari tahun 2013 hingga Desember 2023, LPDP telah membiayai 45.500 penerima beasiswa, Rincian akumulasi beasiswa meliputi 21.794 penerima Beasiswa Umum, 12.624 penerima Beasiswa Targeted, dan 11.082 penerima Beasiswa Afirmasi.

Seperti tahun sebelumnya, pendaftaran seleksi beasiswa LPDP tahun 2023 dilakukan dua kali. Seleksi beasiswa tahap 1 diselenggarakan pada Januari hingga Juni 2023, sedangkan seleksi tahap 2 dibuka dari Juni hingga November 2023. LPDP menyelenggarakan seleksi beasiswa dengan skema seleksi daring, yang pada tahun-tahun sebelumnya menerima 680 penerima (2020), 4.266 penerima (2021), dan 5.664 penerima (2022). Per 31 Desember 2023, LPDP telah

menerima 9.964 penerima beasiswa, meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2022.

Beasiswa Afirmasi LPDP meningkatkan inklusivitas pendidikan pascasarjana khususnya untuk keluarga prasejahtera, beasiswa Indonesia Timur, daerah 3T, dan penyandang disabilitas. Berdasarkan statistik penerima beasiswa afirmasi dari tahun 2013 hingga 31 Desember 2023, LPDP telah mendanai 11.082 mahasiswa jenjang magister dan doktor dari masyarakat Indonesia.

Dari seluruh pembiayaan beasiswa, LPDP mewakili penerima beasiswa dari 38 provinsi di Indonesia, termasuk provinsi yang tergolong miskin dan tertinggal. Beasiswa yang disediakan untuk afirmasi meliputi Beasiswa Daerah Afirmasi, Beasiswa Putra Putri Papua, Beasiswa Prasejahtera, dan Beasiswa Penyandang Disabilitas. Ikhtisar penerima beasiswa secara akumulatif hingga Desember 2023 dapat dilihat pada tabel di samping.



Sebaran Layanan Beasiswa LPDP Per 31 Mei 2024	Tahun Lolos Seleksi												Jumlah Total
Jenis Beasiswa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Umum	1.529	2.175	3.564	3.672	1.252	555	1.141	47	1.742	2.616	3.490	21.783	
Beasiswa Reguler	1.008	1.956	3.299	2.987	991	501	947	-	1.649	2.449	3.185	18.972	
Top Up/Tesis/Disertasi	521	219	265	685	261	50	165	-	-	-	-	2.166	
Beasiswa Perguruan Tinggi Utama Dunia	-	-	-	-	-	4	29	47	93	167	156	496	
Beasiswa Parsial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	149	
Targeted Group	-	37	138	2.359	417	751	1.702	633	1.119	1.518	3.961	12.635	
Beasiswa PNS/TNI/POLRI	-	-	-	2.168	353	701	1.588	611	996	1.377	2.059	9.853	
Beasiswa Dokter Spesialis	-	37	138	191	64	50	114	1	-	-	1.551	2.146	
Beasiswa PKU/P	-	-	-	-	-	-	-	-	70	29	167	266	
Beasiswa Kewirausahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	43	31	55	129	
Beasiswa Kerja Sama Metalurgi CSU	-	-	-	-	-	-	-	21	-	43	17	81	
Beasiswa Fellowship	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	
Beasiswa Dokter Subspesialis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	
Beasiswa Kerja Sama Diktristek-LPDP-OKP/StuNed	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	9	34	
Beasiswa Pendidikan Doktor Praktisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	6	29	
Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	
Beasiswa LPDP-NUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Afirmasi	26	672	949	1.174	502	483	1.828	-	1.405	1.530	2.513	11.082	
Beasiswa Prasejahtera	1	245	530	791	314	394	1.300	-	1.090	806	1.105	6.576	
Beasiswa Daerah Afirmasi	25	427	419	383	188	88	513	-	290	480	1.036	3.849	
Beasiswa Putra Putri Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	253	458	
Beasiswa Penyandang Disabilitas	-	-	-	-	-	1	15	-	25	39	119	199	
Jumlah (orang)	1.555	2.884	4.651	7.205	2.171	1.789	4.671	680	4.266	5.664	9.964	45.500	

Pada tahun 2023, sebanyak 9.964 orang lulus seleksi beasiswa LPDP. Dari jumlah tersebut, 5.914 peserta (59,4%) lulus untuk program dalam negeri, sementara 4.050 peserta (40,6%) lulus untuk program luar negeri. Selain itu, LPDP telah melaksanakan pelatihan bagi 722 pewawancara pada tahun yang sama.

LPDP mendanai beasiswa bagi *awardee* yang menempuh studi di perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Adapun 20 perguruan tinggi unggulan luar negeri tujuan beasiswa LPDP adalah sebagai berikut.

Luar negeri

 853 orang The University of Melbourne	 727 orang University College London	 714 orang Wageningen University	 576 orang Monash University
 531 orang The University of Manchester	 414 orang The University of Edinburgh	 385 orang Columbia University	 381 orang The Australian National University
 380 orang University of Glasgow	 364 orang University of Leeds	 362 orang The University of New South Wales (UNSW Australia)	 347 orang The University of Queensland
 329 orang Imperial College London	 328 orang University of Birmingham	 310 orang Delft University of Technology	 285 orang The University of Sydney
 246 orang Leiden University	 224 orang The University of Sheffield	 220 orang University of Groningen	 211 orang The University of Warwick

LPDP akan meningkatkan jumlah *awardee* di negara-negara nonberbahasa Inggris dengan pemberian pengayaan bahasa negara tujuan (contoh: Jerman, Italia, Prancis) untuk mendorong diversifikasi dan optimalisasi anggaran. Selain itu, berikut adalah 22 perguruan tinggi unggul dalam negeri tujuan beasiswa LPDP.



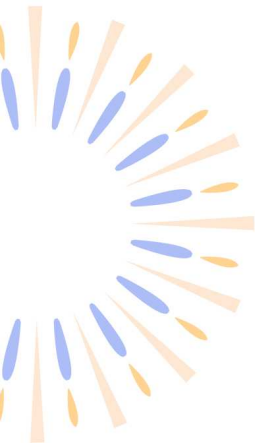
Dalam negeri

 4.846 orang Universitas Gadjah Mada	 3.313 orang Universitas Indonesia	 2.143 orang Institut Teknologi Bandung	 1.408 orang Institut Pertanian Bogor
 1.075 orang Universitas Pendidikan Indonesia	 946 orang Universitas Negeri Yogyakarta	 770 orang Universitas Airlangga	 741 orang Universitas Padjadjaran
 663 orang Universitas Brawijaya	 564 orang Universitas Hasanuddin	 545 orang Universitas Negeri Malang	 498 orang Institut Teknologi Sepuluh Nopember
 416 orang Universitas Diponegoro	 362 orang Universitas Sebelas Maret	 298 orang Universitas Negeri Jakarta	 260 orang Institut PTIQ Jakarta
 206 orang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	 180 orang Universitas Negeri Makassar	 161 orang Universitas Udayana	 128 orang Universitas Negeri Surabaya
 127 orang Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	 120 orang Universitas Negeri Semarang		

Sebaran penerima beasiswa LPDP berdasarkan universitas tujuan kontrak dalam negeri per 31 Desember 2023



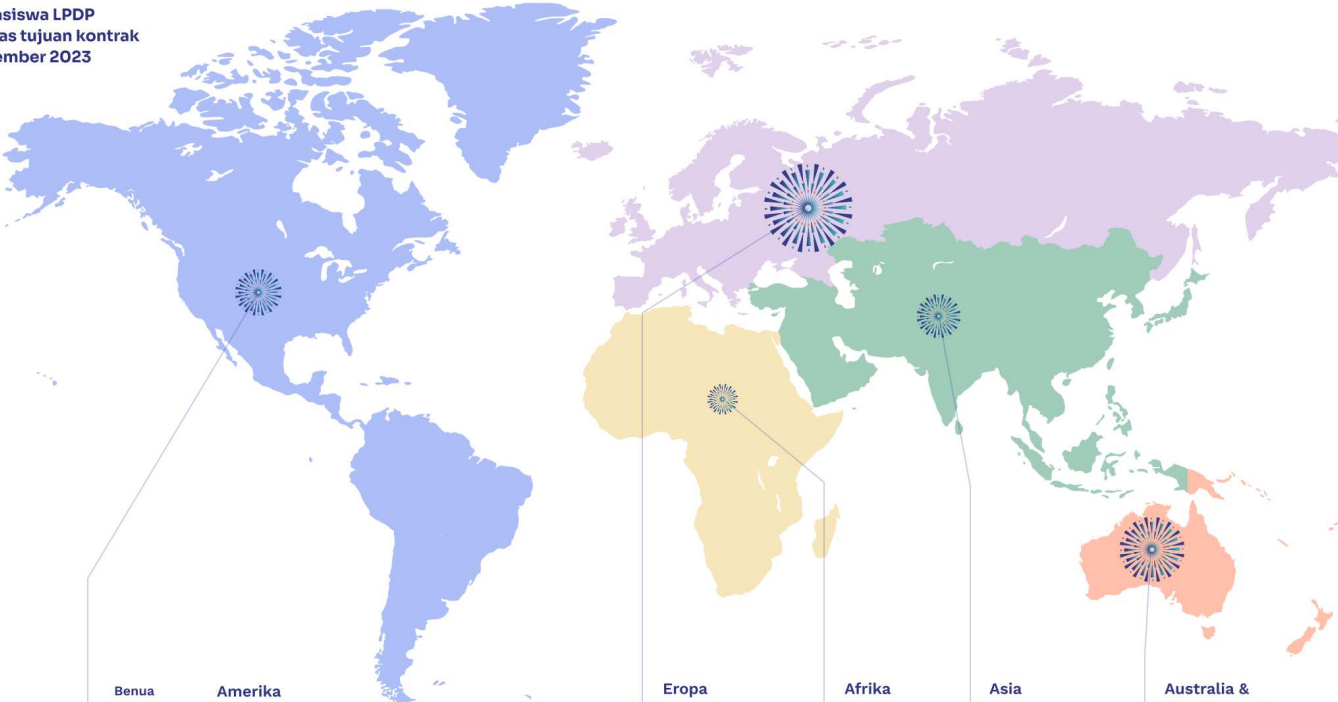
Sebaran penerima beasiswa LPDP
berdasarkan universitas tujuan kontrak
luar negeri per 31 Desember 2023



Total

16.474 orang
penerima beasiswa*

*telah menandatangani surat
pernyataan/kontrak



Benua Amerika

Proporsi **12,82%**

Jumlah Awardee **2.112 orang**

Eropa

56,39%

9.289 orang

Afrika

0,40%

66 orang

Asia

8,01%

1.320 orang

Australia &
Selandia Baru

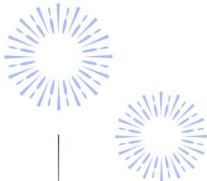
22,38%

3.687 orang

Negara	Total
Amerika	
Amerika Serikat	2.039 orang
Kanada	73 orang
Asia	
Arab Saudi	3 orang
Bangladesh	1 orang
Brunei Darussalam	6 orang
Filipina	7 orang
Hong Kong	12 orang
India	1 orang
Jepang	659 orang
Korea Selatan	97 orang
Malaysia	170 orang
Pakistan	1 orang
Singapura	136 orang
Sri Lanka	2 orang
Taiwan	51 orang
Thailand	48 orang
Tiongkok	104 orang
Turki	9 orang
Yordania	13 orang
Australia & Selandia Baru	
Australia	3.457 orang
Selandia Baru	230 orang
Afrika	
Maroko	14 orang
Mesir	8 orang
Sudan	44 orang
Eropa	
Austria	14 orang
Belanda	2.235 orang
Belgia	93 orang
Ceko	2 orang
Denmark	41 orang
Finlandia	43 orang



Negara	Total
Hungaria	2 orang
Inggris	5.735 orang
Irlandia	35 orang
Islandia	4 orang
Italia	96 orang
Jerman	284 orang
Norwegia	24 orang
Prancis	151 orang
Portugal	1 orang
Rusia	134 orang
Spanyol	31 orang
Swedia	295 orang
Swiss	69 orang



LPDP secara bertahap akan meningkatkan persentase penerima beasiswa di bidang STEM, baik melalui pendanaan penuh maupun co-funding dengan universitas atau negara mitra. Dalam jangka menengah hingga panjang,

program studi STEM akan ditingkatkan menjadi 60% hingga 70%. Saat ini, program studi unggulan yang diambil oleh owordee LPDP terbagi menjadi STEM sebanyak 48% dan non-STEM sebanyak 52%.

II. Informasi Tentang Pengembangan Program Baru dan Inovasi Dalam Pelaksanaan Program

Sampai dengan tahun 2023, LPDP telah melaksanakan beberapa program layanan beasiswa sesuai arahan Dewan Penantuan antara lain sebagai berikut:

NO	STEM	Non-STEM
1	Metalurgi dan Ilmu Material	Ekonomi Sirkular dan Berkelanjutan
2	Bioteknologi	Hukum (termasuk Hukum Siber)
3	Energi Hijau dan Terbarukan	Pendidikan
4	Digital dan TIK	Kebijakan dan Administrasi Publik
5	Pertanian dan Perikanan	Bisnis dan Manajemen
6	Ilmu dan Teknologi Pangan	Seni/Budaya/Bahasa
7	Kedokteran (Spesialis, Subspesialis dan Fellowship)	Psikologi
8	Teknik Biomedis	Perhotelan dan Pariwisata
9	Farmasi	Akuntansi dan Keuangan
10	Kewirausahaan/Startup Teknologi	Studi Agama
11	Teknik dan Desain	Komunikasi
12	Ilmu Data dan Kecerdasan Buatan	Politik dan Hubungan Internasional
13	Ilmu Pengetahuan Alam	Studi Pembangunan
14	Perencanaan Kota dan Infrastruktur	Sosiologi
15	Kelautan dan Geosains	Studi Militer dan Pertahanan

I. Evaluasi Program Pengembangan Kapasitas Bagi Penerima Beasiswa dan Alumni

Jumlah alumni LPDP, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 21.373 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.344 alumni telah mengonfirmasi pelacakan dengan rincian sebagai berikut.



Beasiswa Pendidikan Kader Ulama/Perempuan (PKU/P)

O1 Beasiswa ini merupakan program kerja sama antara LPDP dan Badan Pembinaan Masjid Istiqlal (BPMI), didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang berlangsung selama lima tahun. Pada tahun 2023, untuk tahap satu, terdapat 224 pendaftar, dengan 80 orang dinyatakan lulus seleksi substansi (57 orang untuk magister dan 23 orang untuk doktor).

Pada tahap dua tahun 2023, pendaftar Program Pendidikan Kader Ulama (PKU) berjumlah 193 orang, dengan 66 orang lulus seleksi substansi. Untuk Program PKU/P pada tahap dua tahun 2023, terdapat 47 pendaftar, dengan 21 orang lulus seleksi. LPDP juga menerima arahan dari Ketua Dewan Penantuan agar Perguruan Tinggi Tujuan tidak hanya terbatas pada Perguruan Tinggi Ilmu Quran (PTIQ), tetapi juga dapat mencakup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah Kemenag.

Beasiswa Doktor Praktisi

O2 Beasiswa ini ditujukan untuk dokter di bidang kedokteran guna meningkatkan kapasitas tenaga pengajar dan pembimbing dokter spesialis. Program ini merupakan kombinasi *school* dan *hospital-based* program, bekerja sama dengan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional serta Universitas Airlangga (UNAIR). Program ini menetapkan kuota rekrutmen sebanyak 23 orang yang sedang menempuh studi di UNAIR dan Universitas Indonesia (UI). Pada tahun 2023, terdapat 24 pendaftar, dengan enam orang yang berhasil lulus seleksi substansi.

Beasiswa Dokter Spesialis/Sub Spesialis/Fellowship

O3 Beasiswa ini adalah program kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencakup penempatan lulusan dengan fokus pada spesialisasi kanker, jantung, otak, dan ginjal. Namun, LPDP juga membuka kemungkinan pendanaan untuk spesialisasi lain di luar keempat fokus tersebut. Pada periode 2022-2023, sebanyak 1.551 dokter spesialis dan 44 subspesialis telah lulus dari program ini. Program *fellowship* ini diluncurkan pada 8 Mei 2023 oleh Menteri Kesehatan bersama Menteri Keuangan, untuk tujuan studi di dalam negeri maupun luar negeri.

Beasiswa Kerja Sama Metalurgi CSU 2023

O4 Program Beasiswa Kerja Sama Metalurgi CSU adalah program beasiswa kerja sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemkomarves), LPDP, Central South University China, dan GEM Co., Ltd. Total pendaftar yang lulus seleksi adalah sebanyak 17 orang.

Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU 2023

O5 Beasiswa Kerja Sama Metalurgi NEU adalah program kerja sama antara Kemkomarves, LPDP, Northeastern University (NEU) dan Zhejiang Huayou Cobalt (ZHC) Co. Ltd. Pada dua tahap pendaftaran yang dilakukan, total yang lulus seleksi sebanyak 27 orang.

Beasiswa Kerja Sama LPDP dan UIII

O6 Beasiswa ini membuka program pada jenjang doktor dengan sasaran lulusan magister (S2) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Pada tahun 2024 akan dibuka seleksi untuk program Studi Islam, Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik, dan Ilmu Pendidikan.

Beasiswa Kerja Sama LPDP dan BRIN

O7 Beasiswa ini merupakan hasil kerja sama antara LPDP dan BRIN untuk pengembangan SDM di bidang riset strategis yang dibutuhkan oleh Indonesia. Program ini menawarkan pendanaan penuh oleh LPDP hingga jenjang doktor, dengan nama usulan Program Beasiswa Talenta Riset Nasional untuk Talenta Riset dan Inovasi

Sasaran penerima beasiswa adalah lulusan sarjana (S1) dan magister (S2) WNI, terbuka untuk umum, baik ASN maupun non-ASN. BRIN menguliskan target beasiswa untuk 500 orang lulusan doktor dalam bidang prioritas selama lima tahun dengan rincian sebagai berikut.

- Penerbangan dan Antariksa (Riset Teknologi Satelit dan *Avionics*): 100 orang
- Teknologi Laut Dalam & Maritim (Riset Teknologi Laut Dalam): 30 orang
- Advanced Biodiversity Utilization (Riset Genomic, Omics, Bioinformatika, Rekayasa Genetika): 200 orang
- Radiasi dan Teknologi Nuklir (Riset Teknologi Siklotron dan *Fusion*): 170 orang

Beasiswa Kerja Sama Diktiristek-LPDP-OKP/StuNed 2023

- 08 Beasiswa Diktiristek-LPDP-OKP/StuNed adalah program kerja sama antara Kemendikbudristek, LPDP, dan Nuffic Neso Indonesia. Program ini menawarkan pendanaan beasiswa untuk 22 orang, dengan dukungan bersama dari LPDP dan OKP/StuNed. Beasiswa ini berlaku di beberapa universitas di Belanda. Berikut area prioritas yang dibuka untuk pendaftar:
- Manajemen dan teknologi air
 - Kewirausahaan
 - Ekonomi berkelanjutan dan sirkular, dengan fokus pada pengembangan perkotaan dan pemulihan warisan
 - Perikanan, maritim, dan logistik
 - Keamanan dan penegakan hukum, khususnya keamanan siber
 - Manajemen kesehatan masyarakat

B. Layanan Beasiswa Kolaborasi

I. Program Beasiswa Kolaborasi Kemendikbudristek

LPDP telah mendanai program kolaborasi dengan Kemendikbudristek sejak tahun 2020. Program ini dimulai dengan Kampus Mengajar Perintis (non-degree). Seiring waktu, kolaborasi ini berkembang meliputi berbagai program, baik degree (Diploma, S1, S2, dan S3) maupun non-degree yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi mahasiswa, siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dosen, guru, dan tenaga kependidikan. Ini termasuk dukungan untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).



LPDP senantiasa terus mendukung program beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbudristek seperti program Kampus Merdeka, Indonesia International Student Mobility Award (IISMA), Afirmasi Pendidikan Indonesia Kampus (ADIK), Garuda Ace, Asrama Mahasiswa Nusantara, dan lain-lain. Sejak 2020 hingga Desember 2023, LPDP telah berkolaborasi dengan Kemendikbudristek untuk membiayai program penerima beasiswa program degree dan 415.596 orang penerima beasiswa non-degree. Adapun rincian jumlah penerima beasiswa yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) 2023 telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jumlah alokasi anggaran untuk program kolaborasi LPDP dengan Kemendikbudristek tahun 2023 adalah sebesar Rp4,649 miliar. Realisasi penerima beasiswa kolaborasi LPDP dengan Kemendikbudristek pada tahun 2022 dan tahun 2023 per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.



Rincian progres program kolaborasi LPDP dengan Kemendikbudristek per Desember 2023 adalah sebagai berikut.

a. Program Degree

Dengan total target 17.244 orang atau sasaran, capaian saat ini adalah 14.883 orang. Belum tercapainya target tersebut disebabkan karena beberapa program belum selesai masa seleksinya. Beberapa program degree LPDP dapat diamati pada tabel di bawah ini.

NO	Nama Program	Target (orang)	Capaian (orang)	Progres
1	Beasiswa Pendidikan Indonesia	6.440	6.020	Pelaksanaan
a	Beasiswa Dalam Negeri S1, S2, dan S3	6.021	5.719	Pelaksanaan
b	Beasiswa Luar Negeri S2 dan S3	419	301	Pelaksanaan
2	Beasiswa Indonesia Maju	1.457	645	Pelaksanaan
a	Beasiswa Dalam Negeri S1 dan S2	959	287	Pelaksanaan
b	Beasiswa Luar Negeri S2 dan S3	498	358	Pelaksanaan
3	Asrama Mahasiswa Nusantara	528	27	Pelaksanaan
4	Stipendium Hungaricum	230	162	Seleksi
5	Bantuan Disertasi	300	-	Seleksi
6	Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	7.846	7.569	Ongoing
7	Kemitraan Negara Berkembang	443	451	Seleksi
Total		17.244	21.539	

Program degree kolaborasi dengan Kemendikbudristek sampai dengan Desember 2023 sudah dalam pelaksanaan. Adapun yang masih dalam masa pembiayaan adalah program ADIK.

b. Program Non-Degree

Dengan total target 304.905 orang atau sasaran, capaian saat ini adalah 301.079 orang. Beberapa program *non-degree* adalah sebagai berikut.

NO	Nama Program	Target (orang)	Capaian (orang)	Progres
1	Dharmasiswa	282	281	Pelaksanaan
2	Microcredential Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	450	172	Pelaksanaan
3	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	168.336	165.668	Pelaksanaan
4	Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB)	66.288	62.709	Pelaksanaan
5	Wirausaha Merdeka	12.000	12.393	Pelaksanaan
6	Indonesia International Mobility Awards (IISMA)	1.825	1.984	Pelaksanaan
7	Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM)	15.505	15.286	Pelaksanaan
8	Kampus Mengajar	19.110	21.409	Pelaksanaan
9	Bridging Course Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik (PTA)	50	216	Selesai
10	Praktisi Mengajar	14.130	14.838	Pelaksanaan
11	Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perguruan Tinggi	60	60	Pelaksanaan
12	Kemitraan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan guru	50	300	Pelaksanaan
13	Detasering	50	35	Pelaksanaan
14	Program Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME) Nusantara	29	29	Pelaksanaan
15	Post Doctoral	15	12	Pelaksanaan
16	Sertikom Dosen Tendik	220	100	Pelaksanaan
17	World Class Professor (WCP)	40	40	Pelaksanaan
18	Bridging Course Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik (PTA)	25	16	Pelaksanaan
19	Garuda Ace	20	48	Persiapan teknis
20	Magang Dosen ke Industri Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik (PTA)	225	55	Pelaksanaan
21	Pelatihan dan Sertifikasi Profesi DN	185	185	Pelaksanaan
22	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Luar Negeri	47	47	Pelaksanaan
23	Magang Dosen ke Industri Dalam Negeri Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV)	56	55	Pelaksanaan
24	Sertifikasi Profesi Luar Negeri	46	46	Pelaksanaan
25	Magang Dosen ke Perguruan Tinggi Lain Luar Negeri	50	51	Pelaksanaan
26	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Dalam Negeri	400	400	Pelaksanaan
27	Uji Kompetensi Mahasiswa	4.500	4.570	Proses Penetapan Awardee
28	Magang/Residensi/Diklat Pelaku Budaya Dalam Negeri & Luar Negeri	101	74	Pelaksanaan
Total		304.905	301.079	

II. Program Beasiswa Kolaborasi Kementerian Agama

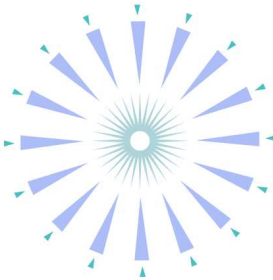
Salah satu program beasiswa kolaborasi LPDP dengan Kemenag adalah Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB). Untuk realisasi tahun 2023, jumlah penerima beasiswa untuk program *degree* (seperti Beasiswa 5.000 Doktor Luar Negeri, Beasiswa Umum S1/S2/S3 dalam dan/atau luar negeri, dan lain-lain) mencapai 3.393 orang dari target 5.335 orang. Sedangkan jumlah penerima beasiswa untuk program *non-degree* (seperti MORA Overseas Student Mobility Awards atau MOSMA, Program Persiapan Studi Lanjut S1/S2/S3, Language and Academic Preparation Program, dan lainnya) adalah 7.077 orang dari target 11.615 orang.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) 2023 telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jumlah alokasi anggaran untuk program kolaborasi LPDP dan Kemenag pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.338 miliar, termasuk alokasi untuk pesantren. Hingga Desember 2023, LPDP terus berkoordinasi dengan Kemenag untuk merealisasikan program *degree* yang ditargetkan. Realisasi penerima Beasiswa Kolaborasi LPDP dengan Kemenag untuk tahun 2022 dan 2023 per Desember 2023 adalah sebagai berikut.

CapaianTarget

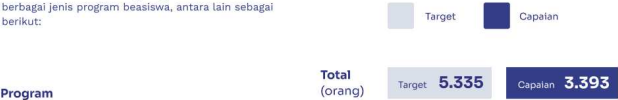


Pada program Beasiswa Kolaborasi dengan Kemenag tahun 2023, program beasiswa *non-degree* untuk pesantren masih dalam tahap persiapan oleh Kemenag. Sementara itu, untuk beasiswa *degree* pesantren, yang selanjutnya disebut Program Beasiswa Santri Berprestasi, terdiri dari dua kategori, yaitu Beasiswa Santri Berprestasi Jenjang S1 dan Beasiswa Santri Berprestasi Jenjang S2. Rincian program kolaborasi LPDP dengan Kemenag pada tahun 2023 dapat diamati di halaman berikutnya.

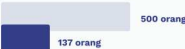


a. Program Degree

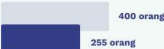
Dengan total target 5.335 orang atau sasaran, capaian saat ini adalah 3.393 orang. Target tersebut meliputi berbagai jenis program beasiswa, antara lain sebagai berikut:



Beasiswa Umum S1 Dalam Negeri



Beasiswa Umum S2 Dalam Negeri



Beasiswa Umum S2 Luar Negeri



Beasiswa Umum S3 Dalam Negeri



Beasiswa Umum S3 Luar Negeri



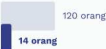
Beasiswa Prestasi S1 Dalam Negeri



Beasiswa Prestasi S1 Luar Negeri



Beasiswa Double Degree S2 Luar Negeri



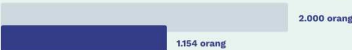
Program Magister Lanjut Doktor (PMLD) Dalam Negeri



Beasiswa Tahfidz S1 Dalam Negeri



Beasiswa S1 Pendidikan Jarak Jauh - Pendidikan Agama Islam (P3J-PAI)



Bantuan Beasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)



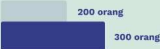
Beasiswa Program 5000 Doktor Luar Negeri (ongoing)



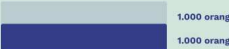
Bantuan Penyelesaian Pendidikan (BPP) S2 Dalam Negeri



Bantuan Penyelesaian Pendidikan (BPP) S3 Dalam Negeri

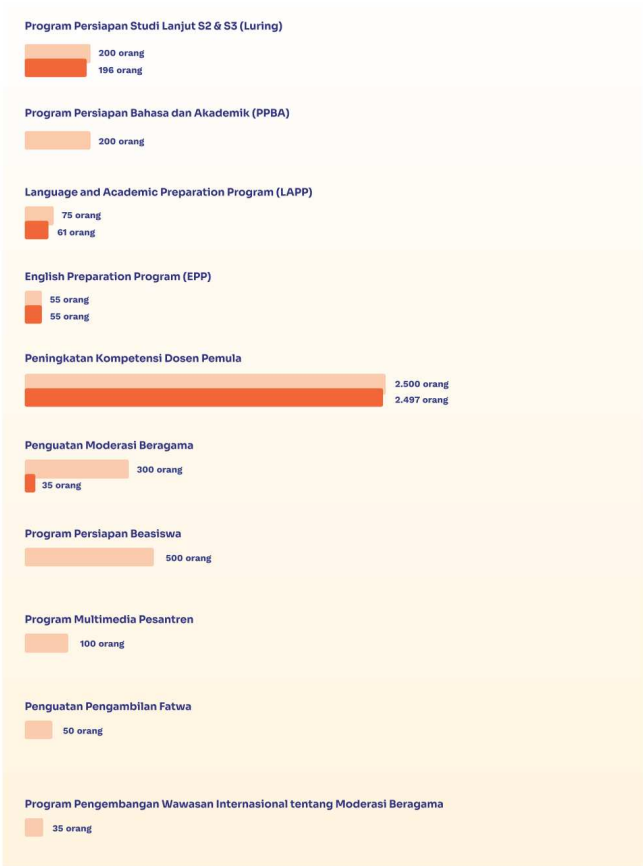
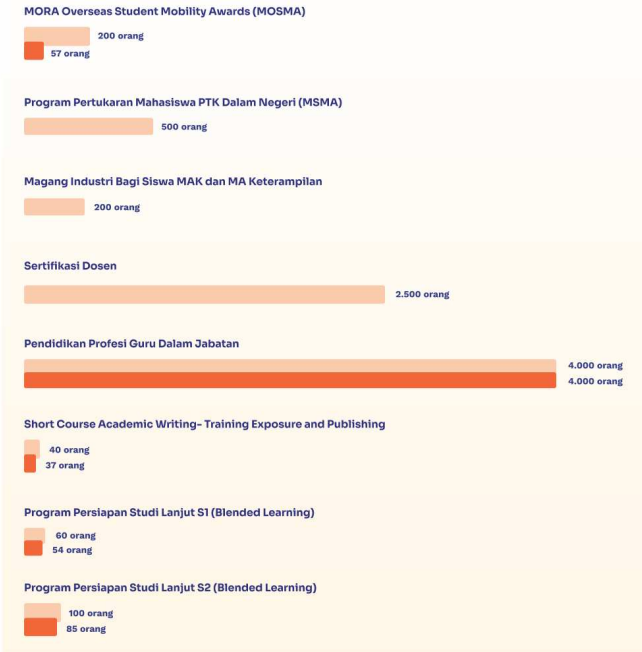


Beasiswa Santri Berprestasi



b. Program Non-Degree

Dengan total target 11.615 orang atau sasaran, capaian saat ini adalah 7.077 orang. Target tersebut meliputi berbagai jenis program beasiswa, antara lain sebagai berikut:



C. Layanan Riset



Layanan pendanaan riset LPDP terdiri atas Riset Kompetisi, Riset Mandatori, Riset Invitasi, dan Kolaborasi Internasional. Termasuk ke dalam Riset Mandatori adalah riset-riset kolaborasi dengan BRIN dan Kemendikbudristek.

Sedangkan proyek riset berstatus selesai sebanyak 938 proyek dengan nilai pendanaan sebesar Rp794,19 miliar. Total pendanaan riset LPDP sebanyak 2.791 proyek dengan nilai Rp2.656,70 miliar. Untuk tahun 2024, Layanan Riset Dana Abadi Pendidikan (DAP) diproyeksikan akan mencapai nilai pendanaan sebesar Rp530 miliar.

Secara akumulatif hingga laporan ini disusun, pada aplikasi eRISPRO (aplikasi pengelolaan riset) dilaporkan bahwa proyek riset yang masih berstatus *ongoing* sebanyak 1.853 proyek dengan nilai pendanaan sebesar Rp1.861,71 miliar.

Rincian pendanaan riset per 31 Desember 2023

(Angka pendanaan dinyatakan dalam miliar Rupiah)

Skema	Ongoing		Selesai		Total	
	Proyek	Pendanaan	Proyek	Pendanaan	Proyek	Pendanaan
Kompetisi	49	144,2	150	214,21	199	358,42
Invitasi	80	409,8	35	161	115	570,81
Kolaborasi Internasional	10	38,47	13	29,7	23	68,17
Mandatori	1.714	1.270,03	740	389,27	2.454	1.659,31
Jumlah	1.853	1.861,71	938	794,19	2.791	2.656,70

a. Layanan Riset Native LPDP

LPDP telah melakukan kerja sama industri/lembaga pendanaan riset dalam rangka meningkatkan kemandirian teknologi industri dalam negeri melalui kerja sama pendanaan riset. LPDP juga senantiasa melanjutkan program riset RISPRO (Riset Inovatif Produktif) tahun-tahun sebelumnya yang sifatnya lintas tahun. RISPRO merupakan program pendanaan riset yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui komersialisasi produk/teknologi atau implementasi kebijakan/tata kelola atau publikasi.

Minidanklanjuti arahan Menteri Keuangan yang mengharuskan agar alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan di APBN tidak menjadi satu-satunya sumber pendanaan layanan atau program LPDP, maka LPDP berupaya untuk mengembangkan kerja sama pendanaan program dengan mengedepankan portofolio layanan LPDP, salah satunya adalah pendanaan riset.

Adapun dari total 2.791 proyek riset, sebanyak 938 proyek telah selesai, dan 1.853 proyek riset masih berjalan hingga 31 Desember tahun 2023. Pelaksanaan pendanaan riset tersebut telah berjalan baik sesuai dengan jenis skema pendanaannya. Di tahun 2023, LPDP tetap melanjutkan program-program pendanaan riset yang sifatnya lintas tahun, serta memfasilitasi, monitoring, dan evaluasi atas Riset BRIN dan Kemendikbudristek.

Perkembangan Pendanaan Riset Secara akumulatif per 31 Desember 2023, LPDP menetapkan 2.791 judul riset dengan nilai pendanaan Rp2,66 triliun. Di antara pendanaan tersebut, 1.853 proyek riset masih *ongoing* dengan nilai pendanaan Rp1,86 triliun dan 938 proyek riset telah dinyatakan selesai dengan nilai pendanaan Rp794,19 miliar. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Rincian pendanaan Riset Native LPDP per 31 Desember 2023

(Angka pendanaan dinyatakan dalam miliar Rupiah)

Skema	Ongoing		Selesai		Total	
	Proyek	Pendanaan	Proyek	Pendanaan	Proyek	Pendanaan
Kompetisi	49	144,2	150	214,21	199	358,42
Invitasi	80	409,8	35	161	115	570,81
Kolaborasi Internasional	10	38,47	13	29,7	23	68,17
Mandatori (K/L)	1.714	1.270,03	740	389,27	2.454	1.659,31
Jumlah	1.853	1.861,71	938	794,19	2.791	2.656,70



LPDP secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap riset-riset yang telah didanai oleh LPDP. Monitoring dan evaluasi dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana riset yang dilakukan berjalan dengan baik, serta selaras dengan target akhir/produktivitas yang telah direncanakan.

Luaran dan produk riset dari pelaksanaan layanan riset sejak tahun 2013 sampai dengan 31 Desember 2023, LPDP telah menghasilkan beberapa luaran, antara lain:



Jenis	Total	Satuan
Product/Technology	1.323	Produk/Teknologi
Policy/Model	144	Dokumen
New Business Entity	58	Badan Usaha
License	27	Buah
Intellectual Property Rights	1.535	Buah
Partners Contributors	30 Miliar	Rupiah
Graduate	5.024	Mahasiswa
Assets Utilized	68 Miliar	Rupiah
Beneficiary Community	67	Buah
New Partnership	123	Buah
Publication	3.015	Buah
Awards and Recognition	396	Buah

Pendanaan LPDP mencakup berbagai riset komersial dan implementatif yang dapat memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Pada Triwulan IV 2023, LPDP bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) untuk melaksanakan kajian dampak pendanaan RISPRO LPDP. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pendanaan riset, dengan mengukur dimensi dampak yang mencakup dampak akademik, sosial, dan ekonomi pada tiga skema pendanaan RISPRO: Kompetisi, Inovasi, dan Kolaborasi Internasional.

Contoh produk hasil riset meliputi PATRIOT-Net, iStow (piranti lunak perencanaan stowage kapal berstandar internasional), Vaksin Ikan: Vaksin Koktail (*Aeromonas*

hydrophila dan *Streptococcus agalactiae*), Baterai Lithium, GAMAWARNI (mesin pewarna kain), BHANEX (bahan baku biokompatibel *bonegraft* untuk tulang buatan), serta THEIA L450 (alat pendeteksi virus dalam darah).

LPDP juga mendanai riset dalam lingkup tata kelola dan regulasi yang mendukung kebijakan berbasis bukti, seperti riset berjudul Tata Kelola dan Regulasi E-diagnostik Malaria Jarak Jauh, yang menghasilkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1280/2023 tentang Pengembangan Ekosistem Inovasi Digital. Kesehatan Melalui Regulatory Sandbox yang diterbitkan pada 4 April 2023.

b. Layanan Riset Kolaborasi

I. Program Riset Kolaborasi BRIN

LPDP terus mendukung Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) berkolaborasi dengan BRIN. Pendanaan Program RIIM didanai menggunakan DAPL yang terdiri dari delapan skema:

- 1. RIIM Kompetisi
- 2. RIIM Inovasi
- 3. RIIM Perusahaan Pemula Berbasis Riset (Start-up) (PPBR)
- 4. RIIM Ekspedisi
- 5. RIIM Kolaborasi
- 6. RIIM Pengujian Produk Inovasi Pertanian (PPIP)
- 7. RIIM Pengujian Produk Inovasi Kesehatan (PPIK)
- 8. Apresiasi Talenta Riset Nasional

Skema	Ongoing	Selesai	Belum Salur
RIIM Gel I	208 Grantees Rp57,73 M	208 Grantees Rp57,73 M	0 Grantees Rp0 M
RIIM Gel II	217 Grantees Rp49,73 M	217 Grantees Rp49,48 M	5 Grantees Rp0,25 M
RIIM Gel III	360 Grantees Rp3,53 M	359 Grantees Rp55,11 M	32 Grantees Rp8,42 M
RIIM Gel IV	410 Grantees Rp69,99 M	19 Grantees Rp9,10 M	391 Grantees Rp60,89 M
Total	1.195 Grantees Rp240,98 M	803 Grantees Rp171,42 M	428 Grantees Rp69,56 M

**) Jumlah grantees pada kolom belum salur meliputi grantees yang masih dalam proses pengajuan maupun sedang proses di keuangan LPDP secara keseluruhan, baik pencairan satu tahap maupun dua tahap, total nominal pada kolom belum salur termasuk dana tahap II yang belum disalurkan.*

Sampai dengan tahun 2023, alokasi anggaran yang LPDP berikan untuk BRIN sebesar Rp1,06 triliun. Dari total alokasi tersebut, BRIN mengusulkan penggunaan sekitar 59,4% atau sebesar Rp633,17 miliar dari alokasinya di tahun 2023.

Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi anggaran yang telah digunakan BRIN mencapai Rp118,35 miliar dari Rp633,17 miliar yang diusulkan (18,7%). Berikut adalah grafik perbandingan alokasi anggaran, usulan anggaran, dan realisasi anggaran dana abadi penelitian tahun 2023. Realisasi anggaran sebesar Rp118,35 miliar digunakan untuk mendanai skema RIIM yang tercantum dalam perjanjian dengan rincian sebagai berikut.



No	Skema RIIM	Total Grantees	Realisasi Pendanaan (Rp)	Target Pendanaan (Rp, berdasarkan proposal BRIN)
1	RIIM Kompetisi	1.195 grantees	117,1 miliar	332 miliar
2	RIIM Invitasi	Proses seleksi proposal	-	100 miliar
3	RIIM Start-Up	23 grantee sedang prainkubasi	-	30 miliar
4	RIIM Ekspedisi	52 grantees	direncanakan awal Januari 2024	62,5 miliar
5	RIIM Kolaborasi	Proses finalisasi panduan RIIM kerja sama BMGF	-	15 miliar
6	RIIM Pengujian Produk Inovasi Pertanian	-	-	76 miliar
7	RIIM Pengujian Produk Inovasi Kesehatan	Proses seleksi proposal	-	75 miliar
8	Aprestasi Talenta Riset Nasional	5 grantees	1,25 miliar	3,675 miliar
Total		1.252 orang	118,35 miliar	633,175 miliar



Pada tahun 2024, layanan pendanaan riset bersama BRIN dari hasil pengembangan DAPL dianggarkan sebesar Rp326.136.475.000 dengan rincian sebagai berikut:

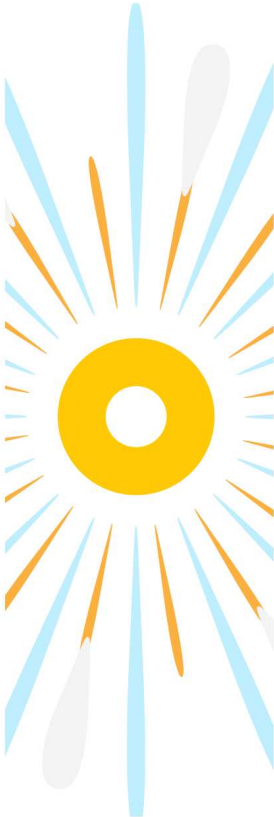
- Skema RIIM Kompetisi Rp253.500.000.000
- Skema RIIM Pengujian Produk Inovasi Kesehatan Rp3.750.000.000
- Skema RIIM Ekspedisi Rp16.336.475.000
- Skema RIIM Start-Up Rp12.400.000.000
- Skema RIIM Kolaborasi Riset Rp36.000.000.000
- Skema RIIM Award Rp450.000.000
- Skema Manajemen Talenta Nasional Rp3.700.000.000

II. Program Riset Kolaborasi Kemendikbudristek

Layanan Pendanaan Riset LPDP telah mendukung program kolaborasi dengan Kemendikbudristek, terutama pada program UK-Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences (UKICIS), Partnership in Research Indonesia and Melbourne (PRIME), Indonesia-NTU Singapore Institute of Research for Sustainability and Innovation (INSPIRASI), dan Ekosistem Kemitraan Inovasi.

UKICIS adalah kolaborasi riset antara konsorsium universitas di Inggris, termasuk University of Nottingham, University of Warwick, dan University of Coventry, dengan konsorsium universitas di Indonesia yang dipimpin oleh IPB, serta melibatkan peneliti dari UGM, UNAIR, dan ITB. Alokasi pendanaan untuk UKICIS adalah sebesar Rp44 miliar untuk periode 2022 hingga 2025. Fokus riset UKICIS meliputi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Teknologi Digital, Pariwisata, dan Kesehatan. Alokasi pendanaan Program UKICIS, sesuai kontrak antara Project Manager Officer (PMO) dan IPB, saat ini adalah sebesar Rp14,82 miliar. Hingga akhir tahun 2023, penyaluran dana tahap satu telah mencapai Rp10,38 miliar, atau 70% dari total pendanaan periode tersebut. Sebagai informasi, pendanaan Tahun I mendapatkan perpanjangan waktu tanpa tambahan pendanaan (*no-cost extension*) hingga April 2024.

PRIME adalah kolaborasi riset antara Melbourne University dan konsorsium universitas di Indonesia yang dipimpin oleh UI, serta melibatkan peneliti dari UGM dan UNAIR. Fokus tema dan topik pada program PRIME meliputi PRIME-Health (klaster layanan kesehatan, klaster perawatan primer,





klaster kesehatan pediatrik dan remaja, serta klaster penyakit menular) dan PRIME-Social. Alokasi pendanaan untuk PRIME adalah sebesar Rp44 miliar untuk periode 2022 hingga 2025, dengan alokasi tahunan sebesar Rp11 miliar. Hingga Desember 2023, alokasi anggaran untuk program PRIME telah mencapai Rp22 miliar (Rp11 miliar per periode/tahun). Dari anggaran tersebut, realisasi penyaluran dana hingga 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21,42 miliar.

INSPIRASI adalah kolaborasi riset antara Nanyang Technological University (NTU) dan institusi partisipan di Indonesia, termasuk UI, UGM, ITS, dan ITB. Pilar riset INSPIRASI meliputi Energi Terbarukan, Ekonomi Sirkular, dan Kota Pintar, serta program unggulan Renewable Energy Living Lab dan Eco Campus. Program INSPIRASI memasuki periode pertama dari total lima periode yang direncanakan (2023 hingga 2027), dengan alokasi pendanaan sebesar Rp938,01 miliar untuk lima tahun. Pendanaan tahap I tahun pertama dialokasikan sebesar Rp169,25 miliar, dengan rincian penyaluran dana LPDP ke Perguruan Tinggi Dalam Negeri (PTDN) sebesar Rp101,5 miliar dan pembayaran *International Cooperation Fee (ICF)* ke NTU sebesar Rp67,74 miliar. Realisasi pendanaan tahap I tahun pertama ini mencapai Rp118,48 miliar atau 70% dari target alokasinya.

Ekosistem Kemitraan Inovasi Berbasis Potensi Daerah melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk satuan pendidikan vokasi, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, komunitas, masyarakat, dan media massa. Progres saat ini melibatkan PKS antara LPDP dan Kemendikbudristek. Jangka waktu dan komitmen pendanaan dimulai pada 2023 hingga 2025 dengan total pendanaan Rp55 miliar. Pencairan tahap I telah dilaksanakan untuk 19 dari 20 tim (satu tim masih dalam proses perbaikan dokumen). Pada tahun 2024, Riset Kolaborasi (Mandatori) dengan Kemendikbudristek diproyeksikan sebesar Rp360 miliar, yang merupakan bagian dari Layanan Riset DAP.

Statistik riset kolaborasi LPDP dengan Kemendikbudristek s.d. 31 Desember 2023

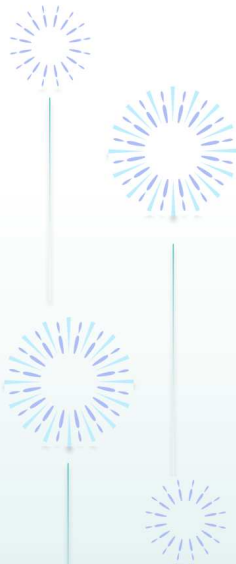
Skema	Ongoing	
	Grantees (orang)	Pendanaan (Miliar Rupiah)
 PRIME	3	21,42
 UKICIS	7	10,38
 INSPIRASI	4	118,48
Total	14	150,28

D. Layanan Dana Abadi Perguruan Tinggi

Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) ditujukan untuk mendanai program yang diluncurkan Ditjen Dikti/ristek selaku PMO dengan program yang dinamai Enhancing Quality Education for International University Recognition (EQUITY) yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pendidikan tinggi agar masuk ke dalam 500 Perguruan Tinggi Terbaik Dunia. Berikut merupakan program-program yang dibiayai:

Universitas Terbuka, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Negeri Yogyakarta). Alokasi pendanaannya adalah Rp481,436 miliar. Adapun Nilai Kontrak Pendanaan Program Dana Abadi Perguruan Tinggi kepada 21 PTNBH untuk tahun 2023 memiliki rincian sebagai berikut.

- ✱ Bantuan Program Pertukaran Pelajar dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Top 100 by subject)
- ✱ Program Riset Kerja Sama Institusi dengan Perguruan Tinggi di luar 16 Perguruan Tinggi Negeri program WCU untuk meningkatkan sitasi (sekaligus pembinaan kelembagaan)
- ✱ Bantuan biaya postdoc di dalam 16 Perguruan Tinggi Negeri
- ✱ Pembentukan dan penguatan Kelembagaan Pengelola Program WCU
- ✱ Bantuan untuk melanggan QS Data Analytic (Tracker)
- ✱ Bantuan biaya melanggan database Scopus/Scival/Web of Science
- ✱ Insentif paten internasional
- ✱ Kerja sama Riset dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri top 100 QS WUR (joint publication), dapat melibatkan diaspora
- ✱ Bantuan pembentukan klaster kelompok keilmuan diajukan oleh minimal tiga perguruan tinggi untuk sebuah klaster keilmuan



LPDP telah berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dan pihak terkait lainnya dalam pemanfaatan hasil pengembangan DAPT. Penerima pendanaan program DAPT tahun 2023 terdiri dari 21 PTNBH (16 PTNBH lama dan 5 PTNBH baru yaitu Universitas Negeri Semarang dan Universitas Sylah Kuala).



Universitas
Airlangga

Rp82.654.500.000*



Institut Teknologi
Bandung

Rp50.159.500.000



Universitas
Gajah Mada

Rp49.691.500.000



Institut
Pertanian Bogor

Rp48.262.500.000



Universitas
Sumatera Utara

Rp44.547.500.000



Universitas
Indonesia

Rp32.373.000.000



Universitas
Diponegoro

Rp25.858.500.000



Institut Teknologi
Sepuluh Nopember

Rp17.863.500.000



Universitas
Padjajaran

Rp15.714.500.000



Universitas
Brawijaya

Rp11.125.500.000



Universitas
Pendidikan
Indonesia

Rp10.887.500.000



Universitas
Andalas

Rp10.302.500.000



Universitas
Syiah Kuala

Rp10.058.500.000



Universitas
Negeri Semarang

Rp9.865.500.000



Universitas
Terbuka

Rp9.816.500.000



Universitas
Negeri
Surabaya

Rp9.710.500.000



Universitas
Negeri
Yogyakarta

Rp9.675.500.000



Universitas
Hasanuddin

Rp8.659.500.000



Universitas
Negeri Sebelas
Maret

Rp 8.558.500.000



Universitas
Negeri Padang

Rp7.844.500.000



Universitas
Negeri Malang

Rp7.806.500.000

Total

Rp481.436.000.000

*J) Dana bersama sebesar Rp412 M

Penetapan Penerima Pendanaan Program Dana Abadi Perguruan Tinggi Tahun 2023 telah ditetapkan pada 17 November 2023. Untuk pencapaian dana tahap I (80%), LPDP telah menyiapkan sistem informasi (eRISPRO DAPT) dan sebanyak 21 PTNBH telah mengajukan permohonan pencairan dana tahap I kepada LPDP dalam rentang 28 November-6 Desember 2023. Saat ini DAPT 2023 tahap I telah dicairkan dan diterima oleh 21 PTNBH dengan total Rp3851 miliar.

E. Layanan Dana Abadi Kebudayaan

LPDP telah berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dan pihak terkait lainnya dalam pemanfaatan hasil pengembangan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB). Pemanfaatan DAKB disebut dengan Program Dana Indonesiana. Hasil pengembangan DAKB digunakan untuk program layanan yang meliputi fasilitas bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, produksi media, dan program lainnya sesuai arahan Dewan Penyantun.

a. Progres Pelaksanaan Program Tahun 2023

Sampai dengan tahun 2023, Direktorat Jenderal Kebudayaan selaku *Project Manager Officer* (PMO) mengusulkan 12 kategori program dengan target penerima manfaat sebanyak 354 grantee dan usulan pendanaan sebesar Rp233 miliar. Sampai dengan 31 Desember 2023, dari 12 kategori program yang diusulkan, terdapat tujuh kategori program yang ditindaklanjuti oleh PMO melalui penyusunan petunjuk teknis. Kategori yang telah berjalan tersebut merupakan kategori lama program yang telah berjalan mulai tahun 2022.

Dari tujuh kategori, lima kategori telah dilakukan proses seleksi dan telah ditetapkan penerima manfaatnya, serta dilanjutkan ke proses penandatanganan perjanjian.

Terkait realisasi program sampai dengan akhir tahun 2023, telah ditetapkan 230 *grantees* dengan total komitmen pendanaan sebesar Rp135,72 miliar. Adapun rincian progres program DAKB *grantee intake* tahun 2023 sebagai berikut.

NO	Kategori Program	Target PMO		Target PMO	
		Target Grantees	Usulan Pendanaan (Miliar Rupiah)	Grantees Ditetapkan	Komitmen Pendanaan (Miliar Rupiah)
1	Dukungan Institusional	60	45,00	50	32,97
2	Pendayagunaan Ruang Publik	40	17,50	55	20,89
3	Kegiatan Strategis	23	57,50	12	30,84
4	Dokumentasi Karya/ Pengetahuan Maestro	30	12,50	56	21,37
5	Penciptaan Karya Kreatif Inovatif	40	25,00	57	29,65
6	Sinema Mikro	40	16,00	Proses Verifikasi	-
7	Kajian OPK	20	7,00	Proses Seleksi	-
8	Dana pendamping Distribusi Internasional *	13	12,00	-	-
9	Dana pendamping Distribusi Unggulan *	13	12,00	-	-
10	Belajar Bersama Maestro *	50	12,50	-	-
11	Afirmasi Dana Pengembangan Kegiatan Prioritas *	5	10,00	-	-
12	Kategori khusus arahan Dewan Pengarah Program *	20	6,00	-	-
Total		354	233,00	230	135,72

*Merupakan kategori baru program tahun 2023 (konsep petunjuk teknis lima kategori program belum disusun dan disampaikan oleh PMO, sehingga kategori program baru belum berjalan)

167

168

4.4 Proyeksi dan Rencana Strategis

A. Program Kementerian/Lembaga

Program Kementerian Keuangan di dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 yang terkait dengan BLU LPDP adalah dalam hal "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus." Berikut adalah sasaran program Kementerian Keuangan yang relevan dengan LPDP.

Uraian	Program	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal					
	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Tugas Khusus	96,87	100	100	100	100

B. Strategi Bisnis LPDP

Strategi Bisnis LPDP dapat dibagi menjadi strategi jangka pendek (*quick wins*) yang dicapai dalam satu tahun anggaran dan strategi jangka menengah yang mencakup pencapaian dalam dua hingga tiga tahun atau lebih.

- a. Inisiatif Strategis Jangka Pendek (*Quick Wins*)**
Strategi Bisnis Jangka Pendek meliputi, antara lain, menyusun Rencana Strategik dan Masterplan untuk TI, Inovasi, dan Transformasi Kelembagaan, serta Roadmap SDM Indonesia Emas 2045; memperkuat posisi dan warisan LPDP dalam pengembangan pendidikan tinggi dan kebudayaan; serta memperkuat kerja sama *pentahelix* dengan media dan Dunia Usaha, Dunia Industri (DUDI) untuk menegaskan peran sentral LPDP dalam peningkatan kapasitas SDM Indonesia.
- b. Inisiatif Strategis Jangka Menengah**
Strategi Bisnis Jangka Menengah LPDP mencakup, antara lain, pembangunan sarana dan prasarana kantor yang mendukung transformasi dan digitalisasi proses kelembagaan; pemenuhan SDM yang kompeten dan profesional; serta memperkuat kerja sama dan jaringan internasional untuk mendapatkan akses pendanaan global dari filantropi, LSM, institusi global, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan-perusahaan multinasional.



C. Strategi Pada Unit Layanan

- a. Pendidikan**
- Membentuk PMO bersifat *ad hoc* untuk mempercepat koordinasi antara LPDP dan Kemdikbudristek dalam mendukung pelayanan pendidikan;
 - Melakukan percepatan proses digitalisasi pelayanan pendidikan
 - Penyusunan sistem insentif dan sosialisasi Sistem Rekrutmen Beasiswa;
 - Mempersiapkan pusat data Dana Abadi Pendidikan, serta manajemen dan analisis data besar (*big data*) dalam rangkuman data (*dashboard*) pimpinan LPDP, yang merupakan bagian dari infrastruktur Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) LPDP.
- b. Riset**
- PMO yang bersifat *ad hoc* untuk pelayanan dan pembangunan Ekosistem Riset dan Inovasi;
 - PMO untuk Komersialisasi dan Hilirisasi Hasil Riset;
 - Penyusunan Model Seleksi Riset sebagai metode pemilihan hasil riset secara obyektif dan menjadi bagian dari instrumen investasi Dana Riset yang efektif;
 - Memulai kompetisi riset unggulan bekerja sama dengan Kemdikbudristek dan BRIN untuk bidang-bidang teknologi baru dan teknologi terapan;
 - Mempersiapkan pusat Dana Abadi Riset, mengelola data besar (*big data*) serta analisis data besar (*big data analytic*), dan mengembangkan dashboard pimpinan LPDP sebagai bagian dari infrastruktur Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) LPDP.
- c. Perguruan Tinggi**
- Menyusun PMO bersifat *ad hoc* untuk pelayanan Dana Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan DUDI;
 - Meningkatkan dan mendukung program padanan dana multiyears untuk Program-program MBKM dengan sinergi DUDI;
 - Mempersiapkan pusat data Dana Abadi Perguruan Tinggi, mengelola data besar (*Big Data*), dan analisis data besar (*big data analytic*) untuk menjadi *dashboard* pimpinan LPDP sebagai bagian dari infrastruktur LPDP;
 - Mendorong pembentukan program studi yang sangat dibutuhkan di industri.
- d. Kebudayaan**
- Menyusun PMO bersifat *ad hoc* untuk pelayanan Dana Abadi Kebudayaan, serta bekerja sama dengan perguruan/institut Pendidikan Seni, asosiasi pekerja, dan penggerak seni budaya;
 - Menginisiasi inkubator-inkubator seni budaya di daerah-daerah potensial (Bali, Lombok, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku) sebagai bagian dari suprastruktur pendukung SDM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 10 destinasi wisata unggulan yang dicanangkan pemerintah;
 - Memulai digitalisasi sejarah budaya dan mendukung terbentuknya museum-museum sejarah budaya tematik bekerja sama dengan Kemdikbudristek, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kempenakraf, dan Kemendes (misalnya: Museum Digital Jalur Rempah Nusantara, Imperium Majapahit dalam versi *metaverse*, dan lain-lain);
 - Mempersiapkan pusat data Dana Abadi Kebudayaan, mengelola data besar (*big data*), dan analisis data besar (*big data analytic*) untuk menjadi *dashboard* pimpinan LPDP sebagai bagian dari infrastruktur *Decision Support System* LPDP.

1. Kegiatan Layanan Beasiswa 2020 - 2024

NO	Tujuan/ Sasaran & Strategi	Indikator Kerja	Target (orang)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya jenjang pendidikan sumber daya manusia Indonesia	Jumlah penerima beasiswa S2 dari masyarakat umum	1.370	1.370	1.507	1.658	1.823
		Jumlah penerima beasiswa S3 dari masyarakat umum	270	270	297	327	359
		Jumlah penerima beasiswa S2 dari masyarakat umum dengan skema co-funding	30	30	33	36	40
		Jumlah penerima beasiswa S3 dari masyarakat umum dengan skema co-funding	10	10	11	12	13
		Jumlah penerima beasiswa S2 pada Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia co-funding	40	40	44	48	53
		Jumlah penerima beasiswa S3 pada Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia	10	10	11	12	13
		Jumlah penerima beasiswa S2 melalui kerja sama LPDP dan Stuned	10	10	10	10	10
		Jumlah penerima beasiswa S2 melalui kerja sama LPDP dan DAAD	25	25	25	25	25
		Jumlah penerima beasiswa S3 melalui kerja sama LPDP dan DAAD	25	25	25	25	25

NO	Tujuan/ Sasaran & Strategi	Indikator Kerja	Target (orang)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah penerima beasiswa S2 melalui kerja sama LPDP dan JICA	50	50	50	50	50
		Jumlah penerima beasiswa S2 melalui kerja sama LPDP dan UIII	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah penerima beasiswa S3 melalui kerja sama LPDP dan UIII	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan melalui pendidikan S3 dan Program Pendidikan Dokter Spesialis	Jumlah penerima beasiswa S3 untuk tenaga kesehatan di RSPON	30	30	30	30	30
		Jumlah penerima beasiswa pada program Pendidikan Dokter Spesialis sesuai prioritas Kementerian Kesehatan	100	100	110	121	133
3	Meningkatnya jenjang pendidikan sumber daya manusia pada Kementerian/ Lembaga dan BUMN melalui pendidikan S2 dan S3	Jumlah penerima beasiswa S2 dari kelompok PNS/TNI/ POLRI	600	600	660	726	799
		Jumlah penerima beasiswa S3 dari kelompok PNS/TNI/ POLRI	115	115	127	139	153
		Jumlah penerima beasiswa S2 untuk pegawai BUMN	100	100	100	100	100
		Jumlah penerima beasiswa S3 untuk pegawai BUMN	100	100	100	100	100

NO	Tujuan/ Sasaran & Strategi	Indikator Kerja	Target (orang)				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatnya jenjang pendidikan sumber daya manusia dari daerah afirmasi serta kelompok rentan melalui pendidikan S2 dan S3	Jumlah penerima beasiswa S2 dari daerah afirmasi	210	210	231	254	280
		Jumlah penerima beasiswa S3 dari daerah afirmasi	25	25	28	30	33
		Jumlah penerima beasiswa S2 dari kelompok disabilitas	15	15	17	18	20
		Jumlah penerima beasiswa S3 dari kelompok disabilitas	5	5	6	6	7
		Jumlah penerima beasiswa S2 dari kelompok masyarakat prasejahtera	500	500	550	605	666
		Jumlah penerima beasiswa S3 dari kelompok masyarakat prasejahtera	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta program pengayaan/ penguatan bahasa	1.055	1.055	1.361	1.740	1.404
5	Meningkatnya jenjang pendidikan sumber daya manusia pada sektor keagamaan melalui pendidikan S2 dan S3	Jumlah penerima beasiswa S2 untuk santri	220	220	242	266	293
		Jumlah penerima beasiswa S3 untuk santri	80	80	88	97	106
		Jumlah penerima beasiswa S2 untuk kader ulama	85	85	85	85	85
		Jumlah penerima beasiswa S3 untuk kader ulama	15	15	15	15	15

NO	Tujuan/ Sasaran & Strategi	Indikator Kerja	Target (orang)				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Meningkatnya jenjang pendidikan tenaga pendidik di bidang kewirausahaan	Jumlah penerima beasiswa S2 bagi tenaga pendidik di bidang kewirausahaan	30	30	33	36	40
7	Meningkatnya akses pembiayaan pendidikan S2 dan S3 kepada masyarakat melalui kerja sama LPDP dan Stuned	Jumlah nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama LPDP dan Stuned	1	1	-	-	-
		Jumlah nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerja sama LPDP dan DAAD	1	1	1	-	-
		Jumlah nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerja sama LPDP dan JICA	1	1	1	-	-
8	Meningkatnya kesiapan penerima beasiswa dalam melaksanakan studi	Jumlah penerima beasiswa yang mengikuti Program Persiapan Keberangkatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyaluran beasiswa	Jumlah nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama terkait pengelolaan beasiswa dengan Perguruan Tinggi atau mitra strategis lainnya	25	25	30	35	40
		Efisiensi jumlah pembayaran Dana SPP/tuition fee kepada perguruan tinggi melalui kerja sama	Rp7 M	Rp7 M	Rp8 M	Rp9 M	Rp10 M
		Jumlah pertemuan koordinasi dengan pengelola beasiswa di perguruan tinggi dalam negeri	2	2	2	2	2
		Jumlah pertemuan koordinasi dengan pengelola beasiswa di perguruan tinggi luar negeri	1	1	1	1	1

NO	Tujuan/ Sasaran & Strategi	Indikator Kerja	Target (orang)				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Meningkatnya kapasitas alumni penerima beasiswa dalam melaksanakan kontribusi kepada Indonesia	Jumlah alumni penerima beasiswa yang terasap di dunia kerja	22143	22143	23.314	23.722	23.855
		Jumlah alumni penerima beasiswa yang menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat	2.260	2.260	2.379	2.421	2.434
		Jumlah kegiatan persiapan (bridging) bagi calon alumni untuk mempersiapkan tantangan pada dunia kerja	7	7	7	7	7

2. Kegiatan Layanan Pendanaan Riset 2020-2024

NO	Tujuan/ Sasaran & Strategi	Indikator Kerja	Target (orang)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya jumlah riset Indonesia	Jumlah Riset Pengusutan Dewan Penyantun Program Baru yang Disalurkan	2 (program UKICIS, IMPACT)	2	2	2	2
		Jumlah Riset Kerja Sama dengan Mitra (Industri/dsb) yang Disalurkan	3	3	3	3	3
		Jumlah SDM Direktorat Fasilitasi Riset yang tersertifikasi Ahli TKT Madya	6	6	3	3	3
		Jumlah SDM Direktorat Fasilitasi Riset yang tersertifikasi Auditor Teknologi	6	6	3	3	3
		Jumlah Pengembangan Sistem Informasi eRISPRO	2 (SIPENSEL & Riset Mobile Apps Dashboard)	1 Mobile Apps eRISPRO (Modul Backoffice)	1 Expand Interoperability & 1 Modul Analytics	Open Platform eRISPRO (research grant management apps for free)	Open Platform eRISPRO (research grant management apps for free)
		Jumlah Riset Kompetisi - UMKM Berbasis Teknologi	1	1	1	1	1

3. Kegiatan Pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan

NO	Tujuan/ Sasaran & Strategi	Indikator Kerja	Target (orang)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kapasitas SDM di Bidang Kebudayaan	Jumlah Penerima Beasiswa Pelaku Budaya	0	0	50	60	70
		Jumlah Produksi Kegiatan Kebudayaan	0	0	5	5	8
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan	0	0	3	3	3
		Jumlah Produksi Media	0	0	2	2	2

4. Kegiatan Pengelolaan Dana Abadi Perguruan Tinggi

NO	Tujuan/ Sasaran & Strategi	Indikator Kerja	Target (orang)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Peringkat Rata-Rata Perguruan Tinggi Indonesia	Jumlah Penerima Padanan Dana Perguruan Tinggi	0	0	16	18	20
		Kenaikan Peringkat Perguruan Tinggi yang Mendapatkan Dana Padanan	0	0	5	5	5

5. Kegiatan Pengelolaan Dana Abadi Penelitian

NO	Tujuan/ Sasaran & Strategi	Indikator Kerja	Target (orang)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengembangan program layanan di bidang penelitian, pengembangan pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan inovasi dan inovasi	Jumlah Penerima Riset Proyek Riset Nasional	0	0	200	250	270
		Produk Inovasi dan Produk riset Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan	0	0	40	50	60

6. Unit Investasi 2020-2024

NO	Tujuan/ Sasaran & Strategi	Indikator Kerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya PNPB	Penyediaan dukungan operasional investasi penyertaan langsung	kustodian & SOP setelmen equity participation	kustodian & SOP setelmen quasi equity participation (convertible bond)	kustodian & SOP setelmen revenue/ profit sharing	kustodian & SOP setelmen jenis investasi langsung lainnya	kustodian & SOP setelmen jenis investasi langsung lainnya
		Penyediaan dukungan operasional investasi valuta asing	kustodian, rek valas, SOP setelmen	rek valas bertambah	rek valas bertambah	rek valas bertambah	rek valas bertambah
		Jumlah pengembangan aplikasi teknologi informasi dalam pengolahan data investasi	4	3	2	1	1



05 Tata Kelola

Serunai Angan Nyata

Keindahan kembang api adalah hasil dari susunan material dan langkah-langkah keamanan yang tepat. Selaras dengan itu, LPDP menegakkan tata kelola pada setiap program dengan integritas dan tanggung jawab. Kebijakan tata kelola LPDP turut menghadirkan strategi manajemen risiko dan sistem penilaian demi menjamin mutu institusi serta hasil yang nyata.



5.1 Pedoman dan Kebijakan GRC Terintegrasi

Seiring dengan semakin kompleksnya tanggung jawab dan pencapaian target yang terus dituntut semakin masif, organisasi pelayanan publik seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) harus menerapkan kebijakan yang lebih dari sekedar tata kelola. Konsep GRC—*governance* (tata kelola), *risk* (risiko), dan *compliance* (kepatuhan)—yang terintegrasi kini jamak digunakan guna memastikan tercapainya tujuan strategis organisasi, mengelola risiko yang mungkin timbul, dan memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku.

A. Komponen GRC Terintegrasi

Konsep GRC Terintegrasi secara lebih rinci meliputi komponen-komponen berikut:

1. Governance (Tata Kelola)

Tata kelola merujuk pada sistem dan proses yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan organisasi. Hal ini mencakup struktur pengambilan keputusan, tanggung jawab, dan kontrol yang memastikan bahwa organisasi beroperasi secara efektif dan efisien. Berikut poin-poin yang mencerminkan tata kelola yang baik:

Kepemimpinan

Organisasi memiliki pimpinan yang efektif dan jelas dalam mengambil keputusan strategis.

Akuntabilitas

Ada transparansi dan akuntabilitas dalam semua kegiatan organisasi.

Strategi dan Tujuan

Organisasi memiliki visi dan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Pengawasan

Ada mekanisme untuk memantau dan menilai kinerja serta kepatuhan.

2. Risk (Risiko)

Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Berikut poin-poin yang terlibat dalam komponen ini:

Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Penilaian Risiko

Mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut.

Mitigasi Risiko

Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi dampak risiko atau menghindari risiko sepenuhnya.

Pemantauan dan Pelaporan

Memantau risiko secara terus-menerus dan melaporkan status serta perkembangan kepada pihak yang relevan.

3. Compliance (Kepatuhan)

Kepatuhan berfokus pada memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan, hukum, standar, dan kebijakan yang berlaku. Berikut poin-poin yang tercakup dalam komponen ini:

Peraturan dan Hukum

Memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan.

Standar Industri

Mengikuti standar industri yang dapat mempengaruhi kualitas, keamanan, atau etika.

Kebijakan Internal

Mematuhi kebijakan dan prosedur internal yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Audit dan Penilaian

Melakukan audit untuk menilai kepatuhan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Secara keseluruhan, GRC membantu organisasi untuk lebih siap menghadapi tantangan, mengelola risiko dengan lebih efektif, dan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sambil mendorong efisiensi dan mencapai tujuan strategis.

Sepanjang tahun 2023, LPDP telah mencanangkan penerapan GRC Terintegrasi dan membangun papan pedoman instrumen atau *dashboard* guna mempermudah proses monitoring dan evaluasi penerapannya. Pengembangan *dashboard* berisi parameter penilaian GRC Terintegrasi di LPDP berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 322/MMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/MMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/MMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan

B. Integrasi GRC

Integrasi GRC menggabungkan aspek tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam satu kerangka kerja yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Berikut sejumlah keunggulan penerapan GRC Terintegrasi:

Koordinasi

Menghindari duplikasi usaha dan memastikan bahwa aktivitas tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan saling mendukung.

Visibilitas dan Transparansi

Memberikan pandangan holistik mengenai kesehatan dan kinerja organisasi, serta masalah yang mungkin timbul.

Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik

Memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih informasional dengan data yang terintegrasi dan analisis yang komprehensif.

5.2 Pembangunan Sistem Penilaian GRC Terintegrasi

Dalam membangun parameter awal penilaian efektivitas penerapan GRC Terintegrasi ini, inisiasi telah dilakukan LPDP dengan mengumpulkan data terkait ke divisi Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) sejak 20 Februari 2023. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan diinput ke dalam parameter penilaian yang telah disusun pada Trivulan IV Tahun 2023. Proses kemudian dilanjutkan dengan evaluasi untuk menentukan apakah parameter yang disusun relevan dengan konteks penerapan GRC di lingkungan LPDP dan apakah cara pengukuran parameter telah sesuai dengan *leading practices* GRC Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penyusunan dan uji coba parameter GRC Terintegrasi di LPDP membawa kesimpulan pada 22 parameter yang dinilai dan dievaluasi:

1. Indeks Pelayanan Publik
2. Indeks Persepsi Kepuasan Stakeholder
3. Perencanaan Kinerja Organisasi yang dirumuskan dalam Renstra Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
4. Pemberian arahan Dewan Penyantun dan/atau Dewan Pengawas sebagai salah satu implementasi tata kelola yang baik di LPDP
5. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi/ Hasil Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
6. Manajemen sumber daya manusia (SDM)
7. Kode Etik dan Kode Perilaku
8. Tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan
9. Penyusunan Profil Risiko Tahun Berjalan
10. Hasil pengelolaan risiko triwulanan
11. Ketaatan pemantauan risiko bulanan oleh Pemilik Proses Bisnis
12. Pemantauan Risiko Investasi
13. Risiko Reputasi
14. Hasil pengawasan internal terhadap aspek GRC
15. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)
16. Pemanfaatan *Fraud Risk Scenario* (FRS)
17. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA)
18. Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etik (PPINE)
19. Pelaksanaan *Know Your Employee* (KYE) oleh atasan langsung
20. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) LPDP
21. Pengelolaan pengaduan melalui WISE Kemenkeu
22. Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi

Penilaian akhir dilaksanakan dengan perhitungan:

$(\text{Jumlah parameter yang memperoleh skor } 1 / \text{Jumlah total parameter}) \times 100\%$, dengan klasifikasi berikut:



Untuk meningkatkan penerapan tata kelola LPDP secara terintegrasi dengan manajemen risiko dan kepatuhan, penting untuk mengadopsi perangkat (*tools*) penilaian yang menyeluruh. Saat ini, penilaian tata kelola berbasis *Good Corporate Governance* (GCG) *Scoring* umumnya diterapkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan *Special Mission Vehicle* (SMV) BUMN di bawah Kemenkeu, sementara SMV Badan Layanan Umum (BLU) menggunakan *maturity rating* BLU yang belum sepenuhnya menghubungkan komponen-komponen pembentuk skor GRC secara terintegrasi, melainkan masih bersifat parsial. Untuk memperkuat posisi LPDP di tingkat global dan meningkatkan kepercayaan publik serta *stakeholder* utama, termasuk calon investor atau donor hibah, perlu adanya alat penilaian GRC terintegrasi yang mengikuti praktik terbaik (*leading practices*).

Dalam upaya ini, penyediaan *dashboard* yang dapat diakses kapan saja oleh pimpinan menjadi krusial. *Dashboard* ini akan menampilkan status indikator GRC, seperti rekomendasi tindak lanjut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), status tindak lanjut Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL), serta perkembangan pegawai berdasarkan *Training Need Analysis* (TNA). Dengan adanya *dashboard* ini, pimpinan dapat memberikan arahan yang diperlukan secara langsung dan cepat pada area yang memerlukan perbaikan.

Aplikasi yang disusun akan mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait area GRC yang saat ini disampaikan kepada pimpinan melalui laporan atau dokumen terpisah. Dengan *dashboard* terintegrasi yang berbasis web (*web-based*), pimpinan akan dapat mengakses informasi tentang penerapan GRC LPDP secara komprehensif dan *real-time*, kapan saja dan di mana saja, hanya melalui satu platform.



5.3 Struktur & Mekanisme Tata Kelola

Struktur dan mekanisme tata kelola LPDP berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Dalam tata kepengurusan LPDP yang dijelaskan pada aturan tersebut, terdapat posisi Dewan Penyalutan yang bertugas memberikan arahan kebijakan strategis dalam pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Ketua merangkap anggota
2. Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai anggota
4. Menteri Agama
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai anggota

Dewan Penyalutan menyelenggarakan rapat paling sedikit dua kali dalam satu tahun, arahan kebijakan strategis yang dihasilkan dari rapat tersebut dapat menetapkan paling sedikit

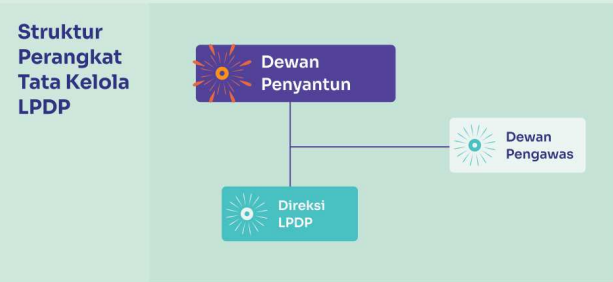
- bidang prioritas pada program layanan;
- kebijakan afirmasi pada program layanan dengan memperhatikan kondisi, wilayah, kelompok masyarakat tertentu dan/atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- proporsi penggunaan hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan; dan
- pembagian tugas pelaksanaan program layanan oleh kementerian/lembaga teknis dan/atau LPDP.

Selain Dewan Penyalutan, terdapat pula Dewan Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap proses bisnis dan layanan LPDP. Dewan Pengawas pada tahun 2023 terdiri dari lima anggota:

1. Pejabat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagai ketua merangkap anggota
2. Pejabat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai anggota
3. Pejabat dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagai anggota
4. Pejabat dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi dan inovasi sebagai anggota
5. Unsur tenaga ahli sebagai anggota

Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam satu bulan.



5.4 Audit Internal dan Eksternal

Dalam mendukung, menyelidiki, dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi, LPDP memiliki Satuan Pemeriksaan Intern atau SPI yang merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugas SPI adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pengawasan dan program kerja pemeriksaan tahunan yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama LPDP
2. Pelaksanaan audit berbasis risiko pada aktivitas proses bisnis LPDP
3. Melakukan revlu terhadap laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian, dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku

Pada tahun 2023, SPI berfokus pada audit atas program beasiswa kolaborasi karena memiliki risiko yang paling tinggi dengan jumlah stakeholder yang beragam. Awal tahun 2023, SPI menginisiasi adanya pertemuan antara para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik dari Kemenkeu dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk melakukan kerja sama pengawasan. Inisiasi ini telah ditindaklanjuti dengan adanya beberapa kali pengawasan atas program kolaborasi dengan membentuk tim gabungan yang terdiri dari SPI, Divisi Layanan Beasiswa LPDP, Inspektoral Jenderal (Ijen) Kemenkeu dan Ijen Kemendikbudristek. Pengawasan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi perbaikan tata kelola berupa perbaikan petunjuk teknis (juktis), perbaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan aturan yang berlaku, hingga sosialisasi dan monitoring dan evaluasi (monev) program yang lebih optimal dilakukan oleh Pengelola Program di Kemendikbudristek dan juga di LPDP.

Selain itu, SPI dengan bantuan dari Subdivisi Teknologi Informasi (TI) Direktorat Keuangan Umum (KU) mengembangkan sistem audit berkelanjutan (*Continuous Audit* atau CA) sebagai upaya peningkatan kualitas pengawasan terhadap transaksi penyaluran dana beasiswa LPDP. Sistem CA menggunakan formula pengujian tertentu atas transaksi penyaluran dana beasiswa untuk komponen biaya hidup (*living allowance*), biaya buku (*book allowance*), dan tunjangan keluarga (*family allowance*). Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa besaran nilai beasiswa yang disalurkan telah sesuai dengan ketentuan terkait standar biaya yang berlaku di LPDP. Hasil pengujian akan diinformasikan kepada Direktorat Beasiswa dan Direktorat Keuangan dan Umum untuk ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi pada realisasi penyaluran dan pencatatan keuangan.

Selain dari kedua hal di atas, SPI juga melakukan tugas pendampingan pemeriksaan oleh pihak eksternal, antara lain Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ijen Kemenkeu dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendampingan pemeriksaan oleh KAP dan BPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan *unaudited* tahun 2022. Kemudian pada paruh kedua tahun 2023 dilakukan pendampingan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK, kajian identifikasi potensi risiko korupsi oleh KPK, pengawasan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) oleh Ijen Kemenkeu dan BPKP. Pendampingan ini dilakukan agar para pemeriksa eksternal mendapatkan pemahaman yang menyeluruh sehingga diharapkan rekomendasi pengawasan eksternal nantinya akan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Kinerja SPI LPDP di atas tak akan lengkap tanpa diukur dari penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi audit eksternal maupun internal. SPI LPDP bekerja sama dengan Ijen Kemenkeu dalam menindaklanjutinya. Capaian kinerja penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi audit eksternal maupun internal pada tahun 2023 adalah 100% dari target 90%. Pada akhirnya atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan dan kinerja yang telah dicapai oleh SPI selama tahun 2023, tidak lain dan tidak bukan adalah agar tata kelola LPDP semakin baik di tahun-tahun yang akan datang.

5.5 Sistem Pengendalian Internal

Sebagai wujud pelaksanaan amanat Keputusan Menteri Keuangan KMK-477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan, LPDP telah melaksanakan serangkaian kegiatan pemantauan sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Sekretariat Jenderal 2023. Di antara kegiatan pemantauan yang diamanatkan pada KMK tersebut adalah EPITE dan PPITA.

LPDP telah melaksanakan EPITE tahun 2023 dengan hasil nilai akhir 98% dari skala 0-100%, menghasilkan kesimpulan pengendalian intern LPDP dinyatakan "tinggi". Simpulan ini dapat berarti bahwa pengendalian intern di LPDP telah berjalan efektif dan dapat memberi keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) kepada Unit Kepatuhan Internal (UKI) atas penegakan integritas dan pelaksanaan proses bisnis di LPDP. Sementara itu, PPITA di LPDP pada tahun 2023 dilaksanakan untuk empat proses bisnis dengan ringkasan hasil sebagai berikut:

Proses Bisnis	Jumlah DUPU	Efektivitas			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Penempatan Dana LPDP dalam Bentuk Deposito	6 DUPU	6 DUPU Efektif	6 DUPU Efektif	6 DUPU Efektif	6 DUPU Efektif
Seleksi Administrasi Beasiswa Pendidikan Indonesia	5 DUPU	4 DUPU Efektif 1 DUPU Tidak Efektif	4 DUPU Efektif 1 DUPU Tidak Efektif	5 DUPU Efektif	5 DUPU Efektif
Monitoring dan Evakuasi Pelayanan Pendanaan Riset RISPRO Kompetisi/ Invitasi	4 DUPU	4 DUPU Efektif	4 DUPU Efektif	4 DUPU Efektif	4 DUPU Efektif
Penyaluran Dana Layanan Beasiswa (<i>Tuition Fee dan Living Allowance</i>)	2 DUPU	2 DUPU Efektif	2 DUPU Efektif	2 DUPU Efektif	2 DUPU Efektif

DUPU = Daftar Uji Pengendalian Utama

Berdasarkan hasil pelaksanaan EPITE dan PPITA serta hasil evaluasi temuan pemantauan pengendalian internal, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan empat proses bisnis tersebut di atas adalah "efektif".

A. Penerapan Kode Etik

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*), diperlukan penerapan dan penegakkan dalam melaksanakan kode etik dan kode perilaku yang berlaku agar pegawai LPDP senantiasa berintegritas, profesional, serta akuntabel. LPDP berpedoman pada PMK 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu LPDP memiliki Peraturan Direktur Utama PER-1/LPDP/2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pejabat, Pegawai, dan Tenaga Kontrak Profesional di Lingkungan LPDP.

B. Pencegahan Korupsi & Suap

Sepanjang 2024, LPDP melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah melakukan berbagai program pengendalian gratifikasi, di antaranya diseminasi pesan antigratifikasi melalui situs web, media sosial, *banner* dan media lainnya dengan tema *Tolak & Laporkan Gratifikasi*. Selain itu telah dilaksanakan sosialisasi antikorupsi baik kepada pegawai maupun kepada *stakeholders* seperti *award*, *periset*, *penerima*, *mitra bank*, *dsb*. Untuk menguatkan budaya integritas pegawai LPDP, setiap divisi menyelenggarakan *Integrity Sharing* secara triwulanan dengan dipimpin oleh masing-masing kepala divisi/satuan.



LPDP berkomitmen untuk menjaga integritas dan tata kelola yang baik.
Kami sampaikan kepada seluruh mitra kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami bahwa setiap kegiatan yang dilakukan LPDP tidak melanggar aturan yang berlaku. Kami akan terus meningkatkan integritas dan tata kelola kami untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada LPDP dalam rangka membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera.

lpdp.kemkeu.go.id | 134 | [#ejektuharapan](https://www.instagram.com/lpdp)



LPDP berkomitmen untuk menjaga integritas dan tata kelola yang baik.
Kami sampaikan kepada seluruh mitra kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami bahwa setiap kegiatan yang dilakukan LPDP tidak melanggar aturan yang berlaku. Kami akan terus meningkatkan integritas dan tata kelola kami untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada LPDP dalam rangka membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera.



C. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)

Sebagai unit kerja di bawah Kemenkeu, sistem pelaporan pelanggaran di LPDP juga menginduk pada Whistleblowing System Kementerian Keuangan yang kemudian dikenal sebagai WISE Kemenkeu. Seluruh pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) maupun UKI. Berikut rekomendasi hasil dari tindak lanjut tersebut:

- Usulan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai yang terbukti melanggar disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Pengembalian uang
- Pelimpahan kasus oleh UKI kepada IBI (apabila dalam penanganan pengaduan ternyata terdapat dugaan pelanggaran disiplin berat)
- Pelimpahan kasus oleh Itjen kepada Aparat Penegak Hukum (dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana)

Terbukanya kanal pelaporan baik melalui WISE Kemenkeu maupun Tiket Bantuan di bantuan.lpd.kemkeu.go.id adalah bagian penting dari upaya LPDP untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.

Dengan memberikan saluran yang aman untuk pelaporan dan memastikan perlindungan bagi pelapor, LPDP mendukung integritas dan mencegah pelanggaran. Proses yang terstruktur untuk pengajuan, verifikasi, investigasi, dan tindak lanjut membantu memastikan bahwa laporan ditangani secara serius dan bahwa pelanggaran dapat ditindak dengan tepat.

Jumlah subjek pengaduan

Sepanjang tahun 2023, LPDP memproses pengaduan masyarakat yang keseluruhannya adalah mengenai awardee dan alumni LPDP dengan rincian sebagai berikut:



D. Pengujian Kepatuhan Internal

LPDP telah melakukan penilaian efektivitas pengendalian internal sesuai kerangka kerja Sistem Pengendalian Intern Kemenkeu. Prinsip dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern antara lain untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses organisasi dalam pengambilan keputusan khususnya terkait dengan perencanaan strategis.

Kerangka kerja Sistem Pengendalian Intern Kemenkeu dilakukan melalui pendekatan Model Tiga Lini yang meliputi peran berikut:

1. **Pimpinan LPDP**
2. **Manajemen**
 - a. Lini pertama (*First Line*) yang dilaksanakan oleh unit di lingkungan LPDP
 - b. Lini kedua (*Second Line*) yang dilaksanakan oleh UKI

Audit intern sebagai Lini ketiga (*Third Line*) yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Model Tiga Lini

	Lini Pertama Manajemen Operasional	1. <i>Tone at the Top, Walk the Talk, Know Your Employee</i> 2. Penamaan Nilai-Nilai Kemenkeu dan Kode Etik 3. Pengawasan atasan langsung 4. Pelaporan SPT dan harga kekayaan 5. Penerapan manajemen risiko terutama risiko <i>fraud</i> 6. Penerapan aturan benturan kepentingan
	Lini Kedua UKI	1. Pemantauan disiplin & kode etik 2. Pemantauan pengendalian intern secara <i>risk based</i> 3. Pengendalian gratifikasi 4. Profiling pegawai 5. Pemantauan risiko <i>fraud</i>
	Lini Ketiga Itjen / SPI / LPDP	1. Audit dan pengawasan intern 2. Penerapan CA-CM (Pencegahan by system) 3. Penilaian integritas secara berkala 4. <i>Helpdesk</i>/media pencegahan <i>fraud</i>

5.6 Manajemen Risiko

Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/KMK.01/2022, tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, LPDP telah menetapkan standar risiko pada masing-masing proses bisnis layanan dalam Matriks Analisis Risiko yang menilai Level Dampak dan Level Kemungkinan. Pada Level Dampak ditetapkan lima level yang meliputi kategori Tidak Signifikan, Minor, Moderat, Signifikan, dan Sangat Signifikan. Sedangkan pada Level Kemungkinan, LPDP menetapkan penilaian pada lima kategori yang meliputi Hampir Tidak Terjadi, Jarang Terjadi, Kadang Terjadi, Sering Terjadi, dan Hampir Pasti Terjadi.

Berdasarkan hasil pemantauan risiko tahunan (s.d Triwulan IV) sepanjang tahun 2023, Matriks Analisis Risiko LPDP adalah sebagai berikut.

Kode warna di atas sangat penting guna mewakili tingkat kombinasi probabilitas dan dampak risiko yang teridentifikasi. Dengan demikian, risiko tinggi harus berwarna merah, risiko sedang berwarna kuning-oranye, dan risiko rendah berwarna hijau. Mitigasi risiko LPDP selalu diarahkan agar masing-masing risiko selalu tetap dalam Level Risiko Rendah (hijau) atau Sangat Rendah (biru).

LPDP telah menetapkan 48 kejadian risiko yang diidentifikasi dari indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur Utama dan proses bisnis yang mendukung pencapaian IKU Direktur Utama LPDP. Dari 48 kejadian risiko tersebut, terdapat 8 *Highlighted Risk Event* atas layanan utama LPDP serta upaya pencegahan korupsi.

Dari 48 kejadian risiko LPDP, 47 di antaranya telah mengalami penurunan Level Risiko atau dapat dipertahankan pada Level Risiko yang sama dengan awal tahun. Terdapat satu kejadian risiko yang mengalami kenaikan dari semula Level Risiko 1 pada awal tahun menjadi Level Risiko 2 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan studi owordree. Atas peningkatan risiko dimaksud telah dilakukan upaya mitigasi risiko untuk menurunkan level risiko.

Matriks Analisis Risiko		Level Dampak				
		Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	Hampir Pasti Terjadi	7	12	17	22	25
	Sering Terjadi	4	9	14	19	24
	Kadang Terjadi	3	8	13	18	23
	Jarang Terjadi	2	6	11	16	21
	Hampir Tidak Terjadi	1	5	10	15	20

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (6)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Orange
Sedang (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Biru

5.7 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM)

Sebagai Operator investasi Pemerintah (OIP) dan pengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan dengan Dana Kelolaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun—di mana saat ini telah mencapai Rp139,307 triliun—tantangan yang dihadapi LPDP ke depannya semakin besar. Dana Kelolaan yang semakin besar memiliki makna adanya tanggung jawab yang besar yang diemban oleh LPDP. Dengan demikian, LPDP perlu senantiasa menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan yang prima, profesional, berintegritas, dan bersinergi dalam mewujudkan visi LPDP sebagai Lembaga pengelola dana bertaraf internasional guna menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing global, serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan melalui pemberian layanan beasiswa, pendanaan riset inovatif produktif, mendukung peningkatan bidang kebudayaan, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi menuju *World Class University*.

Untuk mewujudkan visi dan misi LPDP dan menjaga tata kelola pengelolaan dana abadi yang lebih akuntabel, berintegritas, dan profesional, LPDP berkomitmen untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) sejak tahun 2021. Hal ini ditandai dengan pencanangan dan pendandatangan pakta integritas yang dipimpin oleh Direktur Utama LPDP dan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan LPDP.

Selama proses pembangunan ZI-WBBM, LPDP terus melakukan peningkatan dan perluasan layanan baru yang berfokus pada inovasi pada enam area perubahan:

Manajemen Perubahan

Penataan Tata Laksana

Penataan Manajemen SDM Aparatur

Akuntabilitas Kinerja

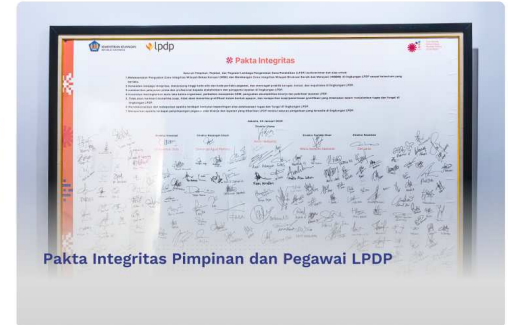
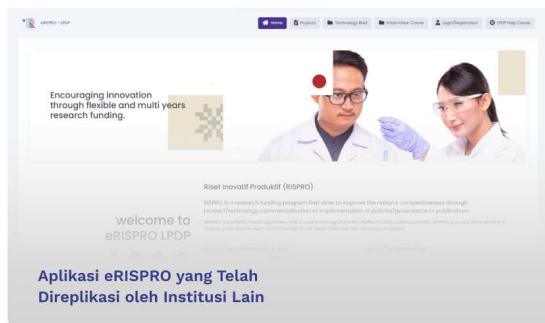
Penguatan Pengawasan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Secara umum, inilah upaya peningkatan dan penyempurnaan pada enam area perubahan yang telah dilakukan LPDP:

1. Penyempurnaan pada area Manajemen Perubahan, di antaranya meliputi internalisasi nilai Kemenkeu yaitu integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan serta core values Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui berbagai macam kegiatan, baik struktural maupun kultural pada direktorat/satuan di lingkungan LPDP.
2. Dari sisi area penataan tata laksana, telah dilakukan penyempurnaan dan revisi secara berkala atas peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan dan dukungan manajemen proses bisnis pada direktorat/satuan LPDP. Selain itu, dilakukan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui berbagai aplikasi untuk pengukuran kinerja, kepegawaian, dan peningkatan layanan LPDP.
3. Dalam perbaikan Sistem Manajemen SDM, LPDP menyusun kebijakan sistem informasi pegawai yang mudah diakses yang selaras dengan penerapan *Know Your Employee* dan penerapan kode etik. Selain itu, dilakukan intensifikasi pelaksanaan Dialog Kinerja Individu (DKI) pegawai secara berkala.
4. Untuk penguatan pada area akuntabilitas kinerja, di antaranya melalui intensifikasi penyalarsan sasaran strategis, indikator kinerja, pelatihan pengelola kinerja, dan manajemen risiko pada level entitas untuk mendukung pencapaian tujuan LPDP.
5. Untuk penguatan di area Pengawasan, LPDP melakukan sosialisasi, diseminasi, dan *public campaign* program antikorupsi, program antigratifikasi, serta penguatan integritas kepada seluruh pegawai dan pengguna layanan LPDP melalui berbagai kanal komunikasi LPDP. Selain itu, LPDP melakukan penguatan implementasi pengendalian internal dan pengawasan Model Tiga Lini oleh Manajemen, UKI, serta SPI secara efektif.
6. Untuk penguatan di area Pelayanan Publik, LPDP memfokuskan program atas pelaksanaan evaluasi dan perbaikan standar layanan LPDP, pelatihan budaya pelayanan prima, serta penyempurnaan sistem informasi terintegrasi. Fokus lainnya yang juga penting adalah melaksanakan perluasan dan optimalisasi kebermanfaatan program layanan beasiswa melalui aplikasi e-Beasiswa dan layanan pendanaan riset melalui aplikasi eRISPRO. Pada saat ini, aplikasi eRISPRO telah direplikasi dan diterapkan oleh berbagai lembaga/universitas di Indonesia.

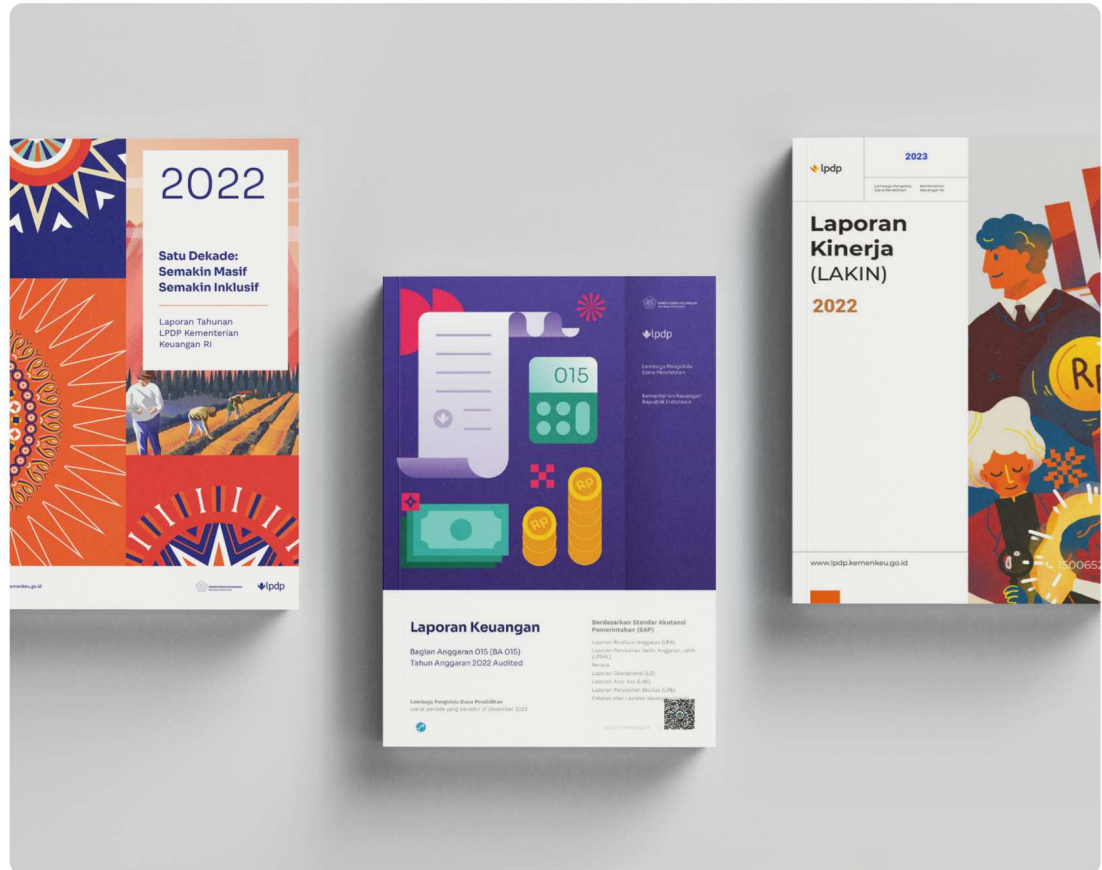
Dokumentasi Pembangunan ZI-WBBM LPDP 2023



5.8 Keterbukaan Informasi Publik

Transparansi informasi merupakan asas utama bagi instansi sektor publik yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan layanan kepada masyarakat luas. LPDP merupakan salah satu di antara instansi tersebut. LPDP melaksanakan pelayanan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara penuh dan konsekuen, sebagai bentuk komitmen LPDP terhadap persebaran informasi yang jelas dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sasaran utama informasi ini adalah para penerima beasiswa dan bantuan dana riset LPDP.

Keterbukaan informasi LPDP telah disampaikan kepada publik melalui rilis berbagai laporan tahunan secara terperiodik, akurat, dan transparan. LPDP secara rutin memublikasikan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja dan sejumlah laporan tambahan lainnya. Seluruh laporan tersebut dapat diunduh di laman situs lpdp.kemenkeu.go.id.



5.9 Survei Kepuasan Publik

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik, LPDP melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Publik atas Layanan LPDP sesuai dengan standar Indeks Kepuasan Publik pada Kemenkeu. LPDP melaksanakan Survei Kepuasan Publik atas Layanan (SKPL) tahun 2023 bekerja sama dengan konsultan independen dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Survei dilaksanakan pada penerima beasiswa dan pendanaan riset, serta kinerja operasional perkantoran LPDP. Survei bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan para penerima layanan LPDP, yang pada akhirnya akan menjadi masukan bagi LPDP dalam penyempurnaan layanan. Survei dilaksanakan dengan menyebar kuesioner secara daring. Untuk mendalami informasi, dilakukan pula *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan secara luring (dalam negeri) dan daring (luar negeri).

Responden survei pada tahun 2023 ini berjumlah 7.264 orang untuk layanan beasiswa. Kepuasan total untuk layanan beasiswa adalah 4,20 dari skala 5,0, (0 sangat buruk, 5 sangat baik). Sementara untuk Rispro melibatkan 41 responden dengan tingkat kepuasan 4,51 dari skala 5. Apabila di total, Indeks Kepuasan Publik atas Layanan LPDP 2022 adalah 4,36.

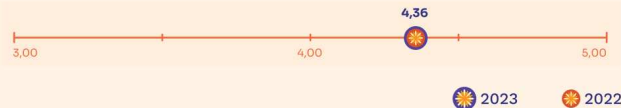
Beasiswa



RISPRO



LPDP Keseluruhan



06 Kontribusi Penerima Manfaat

Terang untuk Kesejahteraan

Seperti kembang api yang menerangi langit, membawa kegembiraan dan semangat bagi semua yang melihatnya, inisiatif tanggung jawab sosial LPDP bertujuan untuk menerangi kehidupan dengan menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.





6.1 Pendahuluan

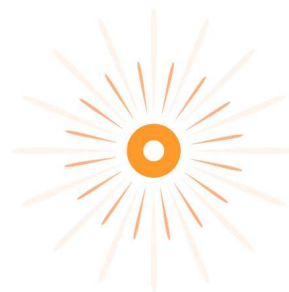
Secara visi dan misi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendukung percepatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dengan menyediakan pendanaan beasiswa untuk jenjang S2 dan S3. Harapan besar diletakkan di dalam setiap *awardee* untuk kembali berkontribusi dengan ilmu dan pemikirannya dalam membangun kemajuan bangsa. Cita-cita menyongsong Indonesia Emas 2045 tetap tertapi dalam arah tujuan LPDP dalam memberikan pendanaan beasiswa secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan jumlah alumni mencapai 21.373 orang per 31 Desember 2023, setiap alumni diminta melaporkan setiap kegiatan kontribusi yang dilakukan setelah lulus. Sejalan dengan itu, LPDP terus berupaya merancang berbagai program untuk mengelola dan mendorong alumni agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan perubahan global.

Manfaat Dana Abadi di Bidang Pendidikan juga mendukung kegiatan inovasi riset ilmiah hingga pelestarian kebudayaan nasional. Berbagai riset yang didanai berorientasi pada inovasi kebaruan sekaligus mempertimbangkan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas, baik berupa produk luaran maupun naskah akademik sebagai landasan kebijakan pengambilan keputusan pemerintah. Dalam pemberian hibah dana untuk pelaku seni budaya, komitmen dukungan terhadap keberlanjutan kebudayaan ini juga berkontribusi terhadap akses masyarakat terhadap kreativitas serta mampu mendorong ekosistem kebudayaan Indonesia dan roda ekonomi yang berputar di sekitarnya.

6.2 Kontribusi Alumni dan Grantee

A. Bidang Pendidikan

Para alumni bersinergi di berbagai posisi dan peran baik di pemerintahan, perusahaan, wiraswasta, pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Ribuan alumni LPDP juga tergabung dalam wadah organisasi yang disebut Mata Garuda. Organisasi ini secara resmi menjadi tempat alumni untuk berdiskusi dan mengembangkan jaringan terkait dengan tugas profesionalnya.



a. Sektor Publik

01 Imam Santoso



Dosen Metalurgi Institut Teknologi Bandung

Aalto University, Finlandia
PhD, Metallurgical Engineering

Dosen asal Jember ini dikenal luas sebagai *influencer* di bidang pendidikan. Di tengah kesibukannya mengajar bidang metalurgi, ia aktif berbagi pengetahuan dan informasi terkini tentang pendidikan, karier, kehidupan mahasiswa, ilmu metalurgi, dan berbagai topik lainnya. Sebagai upaya untuk menyebarkan ilmu kepada publik, Imam sering mengadakan sesi tanya jawab dan diskusi daring mengenai materi ilmu metalurgi, informasi beasiswa, dan topik pendidikan lainnya.

Imam selalu menekankan pentingnya menempuh pendidikan hingga jenjang tertinggi bagi generasi muda Indonesia. Ia percaya bahwa pendidikan adalah cara yang efektif untuk mengubah nasib diri sendiri, keluarga, dan pada akhirnya berdampak pada kemajuan bangsa secara lebih luas.

02 Andi Dian Permana



Dosen Universitas Hasanuddin

Queen's University Belfast, Inggris
PhD, Pharmacy

Bulan Juli 2024 menjadi momen bersejarah dalam hidup Andi Dian Permana, seorang dosen di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar. Andi secara resmi diukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Penghantar Obat pada usia 34 tahun. Gelar ini menjadikannya sebagai guru besar termuda di UNHAS.

Produktivitasnya dalam dunia akademik juga sangat menonjol, dengan kepemilikan 86 artikel jurnal yang terindeks Scopus selama kariernya. Ia berharap pencapaian ini dapat menginspirasi generasi muda dan para dosen untuk bertekad kuat dan totalitas dalam mengejar tujuan mereka.

03 Galih Sulistyaningra



Guru Pegawai Negeri Sipil Sekolah Dasar

University College London, Inggris
Master, Educational Planning,
Economics and International
Development

Tidak banyak guru sekolah dasar (SD) yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi hingga jenjang S2. Galih Suryaningtyas adalah salah satu pengecualian. Setelah mengumpulkan studi magister di University College London dalam bidang pendidikan, Galih memilih untuk berkarier sebagai guru SD negeri di Jakarta.

Dalam menjalankan perannya sebagai guru, ia sering membagikan metode pengajaran yang inovatif dan kreatif melalui platform media sosial Instagram. Galih juga secara aktif meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial dan pendidikan di Indonesia, serta topik-topik seperti pendidikan inklusif, sejarah kritis, hingga kesejahteraan guru.

04 Rahmat Putra Yudha



Guru Pegawai Negeri Sipil Sekolah Menengah Pertama

University of Wollongong, Australia
Master, Education (TESOL)

Cerita perjuangan Rahmat Putra Yudha dalam meraih beasiswa S2 setelah mengalami kegagalan sebanyak 112 kali telah membuat namanya dikenal luas. Namun, di balik itu, Yudha adalah seorang guru bahasa Inggris di sekolah menengah pertama negeri di Pontianak. Selama pandemi COVID-19, ia menginisiasi gerakan pelatihan optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dapat diikuti oleh guru hingga dosen di seluruh Indonesia. Selain itu, ia juga membuka kursus bahasa Inggris dan membentuk komunitas penulis Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kalimantan Barat untuk mendorong kreativitas serta produksi karya tulis di kalangan para guru.

05 Mochamad Nur Ramadhani



Dokter Disabilitas Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan

Humboldt-Universität zu Berlin, Jerman
Master, International Health

Sebagai seorang penyandang disabilitas, Mochamad Nur Ramadhani adalah contoh inspiratif bahwa keterbatasan fisik tidak seharusnya menjadi penghalang utama dalam meraih pendidikan tinggi. Pria yang akrab disapa Dhan ini tidak hanya berhasil melanjutkan studi S2 di Jerman, tetapi juga sukses berkarier sebagai dokter gigi. Dhan, yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Kesehatan, memanfaatkan pendidikan dan pengalamannya untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi yang berkualitas serta berkontribusi dalam pengembangan kebijakan kesehatan nasional.

a. Sektor Privat

01 Nyoman Anjani



Co-Founder & CEO Gently

Massachusetts Institute of Technology,
Amerika Serikat
Master, Integrated Design and
Management

Perempuan kelahiran Bandung ini memutuskan untuk berwirausaha setelah bekerja selama kurang lebih empat tahun di sebuah perusahaan multinasional. Nyoman Anjani mendirikan bisnis *skincare* untuk bayi bernama Gently Indonesia. Setelah menamatkan studi S2 di MIT, Nyoman menjadi Co-Founder sekaligus CEO Gently. Produk Gently diklaim terbuat dari bahan premium yang ramah bagi bayi dan ibu, dengan harga yang terjangkau di pasaran.

02 Widya Putra



Co-Founder & CEO Meatless Kingdom

Wageningen University, Belanda
Master, Food Quality Management

Jika bertanya di mana alumni beasiswa LPDP angkatan pertama, Widya Putra adalah salah satunya. Widya dikenal sebagai salah satu pendiri dan CEO dari Meatless Kingdom, sebuah startup yang berfokus pada pengembangan produk makanan berbasis nabati. Sebagai alumni beasiswa LPDP, Widya telah membawa pengetahuan dan keahlian yang diperoleh selama studinya untuk mendorong inovasi di industri makanan nabati di Indonesia. Meatless Kingdom berhasil menciptakan berbagai produk alternatif daging yang tidak hanya lezat tetapi juga bergizi dan ramah lingkungan.

03 Matilda Narulita



Co-Founder & COO Nexmedis

University of Michigan, Amerika Serikat
Master, Business Administration

Menjadi penyintas kanker telah mengajarkan banyak hal, terutama tentang ketahanan hidup bagi Matilda Narulita. Tidak ingin kondisi kesehatannya menjadi batasan, dan berbekal pengalaman mencari perawatan kanker di luar negeri, Matilda bergabung dalam pengembangan Nexmedis, sebuah sistem informasi kesehatan terpadu berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Nexmedis membantu memberikan diagnosis terbaik bagi pasien sehingga tindakan medis bisa lebih tepat sasaran sesuai dengan keluhan.

Matilda berperan aktif dalam pengembangan Nexmedis. Dalam delapan bulan sejak diluncurkan, Nexmedis telah bekerja sama dengan 300 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, dari kota hingga pelosok. Nexmedis juga telah menerima berbagai penghargaan selama Matilda berkarier di sana.

04 Andhyta Firselly Utami



Founder & CEO Think Policy

Harvard Kennedy School, Amerika Serikat
Master, Political and Economic
Development

Andhyta Firselly Utami, yang akrab dipanggil Afutami, dikenal sebagai seorang profesional yang aktif di bidang kebijakan publik dan advokasi lingkungan. Kariernya mencakup peran sebagai peneliti, pembicara publik, dan aktivis lingkungan. Saat ini, Afutami menjabat sebagai pendiri sekaligus CEO Think Policy, sebuah organisasi yang mengadvokasi isu-isu kebijakan publik dengan tujuan mendorong kemajuan dan demokratisasi di Indonesia.

05 Lodimeda Kini



Managing Director Museum Ammu Hawu/ Peneliti Lepas

Leiden University, Belanda
Master, Industrial Ecology

Delft University of Technology (TU Delft),
Belanda
PhD, Water Management

Krisis air di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menjadi tantangan sehari-hari bagi sebagian besar masyarakat di sana. Lodimeda Kini tergerak untuk kembali ke tanah kelahirannya dan mengabdikan diri sebagai peneliti isu lingkungan, khususnya mengenai masalah air di pulau tersebut. Film dokumenter terbarunya *Pulau yang Ditinggalkan* menangkap realitas yang dihadapi oleh masyarakat di Kepulauan NTT. Melalui film ini, Lodi bertujuan untuk menyebarkan penelitian ini agar lebih banyak orang mengetahui permasalahan tersebut dan memberikan dampak yang berarti di masa depan.

B. Bidang Penelitian dan Inovasi, dan Kebudayaan

Menunjang penelitian berkelanjutan untuk kemajuan bangsa, LPDP telah mendukung pendanaan berbagai riset ilmu pengetahuan melalui program pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO). Tujuan pendanaan RISPRO adalah untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa melalui komersialisasi produk/teknologi maupun implementasi kebijakan/tata kelola atau publikasi.

a. Hasil Riset



01 Chobio

Endang Sutriswati Rahayu dan tim dari Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengembangkan inovasi menarik berupa cokelat probiotik. Dikenal dengan nama Chobio, produk ini adalah cokelat probiotik pertama di Indonesia yang diolah dari biji kakao yang difermentasi menggunakan *Lactobacillus plantarum* HL 15, kemudian ditambahkan probiotik *Lactobacillus plantarum* Dad 13. Chobio merupakan hasil kolaborasi riset antara tim peneliti *Microbiota* FTP-PSPG UGM, BPTP Yogyakarta, serta mitra produsen dan pemasar, CV. Cokelat nDalem. Bakteri baik yang berjumlah milyaran dalam Chobio berfungsi penting untuk menjaga imunitas tubuh, keseimbangan hormon, dan mengendalikan level stres.



02. Butimo

Andi Sudiarso, dosen Departemen Teknik Mesin dan Industri Fakultas Teknik UGM, telah mengembangkan mesin batik tulis untuk memberikan sentuhan modernisasi pada proses pembuatan kain batik tulis, yang merupakan salah satu produk warisan budaya nusantara. Mesin yang dinamakan Butimo ini menggunakan teknologi *Computer Numeric Control* (CNC). Butimo dirancang untuk menggantikan proses penggambaran di kertas, penjiplakan gambar pola di kain, serta proses mencanting dengan malam yang biasanya memerlukan waktu lama.



03. Vaksin Ikan Nila

Dessy Sugiani dan tim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengembangkan vaksin inovatif untuk ikan nila, guna mengatasi masalah penyakit mematikan yang sering terjadi dalam budidaya ikan nila. Vaksin ini, yang diberi nama CapriVac Hydrogalaksi, adalah vaksin tipe bivalen yang dapat menangkal dua jenis penyakit sekaligus. CapriVac Hydrogalaksi secara bertahap telah mulai digunakan oleh para pembudidaya di berbagai lokasi, membantu menekan angka kematian ikan nila dan meningkatkan produktivitas budidaya ikan.



C. Bidang Kebudayaan

Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) dibentuk sesuai dengan komitmen pemerintah dalam mendukung petaku budaya untuk mengembangkan prestasi. Meski tergolong baru diluncurkan dan disalurkan sejak 2022, namun telah berhasil menyokong berbagai program kegiatan budaya skala besar baik taraf nasional maupun internasional.



01 Ubud Writers & Readers Festival

Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) adalah festival sastra dan budaya tahunan yang diselenggarakan di Ubud, Bali. Festival ini mengumpulkan penulis, pembaca, dan tokoh budaya dari seluruh dunia untuk berbagi ide, berdiskusi, dan merayakan karya sastra serta seni. Dampak dari UWRF mencakup pengembangan sastra dan seni, pemberdayaan komunitas, peningkatan pendidikan, serta menarik lebih banyak wisatawan.

Sejak 2023, LPDP secara resmi mendanai UWRF melalui DAKB, juga dikenal sebagai Dana Indonesiana. Pendanaan ini menunjukkan bagaimana dukungan finansial dapat digunakan untuk mempromosikan dan mendukung kegiatan budaya yang berdampak luas dan berkelanjutan.



02 Jogja-NETPAC Asian Film Festival

Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) adalah festival film tahunan yang diadakan di Yogyakarta, Indonesia, dengan fokus pada karya-karya sinematik dari Asia. Didirikan pada tahun 2006, JAFF berkolaborasi dengan Network for the Promotion of Asian Cinema (NETPAC) untuk mempromosikan dan merayakan film-film Asia serta menghubungkan para pembuat film dengan audiens yang lebih luas.



03 Pertunjukan Longser Pendekar Gunung Bohong

Pertunjukan Longser bertajuk Pendekar Gunung Bohong, yang digelar oleh Yayasan Kebudayaan Bandoeng Mooi, merupakan inisiatif penting untuk melestarikan seni tradisional longser Sunda yang saat ini mengalami krisis. Longser, sebagai salah satu bentuk teater rakyat khas Sunda, menggabungkan elemen drama, tari, dan musik tradisional dalam sebuah pertunjukan yang sarat dengan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya.

Dengan visi dan misi yang sejalan dengan semangat DAKB, seni pertunjukan ini mendapatkan pendanaan dari LPDP pada tahun 2023, mendukung upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.



07

Laporan Keuangan

Bijak, Transparan, Genggam Masa Depan

LPDP memegang teguh sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Setiap sumber daya dialokasikan dengan merata untuk mendukung keberlangsungan program pendidikan dan inovasi bagi para *awardee* dan *grantee*. Amanah pengelolaan dana abadi yang berpegang teguh pada kompas *core value* kami, memastikan nyala terang ini dapat terus berkelanjutan dari generasi ke generasi.



7.0 Daftar Lampiran dan Surat Pernyataan Anggota Direksi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

GEDUNG DANADYAKSA, JALAN CIKINI RAYA NO 61, JAKARTA 10330

TELEPON (021) 23951607, FAKS (021) 21232519, LAMAN: ldp.kemkeu.go.id

PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON:134 dan SUREL: kemenkeu.prime@kemkeu.go.id

Surat Pernyataan Direksi
Badan Layanan Umum
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Tentang Tanggung Jawab Atas
Laporan Keuangan
Per 31 Desember 2023

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Andin Hadiyanto
Alamat Kantor : Gedung JB. Sumarlin, Komplek Kementerian Keuangan Jakarta Pusat
Alamat Domisili : Jakarta
Telepon : (021) 23951607
Jabatan : Pjt. Direktur Utama

Nama : Emmanuel Agust Hartono
Alamat Kantor : Gedung JB. Sumarlin, Komplek Kementerian Keuangan Jakarta Pusat
Alamat Domisili : Jakarta
Telepon : (021) 23951607
Jabatan : Direktur Keuangan dan Umum

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan
2. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Mei 2024

Andin Hadiyanto
Pjt. Direktur Utama

Emmanuel Agust Hartono
Direktur Keuangan dan Umum



KANAKA PURADIREDJA SUHARTONO
Head Office
 Firm License No. 588/KM.1/2008
 THE ROYAL PALACE
 Jl. Prof Dr. Soepomo NO.178A - C 29
 Jakarta 12810 - Indonesia
 P. 62 - 21 8313861 F. 62-21 8313871
 E. central.mail@nexia.id
 www.nexia.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Ref.: 00206/2.0752/AU.5/11/1014-2/1/V/2024

Dewan Pengawas, dan Direksi
BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit Laporan keuangan BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ("LPDP"), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan Atas Laporan Keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca) BLU LPDP tanggal 31 Desember 2023, serta realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit ini berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap BLU LPMOH berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BLU LPDP dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkannya, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi BLU LPDP atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BLU LPDP.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk memberikan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat dipektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

[illegible]

Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Medan	Surabaya	Semarang
---------------	---------------	-----------------	-------	----------	----------



KANAKA PURADIREDDA SUHARTONO

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecukupan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup untuk dapat mengungkapkan kesalahan yang signifikan. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecukupan maupun kesalahan, karena kecukupan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghindaran secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Menyusun dan melaksanakan prosedur pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendeteksi prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal BLU LPDP.
- Mengavalasi ketepatan kelengkapan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan profesional.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelengkapan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidaklengkapan material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang menyebabkan ketidaklengkapan tersebut. Jika terdapat ketidaklengkapan material, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidaklengkapan material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami akan selalu berlaku untuk laporan keuangan hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BLU LPDP tidak dapat mempertahankan kelengkapan usaha.
- Mengavalasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan, dan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendayarkannya dengan suatu cara yang wajar dan penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lain

Laporan audit kami atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern BLU LPDP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 disampaikan secara terpisah kepada Dewan Pengawas dan Direksi dalam laporan nomor: 032/KPS/2.0752/RO-1/BLU-LPDP/1014-2/N/2024 dan 033/KPS/2.0752/RO-1/BLU-LPDP/1014-2/N/2024



Aris Suryanta, EPA
NRAP: AP.1014
Jakarta, 17 Mei 2024

Ref.: 00206/2.0752/AU.5/11/1014-2/1/V/2024



7.1 Lampiran 1:

Laporan Realisasi Anggaran LPDP
per 31 Desember 2023

		2023			2022
Uraian	Catatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Negara dan Hibah					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	8.014.759.998.000	9.333.252.912.056	116,45	6.385.259.417.491
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		8.014.759.998.000	9.333.252.912.056	116,45	6.385.259.417.491
Belanja					
Belanja Barang	B.2.1	9.971.160.476.000	9.837.383.554.259	98,66	4.930.209.479.541
Belanja Modal	B.2.2	9.783.274.000	7.880.116.868	80,55	3.943.571.959
Jumlah Belanja		9.980.943.750.000	9.845.263.671.127	98,64	4.934.153.051.500
Surplus (Defisit) Anggaran	B.3	(1.966.183.752.000)	(512.010.759.071)	26,04	1.451.106.365.991
Pembiayaan	B.4	-	-	0,00	-
Jumlah Pembiayaan		-	-	0,00	-
Selisih Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	B.5	(1.966.183.752.000)	(512.010.759.071)	26,04	1.451.106.365.991

7.2 Lampiran 2:

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LPDP
per 31 Desember 2023

Uralan	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenakan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	C.1	6.461.440.172.948	5.010.333.806.957	1.451.106.365.991	28,96
Penggunaan SAL	C.2	-	-	-	0,00
Sub Total		6.461.440.172.948	5.010.333.806.957	1.451.106.365.991	28,96
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	C.3	(512.010.759.071)	1.451.106.365.991	(1.963.117.125.062)	-135,28
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	C.4	-	-	-	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Setelah Penyesuaian	C.5	(512.010.759.071)	1.451.106.365.991	(1.963.117.125.062)	-135,28
Sub Total		5.949.429.413.877	6.461.440.172.948	(512.010.759.071)	-7,92
Koreksi	C.6	-	-	-	0,00
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	C.7	5.949.429.413.877	6.461.440.172.948	(512.010.759.071)	-7,92

7.3 Lampiran 3:

Neraca LPDP per 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)	D.1.1.1	3.022.889.508.177	1.834.885.595.496	1.188.003.912.681	64,75
Investasi Jangka Pendek - BLU	D.1.1.2	2.891.155.823.369	4.625.554.577.452	(1.734.398.754.083)	-37,50
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	D.1.1.3	1.357.410.725.985	819.479.415.595	537.931.310.390	65,64
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	D.1.1.4	803.731.693.873	795.987.148.126	7.744.546.747	0,97
Piutang dari Kegiatan Nonoperasional BLU	D.1.1.5	6.349.402.986	5.462.493.489	886.909.497	16,24
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Nonoperasional BLU	D.1.1.6	(4.782.633.685)	(3.924.579.484)	(858.054.201)	21,86
Persediaan	D.1.1.7	101.237.700	113.974.250	(12.736.550)	-11,17
Jumlah Aset Lancar		8.076.855.758.405	8.077.558.624.924	(702.866.519)	-0,01
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya	D.1.2.1	140.037.133.951.947	119.844.502.324.242	20.192.631.627.705	16,85
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya	D.1.2.2	(896.074.228.316)	(726.513.235.359)	(169.560.992.957)	23,34
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya (Netto)		139.141.059.723.631	119.117.989.088.883	20.023.070.634.748	16,81
Jumlah Investasi Jangka Panjang		139.141.059.723.631	119.117.989.088.883	20.023.070.634.748	16,81
ASET TETAP					
Tanah	D.1.3.1	-	103.873.814.000	(103.873.814.000)	-100,00
Peralatan dan Mesin	D.1.3.2	18.193.453.869	13.487.183.361	4.706.270.508	34,89
Gedung dan Bangunan	D.1.3.3	-	1.929.044.000	(1.929.044.000)	-100,00
Aset Tetap Lainnya	D.1.3.4	25.696.500	25.696.500	-	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.1.3.5	-	120.990.000	(120.990.000)	-100,00
Akumulasi Penyusutan	D.1.3.6	(10.717.081.417)	(9.265.357.153)	(1.451.724.264)	15,67
Jumlah Aset Tetap		7.502.068.952	110.171.370.708	(102.669.301.756)	-93,19

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	D.1.4.1	5.758.094.401	5.758.094.401	-	0,00
Aset Lain-Lain pada BLU	D.1.4.2	35.355.980.391	1.000.000.000	34.355.980.391	3.435,60
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	D.1.4.3	(3.962.008.776)	(3.243.574.526)	(718.434.250)	22,15
Jumlah Aset Lainnya		37.152.066.016	2.514.519.875	33.637.546.141	0,00
JUMLAH ASET		147.262.569.617.004	127.309.233.604.390	19.953.336.012.614	15,67
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	D.2.1.1	181.208.626.318	80.563.029.523	100.645.596.795	124,93
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		181.208.626.318	80.563.029.523	100.645.596.795	124,93
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN	D.2.2.1	139.107.700.000.000	119.107.700.000.000	20.000.000.000.000	16,79
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		139.107.700.000.000	119.107.700.000.000	20.000.000.000.000	16,79
JUMLAH KEWAJIBAN		139.288.908.626.318	119.188.263.029.523	20.100.645.596.795	16,86
EKUITAS DANA					
EKUITAS					
Ekuitas	D.3.1.1	7.973.660.990.686	8.120.970.574.867	(147.309.584.181)	~1,81
Jumlah Ekuitas Dana		7.973.660.990.686	8.120.970.574.867	(147.309.584.181)	~1,81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		147.262.569.617.004	127.309.233.604.390	19.953.336.012.614	15,67

7.4 Lampiran 4:

Laporan Operasional LPDP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
Pendapatan Operasional	E.1.1				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	E.1.1.1	9.257.840.738.768	6.582.281.065.119	2.675.559.673.649	40,65
Pendapatan BLU Lainnya	E.1.1.2	38.673.645.594	3.150.097.332	35.523.548.262	1.127,70
Jumlah Pendapatan Operasional		9.296.514.384.362	6.585.431.162.451	2.711.083.221.911	41,17
Beban Operasional	E.1.2				
Beban Pegawai	E.1.2.1	73.711.308.072	63.375.788.790	10.335.519.282	16,31
Beban Persediaan	E.1.2.2	61.853.306	144.812.036	(82.958.730)	-57,29
Beban Barang dan Jasa	E.1.2.3	9.081.920.010.812	4.455.308.560.872	4.626.611.449.940	103,84
Beban Pemeliharaan	E.1.2.4	619.408.398	527.992.500	91.415.898	17,31
Beban Perjalanan Dinas	E.1.2.5	71.526.012.748	27.611.469.853	43.914.542.895	159,04
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.1.2.6	2.904.997.544	1.906.253.943	998.743.601	52,39
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.1.2.7	858.054.201	(101.089.745)	959.143.946	-948,80
Beban Lain-lain	E.1.2.8	-	-	-	0,00
Jumlah Beban		9.231.601.645.081	4.548.773.788.249	4.682.827.856.832	102,95
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional		64.912.739.281	2.036.657.374.202	(1.971.744.634.921)	-96,81

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
KEGIATAN NONOPERASIONAL					
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Nonlancar					
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar	E.2.1	-	68.365.700	(68.365.700)	-100,00
Beban Pelepasan Aset Nonlancar	E.2.1	-	-	-	0,00
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Nonlancar	E.2.1	-	68.365.700	(68.365.700)	-100,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya					
Pendapatan Kegiatan Nonoperasional Lainnya	E.2.2	74.234.531.007	30.011.392.647	44.223.138.360	147,35
Beban Kegiatan Nonoperasional Lainnya	E.2.2	5.819.116.261	-	5.819.116.261	100,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional Lain	E.2.2	68.415.414.746	30.011.392.647	38.404.022.099	127,96
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Nonoperasional	E.2	68.415.414.746	30.079.788.347	38.335.656.399	127,45
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		133.328.154.027	2.066.737.132.549	(1.933.408.978.522)	-93,55
POS LUAR BIASA	E.3	-	-	-	0,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.4	133.328.154.027	2.066.737.132.549	(1.933.408.978.522)	-93,55

7.5 Lampiran 5:

Laporan Arus Kas LPDP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/turun (Perubahan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
Arus Masuk Kas					
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	F.1.1	9.250.096.193.021	6.360.547.911.586	2.889.548.281.435	45,4
Pendapatan Lainnya	F.1.1.2	48.201.091.611	24.343.140.205	23.857.891.406	98,01
Pendapatan Hibah	F.1.1.3	34.955.687.424	300.000.000	34.655.687.424	11.551,90
Jumlah Arus Masuk Kas		9.333.252.912.056	6.385.191.051.791	2.948.061.860.265	46,17
Arus Keluar Kas					
Pembayaran Pegawai	F.1.2.1	73.711.308.072	63.375.788.790	10.335.519.282	16,31
Pembayaran Barang	F.1.2.2	30.719.352.868	17.540.259.835	13.179.093.033	75,14
Pembayaran Jasa	F.1.2.3	89.438.396.897	51.826.620.618	37.611.776.279	72,57
Pembayaran Pemeliharaan	F.1.2.4	619.408.398	527.992.500	91.415.898	17,31
Pembayaran Perjalanan Dinas	F.1.2.5	71.931.710.647	27.664.905.853	44.266.804.794	160,01
Pembayaran Barang dan Jasa Khusus BLU	F.1.2.6	9.570.914.260.621	4.769.171.413.857	4.801.742.846.764	100,68
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	F.1.2.7	49.116.756	102.498.088	(53.381.332)	-52,08
Jumlah Arus Keluar Kas		9.837.383.554.259	4.930.209.479.541	4.907.174.074.718	99,53
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		(504.130.642.203)	1.454.981.572.250	(1.959.112.214.453)	-134,65
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Arus Masuk Kas					
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	F.2.1	-	68.365.700	(68.365.700)	-100,00
Jumlah Arus Masuk Kas		-	68.365.700	(68.365.700)	-100,00
Arus Keluar Kas					
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	F.2.2.1	4.332.081.128	3.688.982.359	643.098.769	17,43
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	F.2.2.2	3.548.035.740	254.589.600	3.293.446.140	1.293,63
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	F.2.2.3	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	-	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		20.007.880.116.868	20.003.943.571.959	3.936.544.909	0,02
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(20.007.880.116.868)	(20.003.875.206.259)	(4.004.910.609)	0,02

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naikalan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Arus Masuk Kas					
Penerimaan Pembiayaan investasi yang Bersal dari APBN (BA BUN Investasi)	F.3.1.1	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	-	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	-	0,00
Arus Keluar Kas					
Jumlah Arus Keluar Kas	F.3.2	-	-	-	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	-	0,00
KENAIKAN (PENURUNAN)	F.4	(512.010.759.071)	1.451.106.365.991	(1.963.117.125.062)	-135,28
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS		(28.101.940)	-	(28.101.940)	-100,00
SALDO AWAL KAS		6.461.440.172.948	5.010.333.806.957	1.451.106.365.991	28,96
SALDO AKHIR KAS	F.6	5.949.401.311.937	6.461.440.172.948	(512.038.861.011)	-7,92
Rincian Saldo Akhir Kas:					
Saldo Akhir Kas pada BLU		3.022.889.508.177	1.834.885.595.496	1.188.003.912.681	64,75
Investasi Jangka Pendek BLU		2.891.155.823.369	4.625.554.577.452	(1.734.398.754.083)	-37,50
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya		35.355.980.391	1.000.000.000	34.355.980.391	3.435,60
Jumlah Rincian Saldo		5.949.401.311.937	6.461.440.172.948	(512.038.861.011)	-7,92

7.6 Lampiran 6:

Laporan Perubahan Ekuitas LPDP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah (Rp)	Persentase (%)
EKUITAS AWAL	G.1	8.120.970.574.867	6.061.540.057.465	2.059.430.517.402	33,98
SURPLUS/DEFISIT - LO	G.2	133.328.154.027	2.066.737.132.549	(1.933.408.978.522)	-93,55
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS					
Koreksi Nilai Aset Nonrevaluasi	G.3	-	(117.726.700)	117.726.700	100,00
Koreksi Lain-lain	G.3	(172.323.483.393)	(7.188.888.447)	(165.134.594.946)	2.297,08
Jumlah Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	G.3	(172.323.483.393)	(7.306.615.147)	(165.016.868.246)	2.258,46
TRANSAKSI ANTARENTITAS	G.4	(108.314.254.815)	-	(108.314.254.815)	100,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.5	(147.309.584.181)	2.059.430.517.402	(2.206.740.101.583)	-107,15
EKUITAS AKHIR	G.6	7.973.660.990.686	8.120.970.574.867	(147.309.584.181)	-1,81

7.7 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas pada Laporan Tahunan 2023 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

I. B - Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan LPDP bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas hasil pengelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan, Realisasi PNBP LPDP sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.333.252.912.056, lebih tinggi Rp2.947.993.494.565 (46,17%) dari realisasi per 31 Desember 2022 yang sejumlah Rp6.385.259.417.491.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta sejumlah pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan yang telah diterima pada rekening LPDP secara riil sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 9.333.252.912.056 atau 116,45 % dari target Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 sebesar Rp8.014.759.998.000. Seluruh pendapatan telah disahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II selaku mitra kerja LPDP. Rincian PNBP hingga 31 Desember 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Rincian PNBP sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 (Rp)	Persentase Realisasi dari Total (%)	Sudah Disahkan per 31 Desember 2023-LRA (Rp)	Belum Disahkan
Dana Abadi Pendidikan (DAP)	7.542.112.514.043	80,81	7.542.112.514.043	-
Deposito	2.424.855.895.284	25,98	2.424.855.895.284	-
Obligasi Negara	4.935.576.138.631	52,88	4.935.576.138.631	-
Obligasi Korporasi	143.986.532.000	1,54	143.986.532.000	-
Giro	3.532.300.834	0,04	3.532.300.834	-
Lain-lain	34.161.647.293	0,37	34.161.647.293	-

Uraian	Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 (Rp)	Persentase Realisasi dari Total (%)	Sudah Disahkan per 31 Desember 2023-LRA (Rp)	Belum Disahkan
Dana Abadi Penelitian (DAPL)	811.581.323.142	8,70	811.581.323.142	-
Deposito	226.557.769.797	2,43	226.557.769.797	-
Obligasi Negara	576.647.670.698	6,18	576.647.670.698	-
Obligasi Korporasi	8.300.162.667	0,09	8.300.162.667	-
Lain-lain	75.719.980	0,00	75.719.980	-
Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT)	641.497.878.280	6,87	641.497.878.280	-
Deposito	130.021.611.777	1,39	130.021.611.777	-
Obligasi Negara	493.601.285.951	5,29	493.601.285.951	-
Obligasi Korporasi	8.083.106.667	0,09	8.083.106.667	-
Lain-lain	9.791.873.886	0,10	9.791.873.886	-
Dana Abadi Kebudayaan (DAKB)	303.104.678.200	3,25	303.104.678.200	-
Deposito	81.311.168.267	0,87	81.311.168.267	-
Obligasi Negara	213.184.352.615	2,28	213.184.352.615	-
Obligasi Korporasi	7.970.498.667	0,09	7.970.498.667	-
Lain-lain	638.658.651	0,01	638.658.651	-
Nondana Abadi	34.956.518.392	0,37	34.956.518.392	-
Hibah	34.955.687.424	0,37	34.955.687.424	-
Total	9.333.252.912.056			
Target Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	8.014.759.998.000			
Pencapaian Dari DIPA (%)	116,45			

Pendapatan-LRA sebesar Rp9.333.252.912.056 merupakan kalkulasi atas pendapatan yang menjadi hak LPDP sampai dengan periode cut off pengesahan pada periode pelaporan keuangan ini.

Secara riil, terdapat perbedaan antara jumlah realisasi yang diterima melalui rekening operasional/bank dengan jumlah Pendapatan-LRA yang disahkan yang bersumber dari pengakuan Pendapatan-LRA instrumen keuangan berupa obligasi negara. Rincian perbedaan realisasi bank dengan Pendapatan-LRA dapat dicermati pada tabel di samping.

Perbedaan Jumlah Realisasi Bank dengan jumlah
Pendapatan-LRA sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah Realisasi Bank (Rp)	Jumlah Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (Rp)
DAP	7.661.405.094.332	7.542.112.514.043	119.292.580.290
Deposito	2.424.855.895.284	2.424.855.895.284	-
Obligasi Negara	5.054.868.718.921	4.935.576.138.631	119.292.580.290
Obligasi Korporasi	143.986.532.000	143.986.532.000	-
Giro	3.532.300.834	3.532.300.834	-
Lain-lain	34.161.647.293	34.161.647.293	-
DAPL	839.729.769.151	811.581.323.142	28.148.446.009
Deposito	226.557.769.797	226.557.769.797	-
Obligasi Negara	604.796.116.707	576.647.670.698	28.148.446.009
Obligasi Korporasi	8.300.162.667	8.300.162.667	-
Pengembalian Belanja TAYL	75.719.980	75.719.980	-
DAPT	656.459.634.061	641.497.878.280	14.961.755.781
Deposito	130.021.611.777	130.021.611.777	-
Obligasi Negara	508.563.041.732	493.601.285.951	14.961.755.781
Obligasi Korporasi	8.083.106.667	8.083.106.667	-
Pengembalian Belanja TAYL	9.791.873.886	9.791.873.886	-
DAKB	314.590.220.108	303.104.678.200	11.485.541.908
Deposito	81.311.168.267	81.311.168.267	-
Obligasi Negara	224.669.894.523	213.184.352.615	11.485.541.908
Obligasi Korporasi	7.970.498.667	7.970.498.667	-
Pengembalian Belanja TAYL	638.658.651	638.658.651	-

Uraian	Jumlah Realisasi Bank (Rp)	Jumlah Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Nondana Abadi	34.956.518.392	34.956.518.392	-
Hibah	34.955.687.424	34.955.687.424	-
Giro	830.968	830.968	-
TOTAL	9.507.141.236.044	9.333.252.912.056	173.888.323.988

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang ditegaskan melalui Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor ND-551/PB.6/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Pendapatan Bunga SBN Premium yang Berasal dari DPPN yang Bersifat *Endowment Fund* (Dana Abadi), diatur bahwa Pendapatan-LRA obligasi LPDP diakui sebesar hak LPDP yang menambah saldo Badan Layanan Umum (BLU) dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh LPDP.

Bagian yang bukan merupakan hak LPDP yaitu amortisasi kas atas obligasi yang diperoleh secara premium dan bunga berjalan yang menjadi bagian dari perolehan investasi dengan sumber pokok dana abadi. Kalkulasi atas perbedaan realisasi pendapatan obligasi negara pada rekening operasional/bank dengan pendapatan obligasi negara yang disahkan adalah sebagai berikut.

Kalkulasi Pengesahan Penerimaan Kupon Obligasi Negara sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Total Penerimaan Kupon Obligasi Negara (Rp)	Bagian Kupon yang Tidak Disahkan Sebagai Pendapatan-LRA			Total Penerimaan Kupon Obligasi Negara Disahkan (Rp)
		Amortisasi Kas Bagian Premium (Rp)	Accrued Interest		
			Obligasi Premium (Rp)	Obligasi Diskon (Rp)	
DAP	5.054.868.718.921	(174.587.937.663)	274.678.523.605	19.201.994.348	4.935.576.138.631
DAPL	604.796.116.707	(8.099.421.767)	34.191.071.726	2.056.796.050	576.647.670.698
DAPT	508.563.041.732	(6.952.217.800)	20.670.519.081	1.243.454.500	493.601.285.951
DAKB	224.669.894.523	(2.992.050.474)	13.656.097.032	821.495.350	213.184.352.615
TOTAL	6.392.897.771.883	(192.631.627.704)	343.196.211.444	23.323.740.248	6.219.009.447.895

Bagian kupon obligasi negara yang tidak disahkan sebesar Rp559.151.579.395,97 terdiri dari amortisasi kas bagian premium atas obligasi yang diperoleh secara premium sebesar minus Rp192.631.627.704 dan bunga berjalan atau *accrued interest* sebesar Rp366.519.951.692 yang terdiri dari obligasi premium sebesar Rp343.196.211.444 dan obligasi diskon sebesar Rp23.323.740.248.

Realisasi PNBP riil sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.333.252.912.056 atau lebih tinggi Rp2.947.993.494.565 (46,17%) dari angka per 31 Desember 2022 yaitu Rp6.385.259.417.491. Perbandingan Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut.

Perbandingan Pendapatan-LRA periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Akumulasi per 31 Desember 2023 (Rp)	Persentase dari Total Realisasi (%)	Akumulasi per 31 Desember 2022 (Rp)	Persentase dari Total Realisasi (%)	Kenalkan/ Penurunan (Rp)	Persentase dari Kenalkan/ Penurunan (%)
DAP	7.542.112.514.043	80,81	5.269.332.234.099	82,52	2.272.780.279.943	43,13
Deposito	2.424.855.895.284	25,98	1.463.820.386.136	22,92	961.035.509.149	65,65
Obligasi Negara	4.935.576.138.631	52,88	3.630.430.842.059	56,86	1.305.145.296.572	35,95
Obligasi Korporasi	143.986.532.000	1,54	150.669.500.000	2,36	(6.682.968.000)	-4,44
Giro	3.532.300.834	0,04	2.849.561.556	0,04	682.739.278	23,96
Lain-lain	34.161.647.293	0,37	21.561.944.349	0,34	12.599.702.944	58,43
DAPL	811.581.323.142	8,70	498.466.017.074	7,81	313.115.306.068	62,82
Deposito	226.557.769.797	2,43	48.586.677.013	0,76	177.971.092.784	366,30
Obligasi Negara	576.647.670.698	6,18	447.318.648.394	7,01	129.329.022.304	100,00
Obligasi Korporasi	8.300.162.667	0,09	2.560.691.667	0,04	5.739.471.000	100,00
Lain-lain	75.719.980	0,00	-	0,00	75.719.980	200,00
DAPT	641.497.878.280	6,87	432.766.535.925	6,78	208.731.342.355	48,23
Deposito	130.021.611.777	1,39	38.952.470.406	0,61	91.069.141.371	233,80
Obligasi Negara	493.601.285.951	5,29	391.253.373.853	6,13	102.347.912.098	100,00
Obligasi Korporasi	8.083.106.667	0,09	2.560.691.667	0,04	5.522.415.000	100,00
Lain-lain	9.791.873.886	0,10	-	0,00	9.791.873.886	200,00

Uraian	Akumulasi per 31 Desember 2023 (Rp)	Persentase dari Total Realisasi (%)	Akumulasi per 31 Desember 2022 (Rp)	Persentase dari Total Realisasi (%)	kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase dari Kenaikan/ Penurunan (%)
DAKB	303.104.678.200	3,25	184.394.630.393	2,89	118.710.047.807	64,38
Deposito	81.311.168.267	0,87	17.449.350.224	0,27	63.861.818.044	365,98
Obligasi Negara	213.184.352.615	2,28	164.384.588.502	2,57	48.799.764.113	100,00
Obligasi Korporasi	7.970.498.667	0,09	2.560.691.667	0,04	5.409.807.000	100,00
Lain-lain	638.658.651	0,01	-	0,00	638.658.651	200,00
Nondana Abadi	34.956.518.392	0,37	300.000.000	0,00	34.656.518.392	100,00
Hibah	34.955.687.424	0,37	300.000.000	0,00	34.655.687.424	100,00
Giro	830.968	0,00	-	0,00	830.968	200,00
TOTAL	9.333.252.912.056	100,00	6.385.259.417.491	100	2.947.993.494.565	46,17
TARGET DIPA	8.014.759.998.000		5.450.923.500.000			
PENCAPAIAN DARI DIPA (%)	116,45			117,14		

Penjelasan rinci pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan deposito sebesar Rp2.862.746.445.125 terdiri dari

- * pendapatan deposito Dana Abadi Pendidikan (DAP) sebesar Rp2.424.855.895.284;
- * pendapatan Dana Abadi Penelitian (DAPL) sebesar Rp226.557.769.797;
- * pendapatan Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) sebesar Rp130.021.611.777; dan
- * pendapatan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) sebesar Rp81.311.168.267.

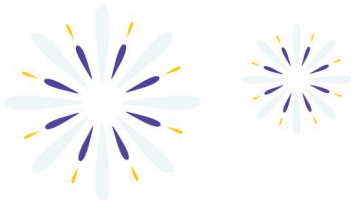
Pendapatan obligasi negara sebesar Rp6.219.009.447.895 terdiri dari

- * pendapatan SBN DAP sebesar Rp4.935.576.138.631;
- * pendapatan SBN DAPL sebesar Rp576.647.670.698;
- * pendapatan SBN DAPT sebesar Rp493.601.285.951; dan
- * pendapatan SBN DAKB sebesar Rp213.184.352.615.

Pendapatan obligasi korporasi sebesar Rp168.340.300.000 terdiri dari

- * pendapatan obligasi korporasi DAP sebesar Rp143.986.532.000;
- * pendapatan obligasi korporasi DAPL sebesar Rp8.300.162.667;
- * pendapatan obligasi korporasi DAPT sebesar Rp8.083.106.667; dan
- * pendapatan obligasi korporasi DAKB sebesar Rp7.970.498.667.
- * LPDP menerima pendapatan hibah dari Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) sebesar sebesar 2.257.536 Dolar AS atau senilai Rp34.955.687.424, Dana tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan Program Pendanaan Riset Pisang.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan tahun 2023, dilakukan *shifting* instrumen investasi dari deposito ke obligasi dengan nilai perolehan awal termasuk diskon, premium, dan bunga berjalan sebagai berikut.



Rincian *Shifting* Deposito ke Obligasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023

Uraian	Shifting Obligasi Negara (Rp)	Shifting Obligasi Korporasi (Rp)	Total (Rp)	Persentase dari Total Shifting (%)
DAP	16.420.582.402.028	(7.601.787.491)	16.412.980.614.537	76,29
DAPL	2.502.535.567.055	43.633.776.651	2.546.169.343.706	11,83
DAPT	1.511.440.633.709	26.390.104.831	1.537.830.738.540	7,15
DAKB	999.786.740.356	17.427.906.009	1.017.214.646.365	4,73
TOTAL	21.434.345.343.148	79.850.000.000	21.514.195.343.148	100



B.2 Belanja

Realisasi Belanja-LRA berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Jakarta II sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Rp9.845.263.671,127 atau mencapai 98,64% dari pagu anggaran sebesar Rp9.980.943.750.000. Realisasi belanja rill per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.845.263.671,127 atau 98,64%. Belanja per Rincian Output (RO) sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Belanja per rincian output sampai dengan
31 Desember 2023

Klasifikasi Rincian Output	Belanja Rill 31 Desember 2023 (Rp)	Belanja yang Sudah Disahkan (Belanja-LRA) (Rp)	Belanja yang Belum Disahkan
PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana	6.451.653.997	6.451.653.997	-
Pendanaan Untuk Penyaluran Beasiswa	8.365.075.550.649	8.365.075.550.649	-
Pendanaan Untuk Penyaluran Dana Riset	349.698.702.720	349.698.702.720	-
Pendanaan Untuk Penyaluran Dana Abadi Kebudayaan	44.755.743.746	44.755.743.746	-
Pendanaan Untuk Penyaluran Dana Abadi Perguruan Tinggi	458.311.000.000	458.311.000.000	-
Kerumahtanggaan	11.174.348.510	11.174.348.510	-
Layanan Perkantoran	25.326.598.718	25.326.598.718	-
Layanan Perkantoran Gaji	73.711.308.072	73.711.308.072	-
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	3.597.889.357	3.597.889.357	-
Rekomendasi Kepatuhan Internal	714.788.994	714.788.994	-
Layanan Beasiswa Awordee Berangkat	498.565.969.493	498.565.969.493	-
Gedung/Bangunan	3.548.035.740	3.548.035.740	-
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3.981.048.529	3.981.048.529	-
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	351.032.600	351.032.600	-
Jumlah	9.845.263.671.127	9.845.263.671.127	-
DIPA	9.980.943.750.000	9.980.943.750.000	
Persentase Realisasi dari target DIPA	98,64%	98,64%	

Realisasi Belanja-LRA terdiri dari Belanja Barang dan Belanja Modal dengan perbandingan tahun sebelumnya sebagai berikut.

Perbandingan Realisasi Belanja periode
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang	9.837.383.554.259	4.930.209.479.541	4.907.174.074.719	99,53
Belanja Modal	7.880.116.868	3.943.571.959	3.936.544.906	99,82
Jumlah	9.845.263.671.127	4.934.153.051.500	4.911.110.619.625	99,53

Penjelasan atas kenaikan belanja yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya dapat dilihat dari masing-masing kategori layanan yang dijalankan oleh LPDP sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini.

Rincian Realisasi Belanja per jenis layanan LPDP sampai
dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi per 31 Desember 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase (%)
A. LAYANAN	9.821.090.873.000	9.716.406.966.608	98,93	4.827.075.745.508	4.889.331.221.100	101,29
Beasiswa	8.898.855.094.000	8.863.641.520.142	99,60	4.190.005.000.899	4.673.636.519.243	111,54
LPDP	4.386.138.272.000	4.361.244.061.178	99,43	2.601.523.284.054	1.759.720.777.124	67,64
Kemendikbudristek	4.132.045.447.000	4.122.607.356.980	99,77	1.476.787.243.170	2.645.820.113.810	179,16
Kemennag	380.671.375.000	379.790.101.984	99,77	111.694.473.675	268.095.628.309	240,03
Pendanaan Riset	416.235.779.000	349.698.702.720	84,01	247.241.383.909	102.457.318.811	41,44
LPDP	115.235.779.000	91.829.375.031	79,69	148.352.210.105	(56.522.835.074)	-38,10
Kemendikbudristek	151.000.000.000	139.461.053.794	92,36	42.787.277.241	96.673.776.553	225,94
BRIN	150.000.000.000	118.408.273.895	78,94	56.101.896.563	62.306.377.332	111,06

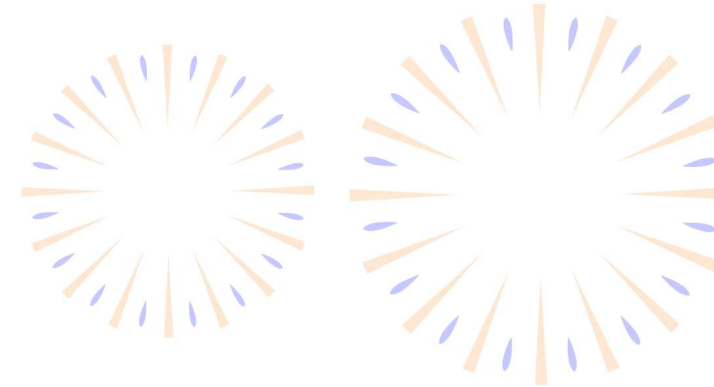
Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi per 31 Desember 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenalkan/ Penurunan (Rp)	Persentase (%)
Layanan Dana Abadi Perguruan Tinggi	459.000.000.000	458.311.000.000	99,85	292.648.800.000	165.662.200.000	56,61
Layanan Dana Abadi Kebudayaan	47.000.000.000	44.755.743.746	95,22	97.180.560.700	(52.424.816.954)	-53,95
B. OPERASIONAL	159.852.877.000	128.856.704.517	80,61	107.077.305.992	21.779.398.795	20,34
Pengelolaan Dana	7.648.528.000	6.451.653.997	84,35	9.255.668.177	(2.804.014.180)	-30,30
Layanan Periklanan	115.997.961.000	99.037.906.790	85,82	78.899.089.295	20.138.817.495	25,52
Dukungan Manajemen	27.023.114.000	15.487.026.861	57,31	14.978.976.557	508.050.304	3,39
Belanja Modal	9.783.274.000	7.880.116.869	80,55	3.943.571.693	3.936.545.176	99,82
TOTAL	9.980.943.750.000	9.845.263.671.127	98,64	4.934.153.051.500	4.911.110.619.627	99,53

Catatan atas belanja tersebut adalah sebagai berikut.

1. Belanja beasiswa terealisasi sejumlah 99,60% dari total anggaran dengan urutan realisasi berdasarkan alokasi anggaran pada DIPA sebagai berikut:



- ✳ Belanja Beasiswa Native LPDP terdiri dari Dana Beasiswa sebesar Rp4.361.244.061.78 termasuk biaya operasional beasiswa untuk penyelenggaraan layanan sebesar Rp140.445.888.670. Belanja Beasiswa Native mengalami kenaikan Rp1.759.720.777.324 (67,64%) dari tahun sebelumnya karena keberangkatan penerima Beasiswa Native yang lebih banyak pada periode ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan meningkatnya keberangkatan penerima beasiswa ke luar negeri.
- ✳ Program Kemendikbudristek meningkat Rp2.645.820.113.810 (179,16%) dari tahun sebelumnya karena upaya-upaya optimalisasi penyerapan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) program antara LPDP dan Kemendikbudristek yang dilakukan sehingga program dapat segera dijalankan sejak awal tahun serta adanya tambahan program-program baru pada tahun 2023.
- ✳ Program Kemenag telah memulai pencairan dana sejak tahun 2023 untuk MORA (5.000 Doktor), Beasiswa Sarjana (S1) PUJ-PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan Program Persiapan Studi Lanjut (PPSL).



2. Belanja riset terealisasi 84,01% dengan urutan realisasi sebagai berikut:



- ✳ Belanja riset LPDP terdiri dari Layanan Pendanaan Riset sebesar Rp91.829.375.031 dan operasional layanan riset sebesar Rp5.046.817.320. Belanja riset LPDP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena tidak terdapat seleksi baru untuk skema RISPRO (Riset Inovatif Produktif) Kompetisi. Untuk tahun 2023, program LPDP melanjutkan pembayaran untuk riset *ongoing* yang sudah berkontrak.
- ✳ Program Kemendikbudristek melanjutkan pembayaran RISPRO Mandatori PRIME (*Partnership in Research Indonesia and Melbourne*), UKICIS (UK-Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences), Kelimuan Akademik (DIKTI), dan Kelimuan Terapan (DIKSI) yang telah berkontrak pada tahun sebelumnya.
- ✳ Program BRIN, telah dilakukan pencairan untuk program baru yaitu Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM).

3. Layanan DAPT telah disalurkan ke 21 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) sebesar Rp458.311.000.000 atau 99,85% dari pagu DIPA. Dana yang dicairkan adalah pencairan untuk termin I (80% dari nilai kontrak). Dana layanan ini digunakan untuk mendanai program *World Class University* (WCU).
4. Layanan DAKB telah direalisasikan sebesar Rp44.755.743.746 atau 95,22% dari pagu DIPA. Dana yang dicairkan adalah pencairan untuk termin I (80% dari nilai kontrak). Dana layanan ini digunakan untuk mendanai program pemajuan kebudayaan.

5. Kenaikan belanja operasional layanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pengelolaan Dana** mengalami penurunan -30,30% dari periode yang sama tahun sebelumnya karena penurunan biaya jasa kustodi yang signifikan.
- Layanan Perkantoran** mengalami kenaikan 25,52% di antaranya karena penambahan pegawai yang berdampak kepada pembayaran remunerasi.
- Dukungan Manajemen** mengalami kenaikan 3,39% karena sebagian besar kegiatan selama tahun 2023 telah dilaksanakan secara luring.
- Belanja Modal** mengalami kenaikan 99,82% karena pembelian peralatan dan mesin serta perangkat pengolahan data dan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, khususnya para pegawai baru.

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp9.837.383.554.259 atau naik Rp4.907.174.074.715 (99,53%) dari angka per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.930.209.479.541. Perbandingan Belanja Barang periode ini dengan periode yang sama tahun sebelumnya dapat dilihat pada rincian berikut.

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja per jenis belanja barang BLU periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Mata Anggaran (MA)	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	
						Rp	%
525111	Beban Gaji dan Tunjangan	87.808.599.000	73.711.308.072	83,95	63.375.788.790	10.335.619.282	16,31
525112	Beban Barang	37.607.488.000	30.718.302.968	81,68	17.482.989.404	13.235.313.564	75,70
525113	Beban Jasa	102.434.214.000	89.438.396.897	87,31	51.698.002.568	37.740.394.329	73,00
525114	Beban Pemeliharaan	752.807.000	619.408.398	82,28	527.992.500	91.415.898	17,31
525115	Beban Perjalanan Dinas	87.048.462.000	71.931.710.647	82,63	27.664.905.853	44.266.804.794	160,01
525116	Beban Atas Pengelolaan Endowment Fund	9.655.382.027.000	9.570.914.260.618	99,13	4.769.171.413.857	4.801.742.846.760	100,68
525121	Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	75.000.000	49.116.756	65,49	102.498.088	(53.381.332)	-52,08
525152	Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	29.609.000	400.000	1,35	57.270.431	(56.870.431)	-99,30
525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0,00	-	-	0,00
525154	Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0,00	128.618.050	(128.618.050)	-100,00
525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtable BLU	22.270.000	649.900	0,00	-	649.900	0,00
TOTAL		9.971.160.476.000	9.837.383.554.259	98,66	4.930.209.479.541	4.907.174.074.715	99,53

Kenaikan Belanja Barang yang signifikan pada periode ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya berdasarkan kategori akun dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✳️ Beban Jasa (525113) naik 73% karena alokasi anggaran untuk honor reviewer untuk layanan riset dan beasiswa dialokasikan ke Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) ini. Pada tahun sebelumnya, poin ini dialokasikan pada akun Beban Barang (525112).
- ✳️ Beban Perjalanan Dinas (525115) naik 160,01% karena sebagian besar kegiatan operasional layanan maupun dukungan manajemen telah dilaksanakan secara luring.
- ✳️ Secara nominal, kenaikan belanja didominasi oleh kenaikan pada akun Beban atas Pengelolaan Endowment Fund (525116) yang merupakan akun belanja layanan pendanaan beasiswa, riset, DAPT, dan DAKB. Belanja untuk keempat layanan tersebut adalah sebagai berikut.

Rincian Perbandingan Kenaikan Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund per Jenis Layanan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase (%)
Beasiswa	8.723.195.631.472	4.135.817.279.631	4.587.378.351.841	110,92
Riset	344.651.885.400	243.524.773.522	101.127.111.878	41,53
DAPT	458.311.000.000	292.648.800.000	165.662.200.000	56,61
DAKB	44.755.743.746	97.180.560.700	(52.424.816.954)	-53,95
TOTAL	9.570.914.260.618	4.769.171.413.853	4.801.742.846.765	100,68

B.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 yaitu sebesar Rp7.880.116.868 atau naik Rp3.936.544.910 (99,82%) dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.943.571.959. Rincian realisasi per akun belanja modal adalah sebagai berikut.

Rincian Realisasi Belanja Modal tahun 2023

Mata Anggaran (MA)	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	
						Rp	%
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.963.274.000	4.332.081.128	87,28	3.688.982.359	643.098.770	100,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.820.000.000	3.548.035.740	73,61	254.589.600	3.293.446.140	0,00
TOTAL		9.783.274.000	7.880.116.868	80,55	3.943.571.959	3.936.544.910	99,82

B.3 Surplus (Defisit) Anggaran

Pendapatan-LRA sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.333.252.912.056, kurang dari Belanja-LRA tahun berjalan sebesar Rp9.845.263.671.125 sehingga terdapat defisit sebesar minus Rp512.010.759.071.

Surplus Anggaran sampai dengan 31 Desember 2023

Jenis Dana Abadi	Pendapatan-LRA (Rp)	Belanja-LRA (Rp)	Surplus/(Defisit) (Rp)
DAP	7.542.112.514.043	9.223.788.653.484	(1.681.676.139.442)
DAPL	811.581.323.142	118.408.273.895	693.173.049.247
DAPT	641.497.878.280	458.311.000.000	183.186.878.280
DAKB	303.104.678.200	44.755.743.746	258.348.934.454
Nondana Abadi	34.956.518.392	-	34.956.518.392
TOTAL	9.333.252.912.056	9.845.263.671.127	(512.010.759.071)

B.4 Pembiayaan

Sampai dengan 31 Desember 2023, transaksi Pembiayaan BLU disajikan nihil.

B.5 Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar minus Rp512.010.759.071 dan Rp1.451.106.365.991. Rincian perbandingan SILPA/SikPA adalah sebagai berikut.

Rincian SILPA/SIKPA periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pendapatan-LRA	9.333.252.912.056	6.385.259.417.491	2.947.993.494.565	46,17
Belanja-LRA	9.845.263.671.127	4.934.153.051.500	4.911.110.619.626	99,53
Selisih Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	(512.010.759.071)	1.451.106.365.991	(1.963.117.125.061)	-135,28

Meskipun belanja naik signifikan dari tahun sebelumnya, tetapi hal tersebut diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang dikontribusikan oleh penerimaan kupon obligasi negara sebagai dampak shifting yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023.

C.1 SAL Awal

Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal periode 31 Desember 2023 sebesar Rp6.461.440.172.948. SAL Awal merupakan Saldo BLU akhir tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Saldo Anggaran Lebih periode 31 Desember 2022 yang menjadi SAL awal tahun 2023

Uraian	Dana Abadi Pendidikan (DAP)	Dana Abadi Penelitian (DAPL)	Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT)	Dana Abadi Kebudayaan (DAKB)	Nondana Abadi	Seluruh Dana Abadi
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	5.474.800.923.604	618.129.322.007	245.781.750.201	122.428.177.136	300.000.000	6.461.440.172.948
Reinvestasi	5.438.667.237.508	617.140.315.092	245.585.124.801	122.036.406.969	-	6.423.429.084.370
Persentase Reinvestasi (%)	99,34	99,84	99,92	99,68	0,00	99,37
Kas	35.895.203.768	1.228.900.208	196.468.100	390.516.502	300.000.000	38.011.088.578
Persentase Kas (%)	0,66	0,16	0,08	0,32	100	0,63

C.2 Penggunaan SAL

Penggunaan SAL merupakan penggunaan dana SAL pada BLU dalam rangka penerimaan pembiayaan BLU melalui pengesahan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)/Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLU. Sampai dengan 31 Desember 2023 penggunaan SAL BLU adalah sebesar nihil.

C.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Jumlah SILPA/SIKPA periode 31 Desember 2023 sebesar minus Rp512.010.759.071 yang merupakan selisih lebih antara pendapatan yang disahkan dengan belanja yang disahkan sampai dengan 31 Desember 2023.

C.4 Penyesuaian Transaksi Badan Layanan Umum (BLU) dengan Bendahara Umum Negara (BUN)

Sampai dengan 31 Desember 2022, tidak terdapat penyesuaian transaksi BLU dengan BUN baik berupa pendapatan alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan penyesuaian transaksi

antara BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPRA rupiah murni, penyetoran PNPB ke Kas Negara, maupun penyetoran surplus BLU ke Kas Negara.

C.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) setelah Penyesuaian

Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) periode 31 Desember 2022 setelah penyesuaian tidak mengalami perubahan dari minus tahun berjalan yaitu sebesar minus Rp512.010.759.071

C.6 Koreksi

Pos Ini merupakan pos untuk menyajikan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya antara lain transaksi reklasifikasi pendefinitifan atas Kas dan Bank BLU Belum Disahkan menjadi Kas dan Bank BLU. Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

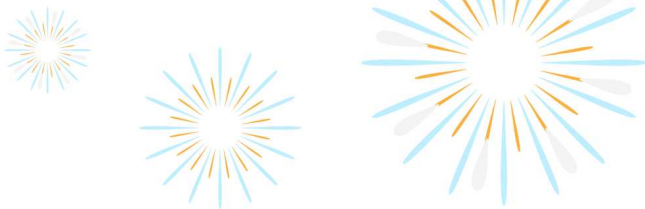
C.7 SAL Akhir

SAL Akhir periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.948.429.413.877 yang terdiri dari saldo surplus atas hasil pengelolaan seluruh Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Rincian posisi SAL Akhir per jenis dana abadi adalah sebagai berikut.

Rincian SAL Akhir per 31 Desember 2023

Uraian	Dana Abadi Pendidikan (DAP) (IDR)	Dana Abadi Penelitian (DAPL) (IDR)	Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) (IDR)	Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) (IDR)	Nondana Abadi (IDH)	Seluruh Dana Abadi (IDR)
Saldo Awal	5.474.800.923.604	618.129.322.007	245.781.750.201	122.428.177.136	300.000.000	6.461.440.172.948
Pendapatan	7.542.112.514.042,60	811.581.323.141,63	641.497.878.280,21	303.104.678.199,93	34.956.518.391,58	9.333.252.912.055,85
Belanja	9.223.488.946.451,38	118.408.273.895,00	458.311.000.000,00	44.755.743.714,00	299.707.035,00	9.845.263.671.125,38
Surplus/ Defisit	(1.681.376.432.409)	693.173.049.247	183.186.878.280	258.348.934.454	34.656.811.359	(512.010.759.070)
Saldo Akhir	3.793.424.491.195	1.311.302.371.254	428.968.628.482	380.777.111.589	34.956.811.359	5.949.429.413.877
Posisi Surplus	3.793.424.491.195	1.311.302.371.254	428.968.628.482	380.777.111.589	34.956.811.359	5.949.429.413.877
Reinvestasi	3.791.528.942.386,08	1.311.009.037.054,00	421.670.863.468,00	380.679.989.759,00	4.955.687.424,00	5.939.844.520.091
Persentase Reinvestasi (%)	99,95	99,98	98,30	99,97	100,00	99,84
Kas	1.895.548.809,04	293.334.199,69	7.297.765.013,52	97.121.830,44	1.123.934,58	9.584.893.787
Persentase Kas (%)	0,05	0,02	1,70	0,03	0,00	0,16

SAL Nondana Abadi merupakan saldo yang berasal dari pendapatan hibah dari PT Sarana Multi Infrastruktur dan dari BMGF untuk kerja sama pendanaan riset yang belum digunakan untuk belanja pada tahun 2023.



III. D – Penjelasan atas Pos-pos Neraca

D.1 Aset

D.1.1 Aset Lancar

D.1.1.1 Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)

Kas pada BLU adalah keseluruhan kas yang disimpan dalam bentuk tunai dan giro pada bank umum yang digunakan untuk membiayai belanja operasional sehari-hari

maupun penyaluran layanan. Saldo Kas pada BLU naik Rp1388.003.912,681 (64,75%) dari periode 31 Desember 2022.

Rincian Kas pada BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Kas Tunai Dan Giro Badan Layanan Umum (BLU)	9.584.893.788	24.168.313.379	(14.603.419.591)	-60,37
Kas di Rekening Pendapatan Konvensional	823.621.675	967.209.369	(143.587.694)	-14,85
Kas di Rekening Pendapatan Syariah	106.165.858	1.018.738.274	(912.572.416)	-89,58
Kas di Rekening Belanja Konvensional	5.422.540.129	11.242.171.892	(5.819.631.763)	-51,77
Kas di Rekening Belanja Syariah	3.016.787.638	10.939.753.493	(7.922.965.855)	-72,42
Kas di Rekening Endowment Fund	-	59.881	(59.881)	-100,00
Kas di Rekening Induk DPPN	-	-	-	0,00
Kas di Rekening Escrow DPPN	-	-	-	0,00
Kas di Rekening Escrow Pendapatan Konvensional	207.747.488	-	207.747.488	0,00
Kas di Rekening Escrow Pendapatan Syariah	-	-	-	9,00
Kas Tunai	8.031.001	20.380.470	(12.349.469)	-60,59
Setara Kas Lainnya – BLU Hasil Kelolaan Dana Abadi DI Bidang Pendidikan	3.013.348.804.651	1.811.697.282.117	1.201.651.522.534	66,33
Reklasifikasi Ke Kas BLU Yang Dibatasi Penggunaannya	(292.967)	(1.000.000.000)	999.707.033	-99,97
Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Kas Dan Bank BLU	(43.897.291)	-	(43.897.291)	100,00
TOTAL	3.022.889.508.177	1.834.885.595.496	1.188.003.912.681	64,75

Per 31 Desember 2023, nilai Kas pada BLU didominasi oleh Setara Kas Lainnya yang merupakan investasi hasil kelolaan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dalam bentuk instrumen deposito berjangka waktu s.d. tiga bulan.

Sedangkan nilai kas tunai dan giro yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan layanan.

Saldo Kas pada BLU sebesar Rp3.022.889.508.177 merupakan gabungan dari kas dan setara kas atas seluruh hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang menjadi kelolaan LPDP, dengan rincian per masing-masing dana sebagai berikut.

Rincian Kas pada BLU per Jenis Dana Abadi per 31 Desember 2023

Jenis Dana	Kas pada BLU		Jumlah (Rp)	Persentase Terhadap Total Kas pada BLU (%)
	Kas Tunai dan Giro (Rp)	Setara Kas Lainnya (Rp)		
Dana Abadi Pendidikan (DAP)	1.895.548.809	2.210.509.207.390	2.212.404.756.199	73,19
Dana Abadi Penelitian (DAPL)	293.334.200	379.514.059.128	379.807.393.328	12,56
Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT)	7.297.765.014	279.750.000.000	287.047.765.014	9,50
Dana Abadi Kebudayaan (DAKB)	97.121.830	143.575.538.133	143.672.659.963	4,75
Nondana Abadi	1.123.935	-	1.123.935	0,00
TOTAL	9.584.893.787	3.013.348.804.651	3.022.933.698.438	100,00

D.11.2 Investasi Jangka Pendek-BLU

Investasi Jangka Pendek-BLU yang disajikan dalam laporan keuangan ini berasal dari saldo akhir Investasi Jangka Pendek-BLU pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perolehan investasi jangka pendek dengan menggunakan Kas dan Bank BLU yang telah disahkan, baik yang berasal dari pendapatan tahun berjalan maupun surplus tahun sebelumnya.

Investasi yang dilakukan LPDP atas dana operasional ini digolongkan dalam investasi jangka pendek dengan karakteristik antara lain:

- dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- dalam rangka manajemen kas; dan
- berisiko rendah.

Investasi Jangka Pendek-BLU per jenis hasil pengembangan Dana Abadi adalah sebagai berikut.

Perbandingan Investasi Jangka Pendek-BLU per Jenis Dana Abadi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis Dana	31 Desember 2023		31 Desember 2022		Kenaikan/Penurunan	
	Jumlah (Rp)	Persentase dari Total (%)	Jumlah (Rp)	Persentase dari Total (%)	Rp	%
Deposito DAP	1.580.619.734.996	54,67	4.236.660.562.540	91,59	(2.656.040.827.543,92)	-62,69
Deposito DAPL	931.494.977.926	32,22	347.235.913.725	7,51	584.259.064.201,00	168,26
Deposito DAPT	141.920.863.468	4,91	10.652.156.414	0,23	131.268.707.054,00	1232,32
Deposito DAKB	237.104.451.626	8,20	31.005.944.773	0,67	206.098.506.853,00	664,71
TOTAL	2.891.155.823.369	100,00	4.625.554.577.452	100,00	(1.734.398.754.083)	-37,50

Terdapat kenaikan nilai investasi jangka pendek dari pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp15.795.353.

D11.3 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun entitas belum menerima manfaat atas pengeluaran tersebut.

Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2023 sebesar Rp1.357.410.725.985, meningkat sebesar Rp537.931.310.390 (65,64%) dari periode 31 Desember 2022. Perbandingannya dengan periode tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Perbandingan Belanja Dibayar di Muka
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis Dana	Saldo		Kenalkan/Penurunan	
	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Rp	%
Belanja Layanan	1.355.323.021.067	817.390.224.537	537.932.796.530	65,81
Belanja Operasional	2.087.704.918	2.089.191.058	(1.486.140)	-0,07
TOTAL	1.357.410.725.985	819.479.415.595	537.931.310.390	65,64

Berikut penjelasan atas Saldo Belanja Dibayar di Muka:

✱ Belanja Layanan merupakan penyesuaian atas skema pembayaran atas komponen dengan peruntukan pembayaran beberapa periode dilakukan di depan, antara lain:

- biaya hidup bulanan,
- SPP atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (*tuition fee*), dan
- asuransi kesehatan.

Belanja ini mengalami kenaikan seiring bertambahnya jumlah penerima beasiswa yang melakukan keberangkatan dan bertambahnya program-program kolaborasi kementerian/lembaga (K/L) teknis yang harus disesuaikan sebagai Belanja Dibayar di Muka.

✱ Belanja operasional pembayaran di muka biaya sewa gedung kantor LPDP kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara.

D11.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima (*occurrent income*) adalah pendapatan yang sudah berhasil diakui dalam tetapi belum diterima pada saat periode pelaporan dikarenakan belum jatuh tempo. Pendapatan yang Masih Harus Diterima ini merupakan nilai pendapatan hasil investasi dari obligasi dan deposito dengan rincian berikut.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima dari Kegiatan
Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023		31 Desember 2022		Kenalkan/Penurunan	
	Jumlah (Rp)	Persentase dari Total (%)	Jumlah (Rp)	Persentase dari Total (%)	Rp	%
PENDAPATAN						
Pendapatan Deposito	122.344.705.125	15,24	133.278.276.089	16,74	(10.722.071.336)	-8,04
Pendapatan Obligasi Negara	663.461.319.191	82,53	642.207.430.098	80,68	21.253.889.093	3,31
Pendapatan Obligasi Korporasi	17.925.669.556	2,23	20.501.441.938	2,58	(2.575.772.382)	-12,56
TOTAL	803.731.693.873	100,00	795.987.148.126	100,00	7.744.545.747	0,97

Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima relatif sama dengan tahun 2022.

D11.5 Piutang dari Kegiatan Nonoperasional BLU

Piutang dari Kegiatan Nonoperasional BLU adalah adalah hak tagih kepada pihak lain yang timbul karena adanya penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan non operasional BLU. Saldo piutang mengalami kenaikan sebesar Rp886.909.497, karena adanya penambahan saldo penyihsian piutang tidak signifikan baru berasal dari debitur RPH, MN, JR, AK, GDP, RK, MA RN, dan TI pada tahun 2023.

Terdapat pembayaran piutang atas nama RC, AH, SS, MAA, RPH, MR, MN, AAB, dan NF pada tahun 2023. Pembayaran piutang ini merupakan piutang tagihan kepada *owordee* yang telah diberhentikan atas sanksi pelanggaran peraturan beasiswa dan sanksi kepada alumni yang tidak kembali ke Indonesia. Perbandingannya adalah sebagai berikut.

Perbandingan Saldo Piutang per
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenalkan/ Penurunan (Rp)	Persentase (%)
Piutang Tagihan Pengembalian Dana Beasiswa	6.349.402.986	5.462.493.489	886.909.497	16,24
Jumlah	6.349.402.986	5.462.493.489	886.909.497	16,24
Penyisihan Piutang	(4.782.633.685)	(3.924.579.484)	(858.054.201)	21,86
Piutang Bersih	1.566.769.301	1.537.914.005	28.855.296	1,88

Rincian perubahan saldo piutang dari beberapa debitur sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Rincian Perubahan Saldo Piutang per
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

inisial Debitur	Saldo Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	Perubahan Saldo (Rp)	Kategori
YRW	339.921.000	339.921.000	-	Macet
AAB	353.625.000	347.694.804	(5.930.196)	Macet
I	292.314.041	292.314.041	-	Macet
NF	116.900.000	114.900.000	(2.000.000)	Macet
A	217.400.000	217.400.000	-	Diragukan
AH	1.229.195.000	1.224.472.025	(4.722.975)	Macet
SS	1.564.139.448	1.471.632.693	(92.506.756)	Macet
RFN	1.268.999.000	1.268.999.000	-	Kurang Lancar
RC	80.000.000	-	(80.000.000)	Lunas

Initial Debitur	Saldo Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	Perubahan Saldo (Rp)	Kategori
RPH	-	786.749.623	786.749.623	Macet
MN	-	88.557.800	88.557.800	Lancar
JR	-	83.400.000	83.400.000	Diragukan
AK	-	25.800.000	25.800.000	Lancar
GDP	-	1.200.000	1.200.000	Lancar
RK	-	14.100.000	14.100.000	Lancar
MA	-	4.300.000	4.300.000	Lancar
RN	-	12.900.000	12.900.000	Lancar
TII	-	55.062.000	55.062.000	Lancar
TOTAL	5.462.493.489	6.349.402.986	886.909.497	

- Berikut penjelasan atas piutang tahun 2023:
- ✳ Terdapat penambahan piutang baru dari debitur atas nama RPH, MN, JR, AK, GDP, RK, MA, RN, dan TII pada tahun 2023.

✳ Terdapat pembayaran cicilan piutang atas nama:
 - AAB sebesar Rp5.930.196,00;
 - NF sebesar Rp2.000.000,00;
 - AH sebesar Rp4.722.975,00;
 - SS sebesar Rp92.506.755,00;
 - RC sebesar Rp40.000.000,00;
 - RPH sebesar Rp2.000.000,00; dan
 - MN sebesar Rp23.305.000,00.

D11.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Nonoperasional BLU

Piutang dari Kegiatan Nonoperasional BLU adalah hak tagih kepada pihak lain yang timbul karena adanya penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan nonoperasional BLU. Kenaikan Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp858.054.201 atau sebesar 21,86% disebabkan adanya penambahan saldo penyisihan piutang tidak signifikan baru di tahun 2023.
- Rincian Piutang Berdasarkan Kategori Kualitas Ketertagihan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
- | Kategori Kualitas Ketertagihan Piutang | Jumlah Piutang | | Persentase Tak Tertagih (%) | Jumlah Diperkirakan Tak Tertagih | |
|--|----------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|--------|
| | Rp | % | | Rp | % |
| Macet | 4.577.684.186 | 72,10 | 100 | 4.537.684.186 | 94,88 |
| Diragukan | 300.800.000 | 4,74 | 50 | 117.040.000 | 2,45 |
| Kurang Lancar | 1.268.999.000 | 19,99 | 10 | 126.899.900 | 2,65 |
| Lancar | 201.919.800 | 3,18 | 0,50 | 1.009.599 | 0,02 |
| TOTAL | 6.349.402.986 | 100,00 | | 4.782.633.685 | 100,00 |
- D11.7 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

Pengurangan saldo Persediaan disebabkan optimalisasi penggunaan persediaan diutamakan untuk menggunakan stok yang sudah tersedia. Keseluruhan nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2023 dalam kondisi baik.
- Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
- | Uraian | 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) | Kenalkan/Penurunan | |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| | | | Rp | % |
| Persediaan | 101.237.700 | 113.974.250 | (12.736.550) | -11,17 |
| TOTAL | 101.237.700 | 113.974.250 | (12.736.550) | -11,17 |
- D1.2 Investasi Jangka Panjang
- Berdasarkan ketentuan pada PMK 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, LPDP menyajikan investasi yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi) sebagai investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya dalam Laporan Keuangan.

D1.2.1 Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya (Bruto)

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bruto) per 31 Desember 2023 sebesar Rp140.037.333.951.947,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.192.631.627.705,00 atau 16,85% dari periode sebelumnya. Saldo ini merupakan saldo atas portfolio investasi yang bersumber dari pokok Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang meliputi deposito dari pokok dana abadi Rp34.292.400.229.705,00 Obligasi Negara-HTM dari pokok dana abadi Rp103.583.483.722.242,00 dan Obligasi Korporasi-HTM dari pokok dana abadi Rp2.161.250.000,00
- Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bruto) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
- | Uraian | 31 Desember 2023 (Rp) | 31 Desember 2022 (Rp) | Kenalkan/Penurunan | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| | | | Rp | % |
| Deposito Dari Pokok Dana Kelolaan | 34.292.400.229.705 | 35.806.595.572.854 | (1.514.195.343.149) | -4,23 |
| Deposito | 34.292.400.229.705 | 35.806.595.572.854 | (1.514.195.343.149) | -31,37 |
- 245

246

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Obligasi Dari Pokok Dana Kelolaan	105.744.733.722.242	84.037.906.751.388	21.706.826.970.854	25,83
a. Obligasi Negara-HTM (<i>Held To Maturity</i>)	103.583.483.722.242	81.956.506.751.388	21.626.976.970.854	79,85
b. Obligasi Korporasi-HTM	2.161.250.000.000	2.081.400.000.000	79.850.000.000	8,29
c. Obligasi Korporasi-AFS (<i>Available For Sale</i>)	-	-	-	0,00
Portofolio Dari Pokok Dana Kelolaan (Imbal Jasa Penjaminan/IJP) Nonpermanen Lainnya Bruto	140.037.133.951.947	119.844.502.324.242	20.192.631.627.705	16,85

Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya mengalami kenaikan sebesar 16,85% salah satunya disebabkan penambahan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp20 triliun pada 2023, penempatan investasi yang bersumber dari amortisasi kas bagian premium obligasi-HTM, serta amortisasi diskon obligasi-HTM.

Secara substansi, klasifikasi Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 06 tentang Akuntansi Investasi disajikan pada rincian di bawah.

Klasifikasi Investasi LPDP berdasarkan PSAP 06 per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Klasifikasi	Instrumen	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
Investasi Jangka Pendek			
Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek	Deposito	29.167.538.682.181	DAP
		2.554.920.675.450	DAPL
		1.549.492.616.781	DAPT
		1.020.448.255.293	DAKB
Total Investasi Jangka Pendek		34.292.400.229.705	
Investasi Jangka Panjang			
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Surat Utang Negara	83.170.797.057.257	DAP
		10.291.445.547.899	DAPL
		8.324.117.278.388	DAPT
		3.862.123.838.698	DAKB
	Obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	81.913.732.509	DAP
		7.148.336.651	DAPL
		4.332.504.831	DAPT
		2.855.426.009	DAKB
Total Investasi Jangka Panjang		105.744.733.722.242	
Total Portofolio Investasi LPDP		140.037.133.951.947	

D1.2.2 Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya

Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp896.074.228.316, mengalami kenaikan sebesar minus Rp169.560.992.957 minus 23,34%. Perbandingan nilai Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya disajikan sebagaimana sebagai berikut.

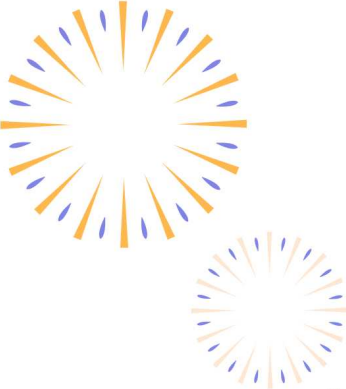
Perbandingan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Persentase (%)
1. Akumulasi Amortisasi Investasi-HTM	(896.074.228.316)	(726.513.235.359)	(169.560.992.957)	23,34
Akumulasi Amortisasi Premium	(925.867.442.840)	(736.802.324.242)	(189.065.118.598)	25,66
Akumulasi Amortisasi Diskon	29.793.214.524	10.289.088.883	19.504.125.641	189,56
2. Unrealized Holding Gain/(Loss) Investasi AFS	-	-	-	0,00
IJP Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya	(896.074.228.316)	(726.513.235.359)	(169.560.992.957)	23,34

Saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya pada tahun 2023 berasal dari:

- akumulasi amortisasi kas bagian premium portofolio investasi yang dikategorikan sebagai HTM dengan metode garis lurus sebesar minus Rp925.867.442.840; dan
- akumulasi amortisasi diskon portofolio investasi yang dikategorikan sebagai HTM dengan metode garis lurus sebesar Rp29.793.214.524.

Dengan demikian, jumlah Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya (Neto) mengalami kenaikan Rp20.023.070.634.748 (16,81%) dari periode 31 Desember 2022. Perhitungannya disajikan sebagai berikut.



Perhitungan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya (Neto) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya (Bruto)	140.037.133.951.947	119.844.502.324.242	20.192.631.627.705	16,85
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya	(896.074.228.316)	(726.513.235.359)	(169.560.992.957)	23,34
Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya (Neto)	139.141.059.723.631	119.117.989.088.883	20.023.070.634.748	16,81

Kenaikan saldo Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya (Neto) secara lebih detail disebabkan adanya pencairan DAP dari APBN Tahun 2023 sebesar Rp20.000.000.000.000.

D.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Saldo Aset Tetap bruto per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.502.068.952 mengalami penurunan karena adanya penyerahan tanah dan gedung. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

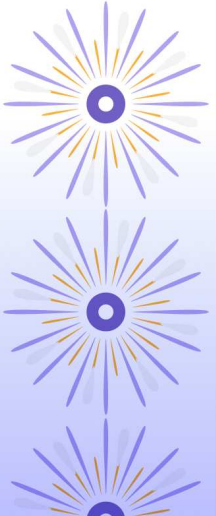
Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Tanah	-	103.873.814.000	(103.873.814.000)	-100,00
Peralatan Dan Mesin	18.193.453.869	13.487.183.361	4.706.270.508	34,89
Gedung Dan Bangunan	-	1.929.044.000	(1.929.044.000)	-100,00
Aset Tetap Lainnya	25.696.500	25.696.500	-	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	120.990.000	(120.990.000)	100,00
Total Aset Tetap	18.219.150.369	119.436.727.861	(101.217.577.492)	-84,75
Akumulasi Penyusutan	(10.717.081.417)	(9.265.357.153)	(1.451.724.264)	15,67
Total Aset Tetap (Neto)	7.502.068.952	110.171.370.708	(102.669.301.756)	-93,19

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap tahun 2023

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Reklasifikasi (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	103.873.814.000	-	-	(103.873.814.000)	-
Peralatan Dan Mesin	13.487.183.361	8.595.958.813	196.357.890	(4.086.046.195)	18.193.453.869
Gedung Dan Bangunan	1.929.044.000	-	-	(1.929.044.000)	-
Aset Tetap Lainnya	25.696.500	-	-	-	25.696.500
Konstruksi Dalam Pengerjaan	120.990.000	3.548.035.740	(196.357.890)	(3.472.667.850)	-
Total Aset Tetap	119.436.727.861	12.143.994.553	-	(113.361.572.045)	18.219.150.369
Akumulasi Penyusutan	(9.265.357.153)	(1.300.348.229)	-	151.376.035	(10.717.081.417)
Total Aset Tetap (Neto)	110.171.370.708	10.843.646.324	-	(113.210.196.010)	7.502.068.952

Keterangan:

- Tanah** semula sebesar Rp103.873.814.000 diserahkan ke Pengelola Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp103.873.814.000 sehingga saldo akhirnya 0.
- Peralatan dan Mesin** semula sebesar Rp13.487.183.361 kemudian ada penambahan di 2023 sebesar Rp8.595.958.813 dan terjadi pengurangan sebesar -Rp3.889.688.305 kemudian ada reklasifikasi sebesar Rp196.357.890 dari konstruksi dalam pengerjaan.
- Gedung dan Bangunan** semula sebesar Rp1.929.044.000 lalu diserahkan ke PIP sebesar Rp1.929.044.000 sehingga saldo akhir 0
- Aset tetap lainnya** saldo awal Rp25.696.500 tidak ada penambahan/pengurangan sehingga saldonya sama yaitu Rp25.696.500.
- Konstruksi** dalam pengerjaan saldo awal sebesar Rp120.990.000 kemudian ada penambahan saldo di 2023 sebesar Rp3.548.035.740, terjadi reklasifikasi menjadi peralatan dan mesin sebesar Rp196.357.890.



D1.3.1 Tanah

Saldo aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2023 adalah 0. Tanah tersebut diserahkan kepada Satuan Kerja (Satker) BLU-PIP dengan Nomor BA-1/ SJ.8/2023.

Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Tanah	-	103.873.814.000	(103.873.814.000)	-100,00
Saldo Akhir	-	103.873.814.000	(103.873.814.000)	-100,00

D1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.706.270.508 (34,89%) dari periode tahun sebelumnya karena adanya Belanja Modal.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Peralatan dan Mesin	18.193.453.869	13.487.183.361	4.706.270.508	34,89
Saldo Akhir	18.193.453.869	13.487.183.361	4.706.270.508	34,89

D1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah nihil.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Gedung Dan Bangunan	-	1.929.044.000	(1.929.044.000)	-100,00
Saldo Akhir	-	1.929.044.000	(1.929.044.000)	-100,00

D1.3.4 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.696.500, tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Alat Musik/Band	25.696.500	25.696.500	-	0,00
Total	25.696.500	25.696.500	-	0,00

D1.3.5 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar nihil, pada tahun 2022 terdapat konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp120.990.000

Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	120.990.000	(120.990.000)	-100,00
Total	-	120.990.000	(120.990.000)	-100,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pengadaan Jasa Konsultansi Desain Interior kantor LPDP pada Gedung Data Center Pusintek yang akan ditempati sebagai kantor LPDP pada tahun 2023. Pengadaan jasa berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor SPK-65/RJ-PL/PPK/ LPDP/2022 tanggal 30 November 2023 dengan penyedia jasa PT Astha Daya Arkiyasa. Pengerjaannya sudah selesai dilaksanakan.

D1.3.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap BLU per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp10.717.081.417, naik sebesar Rp1.451.724.264 (15,67%) karena pembelian Aset Tetap pada semester II 2023.

Mutasi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenalkan/Penurunan	
			Rp	%
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan Mesin	(10.696.545.517)	(8.992.538.343)	(1.704.007.174)	18,95
Gedung dan Bangunan	-	(252.612.910)	252.612.910	-100,00
Aset Tetap Lainnya	(20.535.900)	(20.205.900)	(330.000)	1,63
Jumlah	(10.717.081.417)	(9.265.357.153)	(1.451.724.264)	15,67

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap BLU per 31 Desember 2023 terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Aset Tetap Lainnya dengan rincian nilai buku sebagai berikut.

Rincian Nilai Buku Aset Tetap BLU per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Peralatan dan Mesin	18.193.453.869	(10.696.545.517)	7.496.908.352
Gedung dan Bangunan	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	25.696.500	(20.535.900)	5.160.600
Total	18.219.150.369	(10.717.081.417)	7.502.068.952

D1.4 Aset Lainnya

D1.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp5.758.094.401. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud pada LPDP berupa perangkat lunak (software) yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023
dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenalkan/Penurunan	
			Rp	%
Software	5.758.094.401	5.758.094.401	-	0
Total	5.758.094.401	5.758.094.401	-	0

Berikut catatan atas rincian aset tak berwujud tersebut:

- Sistem aplikasi keuangan terintegrasi sebesar Rp2.500.000.000.
- Sistem feeder beasiswa kolaborasi LPDP sebesar Rp188.700.000.
- Sistem aplikasi talent hub untuk pengelolaan alumni sebesar Rp185.037.000.

D1.4.2 Aset Lain-lain pada Badan Layanan Umum

Aset Lain-lain pada BLU adalah aset yang dibatasi penggunaannya pada LPDP sebesar Rp. 35.355.980.391 adalah sebagai berikut:

1. LPDP menerima pendapatan hibah dari BMGF sebesar 2.257.536 Dolar AS atau senilai Rp34.955.687.424. Dana tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan Program Pendanaan Riset Pisang.
2. LPDP menerima pendapatan hibah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp400.292.967. Dana tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan Riset Kolaborasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur.

D1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp3.962.008.776, naik sebesar Rp718.434.250 (22,15%) dari tahun sebelumnya.

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenalkan/Penurunan	
			Rp	%
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya (Software)	(3.962.008.776)	(3.243.574.526)	(718.434.250)	22,15
Total	(3.962.008.776)	(3.243.574.526)	(718.434.250)	22,15



D.2 Kewajiban

D.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

D.2.1.1 Utang kepada Pihak Ketiga BLU

Utang Pihak Ketiga merupakan kewajiban akrual atas belanja layanan dan operasional LPDP. Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp181.208.626.318 mengalami kenaikan sebesar Rp100.645.596.795 atau 124,93% dari tahun 2022.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Belanja Operasional Yang Masih Harus Dibayar	-	550.558.781	(550.558.781)	-100,00
Beban Gaji dan Tunjangan	-	-	-	100,00
Beban Barang	-	555.000	(555.000)	100,00
Beban Jasa	-	440.521.781	(440.521.781)	100,00
Beban Pemeliharaan	-	-	-	100,00
Beban Perjalanan Dinas	-	109.482.000	(109.482.000)	100,00
Beban Layanan yang Masih Harus Dibayar	181.208.626.318	80.012.470.742	101.196.155.576	217,89
Beban atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i> - Layanan Beasiswa	181.208.626.318	80.012.470.742	101.196.155.576	217,89
Total	181.208.626.318	80.563.029.523	100.645.596.795	124,93

D.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

D.2.2.1 Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN

Utang Jangka Panjang BLU kepada Bendahara Umum Negara (BUN) berasal dari saldo akhir Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN pada buku besar akrual yang merupakan transaksi dana yang diterima oleh BLU dari Bagian Anggaran (BA) BUN 999.03. Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN merupakan alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan pada LPDP.

Saldo Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN per 31 Desember 2023 sebesar Rp139.107.700.000.000, atau meningkat Rp20 triliun dari saldo 31 Desember 2022 karena LPDP telah menerima alokasi tambahan dari BUN berupa Dana Abadi Pendidikan pada Maret dan Desember 2023. Alokasi dana investasi dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) investasi kepada LPDP dapat dilihat pada rincian berikut.

Rincian Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN
per 31 Desember 2023

Uraian	Akumulasi 31 Desember 2022 (Rp)	Pencairan 2023 (Rp)	Tanggal Pencairan	Akumulasi 30 Desember 2023 (Rp)
Dana Kelolaan				
A. DAP	101.117.700.000.000	10.000.000.000.000	Maret dan Desember 2023	111.117.700.000.000

Uraian	Akumulasi 31 Desember 2022 (Rp)	Pencairan 2023 (Rp)	Tanggal Pencairan	Akumulasi 30 Desember 2023 (Rp)
B. DAPL	7.990.000.000.000	4.000.000.000.000	Maret 2023	11.990.000.000.000
C. DAPT	7.000.000.000.000	4.000.000.000.000	Maret 2023	11.000.000.000.000
D. DAKB	3.000.000.000.000	2.000.000.000.000	Maret 2023	5.000.000.000.000
Akumulasi Dana Abadi	119.107.700.000.000			139.107.700.000.000

D.3 Ekuitas Dana

D.3.1 Ekuitas

D.3.1.1. *Ekuitas*

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.973.660.990.686, mengalami penurunan Rp147.309.584.181 dari posisi 31 Desember 2022. Hal ini salah satunya dikontribusi oleh defisit anggaran tahun berjalan.

IV. E - Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

E.1 Kegiatan Operasional

E.1.1.1 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat merupakan pendapatan atas kegiatan utama LPDP, yaitu pengelolaan dana investasi dengan sumber dana kelolaan definitif LPDP yaitu Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat periode 31 Desember 2023 sebesar Rp9.257.840.738.768 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Pendapatan Jasa Layanan dari
Masyarakat periode 31 Desember 2023

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran/LRA (Rp)	Penyesulan (Rp)		LO (Rp)
		Akrual 2023 (+)	Akrual 2022 (-)	
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	9.250.096.193.020	803.731.693.872	795.987.148.125	9.257.840.738.768
Deposito	2.862.746.445.125	122.344.705.125	133.278.276.089	2.851.812.874.161
Surat Berharga Negara (SBN)	6.219.009.447.895	663.461.319.191	20.501.441.938	6.861.969.325.148
Obligasi Korporasi	168.340.300.000	17.925.669.556	642.207.430.098	(455.941.460.542)

E.1.1.2 Pendapatan BLU Lainnya

Pendapatan BLU Lainnya periode 31 Desember 2023 sebesar Rp38.673.645.594. Pendapatan BLU lainnya terdiri dari pendapatan hibah, jasa giro, denda yang bersumber dari pengadaan, dan pendapatan lain-lain.

Rincian Pendapatan BLU Lainnya periode
31 Desember 2023

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran/LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		Laporan Operasional/LO (Rp)
		Akrual 2023	Akrual 2022	
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Lainnya	38.673.645.594	-	-	38.673.645.594
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha-Uang (424222)	34.955.687.424	-	-	34.955.687.424
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424811)	3.533.131.802	-	-	3.533.131.802
Komisí, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU (424913)	119.363.705	-	-	119.363.705
Pendapatan Lain-lain BLU (424919)	65.462.663	-	-	65.462.663

E.1 Kegiatan Operasional

Jumlah Beban Operasional untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.231.601.645.081. Beban Operasional periode 31 Desember 2023 terdiri dari beberapa rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Operasional 31 Desember 2023

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		LO (Rp)
		Tambah	Kurang	
Beban Gaji dan Tunjangan (52511)	73.711.308.072	-	-	73.711.308.072
Beban Barang (52512)	30.718.302.968	-	761.308.449	29.956.994.519
Beban Jasa (52513)	89.438.396.897	-	436.544.306	89.001.852.591
Beban Pemeliharaan (52514)	619.408.398	-	-	619.408.398
Beban Perjalanan (52515)	71.931.710.647	-	405.697.899	71.526.012.748
Beban Atas Pengelolaan Endowment Fund (52516)	9.570.914.260.621	-	608.010.760.834	8.962.903.499.787

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		LO (Rp)
		Tambah	Kurang	
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU (525121)	49.116.756	-	49.116.756	-
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (525152)	400.000	5.114.500	-	5.514.500
Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (525153)	-	-	-	-
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (525154)	-	-	-	-
Beban Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (525155)	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (537112)	4.332.081.128	-	4.332.081.128	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (537113)	3.548.035.740	-	3.548.035.740	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (591111)	-	2.186.233.294	-	2.186.233.294
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan (591211)	-	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya (591411)	-	330.000	-	330.000
Beban Amortisasi Software (592115)	-	718.434.250	-	718.434.250
Beban Persediaan Konsumsi (593111)	-	61.853.306	-	61.853.306
Beban Penylisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya BLU (594791)	-	858.054.201	-	858.054.201
Beban Aset Ekstrakomtsbel Peralatan dan Mesin - BLU (595122)	-	52.149.415	-	52.149.415
TOTAL	9.845.263.671.127	3.882.168.966	617.543.545.112	9.231.601.645.081

Penyesuaian tambah dan kurang tersebut antara lain disebabkan penyesuaian pencatatan akrual pada periode sebelumnya.

E.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai BLU Profesional Non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan honor-honor terkait kegiatan. Beban Pegawai periode 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp73.711.308.072 dengan perhitungan sebagai berikut.

Rincian Beban Pegawai periode 31 Desember 2023

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		LO (Rp)
		Penyesuaian Tambah	Penyesuaian Kurang	
Beban Gaji Dan Tunjangan (525111)	73.711.308.072	-	-	73.711.308.072

Kenaikan Beban Gaji dan Tunjangan disebabkan secara kas terdapat kenaikan pembayaran gaji akibat bertambahnya jumlah pegawai.

E.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Beban Persediaan 31 Desember 2023 sebesar Rp61.853.306,00. Tidak terdapat pencatatan LRA atas beban persediaan karena seluruhnya berasal dari penyesuaian akrual yang merupakan penggunaan persediaan.

E.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban barang dan jasa LPDP terdiri beban operasional dukungan manajemen, beban layanan, pengembangan dana LPDP selain belanja perjalanan. Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2023 sebesar Rp9.081.920.010.812. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2023

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		LO (Rp)
		Tambah	Kurang	
Beban Barang (525112)	30.718.302.968	-	761.308.449	29.956.994.519
Beban Jasa (525113)	89.438.396.897	-	436.544.306	89.001.852.591
Beban Atas Pengelolaan Endowment Fund (525116)	9.570.914.260.621	-	608.010.760.834	8.962.903.499.787
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU (525121)	49.116.756	-	49.116.756	-
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (525152)	400.000	5.114.500	-	5.514.500

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		LO (Rp)
		Tambah	Kurang	
Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (525153)	-	-	-	-
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (525154)	-	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan Dan Mesin - BLU (525122)	649.900	51.499.515	-	52.149,415
Total	9.691.121.127.142	56.614.015	350.600.519.607	9.081.920.010.812

Beban Barang dan Jasa salah satunya terdiri dari akun Belanja atas Pengelolaan *Endowment Fund*. Terjadi kenaikan Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund berupa belanja layanan beasiswa akibat peningkatan belanja Beasiswa Native LPDP, mengingat jumlah mahasiswa berangkat meningkat dari tahun sebelumnya, semakin bervariasinya program kolaborasi dengan Kemendikbudristek dan Kemeng, adanya program baru yaitu layanan DAKB dan DAPT yang berkontribusi terhadap Beban Barang dan Jasa BLU.

E.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah merupakan beban yang terjadi untuk pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan gedung, dan pemeliharaan kendaraan dinas. Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp619.408.398 dengan rincian sebagai berikut.

Rincian Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2023

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		LO (Rp)
		Penyesuaian Tambah	Penyesuaian Kurang	
Beban Pemeliharaan	619.408.398,00	-	-	619.408.398,00
Beban Pemeliharaan (525114)	619.408.398,00	-	-	619.408.398,00
Beban Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (525155)	-	-	-	-

Kenaikan Beban Pemeliharaan dari periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan LPDP pada tahun 2022 melakukan banyak aktivitas pemeliharaan baik untuk Gedung dan Bangunan maupun Peralatan dan Mesin. Pada 2023, tidak terdapat realisasi Beban Pemeliharaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

E.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2023 sebesar Rp71.526.012.748.

Seiring dengan meredanya pandemi COVID-19, pada tahun 2023 LPDP telah banyak melakukan kegiatan secara luring untuk proses bisnis utama (seleksi, monitoring, evaluasi, *reviewer coaching*) untuk layanan beasiswa dan riset maupun dukungan manajemen seperti pemantauan dan audit.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember 2023

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		LO (Rp)
		Tambah	Kurang	
Beban Perjalanan (525115)	71.931.710.647	-	405.697.899	71.526.012.748
Total	71.931.710.647	-	405.697.899	71.526.012.748

E.1.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
periode 31 Desember 2023

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		LO (Rp)
		Tambah	Kurang	
Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin (59111)	2.186.233.294	-	-	2.186.233.294
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya (59141)	330.000	-	-	330.000
Beban Amortisasi Software (592115)	718.434.250	-	-	718.434.250
Total	2.904.997.544	-	-	2.904.997.544

Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 31 Desember 2023 sebesar Rp2.904.997.544.

E.1.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp858.054.201. Hal ini disebabkan pada 2023 terdapat penambahan saldo penyisihan piutang tidak signifikan berasal dari debitor RPH, MN, JR, AK, GDP, RK, MA, RN, dan TII pada tahun 2023.

Terdapat pembayaran piutang atas nama RC, AH, SS, MAA, RPH, MR, MN, AAB, dan NF pada tahun 2023. Dengan demikian, nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menjadi positif. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Piutang Tak Tertagih periode 31 Desember 2023

Initial Debitur	Saldo Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Piutang 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Penyisihan 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Penyisihan 31 Desember 2023 (Rp)	Kategori	Beban Penyisihan Piutang (Rp)
YRW	339.921.000	339.921.000	339.921.000	339.921.000	Macet	-
AAB	353.625.000	347.694.804	353.625.000	347.694.804	Macet	(5.930.196)
I	292.314.041	292.314.041	292.314.041	292.314.041	Macet	-
NF	116.900.000	114.900.000	116.900.000	74.900.000	Macet	(42.000.000)
A	217.400.000	217.400.000	21.740.000	108.700.000	Diragukan	86.960.000
AH	1.229.195.000	1.224.472.025	1.229.195.000	1.224.472.025	Macet	(4.722.975)
SS	1.564.139.448	1.471.632.693	1.564.139.448	1.471.632.693	Macet	(92.506.755)
RFN	1.268.999.000	1.268.999.000	6.344.995	126.899.900	Kurang Lancar	120.554.905
RC	80.000.000	-	400.000	-	Lunas	(400.000)
RPH	-	786.749.623	-	786.749.623	Macet	786.749.623
MN	-	88.557.800	-	442.789	Lancar	442.789
JR	-	83.400.000	-	8.340.000	Diragukan	8.340.000
AK	-	25.800.000	-	129.000	Lancar	129.000
GDP	-	1.200.000	-	6.000	Lancar	6.000
RK	-	14.100.000	-	70.500	Lancar	70.500
MA	-	4.300.000	-	21.500	Lancar	21.500
RN	-	12.900.000	-	64.500	Lancar	64.500
TII	-	55.062.000	-	275.310	Lancar	275.310
TOTAL						858.054.201

E.2 Kegiatan Nonoperasional

E.2.1 Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Nonlancar

Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Nonlancar berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar maupun Beban Pelepasan Aset Nonlancar. Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar periode 31 Desember 2023 sebesar nihil.

E.2.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Nonoperasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pendapatan Kegiatan Nonoperasional Lainnya periode 31 Desember 2023 sebesar Rp74.234.531.007, sedangkan Beban Kegiatan Nonoperasional Lainnya periode 31 Desember 2023 sebesar Rp5.819.116.261.

Perbandingan Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya adalah sebagai berikut.

Perbandingan Surplus/Defisit dari Kegiatan
Nonoperasional Lainnya periode 31 Desember 2023

Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		LO (Rp)
		Tambah	Kurang	
Pendapatan Kegiatan Nonoperasional Lainnya	45.409.982.938	-	-	74.234.531.007
Pendapatan Dari Pengembalian Belanja TAYL (Tahun Anggaran Yang Lalu)	45.409.982.938	-	40.000.000	45.369.982.938
Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi - Amortisasi Diskon Obligasi HTM (Held-To-Maturity)	-	28.845.853.718	-	28.845.853.718
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	2.899.000	-	2.899.000
Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi BLU	-	15.795.351	-	15.795.351
Beban Kegiatan Nonoperasional Lainnya	5.819.116.261	-	-	5.819.116.261
Belanja Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	5.775.218.970	-	5.775.218.970
Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi - BLU	-	43.897.291	-	43.897.291
Total	39.590.866.677	-	-	68.415.414.746

Kenalkan Pendapatan Kegiatan Nonoperasional Lainnya disebabkan adanya pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu baik untuk layanan beasiswa maupun riset. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp2.899.000 merupakan aset lain-lain yang diperoleh dari Pendapatan Hibah Barang Milik Negara (BMN) di Laporan Gratifikasi pegawai LPDP.

E.3 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas. Pada 31 Desember 2023, tidak terdapat Pos Luar Biasa.

E.4 Surplus/(Defisit) - LO

Surplus/(Defisit) – Laporan Operasional (LO) untuk 31 Desember 2023 adalah sebesar surplus Rp133.328.154.027, lebih rendah sebesar - Rp1.933.408.978.522 atau -93,55% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Secara umum, LO pada tahun ini mengalami surplus disebabkan secara akrual, pendapatan tahun berjalan melebihi beban tahun berjalan.

V. F - Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp504.130.642.203 yang merupakan arus kas dari aktivitas pendapatan operasional dan belanja operasional

F.1.1 Arus Masuk Kas

F.1.1.1 Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat

Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat merupakan pendapatan yang diperoleh dari layanan investasi LPDP. Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp9.250.096.193.021, naik sebesar Rp2.889.548.281.435 (45,43%) dari periode 31 Desember 2022 yang sebesar Rp6.360.547.911.586. Perbandingannya disajikan sebagai berikut.

Perbandingan Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenalkan/Penurunan	
			Rp	%
Dana Abadi Pendidikan (DAP)	7.504.418.565.916	5.244.920.728.195	2.259.497.837.721	43,08
Deposito	2.424.855.895.284	1.463.820.386.136	961.035.509.149	65,65
Obligasi Negara	4.935.576.138.631	3.630.430.842.059	1.305.145.296.572	35,95
Obligasi Korporasi	143.986.532.000	150.669.500.000	(6.682.968.000)	-4,44
Dana Abadi Penelitian (DAPL)	811.505.603.162	498.466.017.074	313.039.586.088	62,80
Deposito	226.557.769.797	48.586.677.013	177.971.092.784	366,30
Obligasi Negara	576.647.670.698	447.318.648.394	129.329.022.304	28,91
Obligasi Korporasi	8.300.162.667	2.560.691.667	5.739.471.000	224,14
Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT)	631.706.004.394	432.766.535.925	198.939.468.469	45,97
Deposito	130.021.611.777	38.952.470.406	91.069.141.371	233,80
Obligasi Negara	493.601.285.951	391.253.373.853	102.347.912.098	26,16
Obligasi Korporasi	8.083.106.667	2.560.691.667	5.522.415.000	215,66



Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Dana Abadi Kebudayaan (DAKB)	302.466.019.549	184.394.630.393	118.071.389.156	64,03
Deposito	81.311.168.267	17.449.350.224	63.861.818.044	365,98
Obligasi Negara	213.184.352.615	164.394.588.502	48.799.764.113	29,69
Obligasi Korporasi	7.970.498.667	2.560.691.667	5.409.807.000	211,26
TOTAL	9.250.096.193.021	6.360.547.911.586	2.889.548.281.435	45,43

Kenaikan Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat disebabkan adanya pencairan alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan pada tahun 2023 sebesar Rp20 triliun dan *shifting* deposito ke obligasi dalam rangka optimalisasi pendapatan.

F1.1.2 Pendapatan BLU Lainnya

Pendapatan BLU Lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama LPDP yaitu investasi, melainkan dari kegiatan operasional lainnya. Pendapatan BLU Lainnya periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp43.156.719.035 dan Rp24.643.140.205 atau mengalami kenaikan sebesar Rp18.513.578.831 (237,44%) karena meningkatnya transaksi hibah dari tahun sebelumnya. Perbandingannya adalah sebagai berikut.

Perbandingan Pendapatan BLU Lainnya periode
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pendapatan Giro	3.533.131.801	2.849.561.556	683.570.246	23,99
Pendapatan Lain-lain	44.667.899.810	21.493.578.649	23.174.321.161	107,82
Pendapatan Hibah	34.955.687.424	300.000.000	34.655.687.424	100,00
TOTAL	83.156.719.035	24.643.140.205	58.513.578.831	237,44

F1.2 Arus Keluar Kas

F1.2.1 Pembayaran Pegawai

Pembayaran pegawai merupakan pengeluaran kas untuk membiayai belanja pegawai yang terdiri dari Gaji/Remunerasi, Insentif, Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan uang makan pejabat pengelola dan pegawai LPDP.

Pembayaran Pegawai periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp10.335.519.282 (16,31%) dengan perbandingan sebagai berikut.

Perbandingan Pembayaran Pegawai periode
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pembayaran Pegawai	73.711.308.072	63.375.788.790	10.335.519.282	16,31
TOTAL	73.711.308.072	63.375.788.790	10.335.519.282	16,31

Kenaikan Pembayaran Pegawai di antaranya disebabkan penambahan posisi pegawai baru sepanjang 2023 dan 2022 baik pada posisi manajerial maupun pelaksana sehingga berdampak terhadap kenaikan remunerasi dan insentif pegawai.

F1.2.2 Pembayaran Barang

Pembayaran barang merupakan pengeluaran kas untuk membiayai belanja barang dan operasional kegiatan LPDP diluar belanja perjalanan dinas dan belanja jasa LPDP. Pembayaran Barang periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan Rp13.179.093.033 atau 75,14% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Perbandingan Pembayaran Barang periode
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pembayaran Barang	30.719.352.868	17.540.259.835	13.179.093.033	75,14
TOTAL	30.719.352.868	17.540.259.835	13.179.093.033	75,14

F1.2.3 Pembayaran Jasa

Pembayaran jasa merupakan pengeluaran kas untuk membiayai belanja jasa seperti jasa kustodian, jasa konsultan, jasa sewa peralatan, jasa *coll center*, jasa honor narasumber, dan lain sebagainya. Perbandingan pembayaran jasa periode ini dengan periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Perbandingan Pembayaran Jasa periode
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pembayaran Jasa	89.438.396.897	51.826.620.618	37.611.776.279	72,57
TOTAL	89.438.396.897	51.826.620.618	37.611.776.279	72,57

Kenaikan signifikan belanja jasa bersumber dari pembayaran jasa honor narasumber proses bisnis utama layanan seperti monitoring dan evaluasi (monev) riset maupun seleksi beasiswa, yang pada tahun sebelumnya dianggarkan pada akun Belanja Barang.

F1.2.4 Pembayaran Pemeliharaan

Pembayaran pemeliharaan merupakan pengeluaran kas untuk membiayai belanja pemeliharaan baik berupa peralatan kantor, gedung dan bangunan, maupun kendaraan.

Perbandingan Pembayaran Pemeliharaan
periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pembayaran Pemeliharaan	619.408.398	527.992.500	91.415.898	17,31
TOTAL	619.408.398	527.992.500	91.415.898	17,31

Kenaikan Pembayaran Pemeliharaan disebabkan realisasi biaya pemeliharaan gedung dan bangunan pada 2023 yang di antaranya terdiri dari perbaikan lift, pagar, dan gedung.

F1.2.5 Pembayaran Perjalanan Dinas

Pembayaran perjalanan dinas merupakan pengeluaran kas untuk membiayai belanja perjalanan dinas pejabat/pegawai LPDP serta pihak-pihak lain dalam rangka kegiatan dan fungsi LPDP. Perbandingan periode ini dengan periode sebelumnya adalah sebagai berikut.

Perbandingan Pembayaran Perjalanan Dinas
periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pembayaran Perjalanan Dinas	71.931.710.647	27.664.905.853	44.266.804.794	160,01
TOTAL	71.931.710.647	27.664.905.853	44.266.804.794	160,01

Peningkatan Pembayaran Perjalanan Dinas yang sangat signifikan disebabkan LPDP pada tahun 2022 masih mengadakan kegiatan secara daring. Sedangkan pada tahun ini, kegiatan telah dilaksanakan secara luring, meliputi proses bisnis utama seperti seleksi dan money beasiswa dan riset serta kegiatan dukungan manajemen seperti pemantauan proses bisnis utama, audit, dan kegiatan pelatihan.

F1.2.6 Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU

Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU merupakan pengeluaran kas untuk membiayai belanja layanan LPDP yang bersifat *direct/langsung*. Layanan tersebut terdiri dari penyaluran beasiswa dan pendanaan riset. Perbandingan Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU adalah sebagai berikut.

Perbandingan Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan
BLU periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan Badan Layanan Umum (BLU)				
Layanan Beasiswa	8.723.195.631.472	4.135.817.279.635	4.587.378.351.836	110,92

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Layanan Riset	344.651.885.400	243.524.773.522	101.127.111.878	41,53
Layanan DAPT	458.311.000.000	97.180.560.700	361.130.439.300	100,00
Layanan DAKB	44.765.743.746	292.648.800.000	(247.893.056.254)	100,00
TOTAL	9.570.914.260.621	4.769.171.413.857	4.801.742.846.760	100,68

Penjelasan atas Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU tersebut adalah sebagai berikut.

- ✳ Belanja Layanan Beasiswa naik 110,92%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah mahasiswa berangkat dan berkuliah di luar negeri untuk layanan Beasiswa Native LPDP, meningkatnya variasi program kolaborasi beasiswa Kemendikbudristek, dan dimulainya realisasi program layanan beasiswa Kemenag
- ✳ Terdapat layanan DAPT dan DAKB pada tahun 2023 yang keduanya dikelola oleh Kemendikbudristek.
- ✳ Belanja Layanan Pendanaan Riset naik 41,53%. Pada tahun sebelumnya, LPDP membiayai program RISPRO Mandatori Pendanaan Prioritas Riset Nasional (PRN) dan Konsorsium COVID-19 dari BRIN. Pada tahun ini, program tersebut sudah selesai dan digantikan dengan program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) yang pencairannya diperkirakan baru dimulai Triwulan IV 2023. Selain itu, untuk program Beasiswa Native LPDP dan kolaborasi Kemendikbudristek, LPDP hanya melanjutkan pendanaan riset *ongoing* yang telah berkontrak pada tahun sebelumnya.

F1.2.7 Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan

Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan merupakan pengeluaran kas untuk pembelian persediaan dengan anggaran khusus 525121 (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU). Perbandingan belanja ini dengan periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Perbandingan Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan
periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	49.116.756	102.498.088	(53.381.332)	-52,08
TOTAL	49.116.756	102.498.088	(53.381.332)	-52,08

Penurunan disebabkan pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) tidak sebanyak tahun lalu karena sudah banyak yang dilakukan secara otomatis melalui sistem.

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp20.007.880.116,88 yang terdiri dari perolehan atas Peralatan dan Mesin, Perolehan atas Peralatan dan Mesin, serta Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi).

F.2.1 Arus Masuk Kas

Pada tahun 2023 arus kas masuk dari penjualan sebesar nihil.

F.2.2 Arus Keluar Kas

F.2.2.1 Perolehan atas Peralatan dan Mesin
Perolehan atas Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.332.081.128

F.2.2.2 Perolehan atas Gedung dan Bangunan
Perolehan atas Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.548.035.740

F.2.2.3 Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi) periode 31 Desember 2023 disajikan Rp20.000.000.000.000. LPDP menerima pencairan alokasi pencairan alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar nilai tersebut.

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

F.3.1 Arus Masuk Kas

F.3.1.1 Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)

Pada periode 31 Desember 2023, LPDP telah menerima pencairan alokasi DAP sehubungan berdasarkan alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. Rincian pencairan Dana Abadi di Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut.

Rincian pencairan Dana Abadi di Bidang Pendidikan tahun 2023

Jenis Dana Abadi	Alokasi pada APBN 2023 (Rp)	Pencairan 2023 (Rp)	Persentase Realisasi Pencairan (%)	Tanggal Pencairan
A. DAP	10.000.000.000.000	10.000.000.000.000	100	Maret dan Desember 2023
B. DAPL	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	100	Maret 2023
C. DAPT	4.000.000.000.000	4.000.000.000.000	100	Maret 2023
D. DAKB	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	100	Maret 2023
TOTAL	20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	100	

F.3.2 Arus Keluar Kas

Pada periode 31 Desember 2023, tidak terdapat pembayaran berkaitan aktivitas pendanaan.

F.4 Kenaikan/Penurunan Kas

Pada periode 31 Desember 2023, nilai penurunan kas sebesar Rp512.010.759.071 yang merupakan berupa defisit atas pendapatan dikurangi dengan belanja pada tahun berjalan.

Perbandingan Kenaikan/Penurunan Kas periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Kenaikan/Penurunan Kas	(512.010.759.071)	1.451.106.365.991	(1.963.117.125.062)	-135,28
TOTAL	(512.010.759.071)	1.451.106.365.991	(1.963.117.125.062)	-135,28

F.5 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas periode 31 Desember 2023 sebesar Rp5.949.401.311.937. Rincian Saldo Akhir Kas periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Rincian Saldo Akhir Kas periode 31 Desember 2023

Uraian	Saldo (Rp)
1. Saldo Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal TA 2023	6.461.440.172.948
A. Pendapatan	9.333.252.912.056
B. Belanja	9.845.263.671.127
2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) (A-B)	(512.010.759.071)
3. Selisih Kurs	(28.101.940)
4. Saldo SAL Akhir (1+2+3)	5.949.401.311.937
i. Saldo Akhir Kas Pada BLU (Giro Dan Setara Kas)	3.022.889.508.177
ii. Investasi Jangka Pendek BLU	2.926.511.803.760
iii. Kas Pada BLU Belum Disahkan (1+ii-3)	-

SAL akhir merupakan penjumlahan dari saldo kas pada BLU yang terdiri dari kas pada rekening giro ditambah setara kas dan investasi jangka pendek. Seluruh kas BLU per 31 Desember 2023 telah disahkan.

VI. G - Penjelasan atas Pos-Pos
Laporan Perubahan Ekuitas

G.1 Ekuitas Awal

Perbandingan ekuitas awal masing-masing periode pelaporan ini adalah sebagai berikut.

Perbandingan Ekuitas Awal periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Ekuitas Awal	8.120.970.574.867	6.061.540.057.465	2.059.430.517.402	34
TOTAL	8.120.970.574.867	6.061.540.057.465	2.059.430.517.402	34

G.2 Surplus (Defisit)-LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp133.328.154.027. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan nonoperasional, dan pos luar biasa. Surplus disebabkan di antaranya secara kas, pendapatan tahun berjalan jauh lebih tinggi dari belanjanya.

Perbandingan Surplus/Defisit-LO periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Surplus/Defisit-Laporan Operasional (LO)	133.328.154.027	2.066.737.132.549	(1.933.408.978.522)	-93,55
TOTAL	133.328.154.027	2.066.737.132.549	(1.933.408.978.522)	-93,55

G.3 Koreksi Yang Menambah/
Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas mencerminkan koreksi atas transaksi yang terjadi akibat adanya perubahan kebijakan yang berdampak menambah/mengurangi ekuitas.

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas periode 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp172.323.483.393 atas koreksi beban yang terjadi 2021 dan 2022 yang dibayarkan pada 2023.

G.4 Transaksi Antarentitas

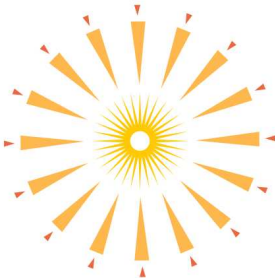
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdapat pada transaksi antar entitas antarsatker di Kementerian Keuangan (Kemenkeu):

Transaksi Antarentitas periode 31 Desember 2023

Transaksi Antarentitas	31 Desember 2023 (Rp)
Transfer Masuk Laptop Dari Pusintek	708.658.125
Laptop	809.895.000
Akumulasi Penyusutan	(101.236.875)
Transfer Keluar ke Biro Umum (BA-1/SJ.8/2023)	109.022.912.940
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	103.873.814.000
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.929.044.000
Gedung Pos Jaga Permanen	-
Bangunan Gedung Kantor Permanen	(250.104.382)
Gedung Pos Jaga Permanen	(2.508.528)
Aset Tetap Renovasi	3.472.667.850
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(108.314.254.815)

Transaksi antar entitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pusintek kepada LPDP terjadi Serah Terima Laptop Hasil Pengadaan Konsolidasi Tahun 2022 sebesar Rp809.895.000.
- LPDP kepada PIP terjadi Penyerahan Tanah dan Bangunan LPDP yang Berlokasi di Jalan Sam Ratulangi, Menteng pada Tahun 2023 sebesar Rp103.873.814.000 dan Rp1.929.044.000.
- LPDP kepada Pusintek terjadi Penyerahan Aset Tetap Renovasi (ATR) Hasil Pengadaan Konstruksi LPDP pada Tahun 2023 Rp3.472.667.850



G.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas adalah saldo penambahan/ pengurangan ekuitas akibat adanya pendapatan operasional dan belanja operasional. Kenaikan/ Penurunan Ekuitas periode 31 Desember 2023 sebesar -Rp147.309.584.181 atau lebih rendah 109,78% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Perbandingan Kenaikan/Penurunan Ekuitas periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Surplus/Defisit – LO	133.328.154.027	2.066.737.132.549	(1.933.408.978.522)	-93,55
Koreksi	(172.323.483.393)	(7.306.615.147)	(165.016.868.246)	2.258,46
Transaksi Antarentitas	(108.314.254.815)	-	(108.314.254.815)	-100,00
TOTAL	(147.309.584.181)	2.059.430.517.402	(2.206.740.101.583)	2.064,91

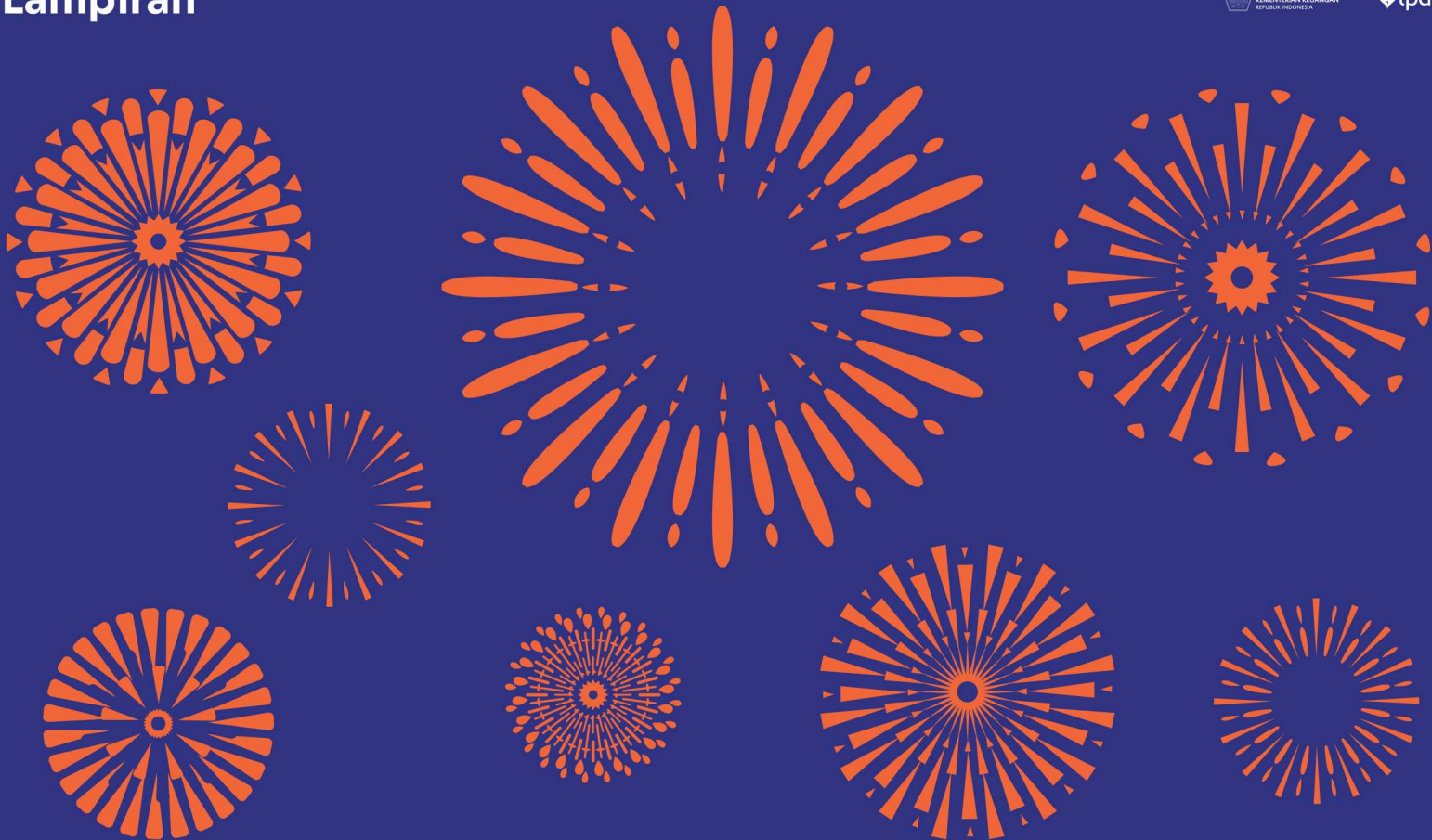
G.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas Akhir periode 31 Desember 2023 sebesar Rp7.973.660.990.686, lebih rendah dari 2022 sebesar Rp8.120.970.574.867 atau -1,81% di antaranya karena penggunaan saldo awal pada anggaran yang terjadi pada tahun 2023.

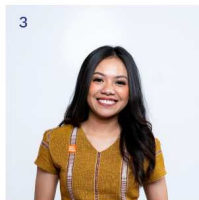
Perbandingan Ekuitas Akhir periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Ekuitas Akhir	7.973.660.990.686	8.120.970.574.867	(147.191.857.481)	-1,81
TOTAL	7.973.660.990.686	8.120.970.574.867	(147.191.857.481)	-1,81





Profil Talenta Laporan Tahunan 2023 LPDP



Profil Talenta Laporan Tahunan 2023 LPDP



1

Afrianto Akbar

PK 231
University of Birmingham
PNS/TNI/POLRI

Afrianto Akbar adalah seorang lulusan Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung yang menamatkan pendidikannya pada tahun 2017 dengan predikat cum laude. Saat ini, Afrianto bekerja di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 2019. Pada tahun 2021, ia ditugaskan sebagai pengawas pekerjaan pembangunan jalan di Kawasan Food Estate, Kalimantan Tengah. Dari pengalaman tersebut, Afrianto semakin menyadari pentingnya memperhatikan kelestarian lingkungan dalam pembangunan infrastruktur agar tidak memperburuk kondisi iklim global.

Menyadari hal ini, Afrianto semakin terdorong untuk melanjutkan pendidikan. Ia berencana untuk melanjutkan studi magister di University of Birmingham dalam jurusan *Road Management and Engineering* pada September 2024. Afrianto berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan material ramah lingkungan untuk konstruksi jalan dan jembatan, serta mendukung Indonesia dalam mencapai *net zero carbon emissions* di masa depan.

2

Dewinta Anindya

PK 224
Columbia University
PTUD

Dewinta Anindya adalah seorang pegawai lembaga negara yang memulai karirnya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015 melalui program Pendidikan Calon Staf (PCS) OJK Batch 2. Saat ini, Dewinta sedang menempuh pendidikan magisternya di Columbia University dengan jurusan Master of Public Administration, bersama sang suami yang juga merupakan penerima beasiswa LPDP.

Dewinta memiliki tekad yang kuat untuk menggabungkan pengalaman kerja dan pendidikan yang akan didapat dengan praktik kebijakan publik di sektor keuangan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Dewinta berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan sektor keuangan di Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan.

3

Elisabeth Wania Galla

PK 191
Columbia University
Daerah Afirmasi

Sejak tahun 2019, Elisabeth aktif dalam bidang pendidikan, khususnya dalam meningkatkan pendidikan anak-anak di daerah terpencil melalui NGO bernama The Sumba Foundation. Komitmennya terhadap pendidikan di daerah 3T membawanya pindah ke New York City, Amerika Serikat, pada tahun 2022 untuk mengajar gelar master di program Curriculum and Teaching di Columbia University. Di sana, ia juga mulai menulis buku anak-anak.

Elisabeth telah menulis seri buku anak yang berjudul Cerita Meri. Melalui karyanya, ia bertujuan menginspirasi anak-anak di seluruh Indonesia, khususnya di NTT, untuk percaya pada diri mereka dan menjadikan asal-usul mereka sebagai sumber kebanggaan dan kekuatan, bukan sebagai rintangan.

Karya-karyanya memotivasi anak-anak untuk merangkul potensi tak terbatas mereka dan tidak membiarkan keadaan membatasi impian dan aspirasi mereka.

4

Irma Nareswari

PK 208
Universitas Indonesia
PNS/TNI/POLRI

Irma Nareswari adalah seorang ASN yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis Akupunktur Medik dan Subspesialis Anestesi-Analgesi di RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), serta sebagai dosen pengajar di Program Studi Sp1 Akupunktur Medik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Selama bekerja di RSCM dan FKUI, ia pernah menjabat sebagai Penanggung Jawab (PJ) Mutu di Departemen Medik Akupunktur, Ketua Program Studi (KPS) dan Sekretaris Program Studi Sp1 Akupunktur Medik FKUI, serta Ketua Cluster Wellness di RSCM Kencana.

Sebagai dosen dan dokter, Irma memotivasi untuk terus mengembangkan ilmu akupunktur. Ia aktif mengikuti berbagai pelatihan di luar negeri, yang memperluasawasannya tentang perkembangan akupunktur global serta modalitas dan metode terbaru. Pengetahuan yang diperolehnya kemudian diterapkan di Indonesia melalui penelitian, publikasi, dan pelayanan masyarakat.

Irma berharap hasil penelitiannya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dengan penerapan berbagai teknik terapi, sehingga dapat mengurangi beban anggaran kesehatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

5

Jessica Wenda Friska

PK 214
Babson College
Kewirausahaan

Jessica Wenda Friska adalah seorang pengusaha yang memulai usaha fashion bernama Maitua Attire pada tahun 2019. Lulus dari Institut Teknologi Bandung dengan gelar di bidang Teknik Kelautan pada tahun 2016, Jessica menerima beasiswa LPDP untuk jalur kewirausahaan. Pada tahun 2024, ia berhasil menyelesaikan program One-Year MBA di Babson College.

Melalui Maitua Attire, Jessica berkomitmen untuk memberdayakan ibu rumah tangga dengan memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Usahanya tidak hanya sukses di dalam negeri, tetapi juga telah mengekspor produk ke berbagai negara, termasuk Malaysia, Singapura, Brunel Darussalam, Rusia, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Eropa. Jessica merasa beruntung dapat berkontribusi pada masyarakat dan berharap untuk terus belajar serta berkembang di industri fashion.

6

Khalif Remaldy Briantino

PK 165
University College London
PNS/TNI/POLRI

Khalif Remaldy Briantino adalah seorang perwira polisi yang telah berdinis sejak tahun 2019. Sebagai alumni penerima beasiswa LPDP 2020, Khalif menempuh studi di University College London jurusan MSc Policing tahun 2021 dan lulus pada tahun 2022 dengan predikat Distinction, yang setara dengan Cum Laude di Indonesia. Setelah menyelesaikan studinya, Khalif pulang dan mengabdikan diri di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Di sana, ia turut serta dalam pengungkapan kasus gratifikasi mantan atase tenaga kerja KBRI Singapura dan kasus korupsi pengadaan gerobak dagang di Kementerian Perdagangan.

Khalif berharap semakin banyak masyarakat Indonesia, khususnya anggota Polri, yang berminat mengikuti program beasiswa LPDP dan mengabdikan diri untuk memajukan bangsa Indonesia, sehingga dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045. Ia meyakini bahwa "Education is our passport to the future, for tomorrow belongs only to the people who prepare for it today."

7

Mark Maryadat Ufie

PK 230
University of Glasgow
Daerah Afirmasi

Mark adalah penerima beasiswa LPDP yang akan melanjutkan studi di University of Glasgow (2024-2025) dalam bidang Master of Creative Industries and Cultural Policy. Sebagai praktisi di bidang kreatif, Mark tergabung dalam Ambon Music Office dan berhasil mengawal kota Ambon untuk menjadi salah satu Kota Kreatif UNESCO di bidang musik pada tahun 2019.

Saat ini, ia aktif sebagai Deputy Strategic Partnership di Ambon Music Office dan pernah menjalin berbagai kerja sama dengan UNESCO Creative Cities Network (UCCN), seperti Daegu, Jinju, Chiang Mai, dan Paducah.

Glasgow, yang juga merupakan kota musik UNESCO sejak 2008, dianggap sebagai tempat yang tepat untuk menimba ilmu, menjalin kerja sama, serta memperluas relasi dengan kota-kota kreatif di kawasan Eropa.

Bagi Mark, memberikan kontribusi bagi daerah adalah bentuk kecintaan terhadap bangsa. Dari Ambon - Maluku, mari bersama-sama harumkan nama Indonesia.

8

Mohamad Djodi Hardi Prajuri

PK 173
University of Pennsylvania
PTUD

Mohamad Djodi Hardi Prajuri adalah Presiden Indonesia Mengglobal, sebuah yayasan nirlaba yang berfokus pada menginspirasi dan memberdayakan masyarakat Indonesia dalam mengejar pendidikan dan karier profesional di tingkat global. Djodi memperoleh gelar Master of Science jurusan Education (M.S.Ed.) dari University of Pennsylvania dan meraih penghargaan 2023 Outstanding Student Service Award.

Saat ini, ia aktif menyumbangkan wawasan dan keahliannya dalam program pendidikan nasional melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Semangatnya untuk pendidikan dan pengembangan kapasitas tercernin dalam pengalamannya sebagai konsultan pembelajaran untuk proyek-proyek pemerintah, pelatih perusahaan, dan guru sekolah.

Di masa depan, Djodi bermimpi untuk mendirikan sekolah dan pusat belajar sendiri yang akan memberikan dampak signifikan pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

9

Muhamad Husen Ali

PK 229
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Reguler

Muhamad Husen Ali adalah seorang dokter dan praktisi kesehatan masyarakat. Keterarikan Husen pada pengendalian penyakit menular dimulai sejak awal karirnya sebagai dokter umum di Nusa Tenggara Timur dan di RS Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran.

Saat ini, Husen bekerja di sebuah organisasi nonpemerintahan internasional yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi program penanggulangan HIV. Husen berperan dalam pembaruan Petunjuk Teknis Notifikasi Pasangan dan Anak serta perluasan Program Profilaksis Pra-Pajanan (PrEP) untuk menurunkan infeksi baru HIV.

Selaras dengan itu semua, Husen akan melanjutkan studi MSc Control of Infectious Diseases di London School of Hygiene and Tropical Medicine pada September 2024 dengan dukungan penuh dari LPDP. Husen berharap dapat membantu Indonesia dalam memperkuat sistem kesehatan sehingga mampu menghadapi potensi pandemi dan ancaman penyakit menular lain di masa depan.

10

Muhammad Rifki Darmawan

PK 230

Cornell University
Reguler

"Kopi yang kamu minum, makanan yang kamu unggah di media sosial, serta keceriaan orang banyak di tempat bermain akan menaruh seiring dengan naiknya suhu bumi."

Muhammad Rifki Darmawan menamatkan studi S1 Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dan telah bekerja di bidang pembangunan berkelanjutan untuk membangun Indonesia yang lestari. Menyadari kompleksitas isu ini, Rifki akan melanjutkan studi dalam program Master of Public Administration di Cornell University.

Aspirasinya adalah menemukan titik keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, yang sering menjadi perdebatan dalam dunia akademis maupun keseharian.

Rifki berkomitmen untuk mendukung pembuatan kebijakan dan perencanaan yang berkelanjutan, menghadirkan investasi berdampak, serta mendorong pembentukan ekosistem gotong-royong untuk Indonesia yang lebih lestari.

Rifki percaya bahwa jika tidak berpikir dan bertindak secara lestari, akan sangat sulit untuk menikmati aliran musik, mendapatkan kesehatan tubuh yang baik, dan mencapai ketenangan di masa depan.

11

Nadhifa Ramadhani

PK 231

Columbia University
Penyandang Disabilitas

Nadhifa Ramadhani adalah seorang ahli gizi dengan minat khusus dalam gizi olahraga. Dengan latar belakang sebagai atlet basket kursi roda, Nadhifa menyadari bahwa permasalahan gizi pada atlet dengan disabilitas memiliki kompleksitas yang setara dengan atlet nondisabilitas.

Namun, Nadhifa merasa masih perlu memperdalam ilmu gizi olahraga dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2 di Columbia University dalam jurusan Nutrition and Exercise Physiology, ia berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan performa atlet disabilitas dan membantu mereka meraih prestasi yang lebih baik lagi.

Nadhifa percaya bahwa olahraga adalah salah satu aset negara yang regenerasinya terjadi dengan cepat, dan dengan keahliannya, ia ingin mendukung pengembangan atlet disabilitas di Indonesia.

12

Putri Afifah Hasna

PK 235

Antwerp Management School
PNS/TNI/POLRI

Putri Afifah Hasna adalah seorang Penerbang TNI-Au yang merupakan alumni Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 2022.

Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Terapan Pertahanan dengan predikat Cumlaude. Saat ini, Putri melanjutkan studi S2 di Antwerp Management School, Belgia, dengan fokus pada Jurusan Air Transport Management. Dengan dukungan dari LPDP melalui Beasiswa Targeted PNS/TNI/POLRI, Putri memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan di luar negeri. Putri berharap dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk tetap semangat dalam mengejar impian, karena ia percaya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi asalkan kita berusaha dengan sungguh-sungguh.

13

Ria Verensia

PK 229

Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
Reguler

Ria Verensia adalah seorang insinyur sumber daya air yang fokus pada pengelolaan sumber daya air dan mitigasi bencana banjir. Sejak tahun 2020, ia telah terlibat dalam berbagai proyek di bidang ini dan pada tahun 2022, ia menjadi konsultan teknik sumber daya air di salah satu perusahaan konsultan multinasional sebagai bagian dari Tim Ketahanan Iklim. Dengan pengalamannya dalam penilaian risiko banjir, solusi berbasis alam, dan perencanaan drainase, Ria terlibat dalam proyek-proyek terkait air dan lingkungan di Indonesia.

Sebagai salah satu penerima beasiswa LPDP, Ria memiliki kesempatan untuk mewujudkan aspirasinya menjadikan Indonesia lebih siap menghadapi tantangan iklim global. Saat ini, Ria melanjutkan studi di Massachusetts Institute of Technology (MIT) dalam program Master of Engineering in Climate, Environment, and Sustainability. Ria bertekad untuk menanggapi berbagai isu air dan iklim di Indonesia.

14

Robi Awaluddin

PK 233

The University of Manchester
Penyandang Disabilitas

Robi Awaluddin adalah seorang dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdedikasi dan berpengalaman dalam bidang bisnis dan manajemen. Sebagai penulis, peneliti, dan konsultan bisnis, Robi telah mencapai banyak hal dalam kariernya. Kini, dengan beasiswa LPDP, ia melanjutkan studi PhD dalam bidang Strategic Marketing di University of Manchester, salah satu program dan universitas terbaik di dunia.

Robi memiliki komitmen kuat terhadap penyajian pendidikan dan perkuliahan berkualitas. Minatnya yang mendalam dalam penelitian strategi dan pemasaran mencakup perkembangan pesat artificial intelligence dan media sosial, serta bagaimana inovasi ini dapat memajukan industri dan UMKM di Indonesia. Selain itu, Robi aktif memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan seminar untuk UMKM, membantu mereka bersaing dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.

Meskipun menghadapi tantangan low vision, Robi tetap berkomitmen untuk memberikan pendidikan bisnis terbaik di tingkat global, menyajikan penelitian berkualitas internasional, dan memberikan kontribusi nyata bagi pelaku usaha di Indonesia. Dengan visi ini, Robi siap untuk membawa perubahan positif dan signifikan bagi dunia bisnis dan pendidikan di Indonesia.

15

Yudas Alep Itlay

**Sedang mengikuti program Pengayaan Bahasa Universitas Indonesia Indonesia Timur/Putra-Putri Papua*

Yudas Alep Itlay adalah pemuda kelahiran Wamena Provinsi Papua Kegunungan yang saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pengadilan Negeri Manokwari sejak Maret 2022. Sebelum berkarier sebagai PNS, pria yang akrab disapa Yudas ini aktif di dunia hiburan dan sukses menjadi pemeran utama berjudul "Zerre: Pendekar Ufuk Timur" yang tayang di bioskop Indonesia pada Oktober 2021 lalu.

Tidak cuma itu, Yudas juga sempat membintangi beberapa film layar lebar seperti "The Horrible" dan "Stroke" bergenre horror. Yudas berharap dapat menjadi teladan bagi generasi muda Papua untuk memiliki mimpi besar dan berkontribusi dalam mengharumkan nama Papua dan Indonesia. Ia juga berharap dapat memberikan manfaat dan berkah bagi banyak orang.

16

Yunasila Silviane Yobee

PK 230

Boston University
Daerah Afiriasi

Yunasila Silviane Yobee atau akrab disapa Yuna, saat ini berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Karier Yuna di Kemendagri dimulai saat berhasil merampungkan pendidikan S1 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 2020.

Pendidikan semi-militer selama empat tahun di IPDN telah mengasah kemampuan Yuna tidak hanya secara fisik tetapi juga mental serta mengembangkan pemikiran kritis berintegritas dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai PNS di Kemendagri.

Wanita asal Dogiyal, Provinsi Papua Tengah ini banyak bersentuhan dengan isu-isu pembangunan dan kesejahteraan Papua yang dijalankan oleh pemerintahannya. Menghadapi kompleksitas tugas dari pimpinan serta berbagai persoalan tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya di Papua, semakin memperkuat tekad Yuna untuk melanjutkan studi di Boston University dengan jurusan City Planning.

Dengan jurusan yang akan diambinya, wanita yang berasal dari Dogiyal ini memiliki mimpi besar untuk memberikan dampak signifikan dalam proses percepatan pembangunan di Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, Yuna percaya bahwa apa yang dilakukannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk keluarga, orang-orang tercinta, dan masyarakat yang menyaksikan perkembangannya serta pertumbuhan kelangkaan, serta demi kemuliaan nama Tuhan.

Glosarium

A	ABK	Analisis Beban Kerja
	ADEM	Asumsi Dasar Ekonomi Makro
	ADIK	Afirmasi Pendidikan Indonesia Kampus
	AFS	<i>Available For Sale</i>
	AL/DPK	Alat Likuid/DPK
	AL/NCD	Alat Likuid/Non-Core Deposit
	APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	APBN	Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara
	APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
	APS	Angka Partisipasi Sekolah
	ASN	Aparatur Sipil Negara
	ATK	Alat Tulis Kantor
	ATR	Aset Tetap Renovasi
	AUM	Asset Under Management
	Awardee	Penerima beasiswa

B	BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
	Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
	BCA	Bank Central Asia
	BITDDR	<i>BI 7-Day Reverse Repo Rate</i>
	BIB	Beasiswa Indonesia Bangkit
	BKI	Biro Kerja sama Iptek
	BKPI	Biro Kerja Sama dan Pemasarakatan Iptek
	BLU	Badan Layanan Umum
	BMGF	Bill & Melinda Gates Foundation
	BMN	Barang Milik Negara

BNI	Bank Negara Indonesia
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPMI	Badan Pembinaan Masjid Istiqlal
BRI	Bank Rakyat Indonesia
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Badan Usaha Niaga

C	CA	<i>Continuous Audit</i>
	CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
	CRM	<i>Customer Relationship Management</i>

D	DAKB	Dana Abadi Kebudayaan
	DAP	Dana Abadi Pendidikan
	DAPL	Dana Abadi Penelitian
	DAPT	Dana Abadi Perguruan Tinggi
	DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
	DKI	Dialog Kinerja Individu
	DPK	Dana Pihak Ketiga
	DPKN	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
	DUDI	Dunia Usaha, Dunia Industri
	DUPI	Daftar Uji Pengendalian Utama

E	EBA-SP	Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi
	EIU	<i>Economist Intelligence Unit</i>
	EPITE	Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas
	EQUITY	<i>Enhancing Quality Education for International University Recognition</i>

F	FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
	FRS	<i>Fraud Risk Scenario</i>
	FTA	<i>Free Trade Agreement</i>
G	GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
	GII	<i>Global Innovation Index</i>
H	HTM	<i>Held To Maturity</i>

I	IAIN	Institut Agama Islam Negeri
	IBI	Asumsi Dasar Ekonomi Makro
	ICF	<i>International Cooperation Fee</i>
	IISMA	International Student Mobility Award
	IJP	Imbal Jasa Penjaminan
	IKPA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
	IKU	Indikator Kinerja Utama
	INSPIRASI	Indonesia-NTU Singapore Institute of Research for Sustainability and Innovation
	IPM	Indeks Pembangunan Manusia
	IPTK	Ilmu pengetahuan dan teknologi
	ITB	Institut Teknologi Bandung
	Itjen	Inspektorat Jenderal

J	Juknis	Petunjuk Teknis
----------	---------------	-----------------

K	K/L	Kementerian/Lembaga
	KAP	Kantor Akuntan Publik
	KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
	KEM-PPKF	Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
	Kemenag	Kementerian Agama
	Kemendikbudristek	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
	Kemenko marves	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
	Kemen PANRB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	KI	Kekayaan intelektual
	KIKK	Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan
	KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
	KPBU	Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
	KPK	Komis Pemberantasan Korupsi
	KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
	KYE	<i>Know Your Employee</i>

L	LAK	Laporan Arus Kas
	LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
	litbang	Penelitian dan pengembangan
	LKE	Lembar Kerja Evaluasi
	LMAN	Lembaga Manajemen Aset Negara
	LO	Laporan Operasional
	LPDP	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
	LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
	LRA	Laporan Realisasi Anggaran

M	MAK	Mata Anggaran Pengeluaran
	MBKM	Merdeka Belajar Kampus Merdeka
	MFP	Multifactor Productivity
	MoA	Memorandum of Agreement
	MONEV	Afirmasi Pendidikan Indonesia Kampus
	MTN	Medium Term Notes
N	MURI	Museum Rekor Indonesia
	NIM	Net Interest Margin
	NTN	Nilai Tukar Nelayan
	NTP	Nilai Tukar Petani
O	OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
	OIP	Operator Investasi Pemerintah
	OJK	Otoritas Jasa Keuangan
	Onsite	Di tempat
	OWLI	Online With LPDP Indonesia
	PDF	Project Development Facility
P	PDN	Posisi Devisa Neto
	PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
	PDRI	Pembebasan Pajak dalam Rangka Impor
	Perspers	Peraturan Presiden
	PIP	Pengelola Investasi Pemerintah
	PIRLS	Progress in International Reading Literacy Study
	PISA	Programme for International Student Assessment
	PK	Persiapan Keberangkatan
	PKIP	Program Kinerja Investasi Pemerintah
	PKS	Perjanjian Kerja Sama

R	PKU	Pendidikan Kader Ulama
	PKU/P	Pendidikan Kader Ulama Perempuan
	PMK	Peraturan Menteri Keuangan
	PNB	Pendapatan Nasional Bruto
	PNBP	Pendapatan Negara Bukan Pajak
	PNS	Pegawai Negeri Sipil
	POLRI	Polisi Republik Indonesia
	PPINE	Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika
	PPITA	Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas
	PPnBM	Pajak Perjualan atas Barang Mewah
S	PPPA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PPSL	Program Persiapan Studi Lanjut
	PR	Public Relations
	PRIME	Partnership in Research Indonesia and Melbourne
	PRN	Prioritas Riset Nasional
	PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
	PSDM-TI	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi
	PTA	Perguruan Tinggi Akademik
	PTIQ	Perguruan Tinggi Ilmu Quran
	PTKI	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
T	PTN-BH	Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
	PUNAS	Prioritas Utama Nasional
	RAB	Rencana Anggaran Biaya
	RBA	Rencana Bisnis dan Anggaran
	ROG	Rapat Dewan Gubernur
	Renstra	Rencana Strategi Bisnis
	RIIM	Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju
	RISPRO	Riset Inovatif Produktif
	RKP	Rencana Kerja Pemerintah
	RLS	Rata-rata Lama Sekolah
U	RO	Rincian Output
	ROA	Return on Assets
	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
	RPJN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
	RPT	Rencana Pemantauan Tahunan
	SAL	Saldo Anggaran Lebih
	Satker	Satuan Kerja
	SBN	Surat Berharga Negara
	SDGs	Sustainable Development Goals
	SDM	Sumber Daya Manusia
V	SIKPA	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
	SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
	SIR	Scimago Institutions Rankings
	SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
	SMA	Sekolah Menengah Atas
	SMP	Sekolah Menengah Pertama
	SMV	Special Mission Vehicle
	SOP	Standar Operasional Prosedur
	SP2B	Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
	SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
W	SP3B	Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
	SPI	Satuan Pemeriksaan Intern
	SPM	Surat Perintah Membayar
	SPP	Sumbangan Pembinaan Pendidikan
	STEM	Science, Technology, Engineering, and Mathematics
	TAYL	Tahun Anggaran Yang Lalu
	TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
	TIMSS	Trends in International Mathematics and Science Study
	TNI	Tentara Nasional Indonesia
	TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
X	UGM	Universitas Gadjah Mada
	UI	Universitas Indonesia
	UIII	Universitas Islam Internasional Indonesia
	UKI	Unit Kepatuhan Internal
	UKICIS	UK-Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences
	UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
	Unpad	Universitas Padjadjaran
	UPG	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
	VGF	Viability Gap Fund
	VOUCA	Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Y	WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
	WISE Kementek	Whistleblowing System Kementerian Keuangan
	ZI-WBBM	Zona Integritas - Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
	ZI-WBK	Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Dekade Penuh Nyala Terang Kemajuan Bangsa: Ucapan Terima Kasih

Dimulai dari peletakan batu pertama pada 2013, tanpa terasa telah satu dekade Lembaga Pengelola Dana Pendidikan hadir mewujudkan mimpi anak bangsa dalam memajukan negeri. Setiap angka, cerita, dan capaian yang tertuang dalam laporan ini bukan sekadar hasil akhir, tetapi merupakan rangkalan upaya kolektif yang penuh makna, dibangun dengan ketekunan serta komitmen dari berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati, kami persembahkan Laporan Tahunan LPDP 2023 ini sebagai bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi kita bersama. Laporan ini mencatat perjalanan kinerja LPDP yang tak terpisahkan dari satu dekade terakhir—sebuah perjalanan penuh tantangan, dedikasi, dan sinergi untuk mewujudkan cita-cita mulia bangsa Indonesia.

Buku ini disusun secara berkala setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada seluruh pemangku kepentingan LPDP. Di sini, kami berbagi cerita dan data mengenai dampak positif dari setiap program dan inisiatif yang telah dijalankan kepada seluruh penerima manfaat Dana Abadi di Bidang Pendidikan.

Terliring apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada seluruh keluarga besar LPDP dari staf hingga pucuk pimpinan, serta para pemangku kepentingan. Setiap detik waktu dan tetes keringat yang tercurah adalah fondasi dari setiap keberhasilan yang diraih bersama.

Laporan Tahunan LPDP 2023 juga tak akan terwujud tanpa dukungan dari pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia yang berhak menjadi bagian dari insan LPDP. Terus dukung kami dalam komitmen untuk berkontribusi menciptakan generasi emas penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing global.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, baik dalam penyusunan laporan tahunan ini maupun dalam kinerja layanan LPDP. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Kami percaya bahwa keberhasilan sejati tak hanya diukur dari capaian, tetapi juga dari sejauh mana kita mampu menerima dan merespon masukan demi kebaikan bersama.



Diterbitkan oleh **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan**

Penanggung jawab: **Andin Hadlyanto** (Direktur Utama LPDP)

Pengarah: **M. Lukmanul Hakim** (Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi), **Ari R. Kuncoro** (Kepala Subdivisi Komunikasi)

Pengisi narasi: **Dimas Wahyudi, Tony Firman**

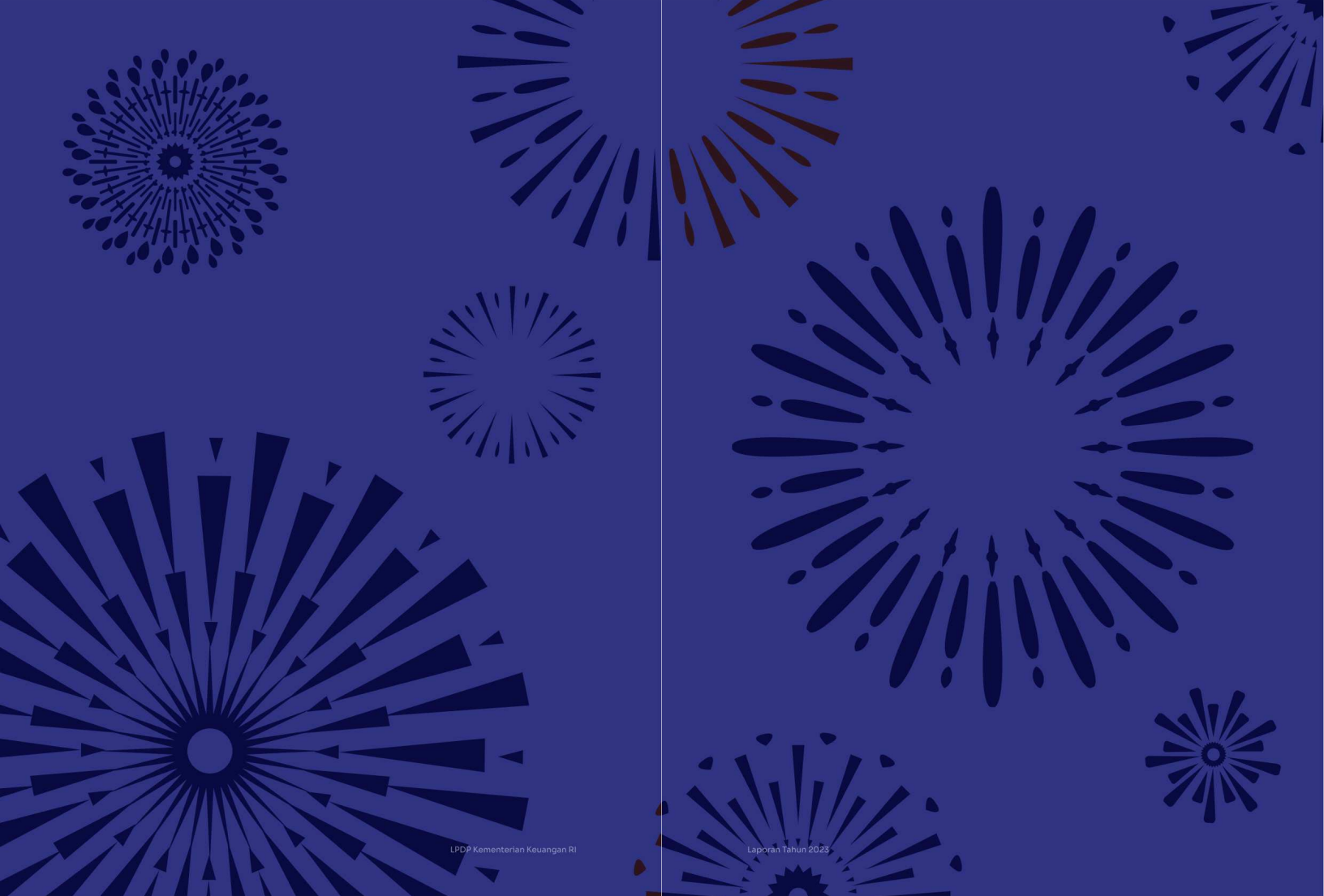
Pengumpul data: **Berliana Abidash Oktovani, Indra Nurhafidhi Hikmat, Dhanar Prasetyo Dwi Putro, Nico Christiawan**

Penata artistik: **Ghilman Hasya Aminullah**

Desain, tata letak, dan produksi oleh
Selaksa
sapa@selaksa.co

© 2024 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Seluruh hak cipta dipegang oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dilarang memproduksi ulang atau menindakkan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, baik secara elektronik atau mekanis, termasuk fotokopi, merekam, menyimpan dan mengunduh informasi lainnya tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.



11 Tahun LPDP: Nyala Terang Kemajuan Bangsa Indonesia

Laporan Tahunan
LPDP Kementerian
Keuangan RI

 lpdp.kemenkeu.go.id

 kemenkeu.go.id/hubungi-kami

 134